



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022

Alamat :

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Jalan Raden Demang

Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang

Telepon (022) 6654274, 6641931, 6641963 Fax. (022) 6654274

Website: www.cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat



Laporan telah di audit oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat



WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, 12 Mei 2023

Nomor	: 900/1730/BPKAD	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth. Kepala BPK-RI
Lampiran	: -	Perwakilan Jawa Barat
Hal	: Surat Representasi Manajemen	Jl. Muhamad Toha No.164 Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Operasional per 31 Desember 2022, Laporan Arus Kas 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2021 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

**P. WALI KOTA CIMAHI**
DIKDIL S. MUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Pernyataan Tanggung Jawab	
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI	6
2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi	8
2.3 Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022	31
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	47
3.1 Kebijakan Akuntansi	47
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	76
4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	76
4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	95
4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca	95
4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	132
4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	152
4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	157
BAB V PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	160
5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (<i>Subsequent Event</i>)	160
5.2 Profil Entitas	160
5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2022	162
5.4 Hubungan dengan DPRD, BPK serta Forkopimda	166
5.5 Pengaruh <i>Stakeholder</i> (pemegang kepentingan): DPRD	167

5.6	Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan	167
5.7	Alamat Kantor	167
BAB VI	PENUTUP	168

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2022	11
2.2 Indeks Gini Ratio	14
2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2022	16
2.4 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022	16
2.5 Realisasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022	17
2.6 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022	18
2.7 Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022	18
2.8 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2022	19
2.9 Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2022	19
2.10 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pengawasan dalam APBD Tahun Anggaran 2022	23
2.11 Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pengawasan dalam APBD Tahun Anggaran 2022	23
2.12 Persentase Perhitungan DTU	24
2.13 Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial	24
2.14 Laporan Penanganan Covid-19	25
2.15 Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022	26
2.16 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022	30
2.17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022	31
2.18 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	32

Tabel		Hal
2.19	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022	37
2.20	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2022	37
2.21	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2022	38
2.22	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022	39
2.23	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022	39
2.24	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Pangan Tahun Anggaran 2022	40
2.25	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022	40
2.26	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022	41
2.27	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2022	41
2.28	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022	42
2.29	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Tahun Anggaran 2022	43
2.30	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola BPKAD Tahun Anggaran 2022	43
2.31	Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022	46
4.1	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022	78
4.2	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	79
4.3	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	79
4.4	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022	80

Tabel		Hal
4.5	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022	81
4.6	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022	82
4.7	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022	82
4.8	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022	83
4.9	Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022	83
4.10	Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022	84
4.11	Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022	85
4.12	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022	85
4.13	Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022	86
4.14	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022	86
4.15	Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022	87
4.16	Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022	87
4.17	Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022	88
4.18	Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022	89
4.19	Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022	90
4.20	Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022	90
4.21	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022	91
4.22	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	91
4.23	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022	92
4.24	Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022	92
4.25	Defisit Tahun Anggaran 2022	93
4.26	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	93
4.27	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	94
4.28	Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022	94
4.29	Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022	95
4.30	Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	95
4.31	Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	95
4.32	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022	96

Tabel	Hal
4.33 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2022	97
4.34 Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2022	97
4.35 Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2022	98
4.36 Rincian Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2022	98
4.37 Saldo Kas di BLUD Air Minum Tahun Anggaran 2022	98
4.38 Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2022	99
4.39 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2022	99
4.40 Saldo Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2022	99
4.41 Saldo Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022	100
4.42 Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	100
4.43 Rincian Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	100
4.44 Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	101
4.45 Rincian Potensi Denda Pajak Tahun Anggaran 2022	101
4.46 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	102
4.47 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	102
4.48 Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022	102
4.49 Rincian Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022	102
4.50 Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022	103
4.51 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022	103
4.52 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022	104
4.53 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 3022	104
4.54 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022	105
4.55 Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Belum Disalurkan Tahun Anggaran 2022	105
4.56 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran	105
4.57 Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022	105
4.58 Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022	106
4.59 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022	106
4.60 Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022	106
4.61 Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022	106

Tabel		Hal
4.62	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru Tahun Anggaran 2022	107
4.63	Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022	108
4.64	Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2022	108
4.65	Rincian Saldo Persediaan SOPD Tahun Anggaran 2022	109
4.66	Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2022	110
4.67	Saldo Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022	111
4.68	Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022	111
4.69	Penyetoran Pokok Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022	112
4.70	Rincian Sisa Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022	112
4.71	Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022	113
4.72	Rincian Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022	113
4.73	Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk	113
4.74	Rincian Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	114
4.75	Rincian Sisa Modal yang Disertakan pada PD. Jati Mandiri	114
4.76	Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2022 <i>Unaudited</i>	116
4.77	Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2022	117
4.78	Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022	118
4.79	Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022	119
4.80	Konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi atas Status Jalan	120
4.81	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat	122
4.82	Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Berada diatas Tanah TNI	123
4.83	Rincian Saldo Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022	125
4.84	Rincian Aset Tidak Berwujud Berupa <i>Software</i> Tahun Anggaran 2022	126
4.85	Rincian Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022	127
4.86	Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022	128
4.87	Rincian Izin Retribusi yang Masa Tagihnya Kadaluwarsa pada Tahun 2013	129
4.88	Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2022	129
4.89	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022	130
4.90	Rincian Kurang Pungut dan Setor PPN Tahun Anggaran 2022	131
4.91	Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2022	132

Tabel	Hal
4.92 Saldo Ekuitas Tahun Anggaran 2022	132
4.93 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2022	134
4.94 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2022	134
4.95 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2022	135
4.96 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2022	136
4.97 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2022	136
4.98 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2022	137
4.99 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2022	137
4.100 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun Anggaran 2022	138
4.101 Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2022	138
4.102 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun Anggaran 2022	138
4.103 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO Tahun Anggaran 2022	139
4.104 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2022	139
4.105 Bantuan Keuangan Provinsi - LO Tahun Anggaran 2022	139
4.106 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun Anggaran 2022	140
4.107 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022	140
4.108 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022	141
4.109 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2022	142
4.110 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022	144
4.111 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022	145
4.112 Rincian Beban Bunga Tahun Anggaran 2022	145
4.113 Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022	146
4.114 Beban Hibah Tahun Anggaran 2022	146
4.115 Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022	146
4.116 Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022	147
4.117 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022	148
4.118 Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022	149
4.119 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022	149
4.120 Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022	150

Tabel	Hal
4.121 Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2022	151
4.122 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022	151
4.123 Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2022	152
4.124 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022	153
4.125 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022	153
4.126 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022	154
4.127 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022	154
4.128 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022	155
4.129 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022	155
4.130 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022	156
4.131 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022	156
4.132 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggarna 2022	156
4.133 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022	157
4.134 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022	157
4.135 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022	157
5.1 Daftar SKPD Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2022	164
5.2 Alamat Kantor SKPD Kota Cimahi	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Indeks Pembangunan Manusia	11
2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	12
2.3 Angka Kematian	12
2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	13
2.5 Angka Inflasi	15
5.1 Peta Administrasi Kota Cimahi	162

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022
Lampiran 2	Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 3	Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2022
Lampiran 4	Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022
Lampiran 5a	Biaya Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2022
Lampiran 5b	Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2022
Lampiran 6	Piutang Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022
Lampiran 7a	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Per 31 Desember 2022
Lampiran 7b	Rekapitulasi Piutang Dan Penyisihan BLUD Air Minum Per 31 Desember 2022
Lampiran 8	Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2022
Lampiran 9	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah PD. Jati Mandiri Per 31 Desember 2022
Lampiran 10	Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2022
Lampiran 11a	Rekapitulasi Laporan Aset Tetap BOS Tahun 2022
Lampiran 11b	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pada Jalan Lingkungan Tahun 2022
Lampiran 12	Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022
Lampiran 13	Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2022
Lampiran 14	Rekapitulasi Aset Lain Lain Tahun 2022
Lampiran 15	Utang Belanja Per 31 Desember 2022
Lampiran 16	Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan Dan Pembangunan (Retensi) Per 31 Desember 2022
Lampiran 17	Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan Per 31 Desember 2022

Lampiran 18	Rincian Utang KJP Dan KDN Per 31 Desember 2022
Lampiran 19	Penjelasan Mutasi Penyesuaian Pendapatan LRA - Pendapatan LO Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022
Lampiran 20	Penjelasan Mutasi Penyesuaian Belanja – Beban Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022
Lampiran 21	Rincian Beban Jasa Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022
Lampiran 22	Rincian Perhitungan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022



WALI KOTA CIMAHI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun, berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, posisi kas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cimahi, Mei 2023

PI. WALI KOTA CIMAHI,



DIKLIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
(LRA)**

**WALI KOTA CIMAHI****LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021**

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	168.162.607.277,00	193.890.140.403,00	115,30	179.891.802.692,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	10.549.195.000,00	11.294.079.342,00	107,06	11.548.482.640,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00	9.956.960.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	185.526.164.403,00	178.469.886.228,53	96,20	203.707.746.221,11
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	375.260.580.277,00	394.676.719.570,53	105,17	405.104.991.553,11
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	46.381.576.000,00	54.229.638.467,00	116,92	61.309.116.578,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.469.404.000,00	36.604.255.359,00	143,72	47.781.705.502,00
	Dana Alokasi Umum	519.937.401.610,00	519.937.401.610,00	100,00	530.425.978.000,00
	Dana Alokasi Khusus	185.227.760.683,00	161.287.016.436,00	87,07	131.759.768.941,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	777.016.142.293,00	772.058.311.872,00	99,36	771.276.569.021,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	52.247.274.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	52.247.274.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67	123.865.281.737,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00	105.707.342.961,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	160.742.356.623,00	158.775.075.669,00	98,78	229.572.624.698,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	943.286.666.916,00	936.361.555.541,00	99,27	1.053.096.467.719,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	6.700.327.000,00
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	55.161.824.000,00
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	71.950.231,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	61.934.101.231,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.318.547.247.193,00	1.331.038.275.111,53	100,95	1.520.135.560.503,11
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	759.832.251.968,00	658.940.382.015,00	86,72	643.977.236.028,00
	Belanja Barang	677.140.000.849,00	588.254.398.560,17	86,87	555.391.457.278,00
	Belanja Bunga	500.000.000,00	234.672.144,00	46,93	308.874.114,00
	Belanja Subsidi	-	-	-	410.574.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	40.262.512.250,00	39.388.772.249,00	97,83	18.999.042.200,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.202.251.600,00	3.133.871.600,00	74,58	2.571.530.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.481.937.016.667,00	1.289.952.096.568,17	87,05	1.221.658.713.620,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	7.039.408.898,00	171.269.485,00	2,43	1.924.413.918,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	26.716.547.465,00	22.831.957.980,00	85,46	40.367.666.054,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	51.020.087.498,00	40.246.977.335,00	78,88	92.323.402.639,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.398.135.549,00	16.911.640.321,00	91,92	109.597.606.795,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.680.699.700,00	1.408.197.523,00	83,79	2.847.475.380,00
	Jumlah Belanja Modal	104.854.879.110,00	81.570.042.644,00	77,79	247.060.564.786,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	12.793.426.443,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	12.793.426.443,00
	JUMLAH BELANJA	1.614.682.803.477,00	1.377.572.310.280,17	85,32	1.481.512.704.849,00

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	Jumlah Transfer	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.614.782.803.477,00	1.377.672.310.280,17	85,32	1.481.512.704.849,00
	SURPLUS / DEFISIT	(296.235.556.284,00)	(46.634.035.168,64)	15,74	38.622.855.654,11
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	270.898.017.186,53
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	270.898.017.186,53
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	9.777.623.090,00	97,78	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	12.429.808.337,00	10.633.131.310,00	85,55	855.508.220,00
	PEMBIAYAAN NETO	296.235.556.284,00	298.032.233.310,64	100,61	270.042.508.966,53
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	251.398.198.142,00		308.665.364.620,64

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAHI

DIDIK S. MUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN
LEBIH (LPSAL)**



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	308.665.364.620,64	270.898.017.186,53
3	Subtotal (1-2)	-	274.203.491,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLpa/SiKPA)	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
5	Subtotal (3+4)	251.398.198.142,00	308.939.568.111,64
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan Sebelumnya	-	(274.203.491,00)
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PI WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S. MUGRAHAWAN, S.Si., M.M. .

NERACA



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	233.273.390.848,00	261.726.825.185,51
	Kas di RSUD	-	40.989.619.473,61
	Kas di Bendahara Pengeluaran	155.655.636,00	148.923.030,52
	Kas di Bendahara Penerimaan	800.000,00	659.044,00
	Kas BLUD	17.614.806.592,00	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	861.472.095,00
	Kas Di Kas BLUD Puskesmas	-	3.174.447.354,00
	Kas Dana Bos	353.545.066,00	1.763.418.438,00
	Kas Lainnya	579.952.960,00	590.793.711,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	134.678.166.819,00	128.892.710.993,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(58.882.194.046,77)	(46.745.285.110,18)
	Piutang Pajak Netto	75.795.972.772,23	82.147.425.882,83
	Piutang Retribusi	3.105.262.342,00	2.271.651.667,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.365.899.654,50)	(1.510.951.900,38)
	Piutang Retribusi Netto	739.362.687,50	760.699.766,62
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.704.535.252,00	9.794.305.571,00
	Belanja Dibayar Dimuka	3.934.019.971,57	4.576.692.589,29
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(217.551.668,00)	(217.551.668,00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-
	Piutang Lainnya	8.139.297.204,17	9.567.340.661,47
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.497.446.423,69)	(2.298.845.270,88)
	Piutang Lainnya Netto	6.641.850.780,48	7.268.495.390,59
	Persediaan	28.649.727.503,26	32.019.657.874,93
	Jumlah Aset Lancar	375.443.620.069,04	445.823.435.406,89
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	52.770.586,00	50.591.536,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	52.770.586,00	50.591.536,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.105.263.630,50	68.493.992.363,50
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	78.105.263.630,50	68.493.992.363,50
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	78.158.034.216,50	68.544.583.899,50
3	ASET TETAP		
	Tanah	1.022.360.336.284,00	1.056.705.806.799,00
	Peralatan dan Mesin	671.637.270.027,82	694.191.726.346,98
	Gedung dan Bangunan	807.092.567.588,52	772.624.864.228,52
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	806.294.757.832,59	826.964.855.561,52
	Aset Tetap Lainnya	71.698.455.667,47	70.405.620.977,47
	Konstruksi dalam Pengerjaan	229.627.190.875,36	211.996.377.038,36
	Akumulasi Penyusutan	(1.237.866.506.093,70)	(1.231.876.277.638,95)
	Jumlah Aset Tetap	2.370.844.072.182,06	2.401.012.973.312,90

No.	Uraian	2022	2021
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	11.492.709.779,90	9.932.562.034,90
	Akumulasi Amortisasi	(9.452.681.527,40)	(8.229.263.872,40)
	Aset Tak Berwujud Netto	2.040.028.252,50	1.703.298.162,51
	Aset Lain-Lain	136.915.695.665,23	16.955.466.977,42
	Jumlah Aset Lainnya	142.304.068.917,73	22.007.110.139,93
	JUMLAH ASET	2.966.749.795.385,33	2.937.388.102.759,22
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	125.000,00	48.276.595,00
	Utang Bunga	92.533.016,65	129.039.156,47
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	330.272.010,00	-
	Utang Belanja	3.373.424.947,00	4.141.620.812,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.315.101.409,72	13.622.915.723,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	15.966.964.603,37	18.797.360.506,47
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	1.711.016.438,70	2.566.524.658,70
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1.711.016.438,70	2.566.524.658,70
	JUMLAH KEWAJIBAN	17.677.981.042,07	21.363.885.165,17
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.949.071.814.343,26	2.916.024.217.594,05
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.966.749.795.385,33	2.937.388.102.759,22

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. WALI KOTA CIMAHI



DINDIK S. HUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

**WALI KOTA CIMAHI****PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 199.763.900.648,00	Rp 203.700.704.578,00	Rp (3.936.803.930,00)	-1,93
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 12.124.254.267,00	Rp 12.171.916.379,00	Rp (47.662.112,00)	-0,39
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 11.022.613.597,00	Rp 9.956.960.000,00	Rp 1.065.653.597,00	10,70
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 177.314.540.170,94	Rp 207.335.232.391,49	Rp (30.020.692.220,55)	-14,48
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 400.225.308.682,94	Rp 433.164.813.348,49	Rp (32.939.504.665,55)	-7,60
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 59.967.035.635,00	Rp 51.986.941.479,00	Rp 7.980.094.156,00	15,35
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp 39.358.275.570,00	Rp 29.733.151.567,00	Rp 9.625.124.003,00	32,37
	Dana Alokasi Umum	Rp 519.937.401.610,00	Rp 530.425.978.000,00	Rp (10.488.576.390,00)	-1,98
	Dana Alokasi Khusus	Rp 161.287.016.436,00	Rp 131.759.768.941,00	Rp 29.527.247.495,00	22,41
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 780.549.729.251,00	Rp 743.905.839.987,00	Rp 36.643.889.264,00	4,93
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp 5.528.168.000,00	Rp 52.247.274.000,00	Rp (46.719.106.000,00)	-89,42
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp 5.528.168.000,00	Rp 52.247.274.000,00	Rp (46.719.106.000,00)	-89,42
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 144.324.705.350,00	Rp 126.781.787.043,00	Rp 17.542.918.307,00	13,84
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 12.360.600.000,00	Rp 105.707.342.961,00	Rp (93.346.742.961,00)	-88,31
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 156.685.305.350,00	Rp 232.489.130.004,00	Rp (75.803.824.654,00)	-32,61
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 942.763.202.601,00	Rp 1.028.642.243.991,00	Rp (85.879.041.390,00)	-8,35
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 13.205.048.800,00	Rp 83.494.375.949,80	Rp (70.289.327.149,80)	-84,18
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp 71.950.231,00	Rp (71.950.231,00)	-100,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 13.205.048.800,00	Rp 83.566.326.180,80	Rp (70.361.277.380,80)	-84,20
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.356.193.560.083,94	Rp 1.545.373.383.520,29	Rp (189.179.823.436,35)	-12,24
2	<u>BEBAN</u>				
	Beban Pegawai	Rp 659.094.670.643,00	Rp 626.341.641.494,00	Rp 32.753.029.149,00	5,23
	Beban Persediaan	Rp 211.229.068.528,36	Rp 147.997.945.138,29	Rp 63.231.123.390,07	42,72
	Beban Jasa	Rp 329.546.472.884,75	Rp 336.911.501.029,62	Rp (7.365.028.144,87)	-2,19
	Beban Pemeliharaan	Rp 19.810.776.950,00	Rp 46.128.442.345,00	Rp (26.317.665.395,00)	-57,05
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 37.958.799.139,00	Rp 25.225.731.969,00	Rp 12.733.067.170,00	50,48
	Beban Bunga	Rp 198.166.004,18	Rp 276.614.324,47	Rp (78.448.320,29)	-28,36
	Beban Subsidi	Rp -	Rp 410.574.000,00	Rp (410.574.000,00)	-100,00
	Beban Hibah	Rp 38.597.225.649,00	Rp 18.250.155.200,00	Rp 20.347.070.449,00	111,49
	Beban Bantuan Sosial	Rp 3.133.871.600,00	Rp 2.571.530.000,00	Rp 562.341.600,00	21,87
	Beban Penyusutan	Rp 98.614.552.341,66	Rp 122.398.887.198,70	Rp (23.784.334.857,04)	-19,43
	Beban Amortisasi	Rp 1.223.417.655,01	Rp 1.329.017.633,25	Rp (105.599.978,25)	-7,95
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 13.231.653.056,71	Rp 2.666.559.266,06	Rp 10.565.093.790,65	396,21
	Beban Transfer	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 100.000.000,00	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 334.507.323,99	Rp (334.507.323,99)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 1.412.738.674.451,67	Rp 1.330.843.106.922,38	Rp 81.895.567.529,29	6,15
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-Rp 56.545.114.367,73	Rp 214.530.276.597,91		
3	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-Rp 15.036.205.911,30	Rp 5.130.797.753,00	Rp (9.905.408.158,30)	193,06
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-Rp 15.036.205.911,30	Rp 5.130.797.753,00	Rp (9.905.408.158,30)	193,06
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-Rp 71.581.320.279,03	Rp 209.399.478.844,91	Rp (280.980.799.123,95)	-134,18
4	<u>POS LUAR BIASA</u>				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp 5.570.083.787,00	Rp 9.736.649.668,00	Rp (4.166.565.881,00)	-42,79
	POS LUAR BIASA	-Rp 5.570.083.787,00	-Rp 9.736.649.668,00	Rp 4.166.565.881,00	-42,79
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-Rp 77.151.404.066,03	Rp 199.662.829.176,91	Rp (276.814.233.242,95)	-138,64

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



LAPORAN ARUS KAS

(LAK)



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	193.890.140.403,00	179.891.802.692,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	11.294.079.342,00	11.548.482.640,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	9.956.960.000,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	177.617.892.290,53	202.654.762.893,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	54.229.638.467,00	61.309.116.578,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.604.255.359,00	47.781.705.502,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	519.937.401.610,00	530.425.978.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	161.287.016.436,00	131.759.768.941,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.528.168.000,00	52.247.274.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	146.414.475.669,00	123.865.281.737,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	12.360.600.000,00	105.707.342.961,00
16	Penerimaan Hibah	-	6.700.327.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Dana BOS	-	55.161.824.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	71.950.231,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas	1.330.186.281.173,53	1.519.082.577.175,11
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	658.940.382.015,00	643.977.236.028,00
23	Pembayaran Barang	588.254.398.560,17	555.391.457.278,00
24	Pembayaran Bunga	234.672.144,00	308.874.114,00
25	Pembayaran Subsidi	-	410.574.000,00
26	Pembayaran Hibah	39.388.772.249,00	18.999.042.200,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	3.133.871.600,00	2.571.530.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	100.000.000,00	-
29	Pembayaran Tak Terduga	6.050.171.068,00	12.793.426.443,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
34	Jumlah Arus Keluar Kas	1.296.102.267.636,17	1.234.452.140.063,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	34.084.013.537,36	284.630.437.112,11
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan		
39	Penjualan atas Tanah		
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	809.394.038,00	-
41	Penjualan atas Gedung dan bangunan	32.941.100,00	10.511.600,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	1.042.471.728,00
44	Penjualan atas Aset Lainnya	9.658.800,00	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
47	Jumlah Arus Masuk Kas	851.993.938,00	1.052.983.328,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan		
50	Perolehan Tanah	171.269.485,00	1.924.413.918,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	22.831.957.980,00	40.367.666.054,00
52	Perolehan Gedung dan bangunan	40.246.977.335,00	92.323.402.639,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.911.640.321,00	109.597.606.795,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.408.197.523,00	2.847.475.380,00
55	Perolehan Aset Lainnya	-	-

No.	Uraian	2022	2021
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.777.623.090,00	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
58	Jumlah Arus Keluar Kas	91.347.665.734,00	247.060.564.786,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(90.495.671.796,00)	(246.007.581.458,00)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
71	Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir		
72	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
73	Arus Keluar Kas		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
84	Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.773.363.792,14	94.401.906.222,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	87.773.363.792,14	94.401.906.222,00
90	Arus Keluar kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.821.515.387,14	94.364.065.094,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	87.821.515.387,14	94.364.065.094,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	(48.151.595,00)	37.841.128,00
94	Kenaikan/Penurunan Kas	(57.315.318.073,64)	37.805.188.562,11
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	308.713.641.215,64	270.908.452.653,53
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	251.398.323.142,00	308.713.641.215,64
97	Saldo Akhir Kas	251.398.323.142,00	308.713.641.215,64

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(77.151.404.066,03)	199.662.829.176,91
3	RK PPKD	-	-
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,39	(0,52)
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(687.988.078,24)	(4.175.918.915,75)
6	KOREKSI NILAI UTANG	(60.087.009,00)	(21.905.000,00)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(20.920.936,00)	(4.683.461,90)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	17.471.159.667,00	(1.265.202.393,86)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	(5.000.000,00)	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	- Penyisihan Piutang	1.041.345.213,18	84.553.855,62
	- Akumulasi Penyusutan	92.624.323.886,92	10.184.503.367,13
	- Akumulasi Amortisasi	-	0,01
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	340.844,00	29.572.880,52
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	(164.172.773,00)	1.682.474,00
14	EKUITAS AKHIR	2.949.071.814.343,26	2.916.024.217.594,05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pj. WALI KOTA CIMAHI

DIKIRI SUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi selama 1 (satu) periode pelaporan dan bertujuan untuk :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 294).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

- 2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 2.3. Kebijakan Keuangan dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*subsequent event*)
 - 5.2 Profil Entitas
 - 5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 5.4 Hubungan dengan DPRD, BPK, dan Forkopimda
 - 5.5 Pengaruh *Stakeholder*: DPRD
 - 5.6 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan
 - 5.7 Alamat Kantor
- Bab VI Penutup

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua provinsi serta kabupaten/kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 - 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi adalah :

“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepada

masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha kecil menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidelines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumber daya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi Periode 2017-2022 adalah:

MISI 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Tujuan dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 4) Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang;

MISI 2: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Tujuan dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah;

Sasaran dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatnya Efisiensi dan Transparansi Pemerintah Daerah;
- 4) Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;
- 5) Meningkatnya profesionalitas aparatur;
- 6) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik;
- 7) Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 8) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
- 9) Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan;
- 3) Mengentaskan kemiskinan.

Sasaran dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
- 2) Meningkatnya Daya saing industri;
- 3) Meningkatnya Daya saing Perdagangan;
- 4) Meningkatnya Ekspor;
- 5) Meningkatnya Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan rendah;
- 6) Meningkatnya Kapabilitas sektor pertanian;
- 7) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 8) Berkurangnya Ketimpangan antar wilayah;
- 9) Menurunnya angka pengangguran;
- 10) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan penduduk;

- 11) Meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

MISI 4: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi;
- 2) Meningkatkan kualitas permukiman;
- 3) Meningkatkan ketahanan bencana;
- 4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;

Sasaran dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan kelancaran pengguna jalan;
- 2) Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
- 3) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
- 4) Meningkatkan pelayanan air limbah domestik;
- 5) Meningkatkan pelayanan drainase permukiman;
- 6) Meningkatkan pelayanan air bersih;
- 7) Mengurangi luas kawasan kumuh;
- 8) Meningkatkan Kesiapsiagaan tanggap bencana;
- 9) Mengurangi risiko banjir;
- 10) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- 11) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- 12) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau;
- 13) Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

MISI 5: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Tujuan dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Meningkatkan pengarusutamaan gender.

Sasaran dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 2) Meningkatkan pelestarian warisan budaya;
- 3) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- 4) Optimalnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

2.2.1 Kebijakan Keuangan Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022

2.2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi dan Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2022

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan

RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah. Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Perubahan, dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Ekonomi untuk tahun 2022, yaitu sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 berikut:

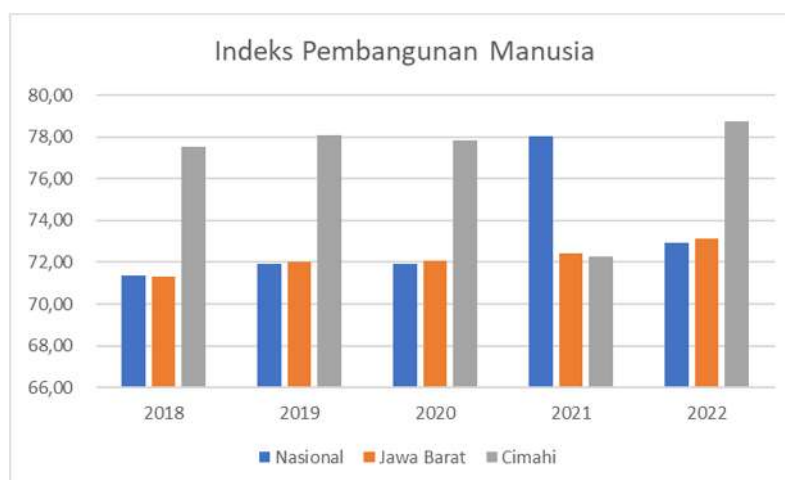
Tabel 2.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,12
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,00
3	Angka Kemiskinan	%	5,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,37
5	Indeks Gini	Poin	0,38
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2022, IPM Kota Cimahi telah mencapai 78,77 yang sudah mencapai kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2017-2022 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2022 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2022 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 78,06 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 72,91 dan 73,12. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah sebesar 0,63%, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang angkanya sebesar 1,25. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:

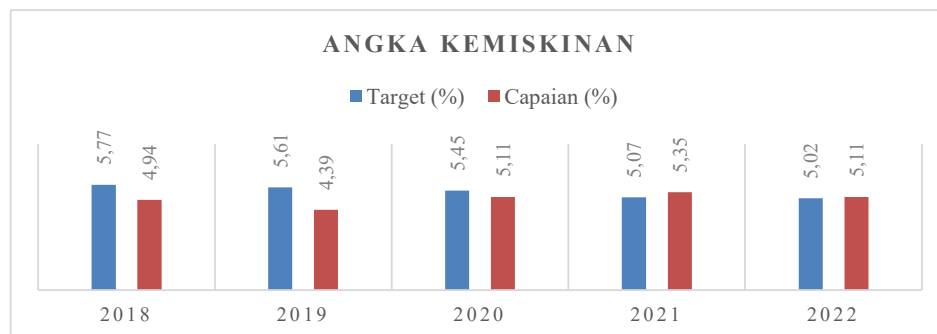


Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Tren penurunan laju pertumbuhan pendudukan dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur PUS. Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

c. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren naik turun selama periode Tahun 2018-2022, sebagaimana tertera dalam Gambar 2.3 berikut :



Gambar 2.3 Angka Kemiskinan
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

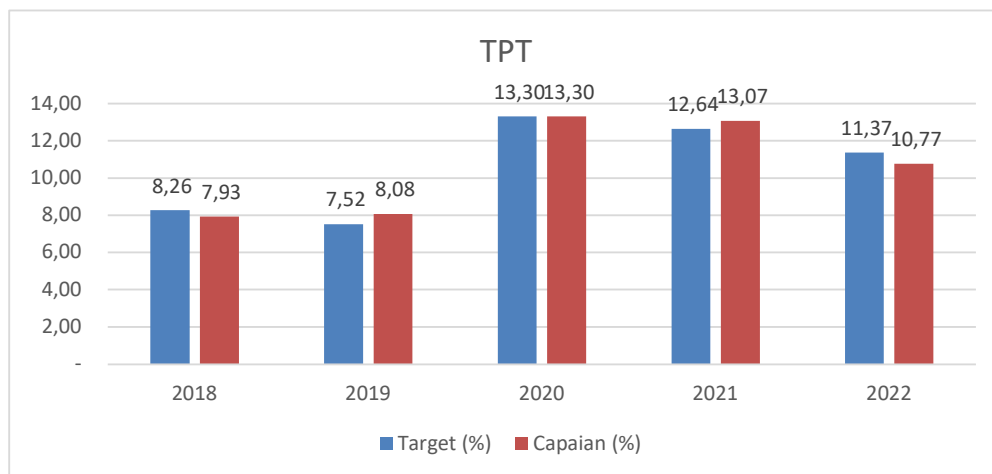
Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dimana baik jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena pandemi COVID 19 yang mengakibatkan dampak ekonomi dan dampak sosial.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Tahun 2022 adalah:

1. Penyediaan *Data By Name By Address* Kemiskinan Ekstrem;
2. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Cimahi dalam menyusun *Roadmap* Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem:
 - a. Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Dalam Rangka Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Ekstrem (Dinsos, Setda);
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Ekstrem (Disdagkoperin, Disnaker, DPMPTSP, P2KBP3A, Kecamatan Dan Kelurahan, Dispangtan);
 - c. Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar Dalam Rangka Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan (DISDIK, DINKES, DPU, DPKP, DLH).
3. 6 Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kota Cimahi dengan total anggaran Rp14.681.352.470,00 dan realisasi 70,73%.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 memiliki tren yang naik turun, pada Tahun 2018 – 2020 TPT di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Bahkan Pada Tahun 2020 TPT Cimahi terjadi peningkatan yang signifikan angkanya menjadi 13,30%, yang akhirnya dapat diturunkan kembali di tahun 2021 menjadi 13,07% dan berhasil diturunkan kembali di Tahun 2022 menjadi 10,77% seperti terdapat dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan TPT selama Tahun 2022 adalah dengan :

1. Menjembatani Pencari Kerja dan Pemberi Kerja secara virtual 9 (Aplikasi SIDAKEPTri);

2. Selama Tahun 2022 telah memfasilitasi sebanyak 678 Pencari Kerja;
3. Pencari kerja teregistrasi pada SIDAKEPTri *mobile* akan mendapatkan notifikasi lowongan kerja setiap saat;
4. *Buliding Trust and Commitment* antara 5 pilar ketenagakerjaan, yaitu : Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah, Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi, dan Akademisi sebagai BKK dan Pengelola Riset Ketenagakerjaan.

e. *Gini Ratio* dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi selama periode Tahun 2018-2022 terlihat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. *Gini ratio* Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 0,36 merupakan indeks terendah bila dibandingkan dengan *gini ratio* Provinsi Jawa Barat ataupun *gini ratio* kabupaten/kota di Bandung Raya. Pada tahun 2019 naik signifikan menjadi 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Tahun 2019 yang mencapai 7,85% tidak didukung dengan pemerataan pendapatan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya *gini ratio* kembali turun di tahun 2020 menjadi 0,38 dan di tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi berkontraksi -2,26%. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kelompok yang tadinya menikmati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 kembali terdampak oleh pandemi Covid-19 dan sekaligus memberikan bukti bahwa Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid- 19 dianggap relatif berhasil.

Pada tahun 2021 *gini ratio* Kota Cimahi naik cukup signifikan menjadi 0,42 dan turun 0,01 poin menjadi 0,41 ditahun 2022 dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi juga kembali mulai pulih sebesar 4,19% dan di Tahun 2022 sebesar 5,92% seperti terdapat dalam Tabel 2.2. Hal ini kembali memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Cimahi belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan ekonomi di masa yang akan datang perlu mendapat perhatian khusus lagi agar kesenjangan dan kemiskinan yang ada dapat diperbaiki dan tertangani.

Tabel 2.2 Indeks *Gini Ratio*

Tahun	Indeks <i>Gini</i>		LPE	
	Target	Capaian	Taerget (%)	Capaian (%)
2018	0,40	0,36	5,46	5,68
2019	0,40	0,36	5,66	6,84
2020	0,39	0,38	3,07	2,26
2021	0,39	0,42	3,69	4,19
2022	0,38	0,41	5,11	5,92

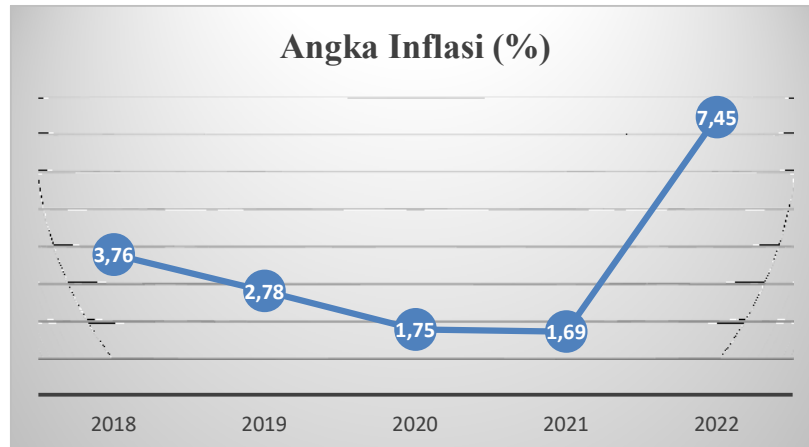
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

f. Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Terjadinya inflasi diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan arus masuk dan keluar uang maupun barang sehingga inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat dan investasi menurun sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Cimahi **tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung**, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Berdasarkan data BPS dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka Tahun 2023, pada Tahun 2022 angka inflasi Kota Bandung yang menjadi acuan nilai inflasi Kota Cimahi adalah sebesar 7,45 %. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di Tahun 2022 merupakan nilai tertinggi sebagaimana terdapat dalam Gambar 2.5. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi *Covid-19* di tahun 2020 dilanjutkan dengan pengaruh perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan inflasi untuk perekonomian Dunia dan Nasional mendorong laju inflasi di Jawa Barat, Kota Bandung dan juga di Kota Cimahi.



Gambar 2.5 Angka Inflasi
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan dampak inflasi selama Tahun 2022 adalah dengan :

1. Melaksanakan operasi pasar murah

- a. 18 kegiatan Operasi Pasar dengan komoditas : minyak goreng, paket sembako (beras premium, minyak goreng, terigu, gula, daging ayam, daging sapi *frozen*) di 15 kelurahan dan 3 kecamatan selama Bulan November –Desember.
- b. 10 Gelar pasar tani di Pemkot Cimahi.

2. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor

18 kegiatan pemantauan harga dan stock bahan pokok, bekerjasama dengan Forkopimda.

3. Kerja Sama daerah

Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat untuk komoditi beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, dan komoditi lainnya.

4. Gerakan Menanam

Pemberian 800 bibit cabe kepada Kodim 0609, pemberian 10.000 bibit cabe kepada 16 KWT, pemberian benih hortikultura (cabe rawit, cabe keriting, bawang merah, benih tomat, dan pupuk organik kepada 250 masyarakat kurang mampu dan 490 rumah tangga.

5. Merealisasikan Belanja Tak Terduga

Telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada 7.712 KPM yang terdiri dari ojek pangkalan, supir angkot, juru parkir, UKM terdampak dan masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dengan jumlah bantuan yang diberikan sebanyak Rp3.470.400.000,00.

6. Dukungan Transportasi dari APBD

- a. Layanan Pemeriksaan kendaraan pengangkut komoditas;

- b. Pengaturan tempat bongkar Muat;
- c. Perbaikan 20 ruas jalan untuk memastikan pendistribusian pangan tidak terkendala.

g. Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2022

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur indikator makro ekonomi, maka realisasi/pencapaian Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2022

No.	Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,12	78,77
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,00	0,63
3	Angka Kemiskinan	%	5,02	5,11
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,37	10,77
5	Indeks Gini	Poin	0,38	0,41
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,92
7	Inflasi	%	-	7,45

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

2.2.2 Kebijakan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 (*Mandatory Spending*)

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan menganggarkan fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Anggaran fungsi pendidikan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Perhitungan	2022	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	Rp 416.445.388.499,00	Rp 378.636.509.026,00
	1) Belanja Operasi	Rp 387.789.272.677,00	Rp 354.193.112.119,00
	a) belanja pegawai	Rp 286.511.483.830,00	Rp 268.729.197.976,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 74.964.971.447,00	Rp 74.003.194.143,00
	c) belanja hibah	Rp 22.110.565.800,00	Rp 9.082.400.000,00
	d) belanja bantuan sosial	Rp 4.202.251.600,00	Rp 2.378.320.000,00
	2) Belanja Modal	Rp 28.656.115.822,00	Rp 24.443.396.907,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	Rp 1.326.673.600,00	Rp 699.819.000,00

No	Komponen Perhitungan	2022	2021
	1) Belanja Operasi	Rp 1.251.673.600,00	Rp 699.819.000,00
	a) belanja pegawai	-	-
	b) belanja barang dan jasa	Rp 1.251.673.600,00	Rp 499.819.000,00
	c) belanja hibah		Rp 200.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	Rp 75.000.000,00	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	Rp 605.563.200,00	Rp 373.467.800,00
	1) Belanja Operasi	Rp 490.564.200,00	Rp 267.531.000,00
	a) belanja pegawai		
	b) belanja barang dan jasa	Rp 490.564.200,00	Rp 267.531.000,00
	c) belanja hibah		
	d) belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	Rp 114.999.000,00	Rp 105.936.800,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 40.468.351.734,00	Rp 137.033.693.375,00
	1) Belanja Operasi	Rp 28.495.191.634,00	Rp 17.388.590.051,00
	a) belanja pegawai	Rp 4.681.699.455,00	Rp 4.404.845.072,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 9.813.492.179,00	Rp 4.883.744.979,00
	c) belanja hibah	Rp 14.000.000.000,00	Rp 8.100.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	Rp 11.973.160.100,00	Rp 119.645.103.324,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan,	-	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp 458.845.977.033,00	Rp 516.743.489.201,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp 1.614.782.803.477,00	Rp 1.856.578.149.343,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	28,42%	27,83%

Mandatory spending fungsi pendidikan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pada 10 (sepuluh) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 112 (seratus dua belas) Sub Kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp377.333.027.534,00 atau 23.36% dari Total Belanja Daerah dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.5 Realisasi *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	289.134.429.050,00	227.745.648.346,00
Program Pengelolaan Pendidikan	127.059.906.749,00	115.678.616.525,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	251.052.700,00	251.052.700,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.636.672.934,00	6.353.442.049,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.118.729.400,00	1.018.119.160,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	32.412.949.400,00	24.146.856.748,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00
Program Pengembangan Kebudayaan	1.326.673.600,00	1.284.518.405,00
Program Pembinaan Perpustakaan	605.563.200,00	554.773.601,00
Total Mandatory Pendidikan	458.845.977.033,00	377.333.027.534,00
Total Belanja Daerah	1.614.682.803.477,00	1.614.682.803.477,00
%	28,42	23,36

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Fungsi Kesehatan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah seperti terdapat dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Perhitungan	2022	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	Rp 396.451.823.507,00	Rp 405.009.168.206,00
	Belanja Operasi		
	a) belanja pegawai	Rp 176.032.297.564,00	Rp 159.939.041.158,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 207.245.590.515,00	Rp 209.078.031.616,00
	c) belanja hibah	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	Rp 12.673.935.428,00	Rp 35.492.095.432,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp -	Rp -
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp 396.451.823.507,00	Rp 405.009.168.206,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp 1.614.782.803.477,00	Rp 1.856.578.149.343,00
4.	Gaji ASN	Rp 346.571.522.368,00	Rp 321.544.406.543,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp 1.268.211.281.109,00	Rp 1.535.033.742.800,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	31,26%	26,38%

Mandatory spending fungsi kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pada 7 (tujuh) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp348.178.065.783,00 atau 27.45% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Realisasi *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82.742.047.036,00	70.964.938.432,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.782.640.595,00	49.676.907.810,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.145.574.200,00	2.027.914.803,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	69.629.000,00	53.649.800,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.905.500,00	123.312.400,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.062.457.702,00	48.397.673.344,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	196.448.569.474,00	176.933.669.194,00
TOTAL MANDATORY KESEHATAN	396.451.823.507,00	348.178.065.783,00
TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR GAJI ASN	1.268.211.281.109,00	1.268.211.281.109,00
%	31,26%	27,45%

3. Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum dapat mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur dalam APBD
Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Perhitungan	2022	2021
1	Total Belanja Daerah	Rp 1.614.782.803.477	Rp 1.856.578.149.343
2	Dana Transfer Umum		
	DAU	Rp 519.937.401.610	Rp 530.425.978.000
	DBH	Rp 71.850.980.000	Rp 92.299.913.266
3	Pengurang		
	DBHCHT	Rp 4.155.501.000	Rp 5.256.491.773
	Dana Reboisasi		
	ADD		
4	Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	Rp 587.632.880.610	Rp 617.469.399.493
5	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% X Selisih)	Rp 1.027.149.922.867	Rp 1.239.108.749.850

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	Jumlah
1	a) Belanja Modal	Rp 104.854.879.110	Rp 425.731.284.310
	1) Tanah	Rp 7.039.408.898	Rp 8.724.964.740
	2) Peralatan dan Mesin	Rp 26.716.547.465	Rp 52.251.769.444
	3) Bangunan dan Gedung	Rp 51.020.087.498	Rp 228.846.712.178
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	Rp 18.398.135.549	Rp 132.999.455.842
	5) Aset tetap lainnya	Rp 1.680.699.700	Rp 2.908.382.106
	6) Aset lainnya	Rp -	Rp -
	b) Belanja pemeliharaan	Rp 33.210.714.556	Rp 39.986.870.874
2	a) Belanja Hibah	Rp 40.262.512.250	Rp 20.953.726.450
	b) Belanja Bantuan Sosial	Rp 4.202.251.600	Rp 3.630.024.338
	c) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 100.000.000	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp 182.630.357.516	Rp 490.301.905.972
4	% Belanja Infrastruktur Daerah	17,78	39,57

Mandatory spending fungsi Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pada 82 (delapan puluh dua) program, 140 (seratus empat puluh) kegiatan dan 217 (dua ratus tujuh belas) Sub Kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp152.003.153.401,00 atau 14,80% dari Minimal Belanja Infrastruktur dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Realisasi *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur dalam APBD
Tahun Anggaran 2022

Program	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	314.485.000,00	304.639.379,00
Program Pengelolaan Pendidikan	54.793.438.222,00	46.104.990.939,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.314.472.753,00	2.046.487.689,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.750.454.675,00	1.621.419.130,00

Program	Anggaran	Realisasi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.599.998.000,00	5.032.763.541,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	742.238.270,00	502.459.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	4.644.322.162,00	4.271.530.822,00
Program Penyelenggaraan Jalan	25.020.842.069,00	23.686.127.578,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	3.295.515.798,00	1.774.025.714,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.950.000.000,00	1.600.710.717,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	702.895.000,00	685.529.210,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500.000.000,00	469.002.774,00
Program Pengembangan Permukiman	12.800.000,00	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.166.402.000,00	819.378.153,00
Program Pengembangan Perumahan	964.739.900,00	843.015.065,00
Program Kawasan Permukiman	2.530.000,00	2.442.864,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	587.927.870,00	584.750.219,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.022.029.000,00	870.129.642,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	887.348.000,00	884.448.000,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	256.525.000,00	202.955.800,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	296.280.000,00	277.122.162,00
Program Penanggulangan Bencana	58.101.000,00	57.541.750,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	388.379.000,00	364.465.509,00
Program Pemberdayaan Sosial	227.430.000,00	200.160.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	34.889.000,00	28.928.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	79.739.640,00	72.588.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	194.026.000,00	157.635.200,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	301.382.000,00	265.640.500,00
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	4.872.000,00	4.872.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	9.112.000,00	7.559.000,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.900.000,00	1.700.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	166.289.000,00	162.727.500,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	56.120.000,00	55.679.102,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	14.384.000,00	14.009.000,00

Program	Anggaran	Realisasi
Program Penyuluhan Pertanian	51.000.000,00	50.976.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	485.344.000,00	210.142.708,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	185.760.682,00	158.754.990,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	435.280.000,00	411.007.250,00
Program Pengelolaan Persampahan	9.379.087.000,00	8.956.992.597,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	527.001.300,00	491.138.550,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	82.000.000,00	77.705.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	678.864.000,00	644.843.126,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.792.943.220,00	3.662.528.310,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86.053.000,00	86.011.000,00
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.895.000,00	6.895.000,00
Program Aplikasi Informatika	1.559.767.320,00	773.463.850,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.300.000,00	24.950.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.810.223.311,00	9.459.334.929,00
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	494.294.079,00	310.827.200,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25.595.660.100,00	19.675.407.403,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00
Program Pengembangan Kebudayaan	125.000.000,00	118.161.824,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.630.444.550,00	1.617.768.827,00
Program Pembinaan Perpustakaan	114.999.000,00	101.492.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	232.747.800,00	213.824.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.870.000,00	246.957.500,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.061.692.445,00	1.023.216.868,00
Program Pengembangan Ekspor	31.982.200,00	15.350.000,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	12.627.500,00	12.382.500,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	741.668.200,00	728.508.109,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.222.080.000,00	1.039.496.079,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	200.000.000,00	200.000.000,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	15.180.000,00	15.050.000,00

Program	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.281.352.400,00	1.022.411.611,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300.366.600,00	256.994.445,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	102.693.000,00	99.705.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	337.526.000,00	290.331.500,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	189.375.000,00	173.259.119,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	458.630.000,00	431.470.299,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	120.678.000,00	119.739.550,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	434.553.000,00	401.136.078,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	667.112.000,00	542.570.957,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	133.400.000,00	101.084.556,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	855.810.000,00	845.397.821,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.500.000,00	9.450.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200.100.000,00	176.566.125,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	768.540.000,00	718.359.455,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	166.750.000,00	161.048.075,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	141.013.000,00	123.982.781,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.846.326.450,00	1.819.026.450,00
Total Mandatory Infrastruktur	182.630.357.516,00	152.003.153.401,00
Minimal Belanja Infrastruktur	1.027.149.922.867,00	1.027.149.922.867,00
%	17,78%	14,80%

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah. Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan dalam APBD
Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen perhitungan	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja pada Inspektorat	Rp 12.175.290.436,00	Rp 9.272.016.907,00
	1) Belanja Operasi	Rp 11.836.997.436,00	Rp 9.026.424.107,00
	a) belanja pegawai	Rp 9.695.507.736,00	Rp 7.450.001.907,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 2.141.489.700,00	Rp 1.576.422.200,00
	c) belanja hibah		
	d) belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -
	2) Belanja Modal	Rp 338.293.000,00	Rp 245.592.800,00
2.	Alokasi APIP	Rp 12.175.290.436,00	Rp 9.272.016.907,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp 1.614.782.803.477,00	Rp 1.856.578.149.343,00
4.	Rasio APIP	0,75%	0,50%

Mandatory spending fungsi pengawasan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pada 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp10.052.016.166,00 atau 0,73% dari Total Belanja Daerah dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11 Realisasi *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan dalam APBD
Tahun Anggaran 2022

Program	Anggaran	realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.109.030.436,00	9.253.741.669,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	457.128.000,00	334.174.187,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	609.132.000,00	464.100.310,00
Total Mandatory Kesehatan	12.175.290.436,00	10.052.016.166,00
Total belanja daerah	1.614.682.803.477,00	1.614.682.803.477,00
%	0,75%	0,62%

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:

- pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
- penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
- pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diatas dianggarkan minimal sebesar 2% (dua persen) dari DTU Triwulan IV Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2022. Perhitungan Anggaran Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12 Persentase Perhitungan DTU

I	DTU Triwulan IV Tahun 2022	
a.	Dana Alokasi Umum	Rp132.606.511.000,00
b.	Dana Bagi Hasil (<i>Non Earmark</i>)	Rp38.393.644.350,00
	Jumlah	Rp171.000.155.350,00
II	Pengurang	
	DBH Cukai Hasil Tembakau	-
	DBH Reboisasi	-
	DTU yang diperhitungkan (I-II)	Rp171.000.155.350,00
	Jumlah Belanja Wajib Perlindungan Sosial	Rp4.673.540.800,00
	Persentase	2,73%

realisasi belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13 Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial

No.	Uraian	Anggaran		Realisasi		Realisasi Output	
		Rp	%	Rp	%	Vol	Satuan
I	Bantuan Sosial						
	Bantuan Langsung Tunai	4.166.550.000,00	89,15	4.055.850.000,00	97,34	9.013	orang
II	Penciptaan Lapangan Kerja	-	-	-	-		
III	Subsidi Sektor Transportasi	-	-	-	-		
IV	Perlindungan Sosial Lainnya						
	Pendataan Dan Pendistribusian BLT	506.990.800,00	10,85	200.068.500,00	39,46	-	-
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022		4.673.540.800,00	100,00	4.255.918.500,00	91,06	-	-

6. Perlu di pahami bahwa penanganan pandemi *Covid-19* sebagai keadaan darurat sejatinya dapat didasarkan kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. pelayanan kesehatan (*health services*),
2. pemenuhan kebutuhan fiskal (*fulfillment of fiscal needs*), dan
3. percepatan penanganan dalam kegiatan sosial (*acceleration of handling in social activities*).

Ketiga pendekatan tersebut sejatinya tercermin dalam beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seperti kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian dalam bidang ekonomi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kedua peraturan tersebut memang dapat ditujukan dalam menjalankan proses penanganan bencana kedaruratan seperti saat Covid-19 ini. Dan Indonesia sendiri menggunakan model yang kedua yaitu menggunakan undang - undang yang ada dengan memperhatikan kesehatan masyarakat (model legislatif). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kehadiran undang –undang tersebut dibentuk dalam menghadapi kondisi kedaruratan

akibat Covid-19 yang dialami oleh Indonesia.

Dalam Tabel 2.14 berikut ini adalah Laporan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022.

Tabel 2.14 Laporan Penanganan Covid-19

No.	Program/Kegiatan (3)	Anggaran (4)	Realisasi (5)	Penyerapan (6)	Capaian Output	
					Vol (7)	Satuan (8)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(c)	(f)	(g)
I	Bidang Kesehatan	22.072.614.450	15.175.307.181	68,75		
A.	Pendegahan dan/atau Penanganan Covid-19	12.630.110.400	10.215.933.581	80,89	7	Kegiatan
B.	Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH	158.273.000	76.239.000	48,17	252	Orang
C.	Dukungan pada Kelurahan untuk Penanganan Covid-19	2.084.231.050	1.817.063.035	87,18	156	Kegiatan
D.	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah untuk Penanganan Covid-19	7.200.000.000	3.066.071.565	42,58	575	Tenaga Kesehatan
II	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	28.552.929.931	20.263.360.932	70,97	720	Kegiatan
III	Bantuan Sosial <i>Safety Net</i> /Jaring Pengaman Sosial	-	-			
Total		50.625.544.381	35.438.668.113	70,00		

2.2.3 Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022

Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kemudian mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Di samping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, Gubernur, Bupati/Wali Kota memiliki tanggung jawab serta otoritas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terhadap perubahan anggaran APBD.

Di Tahun 2022 Pemerintah Kota Cimahi mengalami realokasi APBD sehingga harus melakukan perubahan perda/perwal dengan rincian seperti terdapat dalam Tabel 2.15 dengan rincian perubahan mata anggaran sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.15 Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	15 Tahun 2021	30 Desember 2021	
2	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	63 Tahun 2021	30 Desember 2021	
3	Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	7 Tahun 2022	5 April 2022	1. terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022
				2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
				3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
				4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022.
				5. diperolehnya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4	Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	11 Tahun 2022	17 Juni 2022	1. terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
				2. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (<i>Foot and Mouth Disease</i>) Tanggal 18 Mei 2022

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
				3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 70/KS.01.01.08/Perek tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tanggal 11 Mei 2022
5	Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	30 Tahun 2022	29 September 2022	terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan dampak inflasi tahun 202
6	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	6 Tahun 2022	13 Oktober 2022	
7	Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	35 Tahun 2022	13 Oktober 2022	
8	Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	47 Tahun 2022	30 November 2022	1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kota Cimahi berkurang
				2. Berita acara pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DAK Non Fisik Dana Pelayanan ADMINDUK Tahun 2022 Perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi bersama Tim Teknis DAK Non Fisik Dana Pelayanan ADMINDUK Direktorat

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
				Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3.Nota Dinas Kepala BPBD Kota Cimahi Nomor 900/ND892/BPBD tanggal 9 November 2022 Hal Arahkan Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Darurat Bencana
				4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam

**Tabel 2.16 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi
terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)					
		APBD 2022	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	PERUBAHAN APBD 2022	PARSIAL 4
		(30 Desember 2021)	(5 April 2022)	(17 Juni 2022)	(29 September 2022)	(13 Oktober 2022)	(30 November 2022)
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.046.836.583,00	355.046.836.583,00	355.046.836.583,00	355.046.836.583,00	375.260.580.277,00	375.260.580.277,00
4.1.01	Pajak Daerah	158.885.001.230,00	158.885.001.230,00	158.885.001.230,00	158.885.001.230,00	168.162.607.277,00	168.162.607.277,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.780.921.500,00	12.780.921.500,00	12.780.921.500,00	12.780.921.500,00	10.549.195.000,00	10.549.195.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	173.989.713.853,00	173.989.713.853,00	173.989.713.853,00	173.989.713.853,00	185.526.164.403,00	185.526.164.403,00
4.2	Pendapatan Transfer	924.288.055.737,00	938.585.948.242,00	938.585.948.242,00	938.585.948.242,00	944.555.839.716,00	944.555.839.716,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000,00	790.957.952.000,00	790.957.952.000,00	790.957.952.000,00	782.544.310.293,00	782.544.310.293,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.760.529.737,00	147.627.996.242,00	147.627.996.242,00	147.627.996.242,00	162.011.529.423,00	160.742.356.623,00
	Jumlah Pendapatan	1.279.334.892.320,00	1.293.632.784.825,00	1.293.632.784.825,00	1.293.632.784.825,00	1.319.816.419.993,00	1.318.547.247.193,00
5.	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.256.987.159,00	1.391.807.879.664,00	1.392.181.146.664,00	1.388.671.146.664,00	1.483.166.364.167,00	1.481.937.016.667,00
5.1.01	Belanja Pegawai	727.600.156.083,00	725.990.886.110,00	725.990.886.110,00	721.973.895.310,00	759.832.251.968,00	759.832.251.968,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.567.914.626,00	565.728.077.104,00	566.101.344.104,00	566.608.334.904,00	678.369.348.349,00	677.140.000.849,00
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	96.603.586.450,00	96.603.586.450,00	96.603.586.450,00	96.603.586.450,00	40.262.512.250,00	40.262.512.250,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.785.330.000,00	2.785.330.000,00	2.785.330.000,00	2.785.330.000,00	4.202.251.600,00	4.202.251.600,00
5.2	BELANJA MODAL	78.567.912.994,00	78.314.912.994,00	78.314.912.994,00	78.314.912.994,00	104.854.879.110,00	104.854.879.110,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.691.568.810,00	1.691.568.810,00	1.691.568.810,00	1.691.568.810,00	7.039.408.898,00	7.039.408.898,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558,00	15.629.628.558,00	15.629.628.558,00	15.629.628.558,00	26.716.547.465,00	26.716.547.465,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946,00	45.512.239.946,00	45.618.239.946,00	45.618.239.946,00	51.020.087.498,00	51.020.087.498,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680,00	15.293.747.680,00	15.293.747.680,00	15.293.747.680,00	18.398.135.549,00	18.398.135.549,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000,00	187.728.000,00	187.728.000,00	187.728.000,00	1.680.699.700,00	1.680.699.700,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	24.520.733.000,00	28.030.733.000,00	28.030.733.000,00	27.890.907.700,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	24.520.733.000,00	28.030.733.000,00	28.030.733.000,00	27.890.907.700,00
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	100.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	100.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.480.824.900.153,00	1.495.122.792.658,00	1.495.122.792.658,00	1.495.122.792.658,00	1.616.051.976.277,00	1.614.782.803.477,00
	Surplus/Defisit	(201.490.007.833,00)	(201.490.007.833,00)	(201.490.007.833,00)	(201.490.007.833,00)	(296.235.556.284,00)	(296.235.556.284,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	308.665.364.621,00	308.665.364.621,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	308.665.364.621,00	308.665.364.621,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	213.919.816.170,00	308.665.364.621,00	308.665.364.621,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00	12.429.808.337,00
	Pembiayaan Netto	201.490.007.833,00	201.490.007.833,00	201.490.007.833,00	201.490.007.833,00	296.235.556.284,00	296.235.556.284,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	-	-	-	-	-	-

2.3 Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022

2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa ini selalu menarik untuk terus dikaji demi suksesnya pelaksanaan sistem perpajakan dalam mengamankan penerimaan daerah pada khususnya dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada masa kini merupakan pilar utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta negara sebagaimana telah disepakati bersama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan perpajakan selalu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi psikologis, misalnya diketahui bahwa pada umumnya tidak mudah mendapatkan seseorang yang dengan sukarela membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti karena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakannya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk keberlangsungan pembangunan daerah, pajak rela tidak rela harus dibayar oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan melampaui batasan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Semua itu dimaksudkan agar pundi-pundi APBD tetap terisi untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan demi kepentingan bersama. Di negara kita ini kegiatan pembangunan akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mendukung tujuan tersebut.

2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.318.547.247.193,00 dengan realisasi sebesar Rp1.331.038.275.111,53 atau 100,95% dari target, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	417.115.523.740,00	459.650.574.674,53	110,20
2	Dinas Kesehatan	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37
3	RSU Daerah Cibabat	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.515.690.000,00	8.469.534.676,00	112,69
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01
6	Dinas Tenaga Kerja	255.000.000,00	-	-
7	Dinas Pangan Dan Pertanian	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Dinas Perhubungan	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56
11	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	1.717.197.500,00	1.914.761.761,00	111,51
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	723.053.930.293,00	699.113.186.046,00	96,69
	JUMLAH	1.318.547.247.193,00	1.331.038.275.111,53	100,95

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing dinas/instansi penghasil sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp417,115,523,740,00 dengan realisasi sebesar Rp459.650.574.674,53 atau 110,20% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 10,20% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	417.115.523.740,00	459.650.574.674,53	110,20
Pendapatan Asli Daerah	196.882.787.117,00	222.402.205.179,53	112,96
Pendapatan Pajak Daerah	168.162.607.277,00	193.890.140.403,00	115,30
Pajak Hotel	261.727.322,00	300.018.582,00	114,63
Pajak Hotel	151.172.395,00	165.866.367,00	109,72
Pajak Gubuk Pariwisata	12.541.020,00	9.305.764,00	74,20
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	98.013.907,00	124.846.451,00	127,38
Pajak Restoran	20.400.257.563,00	23.132.936.631,00	113,40
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	20.375.257.563,00	23.132.936.631,00	113,53
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000,00	-	-
Pajak Hiburan	383.600.000,00	461.850.519,00	120,40

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	220.000.000,00	207.600.000,00	94,36
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	163.600.000,00	254.250.519,00	155,41
Pajak Reklame	2.084.000.001,00	2.988.440.000,00	143,40
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	911.138.304,00	1.633.836.900,00	179,32
Reklame Kain	401.232.844,00	208.279.200,00	51,91
Reklame Melekat/Stiker	749.682.953,00	1.078.865.900,00	143,91
Reklame Berjalan	21.945.900,00	67.458.000,00	307,38
Pajak Penerangan Jalan	39.494.600.000,00	41.170.519.697,00	104,24
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	39.484.506.140,00	41.156.883.209,00	104,24
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.093.860,00	13.636.488,00	135,10
Pajak Parkir	900.000.000,00	1.128.146.604,00	125,35
Pajak Parkir	900.000.000,00	1.128.146.604,00	125,35
Pajak Air tanah	13.138.422.391,00	15.724.487.391,00	119,68
Pajak Air tanah	13.138.422.391,00	15.724.487.391,00	119,68
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	53.000.000.000,00	57.936.562.461,00	109,31
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	53.000.000.000,00	57.936.562.461,00	109,31
BPHTB-Pemindahan Hak	38.500.000.000,00	51.047.178.518,00	132,59
BPHTB-Pemindahan Hak	38.500.000.000,00	51.047.178.518,00	132,59
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah	17.697.566.243,00	17.489.451.179,53	98,82
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	549.593.464,00	851.993.938,00	155,02
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	546.934.664,00	809.394.038,00	147,99
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	32.941.100,00	-
Penjualan Aset Lainnya	2.658.800,00	9.658.800,00	363,28
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	602.995.525,00	955.844.165,00	158,52
Hasil Sewa BMD	-	-	-
Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	602.995.525,00	955.844.165,00	158,52
Penerimaan Jasa Giro	10.835.000.000,00	8.005.708.874,03	73,89
Jasa Giro Kas Daerah	10.835.000.000,00	7.381.140.228,03	68,12
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	541.202.239,00	-
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	83.366.407,00	-
Pendapatan Bunga	700.000.000,00	798.069.058,45	114,01
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	700.000.000,00	798.069.058,45	114,01
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	3.411.390.499,00	136,46
Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	2.500.000.000,00	3.411.390.499,00	136,46
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	60.001,05	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	60.001,05	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	46.526.247,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	46.526.247,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.346.275.904,00	1.936.634.909,00	143,85
Pendapatan Denda Pajak Hotel	450.000,00	2.159.094,00	479,80

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000.000,00	45.891.803,00	152,97
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	60.000,00	112.140,00	186,90
Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.000.000,00	18.891.732,00	188,92
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	15.904,00	23.770,00	149,46
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.250.000,00	2.525.315,00	202,03
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	4.500.000,00	13.294.233,00	295,43
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.300.000.000,00	1.850.614.110,00	142,35
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	3.122.712,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.020.600,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	14.020.600,00	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	96.660.750,00	96.660.750,00	100,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	96.660.750,00	96.660.750,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian	310.000.000,00	587.092.623,00	189,38
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	310.000.000,00	586.946.814,00	189,34
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	47.852,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	-	97.957,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional			
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	54.700.115,00	-
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	54.700.115,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	739.520.000,00	739.520.000,00	100,00

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	739.520.000,00	739.520.000,00	100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.500.000,00	5.250.000,00	150,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.500.000,00	5.250.000,00	150,00
PENDAPATAN TRANSFER	220.232.736.623,00	237.248.369.495,00	107,73
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	71.850.980.000,00	90.833.893.826,00	126,42
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	71.850.980.000,00	90.833.893.826,00	126,42
Dana Bagi Hasil Pajak	46.381.576.000,00	54.229.638.467,00	116,92
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.751.093.000,00	5.914.895.750,00	124,50
DBH PPh Pasal 21	32.118.852.000,00	36.131.033.101,00	112,49
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	4.155.501.000,00	6.431.697.628,00	154,78
DBH Dana Cukai Hasil Tembakau	5.356.130.000,00	5.752.011.988,00	107,39
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	25.469.404.000,00	36.604.255.359,00	143,72
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.431.958.000,00	6.486.579.939,00	146,36
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.425.421.000,00	5.974.722.332,00	246,34
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landernt	939.102.000,00	1.443.936.099,00	153,76
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	100.467.000,00	127.372.337,00	126,78
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.614.145.000,00	20.613.333.652,00	132,02
Transfer Pemerintah Provinsi	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.909.536.178,00	51.403.685.055,00	97,15
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.091.614.061,00	26.645.376.870,00	98,35

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.013.677.805,00	37.013.677.805,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	230.357.540,00	215.164.900,00	93,40
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.136.571.039,00	31.136.571.039,00	100,00

2. Dinas Kesehatan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp18.508.598.160,00 dengan realisasi sebesar Rp18.946.647.100,00 atau 102,37% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 2,37% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Pendapatan</u>	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37
<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37
Lain-lain PAD yang Sah	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37
Pendapatan BLUD	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37

3. RSUD Cibabat

Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Cibabat) sebesar Rp145.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp136.867.524.937,00 atau 94,39% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2022 berada di bawah *cash budget* sebesar 5,61 % sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Pendapatan</u>	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39
<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39
Lain-lain PAD yang Sah	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39
Pendapatan Dari BLUD	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.515.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.469.534.676,00 atau 112,69% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 12,69 % sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	7.515.690.000,00	8.469.534.676,00	112,69
Pendapatan Asli Daerah	7.515.690.000,00	8.469.534.676,00	112,69
Pendapatan Retribusi Daerah	3.195.690.000,00	3.312.360.350,00	103,65
Retribusi Jasa Umum	258.630.000,00	365.928.500,00	141,49
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	125.000.000,00	126.737.500,00	101,39
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.430.000,00	195.110.000,00	215,76
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	43.200.000,00	44.081.000,00	102,04
Retribusi Jasa Usaha	2.937.060.000,00	2.946.431.850,00	100,32
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.937.060.000,00	2.946.431.850,00	100,32
Lain-lain PAD yang Sah	4.320.000.000,00	5.157.174.326,00	119,38
Pendapatan Denda Retribusi.	-	7.670.626,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	7.670.626,00	-
Pendapatan Dari BLUD	4.320.000.000,00	5.157.174.326,00	119,38
Pendapatan dari BLUD	4.320.000.000,00	5.157.174.326,00	119,38

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pendapatan daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp100.247.500,00 dengan realisasi sebesar Rp115.297.500,00 atau 115,01% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 15,01% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01
Pendapatan Asli Daerah	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01
Pendapatan Retribusi Daerah	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01
Retribusi Jasa Umum	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01

6. Dinas Tenaga Kerja

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp255.000.000,00 dan tidak ada realisasi sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	255.000.000,00	-	-
Pendapatan Asli Daerah	255.000.000,00	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	255.000.000,00	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	255.000.000,00	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	255.000.000,00	-	-

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp285.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp312.492.500,00 atau 109,43% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 9,43% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43
Pendapatan Asli Daerah	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43
Pendapatan Retribusi Daerah	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43
Retribusi Jasa Usaha	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	245.560.000,00	270.560.000,00	110,18
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	41.932.500,00	104,83

8. Dinas Lingkungan Hidup

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.465.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.823.713.906,00 atau 114,55% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 14,55% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55
Pendapatan Asli Daerah	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55
Pendapatan Retribusi Daerah	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55
Retribusi Jasa Umum	1.950.000.000,00	2.181.745.406,00	111,88
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.950.000.000,00	2.181.745.406,00	111,88
Retribusi Jasa Usaha	515.000.000,00	641.968.500,00	124,65
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	515.000.000,00	641.968.500,00	124,65

9. Dinas Perhubungan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.530.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.620.789.100,00 atau 105,90% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2022 di atas *cash budget* sebesar 5,90% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90
Pendapatan Asli Daerah	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90
Pendapatan Retribusi Daerah	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90
Retribusi Jasa Umum	1.300.000.000,00	1.351.562.100,00	103,97
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	700.000.000,00	771.883.000,00	110,27
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	579.679.100,00	96,61
Retribusi Jasa Usaha	220.000.000,00	256.477.000,00	116,58
Retribusi Terminal	220.000.000,00	256.477.000,00	116,58
Retribusi Perizinan Tertentu	10.500.000,00	12.750.000,00	121,43
Retribusi Izin Trayek / Izin Usaha Angkutan Umum	10.500.000,00	12.750.000,00	121,43

10. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp470.250.161,00. atau 117,56% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2022 di atas *cash budget* sebesar 17,56% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56
Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56
Pendapatan Retribusi Daerah	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56
Retribusi Jasa Umum	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56

11. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian. Perdagangan dan Pertanian sebesar Rp1.717.197.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.914.761.761,00 atau 111,51% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 11,51% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.717.197.500,00	1.914.761.761,00	111,51
Pendapatan Asli Daerah	1.717.197.500,00	1.914.761.761,00	111,51
Pendapatan Retribusi Daerah	1.717.197.500,00	1.905.673.075,00	110,98
Retribusi Jasa Umum	150.000.000,00	190.233.500,00	126,82
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	150.000.000,00	190.233.500,00	126,82
Retribusi Jasa Usaha	1.567.197.500,00	1.715.439.575,00	109,46
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	650.000.000,00	790.645.875,00	121,64
Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan	917.197.500,00	924.793.700,00	100,83
Lain-lain PAD yang Sah	-	9.088.686,00	-
Pendapatan Denda Retribusi.	-	9.088.686,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	9.088.686,00	-

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target pendapatan daerah yang dikelola Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp733.502.750,00 atau 122,25% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2022 berada di atas *cash budget* sebesar 22,25% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25
Pendapatan Asli Daerah	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25
Pendapatan Retribusi Daerah	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25
Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	10.553.450,00	-
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00	722.949.300,00	120,49

13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp723.053.930.293,00 dengan realisasi sebesar Rp699.113.186.046,00 atau 96,69% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2022 berada di bawah *cash budget* sebesar 3,31% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	723.053.930.293,00	699.113.186.046,00	96,69
Pendapatan Transfer	723.053.930.293,00	699.113.186.046,00	96,69
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	705.165.162.293,00	681.224.418.046,00	96,60
Dana Alokasi Umum	519.937.401.610,00	519.937.401.610,00	100,00
Dana Alokasi Umum.	519.937.401.610,00	519.937.401.610,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	185.227.760.683,00	161.287.016.436,00	87,07
Dana Alokasi Khusus Fisik	27.826.107.000,00	21.060.743.820,00	75,69
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157.401.653.683,00	140.226.272.616,00	89,09
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00
DID	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Pemerintah Provinsi	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00

Mekanisme Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS, Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Kesetaraan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) dari Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Bendahara Sekolah/Lembaga sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi. Pengakuan Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 adalah berdasarkan kepada PMK Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 294).

2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2022 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.614.782.803.477,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.377.572.310.280,17 atau 85,32%. Belanja daerah dimaksud dipergunakan untuk:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.481.937.016.667,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.289.952.096.568,17 atau 87,05% terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp759.832.251.968,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp658.940.382.015,00 atau 86,72%;

b. Belanja Barang

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp677.140.000.849,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp588.254.398.560,17 atau 86,87%;

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp234.672.144,00 atau 46,93%;

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp40.262.512.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp39.388.772.249,00 atau 97,83%

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.202.251.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.133.871.600,00 atau 74,58%;

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp104.854.879.110,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp81.570.042.644,00 atau 77,79%;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp27.890.907.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.050.171.068,00 atau 21,69%.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%

2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu. Pinjaman daerah dan/atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp296.235.555.284,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp298.032.233.310,64 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp308.665.364.621,00 dan telah direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp308.665.364.620,64 atau 100,00%;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp12.429.808.337,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.633.131.310,00 atau 85,55%. Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp9.777.623.090,00 atau 97,78% dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21%.

2.3.4 Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja anggaran. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut ini:

Tabel 2.31 Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	375.260.580.277,00	394.676.719.570,53	105,17
2	Pendapatan Transfer	943.286.666.916,00	936.361.555.541,00	99,27
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.318.547.247.193,00	1.331.038.275.111,53	100,95
B	Belanja			
1	Belanja Operasi	1.481.937.016.667,00	1.289.952.096.568,17	87,05
2	Belanja Modal	104.854.879.110,00	81.570.042.644,00	77,79
3	Belanja Tak Terduga	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69
	Jumlah Belanja	1.614.682.803.477,00	1.377.572.310.280,17	85,32
C	Transfer			
1	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Jumlah Transfer	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
D	Surplus/defisit	(296.235.556.284,00)	(46.634.035.168,64)	15,74

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

Basis akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Kota Cimahi adalah Basis AkruaI untuk Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, Transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ruang lingkupnya meliputi terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual;

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2. Penyajian Laporan Keuangan;

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- b. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

- a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus atau defisit-LRA;
 - 5) Penerimaan pembiayaan;
 - 6) Pengeluaran pembiayaan;
 - 7) Pembiayaan neto; dan
 - 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

4. Neraca;

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. Biaya dibayar di muka;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. aset lainnya;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang;
- k. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

5. Laporan Arus Kas;

- a. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk *melengkapi* pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan;

- a. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- b. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
3. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
5. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
8. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assessment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
9. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
10. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.
11. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
12. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
 - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment.
 - b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.

14. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;

1. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
2. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Pendapatan perizinan;

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
3. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

Pendapatan Pemberian Layanan

1. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
3. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
 - b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.

Pendapatan Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividen*) diakui pada saat diperoleh.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
3. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

1. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
2. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
3. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
4. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

1. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.
2. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari

bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.

3. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Pendapatan perizinan;

1. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
2. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

Pendapatan Pemberian Layanan

1. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
3. Dalam hal penyeteroran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
2. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

1. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

1. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan.
2. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
3. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
4. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.
5. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

10. Akuntansi Pendapatan Operasional Transfer;

1. Pendapatan Operasional Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Operasional Transfer LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
4. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
5. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
6. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
7. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.
8. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.
9. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
10. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
11. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
12. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
13. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
14. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
15. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah

melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

11. Akuntansi Hibah;

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
 - c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
 - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
3. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:
 - a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
8. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

9. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.
10. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
14. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
15. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
16. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.
17. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
18. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
19. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
20. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
21. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
22. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

12. Akuntansi Bantuan Sosial;

1. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
 - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.
 - b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.

- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.
 - d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
 - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
2. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 3. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
 4. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
 5. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
 6. Beban diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 7. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
 8. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
 9. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.
 10. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.

11. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
12. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
13. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
14. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
15. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

13. Akuntansi Piutang;

- 1) Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 4) Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).

- 5) STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 6) Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
- 8) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 9) Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
- 10) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas. Pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 11) Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
- 12) Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- 13) Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Transfer Lainnya;

Selain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK, pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

- 14) Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :
 - a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan, maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sudah diterbitkan.
 - b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengadilan.

14. Akuntansi Persediaan;

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Pendapatan pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Periodik. Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

15. Akuntansi Investasi;

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

16. Akuntansi Aset Tetap;

Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dipenuhi:

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional dan dihitung setiap akhir periode.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (Straight Line Method) tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran dimaksud dalam paragraf 120 harus memenuhi batas minimum kapitalisasi biaya (capitalization threshold).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan ditentukan dengan pedoman kapitalisasi barang daerah yang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Perbaikan aset tetap meliputi:

- a) Renovasi;
- b) Restorasi; atau
- c) Overhaul.

17. Akuntansi Kerugian Daerah;

- 1) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
 - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
- 4) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
- 5) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
 - a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang TGR Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat

- berwenang.
- c. Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 6) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
- a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
 - 1) Pengakuan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - b. Entitas yang berhak menerima
 - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Pengakuan Pendapatan LRA
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
 - 3) Pengakuan Pendapatan LO
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
- 7) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
- a. Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - b. kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - c. kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 8) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
- a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
 - b. Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus

dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

- 9) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
- Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
 - Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

18. Akuntansi Aset Tidak Berwujud

- Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

a. Dapat Diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
- Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset satu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan.

Aset tak berwujud diakui pada saat:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengeluaran Setelah Perolehan

1. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
2. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*;
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
4. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
5. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
 - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
 - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh

pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	<i>Software</i> Komputer	4 (empat) Tahun

6. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$

- Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 - Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

- Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
- Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

19. Akuntansi Kewajiban;

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

20. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa- Pemberi Konsesi;

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi Konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- (a) disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana sebagai hasil reklasifikasi.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

21. Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

22. Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 - 6) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 - 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
 - 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset dan akun ekuitas dana.
 - 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.
 - 12) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

23. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

24. Laporan Keuangan Konsolidasian.

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 288), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 294).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Kode Rekening dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan pada LRA diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.331.038.275.111,53 atau mencapai 100,95% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2022 sebesar Rp1.318.547.247.193,00. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer lebih kecil dibandingkan anggarannya.

2. Belanja

Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.377.572.310.280,17 atau mencapai 85,32% dari anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 1.614.682.803.477,00

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan pengembalian belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.000.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00.

4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran kas yaitu Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.;
- c. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.;

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp298.032.233.310,64 atau 100,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp296.235.556.284,00. Penerimaan pembiayaan

Rp308.665.364.620,64 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp308.665.364.621,00 terdiri dari dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp308.665.364.621,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.633.131.310,00 atau 85,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.429.808.337,00 terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp9.777.623.090,00 dan pembayaran pokok pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp855.508.220,00.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp394.676.719.570,53 atau mencapai 105,17% dari target anggaran sebesar Rp375.260.580.277,00.

4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp193.890.140.403,00 atau mencapai 115,30% dari target anggaran sebesar Rp168.162.607.277,00 terdiri dari:

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	261.727.322,00	300.018.582,00	114,63	283.417.966,00
Pajak Restoran	20.400.257.563,00	23.132.936.631,00	113,40	17.018.807.906,00
Pajak Hiburan	383.600.000,00	461.850.519,00	120,40	123.330.330,00
Pajak Reklame	2.084.000.001,00	2.988.440.000,00	143,40	2.326.007.100,00
Pajak Penerangan Jalan	39.494.600.000,00	41.170.519.697,00	104,24	37.701.852.705,00
Pajak Parkir.	900.000.000,00	1.128.146.604,00	125,35	937.097.932,00
Pajak Air tanah	13.138.422.391,00	15.724.487.391,00	119,68	8.237.134.116,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	53.000.000.000,00	57.936.562.461,00	109,31	57.303.314.555,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	38.500.000.000,00	51.047.178.518,00	132,59	55.960.840.082,00
Jumlah	168.162.607.277,00	193.890.140.403,00	115,30	179.891.802.692,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp193.890.140.403,00 atau 115,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.162.607.277,00. Hal ini dikarenakan pengaruh kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi pun mulai menggeliat kembali. Pencapaian realisasi pendapatan yang sangat signifikan yaitu dari Pajak Reklame sebesar Rp2.988.440.000,00 atau sebesar 143,40% dari target sebesar Rp2.084.000.001,00. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan atau pemungutan pajak daerah serta melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah.

4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.11.294.079.342,00 atau mencapai 107,06% dari target anggaran sebesar Rp10.549.195.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	4.158.877.500,00	5.599.810.867,00	134,65	4.817.062.231,00
Retribusi Jasa Usaha	5.524.817.500,00	4.948.015.725,00	89,56	4.591.476.175,00
Retribusi Perijinan Tertentu	865.500.000,00	746.252.750,00	86,22	2.139.944.234,00
Jumlah	10.549.195.000,00	11.294.079.342,00	107,06	11.548.482.640,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Daerah	10.549.195.000,00	11.294.079.342,00	107,06	11.548.482.640,00
Retribusi Jasa Umum	4.158.877.500,00	5.599.810.867,00	134,65	4.817.062.231,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.950.000.000,00	2.181.745.406,00	111,88	1.562.133.900,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	125.000.000,00	126.737.500,00	101,39	181.345.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	700.000.000,00	771.883.000,00	110,27	683.644.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	-	924.793.700,00	-	895.585.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	579.679.100,00	96,61	588.309.040,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01	104.907.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90.430.000,00	195.110.000,00	215,76	157.970.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	43.200.000,00	44.081.000,00	102,04	38.896.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	150.000.000,00	190.233.500,00	126,82	172.659.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	470.250.161,00	117,56	431.612.791,00
Retribusi Jasa Usaha	5.524.817.500,00	4.948.015.725,00	89,56	4.591.476.175,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.347.620.000,00	4.649.606.225,00	106,95	4.307.446.175,00
Retribusi Pasar Grosir	917.197.500,00	-	-	-
Retribusi Terminal	220.000.000,00	256.477.000,00	116,58	253.838.000,00

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	41.932.500,00	104,83	30.192.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	865.500.000,00	746.252.750,00	86,22	2.139.944.234,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	10.553.450,00	-	1.552.574.234,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	10.500.000,00	12.750.000,00	121,43	3.600.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	255.000.000,00	-	-	583.770.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan	600.000.000,00	722.949.300,00	120,49	-

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp11.294.079.342,00 atau 107,06% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp10.549.195.000,00. Namun, apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp254.403.298,00 atau sebesar 2.20%. Penurunan ini lebih dikarenakan belum adanya realisasi dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sedangkan pelampauan realisasi pendapatan yang signifikan Tahun 2021 terjadi pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 215,76% dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 126,82% .

Memperhatikan data tersebut di atas untuk terus meningkatkan pendapatan retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah- langkah antara lain:

1. Menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akurat; dan
2. Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.

4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.11.022.613.597,00 atau mencapai 100,00% dari target anggaran sebesar Rp.11.022.613.597,00 terdiri dari:

Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00	9.956.960.000,00
Jumlah	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00	9.956.960.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.11.022.613.597,00 tersebut merupakan bagian dividen atas laba Tahun 2022 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 111.215.958 lembar saham pada PT Bank BJB.

4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.178.469.886.228,53 atau mencapai 96,20% dari target anggaran sebesar Rp.185.526.164.403,00 terdiri dari:

Tabel 4.5 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	549.593.464,00	851.993.938,00	155,02	1.052.983.328,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	602.995.525,00	955.844.165,00	158,52	337.911.429,00
Jasa Giro	10.835.000.000,00	8.005.708.874,03	73,89	9.376.700.958,10
Pendapatan Bunga	700.000.000,00	798.069.058,45	114,01	307.719.834,01
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.500.000.000,00	3.411.390.499,00	136,46	2.507.325.531,00
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	-	60.001,05	-	561.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	46.526.247,00	-	184.126.021,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.346.275.904,00	1.936.634.909,00	143,85	1.426.540.148,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.020.600,00	16.759.312,00	119,53	23.470.807,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	96.660.750,00	96.660.750,00	100,00	49.593.947,00
Pendapatan dari Pengembalian	310.000.000,00	587.092.623,00	189,38	315.613.979,00
Pendapatan Dari BLUD	167.828.598.160,00	160.963.675.737,00	95,91	188.095.771.759,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	54.700.115,00	0,00	1.177.480,00
Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht)	739.520.000,00	739.520.000,00	100,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.500.000,00	5.250.000,00	150,00	28.250.000,00
Jumlah	185.526.164.403,00	178.469.886.228,53	96,20	203.707.746.221,11

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp25.237.859.992,58 atau 12,39% dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2021. Penurunan yang signifikan terjadi pada Pendapatan dari Jasa Giro yang hanya 73,89% dari target yang dianggarkan dan Pendapatan dari BLUD turun sebesar Rp27.132.096.022,00 atau 14,42% dari Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021. Namun ditengah penurunan yang terjadi terdapat juga realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang melampaui target diantaranya yaitu Pendapatan dari pengembalian 189,38%, Pendapatan Denda Pajak

Daerah 143,85%, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 150,00% dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 136,46%.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.936.361.555.541 atau 99,27% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.943.286.666.916.

Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	777.016.142.293,00	772.058.311.872	99,36	771.276.569.021,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	52.247.274.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.742.356.623,00	158.775.075.669	98,78	229.572.624.698,00
Jumlah	943.286.666.916,00	936.361.555.541	99,27	1.053.096.467.719,00

4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp772.058.311.872,00 atau 99,36% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp777.016.142.293,00.

4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.229.638.467,00 atau 116,92% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp46.381.576.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.7 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.751.093.000,00	5.914.895.750,00	124,50	7.497.770.028,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	4.155.501.000,00	6.431.697.628,00	154,78	6.039.776.294,00
DBH PPh Pasal 21	32.118.852.000,00	36.131.033.101,00	112,49	42.346.269.883,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.356.130.000,00	5.752.011.988,00	107,39	5.425.300.373,00
Jumlah	46.381.576.000,00	54.229.638.467,00	116,92	61.309.116.578,00

Realisasi Pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan PMK nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan PMK nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.604.255.359,00 atau 143,72% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp25.469.404.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.431.958.000,00	6.486.579.939,00	146,36	3.490.313.900,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.425.421.000,00	5.974.722.332,00	246,34	192.486.100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	939.102.000,00	1.443.936.099,00	153,76	801.488.018,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	100.467.000,00	127.372.337,00	126,78	151.713.993,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	15.614.145.000,00	20.613.333.652,00	132,02	41.471.203.341,00
Jumlah	25.469.404.000,00	36.604.255.359,00	143,72	47.781.705.502,00

Realisasi Pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan PMK nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan PMK nomor 127/PMK.07 /2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp519.937.401.610,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp519.937.401.610,00 terdiri dari:

Tabel 4.9 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	519.937.401.610	519.937.401.610,00	100,00	530.425.978.000,00

Menurut Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapatkan penetapan Dana Alokasi Umum sebesar Rp530.425.978.000,00. Realisasi yang diterima Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2022 sebesar Rp519.937.401.610,00. Hal tersebut dikarenakan adanya pemotongan dana sebesar Rp10.488.576.390,00 untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 dan Sertifikasi Guru.

4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.287.016.436,00 atau 91,66% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp185.227.760.683,00 terdiri dari:

Tabel 4.10 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	27.826.107.000,00	21.060.743.820,00	75,69	31.966.257.254,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157.401.653.683,00	140.226.272.616,00	89,09	99.793.511.687,00
Jumlah	185.227.760.683,00	161.287.016.436,00	87,07	131.759.768.941,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima sebesar Rp21.060.743.820,00 dialokasikan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp387.983.800,00
b. Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp7.335.633.853,00
c. Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp3.812.942.991,00
d. Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Rp1.352.882.516,00
e. Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Rp336.045.000,00
f. Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Rp5.046.745.320,00
g. Bidang Sanitasi-Reguler	Rp1.599.520.340,00
h. Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	Rp1.188.990.000,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima sebesar Rp140.226.272.616,00 dialokasikan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. BOS Reguler	Rp66.188.056.313,00
b. BOS Kinerja	Rp60.000.000,00
c. TPG PNSD	Rp59.914.092.620,00
d. Tamsil Guru PNSD	Rp547.200.000,00
e. BOP PAUD	Rp4.882.209.000,00
f. BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp2.534.900.000,00
g. BOKKB-BOK	Rp1.632.867.883,00
h. PK2UKM	Rp278.124.500,00
i. Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp619.199.800,00
j. Fasilitas Penanaman Modal	Rp308.742.500,00
k. BOKB-KB	Rp3.055.580.000,00
l. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp205.300.000,00

4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

4.1.2.2.1. Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.528.168.000 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp5.528.168.000 terdiri dari:

Tabel 4.11 Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif daerah (DID)	5.528.168.000	5.528.168.000	100,00	52.247.274.000,00
Jumlah	5.528.168.000	5.528.168.000	100,00	52.247.274.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan kepada Perpres Nomor 98 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

4.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp229.572.624.698,00 atau 62,92% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp364.842.836.948,00 terdiri dari:

4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp146.414.475.669,00 atau 96,75% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp148.381.756.623,00 terdiri dari:

Tabel 4.12 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	52.909.536.178,00	51.403.685.055,00	97,15	47.304.226.200,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.091.614.061,00	26.645.376.870,00	98,35	22.198.195.050,00
Bagi Hasil dr Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.013.677.805,00	37.013.677.805,00	100,00	29.470.331.948,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	230.357.540,00	215.164.900,00	93,40	215.330.600,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	31.136.571.039,00	31.136.571.039,00	100,00	24.677.197.939,00
Jumlah	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67	123.865.281.737,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.623-BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi.

4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.360.600.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp12.360.600.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.13 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	9.676.657.020,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00	96.030.685.941,00
Bantuan Dari Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-
Jumlah	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00	105.707.342.961,00

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kota Cimahi.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 4.14 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat :	-	-	-	6.700.327.000,00
<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>		-		6.700.327.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	55.161.824.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	-	-	71.950.231,00
Jumlah	-	--	-	61.934.101.231,00

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak mendapatkan Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus.

4.1.4. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.289.952.096.568,17 atau mencapai 87,05% dari anggarannya sebesar Rp1.481.937.016.667,00 terdiri dari:

Tabel 4.15 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	759.832.251.968,00	658.940.382.015,00	86,72	643.977.236.028,00
Belanja Barang	677.140.000.849,00	588.254.398.560,17	86,87	555.391.457.278,00
Belanja Bunga	500.000.000,00	234.672.144,00	46,93	308.874.114,00
Belanja Subsidi	-	-	-	410.574.000,00
Belanja Hibah	40.262.512.250,00	39.388.772.249,00	97,83	18.999.042.200,00
Belanja Bantuan Sosial	4.202.251.600,00	3.133.871.600,00	74,58	2.571.530.000,00
Jumlah	1.481.937.016.667,00	1.289.952.096.568,17	87,05	1.221.658.713.620,00

4.1.4.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp658.940.382.015,00 atau mencapai 86,72% dari anggarannya sebesar Rp759.832.251.968,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 51,09% terdiri dari:

Tabel 4.16 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	346.571.522.368,00	286.598.598.855,00	82,70	287.338.317.514,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.538.501.513,00	177.860.225.984,00	90,04	174.975.041.742,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.293.871.279,00	91.354.628.760,00	82,08	98.614.718.280,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	38.189.613.488,00	37.689.483.344,00	98,69	33.629.360.044,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	712.867.752,00	510.090.496,00	71,55	536.897.640,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	854.400.000,00	732.000.000,00	85,67	605.520.000,00
Belanja Pegawai BLUD	64.671.475.568,00	64.195.354.576,00	99,26	48.277.380.808,00
JUMLAH	759.832.251.968,00	658.940.382.015,00	86,72	643.977.236.028,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 secara nominal meningkat sebesar Rp14.963.145.987,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran

2021. Namun, secara presentase penyerapan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 hanya 86,72% atau turun sebesar 2,27% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Kurangnya penyerapan anggaran tersebut terlihat signifikan pada realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp510.090.496,00 atau 71,55% dari belanja yang dianggarkan yaitu Rp712.867.752,00.

4.1.4.2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Belanja Barang adalah untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp588.254.398.560,17 atau 86,87 % dari anggarannya sebesar Rp677.140.000.849 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 45,61%, terdiri dari:

Tabel 4.17 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Bahan Pakai Habis	123.059.357.306,00	106.568.809.733,00	86,60	101.499.483.027,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	851.054.000,00	836.503.278,00	98,29	47.160.000,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	189.499.587.495,00	168.554.514.488,17	88,95	171.986.735.688,00
Belanja Premi Asuransi	48.088.385.332,00	43.394.308.646,00	90,24	30.507.042.985,00
Belanja Sewa Tanah	-	-	-	1.289.551.963,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.123.674.300,00	4.840.774.785,00	79,05	2.209.706.263,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.241.964.000,00	5.027.060.000,00	80,54	4.314.242.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	315.687.500,00	166.064.500,00	52,60	33.950.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.754.229.214,00	13.824.449.861,00	82,51	17.552.242.206,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.807.391.773,00	4.602.217.357,00	79,25	4.320.851.128,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	37.000.000,00	10.000.000,00	27,03	57.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.111.733.500,00	4.682.857.652,00	91,61	1.854.950.764,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	33.210.714.556,00	29.842.003.612,00	89,86	36.408.345.721,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas	44.519.670.000,00	35.059.872.218,00	78,75	21.680.937.291,00

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak				
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.317.300.000,00	3.049.770.181,00	70,64	8.019.579.973,00
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.950.000.000,00	3.928.196.144,00	99,45	-
Belanja Barang dan Jasa BOS				
Belanja Barang Dana BOS	49.928.083.471,00	46.539.291.483,00	93,21	47.607.938.129,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.324.168.402,00	117.327.704.622,00	84,21	106.001.740.140,00
Jumlah	677.140.000.849,00	588.254.398.560,17	86,87	555.391.457.278,00

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp32.862.941.282,17 atau sebesar 5,59% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021. Namun, apabila melihat rincian belanja di atas masih ada realisasi belanja yang sangat rendah, yaitu penyerapan untuk Belanja Beasiswa Pendidikan PNS hanya Rp10.000.000,00 atau 27,03% dari anggarannya sebesar Rp37.000.000,00.

Dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp588.254.398.560,17 realisasi tertinggi per rincian objek Belanja Barang adalah untuk membayar tenaga non PNS melalui rekening Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp61.494.310.878,00, Belanja Jasa Premi Asuransi Rp43.394.308.646,00 dan Belanja Pemeliharaan Rp29.842.003.612,00.

4.1.4.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp234.672.144,00 atau 46,93% dari anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,02% terdiri dari:

Tabel 4.18 Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	500.000.000,00	234.672.144,00	46,93	308.874.114,00
- JT s.d Maret		129.039.157,00		161.298.946,00
- JT s.d September		105.632.987,00		147.575.168,00
Bunga Utang Pinjaman	500.000.000,00	234.672.144,00	46,93	308.874.114,00

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp308.874.114,00 terdiri dari jatuh tempo bulan Maret 2022 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp129.039.157,00 jatuh tempo bulan September 2022 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp105.632.987,00.

Melihat masih banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap, Pemerintah Daerah

Kota Cimahi akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga karena dengan utang yang sudah diketahui, baik secara nominal pokok maupun persentase bunga tahunan, seharusnya perhitungan proyeksi Belanja Bunga dapat lebih tepat. Dengan perhitungan yang lebih baik, maka kelebihan anggaran dapat diminimalisir dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.4.4. Belanja Subsidi

Tidak ada Realisasi Belanja Subsidi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 4.19 Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Subsidi		-	-	410.574.000,00
Jumlah		-	-	410.574.000,00

4.1.4.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi, dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.388.772.249,00 atau 97,83% dari anggarannya sebesar Rp40.262.512.250,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 3,05% terdiri dari:

Tabel 4.20 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.100.000.000,00	1.064.246.600,00	96,75	998.887.000,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	23.093.750.000,00	22.767.683.364,00	98,59	16.453.828.750,00
Belanja Hibah Dana BOS	14.522.435.800,00	14.010.515.835,00	96,47	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450,00	1.546.326.450,00	100	1.546.326.450,00
Jumlah	40.262.512.250,00	39.388.772.249,00	97,83	18.999.042.200,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dan juga diberikan kepada 4 (empat) aset milik Pemerintah Pusat untuk Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Gedung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi diberikan kepada 7 (tujuh) Badan/Lembaga/Organisasi yang ada di Kota Cimahi. Selanjutnya, dalam belanja hibah juga terdapat sub rincian objek belanja hibah Dana BOS yang diterima oleh sekolah Swasta secara langsung dari KPPN. Selain itu, terdapat pula

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diberikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Rincian Penerima Hibah dapat dilihat di **lampiran 1**.

4.1.4.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.133.871.600,00 atau 74,58% dari anggarannya sebesar Rp4.202.251.600,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,24% terdiri dari:

Tabel 4.21 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.202.251.600,00	3.133.871.600,00	74,58	1.369.990.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			-	1.201.540.000,00
Jumlah	4.202.251.600,00	3.133.871.600,00	74,58	2.571.530.000,00

Belanja Bantuan Sosial digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jenjang SD dan SMP tahun anggaran 2022.

Rincian Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat di **Lampiran 1**.

4.1.5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.570.042.644,00 atau mencapai 77,79% dari anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp104.854.879.110,00 terdiri dari:

Tabel 4.22 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tanah	7.039.408.898,00	171.269.485,00	2,43	1.924.413.918,00
Belanja Peralatan dan Mesin	26.716.547.465,00	22.831.957.980,00	85,46	40.367.666.054,00
Belanja Gedung dan Bangunan	51.020.087.498,00	40.246.977.335,00	78,88	92.323.402.639,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.398.135.549,00	16.911.640.321,00	91,92	109.597.606.795,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.680.699.700,00	1.408.197.523,00	83,79	2.847.475.380,00
Jumlah	104.854.879.110,00	81.570.042.644,00	77,79	247.060.564.786,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara nominal turun sebesar Rp165.490.522.142,00 dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021. Namun, secara presentase realiasi belanja modal tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 19,76% dibandingkan Tahun 2021. Dari rincian belanja modal di atas dapat dilihat realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Cimahi masih sangat rendah dan terlihat signifikan pada Belanja Tanah yang penyerapannya hanya 2,43% dari nilai belanja yang dianggarkan sebesar Rp7.039.408.898,00.

Dari Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp81.570.042.644,00 realisasi tertinggi per rincian objek belanja modal adalah untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp16.205.049.009,00 yaitu untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp14.099.494.597,00 yaitu untuk penyelesaian pekerjaan interior Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi dan Belanja Modal Jalan Kota Rp10.711.443.578,00.

4.1.6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 sebesar Rp6.050.171.068,00 atau mencapai 21,69% dari anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp27.890.907.700,00.

Tabel 4.23 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tak Terduga	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	12.793.426.443,00
Jumlah	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	12.793.426.443,00

Belanja tidak terduga sebesar Rp6.050.171.068,00 merupakan Belanja yang digunakan untuk antisipasi dan percepatan penuntasan pandemi Covid-19 sebesar Rp515.367.281,00 pada RSUD Cibabat, Belanja Santunan Kematian sebesar Rp576.000.000,00 dan Belanja Bantuan BLT BBM sebesar Rp4.055.850.000,00 pada Dinas Sosial, serta Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2015-2021 Rp902.953.787,00. Rincian Penggunaan BTT untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Total (Rp)
1	RSU Daerah Cibabat	515.367.281,00
2	Dinas Sosial	4.631.850.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	902.953.787,00
	Total	6.050.171.068,00

4.1.7. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran belanja Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00. Transfer tersebut merupakan bantuan keuangan untuk penanggulangan gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Bantuan Keuangan tersebut berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8479/SJ perihal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana.

4.1.8. Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2022 dianggarkan terjadi defisit sebesar Rp(296.235.556.284,00) sedangkan realisasinya mengalami defisit sebesar Rp(46.634.035.168,64).

Tabel 4.25 Defisit Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Surplus/(Defisit)	-296.235.556.284,00	-46.634.035.168,64	15,74	38.622.855.654,11

Defisit anggaran sebesar Rp(46.634.035.168,64) terjadi karena pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.331.038.275.111,53 tidak dapat menutupi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.377.572.310.280,17 sehingga defisit Rp(46.634.035.168,64) di tutupi oleh penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

4.1.9. Pembiayaan

4.1.9.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp308.665.364.620,64 yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2021 Rp308.665.364.620,64 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp308.665.364.621,00.

Tabel 4.26 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penggunaan SiLPA	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	270.898.017.186,53
Penerimaan Dana Talangan RSUD dari Bank Mandiri	-	-	-	-
Jumlah	308.665.364.620,64	308.665.364.620,64	100,00	270.898.017.186,53

4.1.9.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.633.131.310,00 atau 85,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.429.808.337,00

Tabel 4.27 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penyertaan Modal Pemda	10.000.000.000,00	9.777.623.090,00	97,78	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
Jumlah	12.429.808.337,00	10.633.131.310,00	85,55	855.508.220,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp10.633.131.310,00 yaitu terdiri dari penyertaan modal untuk pembelian 7.215,958 lembar saham Seri B pada Bank BJB sebesar Rp9.777.623.090,00 berdasarkan kepada Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB dan pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007.

4.1.10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA TA 2022 yaitu sebesar Rp 251.398.198.142,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.28 Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Realisasi Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	394.676.719.570,53	405.104.991.553,11
Pendapatan Transfer	936.361.555.541,00	1.053.096.467.719,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	61.934.101.231,00
Jumlah Pendapatan (a)	1.331.038.275.111,53	1.520.135.560.503,11
Realisasi Belanja		
Belanja Operasi	1.289.952.096.568,17	1.221.658.713.620,00
Belanja Modal	81.570.042.644,00	247.060.564.786,00
Belanja Tak Terduga	6.050.171.068,00	12.793.426.443,00
Jumlah Belanja (b)	1.377.572.310.280,17	1.481.512.704.849,00
Transfer		
Bantuan Keuangan	100.000.000,00	-
Jumlah Transfer (c)	100.000.000,00	-
Surplus / (Defisit) (I)	(46.634.035.168,64)	38.622.855.654,11
Realisasi Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	308.665.364.620,64	270.898.017.186,53
Pengeluaran Pembiayaan	10.633.131.310,00	855.508.220,00
Pembiayaan Netto (II)	298.032.233.310,64	270.042.508.966,53
SiLPA Tahun 2022 (I) + (II)	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel 4.29 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022

	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	308.665.364.620,64	270.898.017.186,53
Subtotal	-	274.203.491,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
Subtotal	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	(274.203.491,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	233.273.390.848,00	261.726.825.185,51

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut terdiri dari:

Tabel 4.31 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

No	No. Rek.	Bank	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	0230270000025	BJB	233.273.390.848,00	240.615.550.149,00
2	00091.01.30.000230.1	BTN	-	13.194.835.071,97
3	7233333551	BSM	-	7.303.169.762,23
4	7233333446	BSM	-	613.270.202,31
Jumlah			233.273.390.848,00	261.726.825.185,51

Dari Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Kas di Kas Daerah pada Bank BJB merupakan rekening yang dikelola oleh BUD yang digunakan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Saldo Kas Daerah pada Bank BJB adalah sebesar Rp233.273.390.848,00 . Di dalam Kas di Kas daerah tersebut terdapat koreksi sebesar 0,14 karena pembulatan Transaksi di Bank Jabar Banten;

- b. Kas pada Bank BTN rekening Giro Nomor: 0009101300002301 digunakan sebagai rekening penerimaan pajak ditutup pada Tahun 2022;
- c. Kas pada Bank Syariah Mandiri rekening Tabungan Mudharabah Nomor: 7233333551 ditutup pada Tahun 2022;
- d. Kas pada Bank Syariah Mandiri rekening Giro Wadiah Nomor: 7233333446 ditutup pada Tahun 2022;
- e. Pemerintah Kota Cimahi tidak mengeluarkan bilyet giro untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah kepada rekening pihak yang menerima, tetapi menggunakan SP2D sebagai alat pembayaran;
- f. Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB terdapat juga sisa Dana Transfer (*Earmark*) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.503.181.513,00 yang terdiri dari :

1. Tunjangan Profesi Guru	307.745.200,00
2. Tambahan Penghasilan Guru	451.400.000,00
3. Bantuan Operasional Kesehatan	3.911.871.802,00
4. Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.852.761.843,00
5. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	84.530.000,00
6. Administrasi Kependudukan	1.333.000,00
7. Dana Pelayanan Kepariwisata	4.972.500,00
8. Dana Fasilitas Penanaman Modal	56.306.724,00
9. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.995.500,00
10. DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	31.417.355,00
11. DAK Fisik - Pelayanan Kesehatan Dasar	1.961.332.675,00
11. DAK Fisik - Pelayanan Kefarmasian Dan Bahan Habis Pakai	26.800.600,00
12. DAK Fisik Bidang Jalan	14.818.591,00
13. DAK Fisik Bidang Irigasi	3.622.583,00
14. DID Tahun Anggaran 2021	468.720.280,00
15. DID Tahun Anggaran 2022	1.315.552.860,00
JUMLAH	10.503.181.513,00

4.3.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo seluruh kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	360.000,00	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	250.000,00	-
Dinas Pendidikan		6.050,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan		140.400,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	155.045.636,00	115.661.521,00
Sekretariat Daerah		26.204.303,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6.812.150,52
Kecamatan Cimahi Utara		98.606,00
Jumlah	155.655.636,00	148.923.030,52

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Rp360.000,00 merupakan pengembalian kelebihan bayar belanja sewa repeater. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat kas tunai Rp250.000,00 di bendahara pengeluaran yang merupakan sisa uang yang dikembalikan di Tahun 2023. Terdapat kas di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp155.045.636,00 merupakan pengembalian dana hibah KONI yang dikembalikan di Tahun 2023.

4.3.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo seluruh kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	9.044,00
Dinas Lingkungan Hidup	800.000,00	650.000,00
Jumlah	800.000,00	659.044,00

Kas Bendahara Penerimaan Rp800.000,00 merupakan setoran Retribusi Persampahan yang ditransfer oleh Wajib Retribusi ke Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Bendahara Penerimaan tutup buku, sehingga tidak tersetorkan ke Kas Daerah.

4.3.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang berada di Bendahara BLUD Kota Cimahi yang terdiri dari RSUD Cibabat, 13 (tiga belas) UPT Puskesmas, dan UPT Air Minum.

Tabel 4.34 Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
BLUD RSUD Cibabat	11.048.201.198,00	40.989.619.473,61
BLUD Air Minum	1.586.321.584,00	861.472.095,00
BLUD Puskesmas	4.980.283.810,00	3.174.447.354,00
Jumlah	17.614.806.592,00	45.025.538.922,61

- 1) Kas di RSUD Cibabat merupakan saldo kas di rekening RSUD Cibabat yang merupakan hasil dari kegiatan operasional RSUD dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional RSUD Cibabat, dan Saldo Giro Rupiah IDR-Gov. Saldo Kas di RSUD Cibabat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar:

Tabel 4.35 Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kas di RSUD Cibabat	11.048.201.198,00	40.989.619.473,61

Saldo Kas di RSUD Cibabat yang berada pada rekening nomor 00230030000609 a.n. RSUD Cibabat pada Bank Jabar Banten berasal dari pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp11.048.201.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.36 Rincian Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2022

Penerimaan:		
Pendapatan Operasional TA 2022	136.867.524.937,00	
Jumlah (a)	136.867.524.937,00	
Belanja:		
TA 2022	166.808.943.213,00	
Ambang Batas TA 2022	-	
Jumlah (b)		166.808.943.213,00
Sisa Kas (c=a-b)		(29.941.418.276,00)
Saldo Tahun Lalu (d)		40.989.619.473,61
Pembualatan (e)		0,39
Total Kas di RSUD Cibabat TA 2022 (f=c+d+e)		11.048.201.198,00

- 2) Kas di BLUD Air Minum merupakan saldo kas di rekening BLUD Air Minum yang merupakan hasil dari kegiatan operasional BLUD Air Minum dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD Air Minum. Saldo Kas di BLUD Air Minum per 31 Desember 2022 adalah sebesar:

Tabel 4.37 Saldo Kas di BLUD Air Minum Tahun Anggaran 2022

Penerimaan:		
Pendapatan Operasional TA 2022	5.361.425.831,00	
Jumlah (a)	5.361.425.831,00	
Belanja:		
TA 2022	4.636.576.342,00	
Jumlah (b)		4.636.576.342,00
Sisa Kas (c=a-b)		724.849.489,00
Saldo Tahun Lalu (d)		861.472.095,00
Total Kas di BLUD Air Minum TA 2022 (e=c+d)		1.586.321.584,00

- 3) Kas di Bendahara BLUD Puskesmas merupakan saldo kas di rekening FKTP (Puskesmas) Kota Cimahi pada Bank BJB yang berasal dari Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai:

Tabel 4.38 Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	4.980.283.810,00	3.174.447.354,00

Tabel 4.39 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2022

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2022	2021
1	0059469843001	Bend Dana Kapitasi Cibeureum	653.831.868,00	328.239.378,00
2	0059470388001	Bend Dana Kapitasi Leuwigajah	219.198.674,00	92.173.325,00
3	0059474278001	Bend Dana Kapitasi Cigugur	405.174.115,00	256.566.295,00
4	0059475851001	Bend Dana Kapitasi Pasirkaliki	97.886.488,00	83.242.045,00
5	0059478494001	Bend Dana Kapitasi Cipageran	649.769.135,00	439.412.244,00
6	0059478117001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Tengah	549.321.706,00	359.767.797,00
7	0059478249001	Bend Dana Kapitasi Padasuka	562.613.342,00	422.289.259,00
8	0059479938001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Utara	777.410.861,00	389.933.703,00
9	0059490974001	Bend Dana Kapitasi Cibeber	286.324.090,00	237.303.220,00
10	0059535862001	Bend Dana Kapitasi Melong Tengah	42.832.928,00	101.143.217,00
11	0059547607001	Bend Dana Kapitasi Citeureup	246.122.104,00	99.553.496,00
12	0059547879001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Selatan	140.373.172,00	177.893.032,00
13	0059574868001	Bend Dana Kapitasi Melong Asih	349.425.327,00	186.930.343,00
Jumlah			4.980.283.810,00	3.174.447.354,00

4.3.5. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Sisa dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 4.40 Saldo Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kas Dana BOS	353.545.066,00	1.763.418.438,00

Rincian sebagai berikut :

Pendapatan (a)

Penerimaan Dana Bos TA 2022	52.237.540.478,00	55.161.824.000,00

Belanja (b)

Pengeluaran Dana Bos TA 2022	53.647.413.850,00	55.889.301.216,00
Pengembalian Dana BOS		
Sisa Kas (c=a-b)	(1.409.873.372,00)	(727.477.216,00)
Pajak Yang belum Di setor (d)		
Pajak Yang Sudah Di setor (e)		
Saldo Tahun Lalu(f)	1.763.418.438,00	2.490.895.654,00
Total Kas Dana BOS TA 2022 (g=d+e+f)	353.545.066,00	1.763.418.438,00

4.3.6. Kas Lainnya

Kas Lainnya terdiri dari kas pada Rekening UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kas pada Rekening UPTD Rusunawa penerimaannya berasal dari jaminan dan/atau bunga uang keluar atas pencairan penghuni yang telah keluar. Selain Kas pada Rekening UPTD Rusunawa, juga terdapat keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2022 dari 3 Sekolah Dasar Negeri.

Tabel 4.41 Saldo Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022

No.	OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	579.827.960,00	542.857.960,00
2	Setoran PFK - Dana Bos	125.000,00	47.935.751,00
	Jumlah	579.952.960,00	590.793.711,00

4.3.7. Piutang Pajak

Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas pajak daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

Tabel 4.42 Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang Pajak	134.678.166.819,00	128.892.710.993,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.678.166.819,00 tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari:

Tabel 4.43 Rincian Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Pajak	2022	2021
1	Pajak Hotel	15.284.880,00	19.580.880,00
2	Pajak Restoran	180.322.860,00	40.929.897,00
3	Pajak Reklame	934.057.835,00	916.986.235,00
4	Pajak Hiburan dan Tontonan	-	-
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	-

No.	Jenis Pajak	2022	2021
6	Pajak Parkir	290.800,00	433.000,00
7	Pajak Air Tanah	1.062.118.438,00	886.660.956,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	132.486.092.006,00	127.028.120.025,00
	Jumlah	134.678.166.819,00	128.892.710.993,00

Saldo piutang pajak sebesar Rp134.690.315.376,00 tersebut berasal dari mutasi piutang pajak selama tahun 2022 yang meliputi:

Tabel 4.44 Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	128.892.710.993,00
2	Penambahan:	
3	Penetapan SKPD tahun 2022	199.675.596.229,00
4	Jumlah Penambahan	<u>199.675.596.229,00</u>
5	Pengurangan:	
6	Pembayaran tahun 2022	193.891.140.403,00
7	Jumlah Pengurangan	<u>193.890.140.403,00</u>
8	Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (8= 4+7)	134.678.166.819,00

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Dalam Saldo Awal Piutang Pajak Rp.128.892.710.993,00 terdapat piutang yang telah dihapuskan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 913/KEP.456-BAPPENDA/2021 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Kadaluwarsa untuk Masa Pajak Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2021 Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp91.036.314.611,00, namun terdapat penyesuaian pembayaran atas piutang yang dihapuskan sebesar Rp1.140.949.154,00 sehingga jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dihapuskan Tahun 1994 sampai dengan 2012 per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.895.365.475,00. Penambahan Piutang Pajak merupakan ketetapan Tahun 2022 ditambah dengan hasil pelayanan di tahun berjalan (penambahan luas bumi dan atau bangunan) dengan jumlah seluruh penambahan ketetapan sebesar Rp199.675.596.229,00.

Saldo piutang pajak tersebut belum termasuk potensi denda pajak yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu sebesar Rp55.102.346.013 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.45 Rincian Potensi Denda Pajak Tahun Anggaran 2022

Piutang	Potensi Denda Pajak per 31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Hotel	5.060.859,00
Pajak Restoran	31.647.086,00
Pajak Reklame	262.246.639,00
Pajak Parkir	84.384,00
Pajak Air Tanah	286.043.651,00
Pajak Bumi dan Bangunan	54.517.263.394,00
Jumlah	55.102.346.013,00

4.3.8. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah:

Tabel 4.46 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	58.882.194.046,77	46.745.285.110,18

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 besar (Rp58.882.194.046,77) dengan rincian:

Tabel 4.47 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2021 (Rp)
Pajak Hotel	1.471.488,00	97.904,40
Pajak Restoran	1.066.201,80	204.649,49
Pajak Reklame	186.457.470,50	157.981.948,00
Pajak Hiburan dan Tontonan	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-
Pajak Parkir	18.155,00	18.866,00
Pajak Air Tanah	271.420.814,06	206.535.379,83
Pajak Bumi dan Bangunan	58.421.759.917,41	46.380.446.362,46
Jumlah	58.882.194.046,77	46.745.285.110,18

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 3**.

4.3.9. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas retribusi daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi (WR). Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar:

Tabel 4.48 Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang Retribusi	3.105.262.342,00	2.271.651.667,00

Piutang retribusi tersebut terdiri dari:

Tabel 4.49 Rincian Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	108.286.824,00	105.001.074,00
2	Piutang retribusi Ijin Gangguan/Keramaian (HO)	51.898.211,00	51.898.211,00
3	Piutang retribusi Ijin Trayek	3.950.000,00	2.900.000,00
4	Piutang retribusi Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Piutang Retribusi UPTD Laboratorium	45.812.500,00	31.548.000,00

No.	Jenis Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Lingkungan		
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	84.531.525,00	86.411.700,00
7	Penyedia Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan	33.416.700,00	-
8	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.751.245.682,00	1.992.752.682,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	24.980.900,00	-
	Jumlah	3.105.262.342,00	2.271.651.667,00

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 4**.

Saldo piutang retribusi sebesar Rp3.105.262.342,00 tersebut berasal dari mutasi piutang retribusi selama Tahun 2022 yang meliputi:

Tabel 4.50 Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	2.271.651.667,00
2	Penambahan:	
3	Penetapan SKRD tahun 2022	6.429.159.811,00
4	Jumlah Penambahan	6.429.159.811,00
5	Pengurangan:	
6	Pembayaran tahun 2022	5.595.549.136,00
7	Jumlah Pengurangan	5.595.549.136,00
8	Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (8 = 4+7)	3.105.262.342,00

Rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 4.51 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Penambahan Piutang Tahun 2022	Pengurangan Piutang Tahun 2022	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	105.001.074,00	736.788.500,00	733.502.750,00	108.286.824,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	2.900.000,00	13.800.000,00	12.750.000,00	3.950.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00
5	Laboratorium Lingkungan	31.548.000,00	656.233.000,00	641.968.500,00	45.812.500,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	86.411.700,00	788.765.700,00	790.645.875,00	84.531.525,00
7	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan	-	33.416.700,00	-	33.416.700,00
8	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.992.752.682,00	3.704.924.850,00	2.946.431.850,00	2.751.245.682,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	495.231.061,00	470.250.161,00	24.980.900,00
	Jumlah	2.271.651.667,00	6.429.159.811,00	5.595.549.136,00	3.105.262.342,00

4.3.10. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan taksiran nilai Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Retribusi Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.365.899.654,50 dengan rincian:

Tabel 4.52 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	101.766.876,00	102.404.149,00
Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (IG)	51.898.211,00	51.898.211,00
Retribusi Izin Trayek(IT)	3.245.000,00	2.900.000,00
Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
Laboratorium Lingkungan	16.578.665,00	14.074.815,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	62.262.525,00	35.289.205,88
Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	9.495.912,25	-
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.117.014.375,25	1.303.245.519,50
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.498.090,00	-
Jumlah	2.365.899.654,50	1.510.951.900,38

Rincian dapat dilihat pada lampiran 4.

4.3.11. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Tidak ada Saldo Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.53 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	-	-

4.3.12. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas bagi hasil daerah yang dicatat berdasarkan jumlah nilai definitif yang menjadi bagian Kota Cimahi dan telah ditetapkan dengan peraturan atau surat keputusan tetapi masih ada hak yang masih harus diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.54 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang Bagi Hasil	7.704.535.252,00	9.794.305.571,00

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/Kep.114-BAPENDA/2023 Tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Belum Disalurkan Per 31 Desember 2022 adalah:

Tabel 4.55 Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Belum Disalurkan Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Bagi Hasil Pajak	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.317.152.540,00	2.624.406.060,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.204.696.200,00	1.467.319.800,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.530.273.536,00	2.696.305.912,00
4	Pajak Air Permukaan	12.737.150,00	24.964.600,00
5	Pajak Rokok	2.639.675.826,00	2.981.309.199,00
Jumlah		7.704.535.252,00	9.794.305.571,00

4.3.13. Belanja Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi yang dilakukan pada Tahun 2022 tetapi terdapat sisa periode/manfaat pada Tahun 2020. Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.56 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Belanja Dibayar di Muka	3.934.019.971,57	4.576.692.589,29

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.934.019.971,57 tersebut merupakan biaya dibayar di muka atas sewa penyimpanan barang, sewa gedung/kantor/tempat, sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa lahan, asuransi gedung, asuransi kerugian, asuransi kendaraan bermotor, dan belanja pemeliharaan server komputer. Rincian Biaya Dibayar di Muka dapat dilihat pada **lampiran 5**.

4.3.14. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset yang telah jatuh tempo sampai dengan Tahun 2022. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.57 Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp217.551.668,00 tersebut berasal dari mutasi selama Tahun 2022 yang meliputi:

Tabel 4.58 Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kerugian keuangan daerah	159.884.500,00	159.884.500,00
Kerugian kehilangan aset daerah	57.667.168,00	57.667.168,00
Kerugian -Kelebihan Pembayaran Ke Pihak Ketiga	-	-
Jumlah	217.551.668,00	217.551.668,00
Penerimaan pembayaran	-	-
Koreksi	-	-
Saldo Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00
Saldo Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :		
Bagian lancar	217.551.668,00	217.551.668,00
Bagian jangka panjang	-	-
Jumlah	217.551.668,00	217.551.668,00

Jangka waktu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang telah terlewati menyebabkan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Disisihkan yaitu sebesar Rp217.551.668,00

Tabel 4.59 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00

Rincian kasus tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **lampiran 6**.

4.3.15. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah.Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.60 Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang Lainnya	8.139.297.204,17	9.567.340.661,47

Saldo piutang lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 4.61 Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	5.903.205.836,00	6.662.518.251,00
2	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	0,00	197.129.997,09
3	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
4	Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	108.534.973,00	391.208.333,20
5	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga PUPR	64.547.257,60	396.455.379,55

No	Jenis Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
6	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga Disdik	15.532.585,63	89.463.875,63
7	Piutang BLUD Air Minum	1.819.279.600,00	1.582.507.300,00
8	Piutang BLUD Puskesmas	2.000.000,00	23.920.000,00
9	Piutang Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF)	2.059.426,94	-
	Jumlah	8.139.297.204,17	9.567.340.661,47

Dari rincian Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Piutang Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.903.205.836,00 merupakan hak penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD Cibabat terkait dengan penyediaan jasa kesehatan atas pelayanan kesehatan dari RSUD Cibabat (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7a**).
- b. Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.137.525,00 merupakan kekurangan setor atas kontribusi pengelolaan Pasar Antri Baru yang didasarkan atas perjanjian pengelolaan Pasar Antri Baru beserta fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah Nomor 180/09 Perj-/2004 dan telah mengalami perubahan melalui addendum pertama Nomor 180/18b-perj/2007 antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Cimahi Persada terdiri atas :

Tabel 4.62 Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru Tahun Anggaran 2022

Jenis Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang pajak parkir	26.480.000,00	26.480.000,00
Piutang retribusi pelayanan parkir	183.509.525,00	183.509.525,00
Piutang retribusi sub terminal	14.148.000,00	14.148.000,00
Jumlah	224.137.525,00	224.137.525,00

- c. Piutang atas Kontribusi Cimahi Mall, merupakan kontribusi dari Cimahi Mall selama Januari – Desember 2022 sebesar Rp108.534.973,00.
- d. Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR sebesar Rp64.547.257,60 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan Tahun 2022 pada DPUPR yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- e. Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK sebesar Rp15.532.585,63 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan Tahun 2022 pada DISDIK yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- f. Piutang BLUD Air Minum sebesar Rp1.819.279.600,00 merupakan Piutang Dari BLUD Air Minum yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7b**).
- g. Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp2.000.000,00 merupakan Pengakuan Piutang Dinkes atas Klaim BPJS PKM Cibeureum.
- h. Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.059.426,94 merupakan Piutang Jasa Giro yang berasal dari Remunerasi (Jasa Giro) TDF atas Dana Bagi Hasil Non Tunai yang terdapat pada Rekening TDF Pemerintah Daerah

Kota Cimahi dengan Nama **Rek Lain BI TDF TKD Kota Cimahi Nomor 519000329980** di Bank Indonesia.

4.3.16. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.63 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022

Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	70.642.371,48	671.030.309,52
Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	0,00	197.129.997,09
Piutang atas pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	61.662.335,00	302.552.832,00
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR	322.736,29	1.982.276,89
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK	77.662,92	447.319,38
Piutang BLUD Air Minum	1.140.593.793,00	901.445.411,00
Piutang BLUD Puskesmas	10.000,00	119.600,00
Jumlah	1.497.446.423,69	2.298.845.270,88

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengatur bahwa penyisihan Piutang Lainnya dihitung berdasarkan progress dari keluarnya surat tagihan.

4.3.17. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.64 Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021(Rp)
Persediaan	28.649.727.503,26	32.019.657.874,93

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.649.727.503,26 tersebut terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan baku bangunan, alat KB, suku cadang dan bahan material. Saldo persediaan tersebut diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir, kecuali untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Cibabat telah disajikan dengan metode FIFO. Saldo persediaan

dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.649.727.503,26 tersebut berada pada:

Tabel 4.65 Rincian Saldo Persediaan OPD Tahun Anggaran 2022

No	OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	61.477.416,00	187.389.597,00
2	Dinas Kesehatan	9.192.568.546,29	9.548.695.953,58
3	RSUD Cibabat	10.327.639.662,80	11.721.606.703,80
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.065.469.000,00	3.475.067.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	286.943.083,00	236.724.165,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	2.744.260,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	343.162.536,00	735.731.307,00
8	Dinas Sosial	-	271.174.665,56
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	172.781.116,00	-
11	Dinas Pangan Dan Pertanian	664.630.862,00	722.590.459,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	198.844.440,00	493.088.160,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	779.414.335,89	1.261.693.160,89
14	Dinas Perhubungan	2.122.443.697,28	2.687.119.484,10
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan Dan Perpustakaan	-	847.400,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.540.000,00	152.798.890,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	59.927.875,00	-
19	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	-	82.752.900,00
20	Sekretariat Daerah	280.662.637,00	331.766.639,00
21	Sekretariat DPRD	61.703.996,00	41.034.950,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.310.000,00	16.759.500,00
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	330.000,00	45.023.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	11.500.000,00	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
26	Inspektorat Kota	1.378.300,00	4.532.480,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	-	-
28	Kecamatan Cimahi Tengah	-	-
29	Kecamatan Cimahi Selatan	-	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	-	517.200,00
	JUMLAH	28.649.727.503,26	32.019.657.874,93

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Rincian Persediaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan jenis Persediaannya, sebagai berikut:

Tabel 4.66 Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2022

No	Persediaan	2022	2021
1	Alat Listrik	1.823.743.448,00	2.345.204.989,90
2	Alat Tulis Kantor	186.270.019,03	971.560.304,89
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	550.917.816,70	-
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	250.741.394,50	184.960.760,00
5	Bahan Cetak	1.579.355.488,28	4.821.711.600,56
6	Bahan Kimia	4.743.199.623,00	5.697.930.807,48
7	Bahan Komputer	532.679.580,01	-
8	Bahan Lainnya	3.871.063.767,69	-
9	Bahan/Bibit Tanaman	9.922.000,00	72.808.794,00
10	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	59.640.000,00	96.720.000,00
11	Benda Pos	7.223.000,00	5.850.000,00
12	Kertas dan Cover	94.714.988,04	-
13	Natura	86.690.176,02	232.240.800,40
14	Obat	9.388.799.358,49	14.370.265.125,60
15	Obat-obatan Lainnya	10.276.238,00	-
16	Pakan	1.578.000,00	-
17	Perabot Kantor	289.396.841,50	1.150.994.322,00
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	969.981.670,00	-
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.065.549.000,00	1.904.711.170,10
20	Suvenir/Cendera Mata	127.985.094,00	164.699.200,00
	JUMLAH	28.649.727.503,26	32.019.657.874,93

Dalam persediaan bibit ternak, terdapat benih pemberian yang dibudidayakan. Hasil dari budidaya benih tersebut dicatat terpisah oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat berupa alat-alat untuk perbaikan jalan masyarakat, logistik bencana dan rambu evakuasi, alat kontrasepsi dan beras. Adapun Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya antara lain bahan bangunan untuk rehabilitasi bangunan instansi vertikal seperti, Kejaksaan Negeri Cimahi, Pengadilan Negeri, Polres Cimahi, dan Gedung Pusat-Pusat Pendidikan Militer.

4.3.18. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok dengan jangka waktu maksimal pinjaman sebesar tiga tahun. Dana bergulir dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan membentuk sebuah Tim Dana Bergulir. Saldo dana

bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.67 Saldo Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dana Bergulir	52.770.586,00	50.591.536,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.770.586,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah pokok awal dana bergulir ditambah dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir di masyarakat yang diragukan akan tertagih. Berdasarkan Laporan Tim Pengelolaan Pengawasan dan Monitoring Dana Bergulir dan laporan dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pokok awal dana bergulir seluruhnya adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 dan telah disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp1.087.500.000,00 yang disalurkan berdasarkan dua cara:
 - 1) Penyaluran dengan nilai Rp125.000.000,00 disalurkan kepada kelompok usaha. Pada Tahap I diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok usaha dengan dengan nilai penyaluran sebesar Rp100.500.000,00 dengan nilai pengembalian (*revolving*) Tahap I sebesar Rp31.500.000,00. Sisa penyaluran dana Tahap I sebesar Rp24.500.000,00 dan pengembalian dari kelompok usaha sebesar Rp31.500.000,00 disalurkan kembali pada Tahap II kepada 4 (empat) kelompok usaha.
 - 2) Perjanjian Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor: 180/35.Perj/2009.407/CMI.PERJ/2009 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) koperasi/Baitul Mal Watamwil (BMT) sebesar Rp575.000.000,00 dan usaha mikro sebesar Rp387.500.000,00 yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan di Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Perkembangan pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.68 Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)
Pokok dana bergulir	1.125.000.000,00
Penyaluran dana bergulir	(1.087.500.000,00)
Saldo dana bergulir	37.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman	774.044.114,00
Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(768.908.592,00)
Pokok dana bergulir yang ada dalam Tim Dana Bergulir	42.635.522,00
Pendapatan bunga dan jasa giro	156.018.715,00
Penyetoran pendapatan ke kas daerah	(142.637.019,00)
Biaya administrasi	(3.246.632,00)
Jumlah	52.770.586,00

Terdapat penyetoran pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.500.002,00 dan

bunga pinjaman sebesar Rp389.998,00 yang dicatat sebagai penerimaan kembali investasi yang terdiri dari:

Tabel 4.69 Penyetoran Pokok Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tanggal	Nilai
1	Setoran A.n. Eni Rohaeni	7-Sep-22	450.000,00
2	Setoran A.n. Eni Rohaeni	28-Nov-22	300.000,00
3	Setoran A.n. Sukandar	7-Sep-22	600.000,00
4	Setoran A.n. Sukandar	28-Nov-22	150.002,00
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro		1.500.002,00
	Jumlah Setoran Pokok Koperasi		-
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro dan Koperasi		1.500.002,00
1	Setoran A.n. Sukandar	28-Nov-22	149.998,00
2	Setoran A.n. Ate Rahmat	1-Dec-22	240.000,00
	Jumlah Setoran Bunga Pinjaman Usaha Mikro		389.998,00
	Jumlah Setoran Pokok dan Bunga Pinjaman		1.890.000,00

Saldo dana bergulir sebesar Rp52.770.586,00 seluruhnya berada pada rekening Bank BJB nomor 0008291470001 atas nama Tim Pengelola Dana Bergulir.

- c. Sisa dana bergulir yang masih ada di masyarakat adalah sebesar Rp313.415.886,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.70 Rincian Sisa Dana Bergulir Tahun Anggaran 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Bergulir yang disalurkan	1.087.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman s.d 2021	(772.584.112,00)
Sisa Dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2021	314.915.888,00
Pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2022	(1.500.002,00)
Sisa dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2022	313.415.886,00

Seluruh sisa dana di masyarakat tersebut termasuk kategori macet sehingga keseluruhan nilai tersebut dilaporkan sebagai dana bergulir yang diragukan tertagih. Kemacetan tersebut dikarenakan:

- 1) Usaha yang dijalankan tidak dapat bersaing, pailit dan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- 2) Penerima dana bergulir meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dan alamat baru tidak dapat diketahui.

Terhadap dana yang masih berada di masyarakat tersebut, tetap dilakukan upaya penagihan dan sebagian dari penerima manfaat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman.

- d. Atas dasar kondisi tersebut, untuk nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah hanya dana yang ada pada rekening Tim Pengelola Dana Bergulir saja yaitu sebesar Rp52.770.586,00

4.3.19. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.71 Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.105.263.630,50	68.493.992.363,50

Penyertaan modal tersebut terdiri dari:

Tabel 4.72 Rincian Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2022(Rp)	2021 (Rp)
1	PT Bank BJB Tbk	35.777.623.090,00	26.000.000.000,00
2	PD Jati Mandiri	42.327.640.540,50	42.493.992.363,50
	Jumlah	78.105.263.630,50	68.493.992.363,50

Dari tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank BJB mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kepemilikan saham Pemerintah Kota Cimahi setelah IPO sebesar 1.07% dengan jumlah lembar saham 104.000.000. Penyertaan modal pada PT Bank BJB Tbk per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.000.000.000,00 merupakan nilai berdasarkan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi kurang dari 20%. Data realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73 Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk

Tahun	Nilai Penyertaan (Rp)	Saldo (Rp)
2002	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2003	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2004	5.000.000.000,00	11.000.000.000,00
2005	5.000.000.000,00	16.000.000.000,00
2006	2.500.000.000,00	18.500.000.000,00
2007	2.500.000.000,00	21.000.000.000,00
2008	2.500.000.000,00	23.500.000.000,00
2009	2.500.000.000,00	26.000.000.000,00
2022	9.777.623.090,00	35.777.623.090,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Barat dan Banten, Pemerintah Kota Cimahi pada

tanggal 9 Maret 2022 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 7.215.958 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.355,00 senilai Rp9.777.623.090,00,-, dengan penyertaan modal tersebut jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah 104.000.000 Lembar Saham Seri A dan 7.215.958 Lembar Saham Seri B.

- b. Penyertaan modal pada PD Jati Mandiri per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.327.640.540,50 merupakan nilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi lebih dari 50%.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi ke PD Jati Mandiri sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD Jati Mandiri adalah sebesar Rp51.351.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.74 Rincian Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri

No	TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
1	2006	27.000.000.000,00
2	2007	15.000.000.000,00
3	2010	2.800.000.000,00
4	2011	4.000.000.000,00
5	2013	1.551.000.000,00
6	2014	1.000.000.000,00
JUMLAH		51.351.000.000,00

Sedangkan saldo rugi sampai dengan 2022 adalah sebesar Rp9.023.359.459,50 dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

Tabel 4.75 Rincian Sisa Modal yang Disertakan pada PD Jati Mandiri

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	2006	PD Jati Mandiri	27.000.000.000,00	.	27.000.000.000,00
2	2007	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(83.543.057,00)	41.916.456.943,00
3	2008	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(303.940.227,75)	41.696.059.772,25
4	2009	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	5.848.661.350,15	47.848.661.350,15
5	2010	PD Jati Mandiri	44.800.000.000,00	4.198.313.359,98	48.998.313.359,98
6	2011	PD Jati Mandiri	48.800.000.000,00	1.825.475.045,52	50.625.475.045,52
7	2012	PD Jati Mandiri	48.800.000.000,00	(741.246.025,00)	48.058.753.975,00
8	2013	PD Jati Mandiri	50.351.000.000,00	(1.334.312.162,00)	49.016.687.838,00
9	2014	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(2.675.227.439,00)	48.675.772.561,00
10	2015	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(5.036.957.720,00)	46.314.042.280,00
11	2016	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(6.305.696.640,00)	45.045.303.360,00
12	2017	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(7.894.853.454,00)	43.456.146.546,00

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
13	2018	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.479.403.846,00)	42.871.596.154,00
14	2019	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.524.303.990,50)	42.826.696.009,50
15	2020	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.690.655.813,50)	42.660.344.186,50
16	2021	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(8.857.007.636,50)	42.493.992.363,50
17	2022	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(9.023.359.459,50)	42.327.640.540,50

Saldo Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri tersebut didasarkan laporan keuangan PD Jati Mandiri *audited* dan *unaudited*.

Perlu disampaikan bahwa kondisi PD Jati Mandiri Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) PD Jati Mandiri secara operasional telah berhenti disebabkan tidak memiliki modal usaha lagi akibat kerugian terus menerus.
- 2) Sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821/Kep.336.Admrek/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Periode 2013-2017 disebutkan bahwa Direksi PD Jati Mandiri selesai per tanggal 16 Agustus 2017.
- 3) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.276.Admrek/2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berakhir pada 22 Juli 2017.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat telah berupaya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah berpengalaman untuk menemukan solusi penyelesaian masalah perusahaan daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Melakukan upaya fasilitasi penyusunan kajian mengenai PD Jati Mandiri ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Melakukan Upaya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penarikan Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri.
- 6) Mengajukan Permohonan untuk melakukan audit PD Jati Mandiri ke BPKP Perwakilan Jawa Barat namun ditolak melalui Surat BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor S.4331/PW10/5/2018 tanggal 8 Desember 2017.

- 7) Melakukan permohonan untuk melakukan audit PD Jati Mandiri ke KAP Koesbandiah Beddy Samsi dan Setiasih namun ditolak karena sampai dengan Tahun 2017 PD Jati Mandiri sampai dengan 2016 telah diaudit oleh KAP lain.
- 8) Mengeluarkan Surat Wali Kota Cimahi Nomor 539/5105/admrek tentang Penghentian Aktivitas dan Permohonan Dokumen Pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri termasuk Laporan Keuangan PD Jati Mandiri sebagai bahan audit.
- 9) Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengembalian aset PD Jati Mandiri ke Kota Cimahi.
- 10) Melakukan pembahasan permasalahan hukum terkait PD Jati Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga legal opinion tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PD Jati Mandiri.
- 11) Melakukan Kajian terhadap Aspek Operasional, Aspek Keuangan dan Aspek Ketaatan terhadap Regulasi PD Jati Mandiri oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan.
- 12) Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah PD Jati Mandiri.
- 13) Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah PD Jati Mandiri bersama DPRD Kota Cimahi.

Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2022 *unaudited* adalah sebagai berikut: (rincian selengkapnya pada **lampiran 9**)

Tabel 4.76 Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2022 *Unaudited*

Laporan Rugi Laba Tahun 2022	
Pendapatan	-
Belanja	(166.351.823,00)
Rugi Tahun 2021	(166.351.823,00)
Neraca Tahun 2022	
Aset	46.962.881.853,00
Utang	4.635.241.312,50
Ekuitas	42.327.640.540,50

Dalam Aset senilai Rp46.962.881.853,00 terdapat Tanah senilai Rp38.773.988.854,00 yang masih dalam sengketa perdata, dengan uraian sebagai berikut :

Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum antara Awong Hidjaja (Direktur Utama PT Adi Darma Bumi Indonesia) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail dkk

- 1) Perkara pada Tingkat Pertama No. 93/G/2011/PTUN-BDG, dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 2) Perkara pada Tingkat Banding No. 134/B/2012/PT.TUN.JKT dimenangkan oleh PD Jati Mandiri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Idris Ismail dkk;

- 3) Perkara pada Tingkat Kasasi Nomor 120 K/TUN/2013 dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 4) Perkara Pada Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 5) Namun berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB Jo. Nomor : 76/Pdt.G/2004 PN.BB Jo. Nomor: 372/Pdt/2006/Pt.2006/PT.Bdg Jo. Nomor: 1686 K/ Pdt/2007. Tentang “NON EKSEKUTABEL ATAU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI”. Maka Tanah tersebut kembali menjadi milik PD. Jati Mandiri di karenakan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 yang dimenangkan oleh Awong Hidjaja itu sebatas membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (sisi administrasi), bukan membatalkan kepemilikan karena hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 6) Berdasarkan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 1 Juli 2021 dan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 716/Pdt/2022/PT.BDG tanggal 24 Januari 2023 memutuskan kembali memenangkan Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail sebagai pemilik Tanah Cibereum.

4.3.20. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi dan pelayanan masyarakat. Saldo aset Tetap milik Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

4.77 Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	1.022.360.336.284,00	1.056.705.806.799,00
2	Peralatan dan Mesin	671.637.270.027,82	694.191.726.346,98
3	Gedung dan Bangunan	807.092.567.588,52	772.624.864.228,52
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	806.294.757.832,59	826.964.855.561,52
5	Aset Tetap Lainnya	71.698.455.667,47	70.405.620.977,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	229.627.190.875,36	211.996.377.038,36
7	Akumulasi Penyusutan	(1.237.866.506.093,70)	(1.231.876.277.638,95)
	Jumlah	2.370.844.072.182,06	2.401.012.973.312,90

Rincian aset tetap dapat dilihat pada **lampiran 10**. Atas posisi aset tetap per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Mutasi aset tetap pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.78 Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp.)	Penambahan Tahun 2022 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2022 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)
Tanah	1.056.705.806.799,00	1.619.269.485,00	35.964.740.000,00	1.022.360.336.284,00
Peralatan dan Mesin	694.191.726.346,98	44.010.210.595,48	66.564.666.914,64	671.637.270.027,82
Gedung dan Bangunan	772.624.864.228,52	60.169.479.727,00	25.701.776.367,00	807.092.567.588,52
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	826.964.855.561,52	25.662.727.129,00	46.332.824.857,93	806.294.757.832,59
Aset Tetap Lainnya	70.405.620.977,47	2.671.657.534,62	1.378.822.844,62	71.698.455.667,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.996.377.038,36	21.720.291.975,00	4.089.478.138,00	229.627.190.875,36
JUMLAH	3.632.889.250.951,85	155.853.636.446,10	180.032.309.122,19	3.608.710.578.275,76

Dari tabel mutasi aset tetap di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Penambahan aset tetap selama tahun 2022 sebesar Rp155.853.636.446,10 dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp81.570.042.644,00 (termasuk Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.108.122.367,00 **(Lampiran 11a)**)
 - b) Reklas antar KIB sebesar Rp24.012.478.311,00
 - c) Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.947.933.718,00
 - d) Reklas dari belanja pemeliharaan Rp49.906.680,00
 - e) Reklas dari belanja persediaan Rp 4.934.000,00
 - f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp25.192.074.466,10
 - g) Hibah sebesar Rp2.040.350.399,00
 - h) BTT sebesar Rp 286.036.036,00
 - i) Koreksi sebesar Rp17.749.880.192,00
- 2) Pengurangan aset tetap selama tahun 2022 sebesar Rp180.032.309.122,19 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Aset yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp697.642.113,98
 - b) Reklas Antar KIB sebesar Rp24.012.478.311,00
 - c) Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp349.131.313,00

- d) Reklas ke pemeliharaan sebesar Rp361.638.949,00
- e) Reklas ke persediaan sebesar Rp223.914.560,00
- f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp 25.192.074.466,10
- g) Mutasi ke Aset Lain-lain Rp80.166.941.741,93
- h) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp46.416.695.978,18
- i) Koreksi sebesar Rp2.611.791.690,00

Tabel 4.79 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

Penambahan TA 2022	Belanja Modal	Reklas Antar KIB	Reklas dari Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pemeliharaan	Reklas dari Belanja Persediaan
Tanah	171.269.485,00	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	22.831.957.980,00	604.136.921,00	70.441.870,00	-	4.934.000,00
Gedung dan Bangunan	40.246.977.335,00	2.495.102.275,00	2.699.168.918,00	49.906.680,00	-
Jalan, irigasi & Jaringan	16.911.640.321,00	384.571.734,00	974.856.136,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	1.408.197.523,00	11.842.200,00	-	-	-
KDP	-	20.516.825.181,00	1.203.466.794,00	-	-
Total	81.570.042.644,00	24.012.478.311,00	4.947.933.718,00	49.906.680,00	4.934.000,00

Mutasi Antar SKPD	Hibah	BTT	Koreksi	Penambahan
1.448.000.000,00	-	-	-	1.619.269.485,00
18.921.287.163,48	379.727.500,00	286.036.036,00	911.689.125,00	44.010.210.595,48
3.350.682.191,00	-	-	11.327.642.328,00	60.169.479.727,00
220.487.300,00	1.660.622.899,00	-	5.510.548.739,00	25.662.727.129,00
1.251.617.811,62	-	-	-	2.671.657.534,62
-	-	-	-	21.720.291.975,00
25.192.074.466,10	2.040.350.399,00	286.036.036,00	17.749.880.192,00	155.853.636.446,10

Pengurangan TA 2021	Tidak Dikapitalisasi	Reklas Antar KIB	Reklas ke Barang dan Jasa	Reklas ke Pemeliharaan	Reklas ke Persediaan
Tanah	-	0,00	-	-	-
Peralatan dan Mesin	697.642.112,98	11.842.200,00	-	-	99.959.560,00
Gedung dan Bangunan	-	20.754.163.303,00	-	361.638.949,00	-
Jalan, irigasi & Jaringan	-	676.406.000,00	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	74.964.533,00	-	-	6.120.000,00
KDP	-	2.495.102.275,00	349.131.313,00	-	117.835.000,00
Total	697.642.112,98	24.012.478.311,00	349.131.313,00	361.638.949,00	223.914.560,00

Pengurangan TA 2021	Mutasi Antar SKPD	Mutasi ke Aset Lain-lain	Rusak Berat / Penghapusan	Koreksi	Pengurangan
Tanah	1.448.000.000,00	34.516.740.000,00	-	-	35.964.740.000,00
Peralatan dan Mesin	18.921.287.163,48	552.779.500,00	46.257.494.978,18	23.661.400,00	66.564.666.914,64

Pengurangan TA 2021	Mutasi Antar SKPD	Mutasi ke Aset Lain-lain	Rusak Berat / Penghapusan	Koreksi	Pengurangan
Gedung dan Bangunan	3.350.682.191,00	510.068.762,00	159.201.000,00	566.022.162,00	25.701.776.367,00
Jalan, irigasi & Jaringan	220.487.300,00	44.508.732.979,93	-	927.198.578,00	46.332.824.857,93
Aset Tetap Lainnya	1.251.617.811,62	46.120.500,00	-	-	1.378.822.844,62
KDP	-	32.500.000,00	-	1.094.909.550,00	4.089.478.138,00
Total	25.192.074.466,10	80.166.941.741,93	46.416.695.978,18	2.611.791.690,00	180.032.309.122,19

A. Aset Tetap Tanah

Terdapat pengurangan yang signifikan pada aset tetap tanah dikarenakan pada tanggal 30 Juli 2020 Pemerintah Daerah Kota Cimahi menerima Surat Keterangan dari Kepala Zidam III/Siliwangi Nomor SK/03/VII/2020 tentang surat keterangan status jalan yang berada diwilayah Kota Cimahi. Dimana berdasarkan surat tersebut terdapat 17 ruas jalan di Kota Cimahi yang berada diatas tanah milik TNI.

Berdasarkan surat keterangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menindaklanjuti dengan:

- Meminta konfirmasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi untuk memastikan bahwa 17 ruas jalan tersebut memang milik TNI.
- Meminta konfirmasi kepada Pangdam III Siliwangi perihal :
 - Permintaan surat pernyataan/keterangan dari Kodam III Siliwangi yang menyatakan bahwa ke 17 ruas jalan tersebut telah tercatat dalam Aset BMN Kodam III Siliwangi untuk menghindari double catat dalam pencatatan aset milik negara.
 - Permintaan salinan sertifikat hak pakai atas penguasaan lahan ke 17 ruas jalan tersebut.

Berdasarkan jawaban konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi melalui Surat Kepala BPN Kota Cimahi Nomor: 1519/32.77.IP.02.01/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 diperoleh informasi bahwa dari 17 ruas jalan hanya 10 ruas jalan yang termasuk dalam sertifikat tersebut.

Tabel 4.80 Konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi atas Status Jalan TNI

No.	NAMA JALAN (SK KAZIDAM III/Siliwangi Nomor SK/03/VII/2020)	LUAS TANAH (M2)	NILAI	KONFIRMASI BPN		
				KETERANGAN STATUS	LUAS TANAH (M2)	NILAI
1	Jl. SRIWIJAYA, Kecamatan Cimahi Tengah	13.855,00	11.698.970.000,00	Dalam Penguasaan TNI namun tidak termasuk dalam sertifikat	-	-
2	Jl. GEDUNG EMPAT, Kecamatan Cimahi Tengah	6.075,00	7.099.350.000,00		-	-
3	Jl. DUSTIRA, Kecamatan Cimahi Tengah	6.300,00	3.756.375.000,00		-	-
4	Jl.Poncol Kec.Cimahi Tengah	8.700,00	1.740.000.000,00	Tanah TNI	8.700,00	1.740.000.000,00

No.	NAMA JALAN (SK KAZIDAM III/Siliwangi Nomor SK/03/VII/2020)	LUAS TANAH (M2)	NILAI	KONFIRMASI BPN		
				KETERANGAN STATUS	LUAS TANAH (M2)	NILAI
5	Jl. KALIDAM, Kecamatan Cimahi Tengah	6.885,00	9.743.390.000,00	Tanah TNI	6.885,00	9.743.390.000,00
6	Jl. PASAR KUMELI, Kecamatan Cimahi Tengah	9.000,00	4.878.000.000,00	Tanah TNI	9.000,00	4.878.000.000,00
7	Jl. TERUSAN KALIDAM, Kecamatan Cimahi Tengah	1.440,00	1.900.800.000,00	Tidak masuk dalam sertifikat TNI	-	-
8	Jl. SIMPANG, Kecamatan Cimahi Tengah	2.345,00	1.847.860.000,00	Tanah TNI	2.345,00	1.847.860.000,00
9	Jl. Munajan	340,00	82.620.000,00	Tanah TNI	340,00	82.620.000,00
10	Jl. TAMAN KARTINI, Kecamatan Cimahi Tengah	1.840,00	1.159.250.000,00	Tanah TNI	1.840,00	1.159.250.000,00
11	Jl. SAM RATULANGI, Kecamatan Cimahi Tengah	4.542,00	3.410.900.000,00	Tanah TNI	4.542,00	3.410.900.000,00
12	Jl. Unjani	340,00	96.900.000,00	Tidak masuk dalam sertifikat TNI	-	-
13	Jl. SISINGAMANGARAJA, Kecamatan Cimahi Tengah	9.720,00	9.205.760.000,00	Tanah TNI	9.720,00	9.205.760.000,00
14	Jl. PASOPATI, Kecamatan Cimahi Tengah	3.600,00	1.775.700.000,00	Tanah TNI	3.600,00	1.775.700.000,00
15	Jl. Pojok Selatan	735,00	673.260.000,00	Tanah TNI	735,00	673.260.000,00
16	Jl. Lapangan Tembak	370,00	145.780.000,00	Tidak masuk dalam sertifikat TNI	-	-
JUMLAH TOTAL		76.087,00	59.214.915.000,00		47.707,00	34.516.740.000,00

Maka berdasarkan jawaban dari BPN tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut kepada 6 bidang tanah seluas 28.380,00 m² senilai Rp24.698.175.000,00 dan terus berkoordinasi dengan dengan Kodam III Siliwangi untuk memastikan status tanah tersebut.
2. Melakukan proses penghapusan terhadap 10 bidang tanah seluas 47.707,00 m² senilai Rp34.516.740.000,00 yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi masih mencatat 6 bidang tanah yang belum terbukti milik TNI dalam Aset Tetap Tanah dan KIB A sesuai dengan pedoman Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Aset Tetap Akrua yang menyatakan bahwa Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk 10 bidang tanah yang dalam proses penghapusan senilai Rp34.516.740.000,00 di reklas dari Aset Tetap Tanah ke Aset Lain-Lain.

B. Peralatan dan Mesin

Terdapat pengurangan yang signifikan pada aset tetap peralatan dan mesin karena pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan sensus barang milik daerah (inventarisasi) untuk aset tetap tanah dan peralatan dan mesin. Berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penelitian dari 57.056 unit barang senilai Rp658.180.596.227,00 terdapat 7.017 unit barang senilai Rp35.499.258.592,00 yang dipastikan dalam kondisi rusak berat dengan rincian:

Tabel 4.81 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat

No	Nama SKPD	Jumlah	Nilai (Rp)	Akumulasi penyusutan
1	Dinas Pendidikan	258	445.269.300,00	445.269.300,00
2	Dinas Kesehatan	1.584	5.357.871.213,51	5.357.871.213,51
3	RSUD Cibabat	1.874	10.181.028.566,83	9.817.142.220,26
4	DPUPR	95	487.002.450,00	487.002.450,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan	132	894.939.994,36	880.443.461,03
6	Kantor Satpolpp Damkar	105	3.452.322.790,00	3.452.322.790,00
7	Badan Penanggulangan Bencana	2	8.900.000,00	8.900.000,00
8	Dinas Sosial	8	19.647.750,00	19.647.750,00
9	DP3AP2KB	74	350.287.982,33	350.287.982,33
10	Dinas Tenaga Kerja	20	94.100.000,00	94.100.000,00
11	Dinas Pangan dan Pertanian	201	675.148.332,58	675.148.332,59
12	Dinas Lingkungan Hidup	92	2.010.438.359,00	2.009.430.209,00
13	Disdukcapil	134	590.810.748,00	587.935.748,00
14	Dinas Perhubungan	460	1.349.336.530,00	773.089.466,43
15	Dinas Komunikasi dan Informasi	12	32.477.500,00	32.477.500,00
16	Dinas Arsip Daerah	97	416.922.419,00	416.922.419,00
17	DPMPTSP	196	995.890.345,00	995.890.345,00
18	DISBUDPARPORA	5	39.572.500,00	39.572.500,00
19	DISDAGKOPERIN	116	664.880.500,00	659.220.500,00
20	Sekretariat DPRD	242	808.347.700,00	808.347.700,00
21	Sekretariat Daerah	659	2.745.937.567,00	2.734.387.567,00
22	Bappelitbangda	131	611.842.736,43	611.842.736,43
23	Bappenda	60	292.190.900,00	292.190.900,00
24	BPKAD	92	528.212.241,00	516.333.781,00
25	BKPSDMD	66	424.577.813,00	424.577.813,00
26	Inspektorat	17	47.942.000,00	47.942.000,00
27	Bakesbangpol	18	81.886.500,00	81.886.500,00
28	Kecamatan Cimahi Selatan	69	499.494.070,00	499.494.070,00
29	Kecamatan Cimahi Tengah	91	564.838.050,00	564.838.050,00
30	Kecamatan Cimahi Utara	107	827.141.734,44	827.141.734,44
Total Jumlah		7.017	35.499.258.592,48	34.511.657.039,02

Berdasarkan data tersebut diatas Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan reklas atas aset peralatan mesin tersebut ke aset lainnya (aset rusak berat).

C. Gedung dan Bangunan

Transaksi yang cukup signifikan pada aset tetap gedung bangunan Tahun 2022 adalah penambahan dikarenakan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor senilai Rp14.099.494.597,00 yang diantaranya adalah penyelesaian pekerjaan interior mall pelayanan publik kemudian Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan senilai Rp16.205.049.009,00 untuk pembangunan dan pemeliharaan beberapa sekolah negeri dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp6.102.000.000,00 yang diantaranya adalah untuk rehabilitasi dan pemasangan rumput Stadion Sangkuriang.

D. Jalan, irigasi & Jaringan

Transaksi yang cukup signifikan pada aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah dikarenakan diatas 10 bidang tanah senilai Rp34.516.740.000,00 yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI terdapat Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum yang masih dipelihara oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Rp34.248.001.979,93. Untuk itu tindak lanjut yang dilakukan adalah mengkoreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut ke Aset Lainnya. Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang dikoreksi tersebut adalah:

Tabel 4.82 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Berada diatas Tanah TNI

No	OPD	NAMA ASET	NILAI	ALAMAT	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	1.297.370.852,00	Jl. PONCOL	1.297.370.852,00
2	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	125.080.000,00	Jl. PONCOL	45.028.800,00
3	DPUPR	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.580.250.133,00	Jl. Kalidam	1.555.437.133,00
4	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	50.000.000,00	JEMB. KALIDAM	19.000.000,00
5	DPUPR	Saluran Drainage	229.582.000,00	Jl. Kalidam	183.665.600,00
6	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	709.148.000,00	JL SIMPANG	709.148.000,00
7	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	62.561.827,00	Jalan Munajan	62.561.827,00
8	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	546.252.000,00	JL. KARTINI	510.237.900,00
9	DPUPR	Saluran Drainage	510.000,00	JL. KARTINI / CIMAHI TENGAH	510.000,00
10	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	1.229.643.600,00	JL. SAM RATULANGI	1.125.124.100,00
11	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	5.971.163.775,93	JL. SISINGAMANGARAJA	5.015.966.627,52
12	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	20.000.000,00	JEMB. SISINGAMANGARAJA	7.600.000,00
13	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	2.894.587.000,00	JL. PASOPATI	2.826.608.000,00
14	DPUPR	Saluran Drainage	131.920.000,00	JL. PASOPATI / CIMAHI TENGAH	131.920.000,00
15	DPUPR	Saluran Air Kotor Sambungan	46.873.950,00	JL PASOPATI	19.921.428,75
16	DPUPR	Jalan Kabupaten Lain-lain	502.975.000,00	Jl. Pojok Selatan	406.022.222,22
17	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	3.522.544.068,00	JL. PASIR KUMELI	2.452.875.068,00
18	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota		JEMB. PASIRKUMELI	15.200.000,00

No	OPD	NAMA ASET	NILAI	ALAMAT	AKUMULASI PENYUSUTAN
		Lokal	40.000.000,00		
19	DPUPR	Bangunan Pengambilan Dari Waduk	97.250.000,00	BAROS / BEND. PASIR KUMELI 4.200M	23.225.000,00
20	DPUPR	Saluran Drainage	90.850.000,00	PASIR KUMELI / CIMAHI TENGAH	90.850.000,00
21	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	221.960.753,00	Jembatan Pasir Kumeli (89,28 m)	71.027.440,96
22	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	49.242.500,00	JL SIMPANG	19.697.000,00
23	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	48.141.100,00	Jl. PONCOL	19.256.440,00
24	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	73.231.800,00	Jalan Munajan	29.292.720,00
25	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	33.192.500,00	JL. KARTINI	16.596.250,00
26	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	37.293.000,00	JL. KARTINI	18.646.500,00
27	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	97.205.357,00	JL. SISINGAMANGARAJA	60.133.258,88
28	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	97.630.358,00	JL. PASIR KUMELI	60.398.884,25
29	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	49.228.000,00	JL. PASIR KUMELI	22.152.600,00
30	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	391.714.088,00	JL. TERUSAN KALIDAM	391.714.088,00
31	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	2.355.937.350,00	JL DUSTIRA	2.325.508.485,00
32	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	2.861.076.000,00	JL. GEDUNG EMPAT	2.861.076.000,00
33	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	6.381.996.092,00	JL SRIWIJAYA	5.494.724.550,00
34	DPUPR	Jalan Kabupaten Lain- lain	1.081.744.000,00	Jl. Menuju Universitas Unjani	635.973.400,00
35	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	60.000.000,00	JEMB. SRIWIJAYA II	22.800.000,00
36	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	313.272.000,00	JEMB. SRIWIJAYA I	119.043.360,00
37	DPUPR	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	126.156.650,00	Saluran JL SRIWIJAYA	23.688.150,13
38	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain- lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
39	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain- lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
40	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain- lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
41	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain- lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
42	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain- lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
43	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain- lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
44	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	49.630.000,00	Jl. Sriwijaya	37.222.500,00
45	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	199.218.000,00	Akses Kawasan Lapang Tembak	69.726.300,00
46	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	98.632.357,00	Jalan Panembakan Selatan	61.025.133,88
47	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	45.869.521,00	Jalan Sriwijaya VII Rw. 08 Rt. 03	22.934.760,50
48	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	214.992.648,00	JALAN SRIWIJAYA	107.496.324,00
49	DPKP	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	199.122.000,00	Rw. 08 Kelurahan Setiamanah	199.122.000,00
	JUMLAH		34.248.001.979,93		29.200.482.404,09

Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi banyak melakukan perbaikan/pemeliharaan terhadap jalan lingkungan di wilayah Kota Cimahi, namun diantara jalan-jalan lingkungan tersebut diantaranya terdapat 106 ruas jalan lingkungan yang diduga berada diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi senilai Rp10.260.731.000,00 namun tercatat didalam KIB Jalan Irigasi dan Jaringan. Untuk itu Pemerintah Kota Cimahi melalui BPKAD dan Dinas PUPR akan meneliti dan menguji kembali mengenai bukti kepemilikan tanah dibawah jalan lingkungan tersebut sebelum menghapus aset tetap jalan tersebut dari neraca. Rincian Jalan Lingkungan tersebut disajikan dalam *Lampiran 11b*.

E. Aset Tetap Lainnya

Transaksi yang signifikan dalam aset tetap lainnya adalah penambahan dari belanja modal Belanja Modal Bahan Perpustakaan senilai Rp101.492.000,00 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp72.842.500,00 untuk pengadaan software dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp1.207.763.023,00 di lingkungan sekolah negeri Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

F. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Transaksi yang signifikan dalam Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah penambahan dari reklas antar KIB SKPD senilai Rp20.516.825.181,00 dan reklas dari belanja barang jasa Rp1.203.466.794,00 dibeberapa SKPD.

4.3.21. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar Rp(1.237.866.506.093,70) Rincian akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada *lampiran 12*.

4.3.22. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.83 Rincian Saldo Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022

Jenis Aset Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
Aset Tidak Berwujud	11.492.709.779,90	9.932.562.034,90
Akumulasi Amortisasi	(9.452.681.527,40)	(8.229.263.872,39)
Aset Tak Berwujud Netto	2.040.028.252,50	1.703.298.162,51
Aset Lain Lain	136.915.695.665,23	16.955.466.977,42
Jumlah	142.304.068.917,73	22.007.110.139,93

Atas posisi aset lainnya per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.348.345.000,00 merupakan nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m² yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah dengan perjanjian Nomor 180/07-Perj/2003 Tanggal 17 Juli 2003.
- b. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.492.709.779,90 merupakan *software* yang terdiri dari :

Tabel 4.84 Rincian Aset Tidak Berwujud Berupa *Software* Tahun Anggaran 2022

OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	668.380.800,00	521.580.800,00
Dinas Kesehatan	172.730.000,00	172.730.000,00
RSUD Cibabat	392.194.000,00	392.194.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.774.910,00	1.117.395.100,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	324.720.140,00	275.132.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.000.000,00
Dinas Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.640.000,00	32.640.000,00
Dinas Tenaga Kerja	411.318.050,00	321.387.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	51.975.455,00	51.975.455,00
Dinas Lingkungan Hidup	349.472.000,00	86.680.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	384.974.250,00	263.974.250,00
Dinas Perhubungan	355.089.395,00	334.344.050,00
Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Kepustakaan	1.006.929.683,00	1.006.929.683,00
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	636.943.400,00	498.426.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	819.692.900,00	787.192.900,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	117.150.000,00	34.650.000,00
BAPPEDA	264.694.646,90	204.694.646,90
BPKAD	519.907.500,00	473.787.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.687.042.900,00	1.627.768.900,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	378.260.500,00	378.260.500,00
Sekretariat Daerah	166.952.500,00	166.952.500,00
Sekretariat DPRD	743.221.000,00	698.221.000,00
Inspektorat	49.700.000,00	49.700.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	71.193.750,00	71.193.750,00
Kecamatan Cimahi Tengah	173.664.500,00	173.664.500,00
Kecamatan Cimahi Selatan	100.595.000,00	78.595.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa	47.492.500,00	47.492.500,00
Jumlah	11.492.709.779,90	9.932.562.034,90

c. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp(9.452.681.527,40) merupakan amortisasi aset tetap tak berwujud dari tahun perolehan hingga tahun 2022. Rincian Akumulasi Amortisasi disajikan pada **lampiran 13**.

d. Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp136.915.695.665,23 terdiri dari :

Tabel 4.85 Rincian Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022

OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	41.332.760.911,30	5.849.152.318,82
Piutang Retribusi Kadaluwarsa	212.739.385,00	212.739.385,00
Koreksi Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan	5.422.866.048,00	5.422.866.048,00
Peralatan dan Mesin tidak dalam penguasaan	1.992.585.462,00	1.294.404.425,60
Peralatan dan Mesin Diserahkan Kepada Masyarakat – DLH	336.169.000,00	4.176.304.800,00
Peralatan Mesin Hilang Dalam Proses TGR	101.684.500,00	-
Piutang Treasury Deposit Facility	8.491.417.379,00	-
Penghapusan Aset Tetap dari KIB D ke Aset Lainnya	44.508.732.979,93	
Penghapusan Aset Tetap Tanah dari KIB A ke Aset Lainnya	34.516.740.000,00	-
Jumlah	136.915.695.665,23	16.955.466.977,42

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp136.915.695.665,23 terdiri dari aset tetap rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp41.332.760.911,30 dan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp 212.739.385,00. (rincian pada **lampiran 14**). Selain itu, terdapat koreksi Aset tetap Gedung dan bangunan yang dialihkan ke aset lain-lain dikarenakan terdapat Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bukan milik Dinas Pendidikan sebesar Rp5.422.866.048,00, Peralatan dan Mesin tidak dalam penguasaan (pinjam pakai dengan instansi vertikal) Rp1.992.585.462,00, Peralatan dan Mesin Diserahkan Kepada Masyarakat – Dinas Lingkungan Hidup Rp336.169.000,00, Peralatan Mesin Hilang Dalam Proses TGR pada Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Satpol PP Damkar Rp101.684.500,00, Piutang Treasury Deposit Facility Rp8.491.417.379,00, Penghapusan Aset Tetap dari KIB D ke Aset Lainnya Rp44.508.732.979,93 dan Penghapusan Aset Tetap Tanah dari KIB A ke Aset Lainnya Rp34.516.740.000,00.

Penambahan yang signifikan dalam Aset Tetap Rusak Berat adalah dikarenakan pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan sensus barang milik daerah (inventarisasi) untuk aset tetap peralatan dan mesin. Berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penelitian dari 57.056 unit barang senilai Rp658.180.596.227,00 terdapat 7.017 unit barang senilai Rp35.499.258.592,00 yang dipastikan dalam kondisi rusak berat kemudian 7.017 unit barang senilai Rp35.499.258.592,00 yang dipastikan dalam kondisi rusak berat tersebut direklas ke

aset lainnya - aset tetap rusak berat. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat telah disajikan dalam Tabel 4.81.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dilaksanakan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposit Facility*) yaitu fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Rekening TDF Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah **Rek Lain BI TDF TKD Kota Cimahi Nomor 519000329980** dengan saldo Rp8.491.417.379,00 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.86 Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022

No	Rekening	Rp
1	Non Tunai Pajak Penghasilan	4.487.134.510,00
2	Non Tunai PBB	587.709.814,00
3	Non Tunai DBHCHT	662.552.844,00
4	Non Tunai SDA Minyak Bumi	741.492.040,00
5	Non Tunai Minerba	101.545.599,00
6	Non Tunai Kehutanan	10.863.550,00
7	Non Tunai Perikanan	211.753.211,00
8	Non Tunai Panas Bumi	1.688.365.811,00
Total Piutang		8.491.417.379,00

Penambahan yang signifikan dalam aset lainnya adalah dikarenakan Penghapusan Aset Tetap Tanah dari KIB A ke Aset Lainnya sebesar Rp34.516.740.000,00 yang merupakan proses penghapusan terhadap 10 bidang tanah seluas 47.707,00 m² yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI dan diikuti dengan Penghapusan Aset Tetap dari KIB D ke Aset Lainnya sebesar Rp34.248.001.979,93 atas Jalan dan PJU serta Bangunan lain di Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas DPKP yang berada diatas 10 bidang tanah yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI. Selain itu terdapat reklas dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas 106 ruas jalan lingkungan yang diduga berada diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi senilai Rp10.260.731.000,00 yang juga direklas ke aset lainnya. Rincian dari aset tetap tanah yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI dan aset tetap jalan serta bangunan lain yang berada diatasnya telah kami jelaskan dalam **Tabel 4.80 Konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi atas Status Jalan TNI** dan **Tabel 4.82 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Berada diatas Tanah TNI** sedangkan rincian 106 ruas jalan lingkungan yang diduga berada diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi senilai Rp10.260.731.000,00 disajikan dalam **Lampiran 11b**.

Sampai dengan tahun 2013 izin yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berjumlah 66 jenis. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 141 yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol. Retribusi Izin Gangguan (HO). Retribusi Izin Trayek. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sehingga KPPT Kota Cimahi hanya memungut tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Gangguan (HO). dan Retribusi Izin Trayek (IT). Pada Tahun 2005 sampai dengan 2009 sudah terbit beberapa izin retribusi namun belum dibayar oleh wajib retribusi, sehingga berdasarkan peraturan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 23, hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Oleh karena itu, KPPT telah melakukan verifikasi izin-izin retribusi yang masa tagihnya telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp212.739.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.87 Rincian Izin Retribusi yang Masa Tagihnya Kadaluwarsa pada Tahun 2013

Jenis retribusi	2013 (Rp)
IMB	64.461.601,00
HO	30.926.150,00
IT	150.000,00
KP	405.000,00
IPPT	102.215.234,00
SIUP	2.650.000,00
TDP	1.510.000,00
SIUKP	525.000,00
SITU	426.400,00
TDG	120.000,00
SIUJK	100.000,00
IPKTK.SWSATA	300.000,00
SIPA.ANGK	750.000,00
IUA	750.000,00
IP	7.450.000,00
Jumlah	212.739.385,00

4.3.23. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.88 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2022

Uraian	2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	48.276.595,00	125.000,00	48.276.595,00	125.000,00
Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	129.039.156,47	92.533.016,65	129.039.156,47	92.533.016,65

Uraian	2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022 (Rp)
Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.220,00	0,00	0,00	855.508.220,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	330.272.010,00	0,00	330.272.010,00
Utang Belanja	4.141.620.812,00	3.373.424.947,00	4.141.620.812,00	3.373.424.947,00
Utang Lain-lain	13.622.915.723,00	45.965.118.561,57	48.272.932.874,85	11.315.101.409,72
Jumlah	18.797.360.506,47	49.761.473.535,22	52.591.869.438,32	15.966.964.603,37

Atas saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp125.000,00 merupakan Utang PFK BOS SD pada Dinas Pendidikan.
- Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No.02/WPB.13/BD.02/2022 Tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp92.533.016,65 merupakan proporsi bunga berjalan yang akan jatuh tempo pada 20 Maret 2022.
- Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp855.508.220,00 merupakan kewajiban utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007. Saldo Utang sebesar Rp855.508.220,00 tersebut merupakan bagian lancar utang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2022 sebesar Rp427.754.110,00 dan tanggal 20 September 2022 sebesar Rp427.754.110,00.
- Utang Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp330.272.010,00 merupakan sewa yang dibayarkan oleh PT. Bali Towerindo Sentra Tbk. Sejak 30 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2027 dengan perjanjian Nomor 555/5912/BPKAD tentang Pemanfaatan Sebagian Lahan Bagian jalan untuk Penempatan Menara Telekomunikasi Microcell.
- Utang Belanja Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.373.424.947,00 merupakan utang belanja pegawai dan barang jasa selama tahun 2022. Rincian utang belanja dapat dilihat pada **lampiran 15**.
- Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.315.101.409,72 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga, terdiri dari:

Tabel 4.89 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022

Uraian	2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022 (Rp)
Utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi)	1.319.924.798,00	0,00	0,00	1.319.924.798,00
Utang RSUD Cibabat atas pembelian barang	11.380.509.815,00	42.025.578.192,57	44.365.515.684,85	9.040.572.322,72
Utang Kompensasi Jasa Pelayanan	70.342.150,00	694.896.960,00	706.066.590,00	59.172.520,00
Utang Kompensasi Dampak Negatif	309.281.000,00	3.013.746.400,00	3.067.510.600,00	255.516.800,00

Uraian	2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Jaminan pada UPTD Rusunawa	542.857.960,00	170.810.000,00	133.840.000,00	579.827.960,00
Pengembalian PEN atas denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Underpass Sriwijaya dan Pembangunan Wisata Cimenteng Tahun 2021, yang masih belum dikembalikan ke Kas Provinsi Jawa Barat	0,00	60.087.009,00	0,00	60.087.009,00
Jumlah	13.622.915.723,00	45.965.118.561,57	48.272.932.874,85	11.315.101.409,72

Rincian utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi), utang RSUD Cibabat atas pembelian barang serta utang Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak negatif dapat dilihat pada **lampiran 16, 17 dan 18**.

Perlu disampaikan pula bahwa pada pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah kurang pungut dan setor PPN dengan rincian:

Tabel 4.90 Rincian Kurang Pungut dan Setor PPN Tahun Anggaran 2022

No	Kelurahan	Nilai Paket (Rp)	PPN Disetor (Rp)	PPN Seharusnya (Rp)	Kekurangan PPN (Rp)
1	Pasirkaliki	1.049.415.591,00	88.734.878,38	98.495.715,01	(9.760.836,63)
2	Setiamanah	1.300.695.025,00	99.857.075,00	109.817.174,50	(9.960.099,50)
3	Utama	1.143.536.483,00	95.385.791,00	96.816.576,12	(1.430.785,12)
4	Leuwigajah	1.498.190.393,00	124.587.505,01	126.456.317,54	(1.868.812,53)
Jumlah		4.991.837.492,00	408.565.249,39	431.585.783,17	(23.020.533,78)

Pemerintah Daerah kota Cimahi tidak mencatat kurang bayar PPN tersebut sebagai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 karena berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, sehingga pembayaran kurang bayar PPN sebesar Rp23.020.533,77 merupakan kewajiban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Namun demikian Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Inspektorat akan mengawasi pelaksanaan penyetoran kurang bayar PPN oleh bendahara pengeluaran pembantu Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah.

4.3.24. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.91 Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2022

Uraian	2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022 (Rp)
Utang Kepada Pemerintah Pusat	2.566.524.658,70	-	855.508.220,00	1.711.016.438,70

Utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.086.072.432,00. Pada tanggal 19 April 2010, plafon pinjaman diubah menjadi Rp12.832.623.298,00 dengan Amandemen Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor AMA-369/SLA-1208/DSMI/2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan berakhir tanggal 20 September 2025.

4.3.25. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.92 Saldo Ekuitas Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Ekuitas	2.949.071.814.343,26	2.916.024.217.594,05

Ekuitas dijelaskan lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2022. (Rincian Dapat Dilihat pada **Lampiran 19**)

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan-LO dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah, maka dicatat di Neraca sebagai penambah

Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan yang telah diterima untuk periode tahun anggaran selanjutnya dicatat di Neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan-LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.355.003.021.180,94. Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi pendapatan yang berpengaruh terhadap neraca.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran beban daerah terdiri dari:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap
- h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- i. Beban Penyisihan Piutang
- j. Beban Penyisihan Dana Bergulir
- k. Beban Lain-lain

Jumlah beban daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.412.717.348.736,50 jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi beban yang berpengaruh terhadap neraca.

Koreksi atas Pengeluaran Beban (penerimaan pengembalian beban) yang

terjadi dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran beban dicatat dalam lain-lain pendapatan yang sah.

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp400.225.308.682,94.

4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp199.763.900.648,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.93 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	295.722.582,00	301.848.846,00
Pajak Restoran	23.272.329.594,00	17.048.477.567,00
Pajak Hiburan	461.850.519,00	123.330.330,00
Pajak Reklame	3.005.511.600,00	2.679.178.300,00
Pajak Penerangan Jalan Umum	41.170.519.697,00	37.701.852.705,00
Pajak Parkir	1.128.004.404,00	937.097.932,00
Pajak Air Tanah	15.899.944.873,00	8.472.806.671,00
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	63.482.838.861,00	55.960.840.082,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.047.178.518,00	80.475.272.145,00
Jumlah	199.763.900.648,00	203.700.704.578,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah – LRA menjadi Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp12.124.254.267,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.94 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	5.658.208.467,00	4.644.854.020,00
Retribusi Jasa Usaha	5.718.893.050,00	5.387.268.125,00
Retribusi Perijinan Tertentu	747.152.750,00	2.139.794.234,00
Jumlah	12.124.254.267,00	12.171.916.379,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.95 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Retribusi Daerah	12.124.254.267,00	12.171.916.379,00
Retribusi Jasa Umum	5.658.208.467,00	4.644.854.020,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.181.745.406,00	1.562.133.900,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	126.737.500,00	181.345.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	771.883.000,00	683.644.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	958.210.400,00	895.585.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	579.679.100,00	588.309.040,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	115.297.500,00	104.907.500,00
Retribusi Pengendalian Menara	495.231.061,00	259.404.580,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	195.110.000,00	157.970.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	44.081.000,00	38.896.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	190.233.500,00	172.659.000,00
Retribusi Jasa Usaha	5.718.893.050,00	5.387.268.125,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.420.483.550,00	5.103.238.125,00
Retribusi Pasar Grosir	0,00	0,00
Retribusi Terminal	256.477.000,00	253.838.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	41.932.500,00	30.192.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	747.152.750,00	2.139.794.234,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.839.200,00	1.552.574.234,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	13.650.000,00	3.450.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	719.663.550,00	-
Retribusi Persetujuan Bangunan	-	583.770.000,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA menjadi Pendapatan Retribusi Daerah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.022.613.597,00 yaitu:

Tabel 4.96 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Perusahaan Daerah		
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	11.022.613.597,00	9.956.960.000,00
Jumlah	11.022.613.597,00	9.956.960.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO sebesar Rp11.022.613.597,00 tersebut merupakan bagian deviden atas laba Tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 1.07% saham atau sebanyak 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Barat dan Banten, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 9 Maret 2022 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 7.215.958 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.355,00.

4.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp177.314.540.170,94 yang terdiri dari:

Tabel 4.97 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	851.993.938,00	1.052.983.328,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	342.898.794,80	337.911.430,00
Penerimaan Jasa Giro	8.007.768.300,97	9.376.700.958,10
Pendapatan Bunga Lain-Lain	798.069.058,45	307.719.834,01
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.411.390.499,67	3.102.432.744,38
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	60.001,05	561.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	46.526.247,00	184.126.021,00
Pendapatan Denda Pajak	1.936.634.909,00	1.426.540.148,00
Pendapatan Denda Retribusi	16.759.312,00	23.470.807,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	96.660.750,00	49.593.947,00
Pendapatan dari Pengembalian	587.092.623,00	315.613.979,00

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Dari BLUD	160.419.215.622,00	191.128.150.715,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	739.520.000,00	-
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	54.700.115,00	1.177.480,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	5.250.000,00	28.250.000,00
Jumlah	177.314.540.170,94	207.335.232.391,49

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA menjadi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.028.642.243.991,00.

Tabel 4.98 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	780.549.729.251,00	743.905.839.987,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.528.168.000,00	52.247.274.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.685.305.350,00	232.489.130.004,00
Jumlah	942.763.202.601,00	1.028.642.243.991,00

4.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat -LO Dana Perimbangan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp780.549.729.251,00 yang terdiri dari :

4.4.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.967.035.635,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.99 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.502.605.564,00	5.740.049.507,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	40.104.132.476,00	6.039.776.294,00
DBH PPh Pasal 21	6.945.732.763,00	35.315.829.783,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.414.564.832,00	4.891.285.895,00
Jumlah	59.967.035.635,00	51.986.941.479,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak – LRA menjadi Dana Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan dalam **Lampiran 19**.

4.4.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.358.275.570,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.100 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.965.809.916,00	3.358.469.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6.236.984.395,00	179.344.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	1.545.481.698,00	769.322.068,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	138.235.887,00	85.402.700,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	22.301.699.463,00	24.212.294.799,00
Jumlah	39.358.275.570,00	29.733.151.567,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA menjadi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO dijelaskan dalam **Lampiran 19**.

4.4.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp519.937.401.610,00 yaitu:

Tabel 4.101 Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2022

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	519.937.401.610,00	530.425.978.000,00

4.4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.287.016.436,00 yaitu:

Tabel 4.102 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun Anggaran 2022

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	21.060.743.820,00	31.966.257.254,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	140.226.272.616,00	99.793.511.687,00
Jumlah	161.287.016.436,00	131.759.768.941,00

4.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu:

Tabel 4.103 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO Tahun Anggaran 2022

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
DID	5.528.168.000,00	52.247.274.000,00

4.4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer dari Pemerintah Provinsi - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp156.685.305.350,00 yang terdiri dari:

4.4.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Transfer dari Pemerintah Provinsi - LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp144.324.705.350,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.104 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	51.096.431.535,00	47.893.996.320,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.382.753.270,00	22.789.873.830,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.847.645.429,00	29.736.362.390,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	202.937.450,00	178.901.700,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	30.794.937.666,00	26.182.652.803,00
Transfer Pemerintah Provinsi	144.324.705.350,00	126.781.787.043,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA menjadi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Bantuan Keuangan Provinsi - LO periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.360.000.000,00

Tabel 4.105 Bantuan Keuangan Provinsi - LO Tahun Anggaran 2022

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	9.676.657.020,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.360.600.000,00	96.030.685.941,00
Jumlah	12.360.000.000,00	105.707.342.961,00

4.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.205.048.800,00 terdiri dari:

Tabel 4.106 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Hibah	13.205.048.800,00	83.494.375.949,80
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	71.950.231,00
Jumlah	13.205.048.800,00	83.566.326.180,80

Adapun rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan	Rp9.723.267.574,00
2. RSUD Cibabat	Rp1.190.538.903,00
3. DPKP	Rp1.660.622.899,00
4. BPBD	Rp38.934.050,00
5. DP3KB	Rp211.377.874,00
6. Bapelitbangda	Rp24.425.000,00
7. Dinas Pendidikan	Rp355.882.500,00

Jumlah Rp13.205.048.800,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Hibah – LRA menjadi Pendapatan Hibah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Beban Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp659.094.670.643,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.107 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022

Beban Pegawai	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Gaji Pokok dan Tunjangan	286.598.598.855,00	287.338.317.514,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	177.860.225.984,00	157.339.447.208,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.508.917.388,00	98.614.718.280,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	37.689.483.344,00	33.629.360.044,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	510.090.496,00	536.897.640,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	732.000.000,00	605.520.000,00
Beban Pegawai BLUD	64.195.354.576,00	48.277.380.808,00
Jumlah	659.094.670.643,00	626.341.641.494,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Pegawai – LRA menjadi Beban Pegawai – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*.

4.4.5 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membiayai persediaan yang telah digunakan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Beban Persediaan dicatat sesuai dengan pemakaian persediaan yang telah terjadi.

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp211.229.068.528,36 yang terdiri dari :

Tabel 4.108 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022

Beban Persediaan	2022	2021
Alat Listrik	3.319.509.439,90	1.996.871.348,10
Alat Tulis Kantor	8.327.822.221,81	6.228.766.174,11
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.719.239.757,80	-
Bahan Bakar dan Pelumas	4.422.921.871,00	-
Bahan Baku	353.982.828,00	-
Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.233.400.063,50	4.954.649.798,00
Bahan Cetak	12.241.291.199,82	7.059.813.396,50
Bahan Kimia	2.654.580.162,00	10.574.335.163,99
Bahan Komputer	1.027.838.761,00	-
Bahan Lainnya	6.633.241.354,61	2.011.635,00
Bahan/Bibit Tanaman	632.339.954,00	629.225.496,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	97.848.900,00	27.320.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	609.981.485,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.667.737.970,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.580.464.543,00	-
Belanja Pakaian Adat Daerah	9.336.000,00	-
Belanja Pakaian Batik Tradisional	539.613.574,00	-
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.060.876,00	-
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	143.700.000,00	-
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	231.846.950,00	-
Belanja Pakaian KORPRI	3.050.000,00	-
Belanja Pakaian Olahraga	250.960.850,00	-
Belanja Pakaian Paskibraka	6.821.800,00	-
Belanja Pakaian Penyelamatan	12.625.000,00	-
Belanja Pakaian Siaga	23.301.800,00	-
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	97.844.625,00	-
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	102.277.125,00	-
Belanja Pakaian Teknik	9.580.000,00	-

Beban Persediaan	2022	2021
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	74.120.000,00	-
Benda Pos	389.672.780,00	299.654.500,00
Isi Tabung Gas	58.842.000,00	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	98.850.888,00	-
Kertas dan Cover	525.508.950,00	-
Komponen Peralatan	12.899.150,00	-
Komponen Rambu-Rambu	809.538.278,00	-
Natura	6.711.533.994,38	7.026.072.808,10
Natura dan Pakan Lainnya	7.606.000,00	-
Obat	55.440.952.163,98	50.512.544.131,54
Obat-obatan Lainnya	19.007.367,00	-
Pakan	137.361.000,00	-
Perabot Kantor	4.799.993.016,00	4.523.712.691,71
Perlengkapan Dinas	292.007.780,00	-
Perlengkapan Pendukung Olahraga	17.720.014,00	-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	52.658.290.080,56	33.152.210.895,24
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.295.807.444,00	-
Suku Cadang Alat Bengkel	45.423.650,00	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	47.571.380,00	-
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.542.998,00	-
Suku Cadang Lainnya	50.087.700,00	-
Suvenir/Cendera Mata	1.675.512.783,00	1.206.546.300,00
Beban Persediaan BOS	-	19.804.210.800,00
Jumlah	211.229.068.528,36	147.997.945.138,29

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Persediaan – LRA menjadi Beban Persediaan – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*.

4.4.6 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa habis pakai diluar persediaan. Biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp329.546.472.884,75 yang terdiri dari :

Tabel 4.109 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2022

No	S O P D	Beban Jasa 2022 (Rp)	Beban Jasa 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	49.510.638.953,42	44.426.279.349,50

No	S O P D	Beban Jasa 2022 (Rp)	Beban Jasa 2021 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	50.680.461.598,67	53.627.957.626,83
3	Rsud Cibabat	52.496.638.792,83	40.474.807.598,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.700.546.559,27	6.409.546.161,80
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.822.900.831,41	22.950.190.236,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.848.227.562,00	4.684.113.133,08
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.263.158.462,83	2.441.890.603,67
8	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	6.941.019.182,00
9	Dinas Sosial	3.499.952.545,00	-
10	Dinas Tenaga Kerja	4.129.139.444,50	3.276.278.796,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	5.402.674.806,16	-
12	Dinas Pangan dan Pertanian	1.876.089.398,67	2.111.884.027,50
13	Dinas Lingkungan Hidup	18.883.553.597,00	24.978.343.254,16
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.235.793.532,50	1.758.600.177,17
15	Dinas Perhubungan	12.989.205.183,24	14.397.526.453,09
16	Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Perpustakaan	-	4.434.620.193,91
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.834.950.202,42	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.352.727.462,50	2.610.581.375,50
19	Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Kepemudaan dan Olahraga	4.406.031.319,16	3.954.446.945,17
20	Dinas Arsip Daerah	722.372.226,09	-
21	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	9.527.172.031,67	11.159.280.373,00
22	Sekretariat Daerah	13.994.521.457,66	16.967.077.165,00
23	Sekretariat DPRD	10.008.469.549,59	9.977.677.199,16
24	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	1.918.767.846,22	2.130.363.855,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.483.016.405,16	2.841.500.224,50

No	S O P D	Beban Jasa 2022 (Rp)	Beban Jasa 2021 (Rp)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.196.511.214,28	1.821.427.808,17
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.627.304.627,17	2.143.340.510,33
28	Inspektorat Kota	884.164.972,00	1.002.165.166,66
29	Kecamatan Cimahi Utara	9.629.998.129,00	13.500.224.594,83
30	Kecamatan Cimahi Tengah	12.886.396.370,00	17.814.169.290,00
31	Kecamatan Cimahi Selatan	11.497.841.253,00	15.555.680.789,33
32	Kantor Kesatuan Bangsa	2.237.246.551,33	2.520.508.939,67
	JUMLAH	329.546.472.884,75	336.911.501.029,62

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Jasa – LRA menjadi Beban Jasa – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20* sedangkan rincian beban jasa dijelaskan di *Lampiran 21*.

4.4.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap itu sendiri selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.810.776.950,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.110 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022

Beban Pemeliharaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	484.360.469,00	2.856.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.883.723.450,00	12.021.785.180,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.841.892.383,00	1.183.308.137,00
Beban Penggantian Suku Cadang	-	219.991.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	2.323.452.315,00	23.715.152.275,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.993.000,00	10.384.000,00
Beban Pemeliharaan BOS	1.000.550.951,00	1.620.862.544,00
Beban Pemeliharaan BLUD	1.269.804.382,00	7.354.103.209,00
Jumlah	19.810.776.950,00	46.128.442.345,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Pemeliharaan – LRA menjadi Beban Pemeliharaan – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*

4.4.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, pelatihan dan pendidikan, bimbingan

teknis, kursus, seminar dan sosialisasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.958.799.139,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.111 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022

Beban Perjalanan Dinas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Perjalanan dinas dalam daerah	34.060.904.468,00	685.347.000,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	172.290.181,00	20.854.005.291,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	257.350.000,00	141.585.000,00
Beban Kursus.kursus singkat/ Pelatihan	-	1.048.353.400,00
Beban Sosialisasi	-	367.464.364,00
Beban Bimbingan Teknis	-	168.731.000,00
Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	270.402.000,00
Beban Perjalanan Dinas BOS	2.607.889.150,00	1.089.346.150,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD	860.365.340,00	600.497.764,00
Jumlah	37.958.799.139,00	25.225.731.969,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Perjalanan Dinas – LRA menjadi Beban Perjalanan Dinas – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*

4.4.9 Beban Bunga

Beban Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Beban Bunga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp198.166.004,18 yang terdiri dari :

Tabel 4.112 Rincian Beban Bunga Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	198.166.004,18	276.614.324,47
Jumlah	198.166.004,18	276.614.324,47

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Bunga – LRA menjadi Beban Bunga – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*

4.4.10 Beban Subsidi

Beban Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tidak terdapat Realisasi Beban Subsidi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 4.113 Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Subsidi kepada BUMN	-	410.574.000,00
Jumlah	-	410.574.000,00

4.4.11 Beban Hibah

Beban Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.597.225.649,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.114 Beban Hibah Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	38.597.225.649,00	18.250.155.200,00
Jumlah	38.597.225.649,00	18.250.155.200,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Hibah – LRA menjadi Beban Hibah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*

4.4.12 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.133.871.600,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.115 Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022

Beban Bantuan Sosial	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.133.871.600,00	2.571.530.000,00
Jumlah	3.133.871.600,00	2.571.530.000,00

4.4.13 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Perhitungan nilai beban penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi menggunakan metode garis lurus.

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.614.552.341,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.116 Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.979.792.217,87
2	Dinas Kesehatan	4.558.089.958,74
3	RSUD Cibabat	28.742.733.143,70
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.952.793.875,90
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.870.607.166,11
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	603.917.974,08
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	196.662.469,31
8	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Dinas Sosial	185.914.214,29
10	Dinas Tenaga Kerja	57.714.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	256.362.837,02
12	Dinas Pangan dan Pertanian	551.689.488,15
13	Dinas Lingkungan Hidup	2.642.226.376,37
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	327.271.276,14
15	Dinas Perhubungan	7.655.167.830,52
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	961.485.807,36
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	932.579.192,60
19	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	346.956.509,66
20	Dinas Arsip Daerah	195.182.816,43
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	3.853.696.659,48
22	Sekretariat Daerah	2.910.778.688,40
23	Sekretariat DPRD	1.174.147.668,91
24	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	185.710.424,91
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	93.055.838,40
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	380.755.289,08
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	68.423.137,50
28	Inspektorat Kota	257.223.808,41
29	Kecamatan Cimahi Utara	428.734.224,81
30	Kecamatan Cimahi Tengah	712.647.339,84

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
31	Kecamatan Cimahi Selatan	504.357.192,57
32	Kantor Kesatuan Bangsa	27.874.415,10
	JUMLAH	98.614.552.341,66

4.4.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.223.417.655,01 yang berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terdiri dari :

Tabel 4.117 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	71.715.337,50	40.297.950,00
Dinas Kesehatan	9.492.500,00	9.492.500,00
RSUD Cibabat	33.061.000,00	33.061.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.175.471,25	246.337.775,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	44.001.410,00	43.874.875,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00
BPBD	-	-
Dinas sosial. pengendalian penduduk. dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
Dinas Sosial	-	-
Dinas Tenaga Kerja	62.120.137,50	80.346.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	-	-
Dinas Pangan dan Pertanian	-	2.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	65.698.000,00	21.670.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	61.829.487,50	54.166.987,50
Dinas Perhubungan	5.186.336,25	-
Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	9.912.375,00	46.622.420,75
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	162.438.225,00	187.163.225,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	20.625.000,00	8.662.500,00
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	141.735.975,00	118.669.125,00
Sekretariat Daerah	-	4.496.250,00
Sekretariat DPRD	81.708.250,00	36.708.250,00
Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	23.676.250,01	8.676.250,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	182.168.775,00	56.626.750,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	55.913.875,00	235.169.275,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	23.941.500,00
Inspektorat Kota	-	12.425.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	-	-
Kecamatan Cimahi Tengah	16.086.125,00	31.904.875,00
Kecamatan Cimahi Selatan	11.000.000,00	9.831.250,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.873.125,00	11.873.125,00
Jumlah	1.223.417.655,01	1.329.017.633,25

4.4.15 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan pengakuan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp13.231.653.056,71 ditentukan dengan penggolongan kualitas pajak. Beban Penyisihan Piutang dibagi menjadi Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi dan Beban Penyisihan Piutang lain-lain.

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 mengalami penambahan beban sebesar Rp12.136.909.647,58 yang terdiri dari:

Tabel 4.118 Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2021 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak 2022 (Rp)
Pajak Hotel	1.471.488,00	97.904,40	1.373.583,60
Pajak Restoran	1.066.201,79	204.649,48	861.552,31
Pajak Reklame	186.457.470,50	157.981.948,00	28.475.522,50
Pajak Parkir	18.155,00	18.866,00	-
Pajak Air Tanah	271.420.814,06	206.535.380,83	64.885.434,23
PBB	58.421.759.917,42	46.380.446.362,47	12.041.313.554,94
Jumlah	58.882.194.046,77	46.745.285.110,18	12.136.909.647,58

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 mengalami penambahan beban sebesar Rp855.585.027,13 dan pengurangan sebesar Rp637.273,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.119 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2022 (Rp)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	101.766.876,00	102.404.149,00	-637.273,00
			-

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2022 (Rp)
Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	51.898.211,00	-
Izin Trayek (IT)	3.245.000,00	2.900.000,00	345.000,00
Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00	-
Laboratorium (DLH)	16.578.665,00	14.074.815,00	2.503.850,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	62.262.525,00	35.289.205,88	26.973.319,13
Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	9.495.912,25	-	9.495.912,25
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.117.014.375,25	1.303.245.519,50	813.768.855,75
Menara	2.498.090,00	-	2.498.090,00
Jumlah	2.365.899.654,50	1.510.951.900,38	855.585.027,13
			-637.273,00

3. Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami penambahan beban sebesar Rp239.158.382,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.120 Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2022

Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya 2022 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSU Cibabat	70.642.371,47	671.030.310,52	-
Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSU Cibabat	0,00	197.129.997,09	-
Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00	-
Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	61.662.335,00	302.552.832,00	-
Piutang TGR Pihak Ketiga DPUPR	322.736,29	1.982.276,89	-
Piutang TGR Pihak Ketiga Disdik	77.662,93	447.319,38	-
Piutang BLUD Air Minum	1.140.593.793,00	901.445.411,00	239.148.382,00
Piutang BLUD Puskesmas	10.000,00	119.600,00	10.000,00
Jumlah	1.497.436.423,69	2.298.725.670,88	239.158.382,00

Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2021 telah dihapuskan karena Piutang BLUD Puskesmas telah dibayar oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022, sehingga Beban Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas adalah Rp10.000,00 atas Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,00.

4.4.16 Beban Transfer

Beban Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Beban Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.000.000,00. Transfer tersebut merupakan bantuan keuangan untuk penanggulangan gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Bantuan Keuangan tersebut berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8479/SJ perihal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana.

4.4.17 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban operasional Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan beban penyisihan.

Tidak terdapat beban lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 :

Tabel 4.121 Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bahan Pembelajaran		-
Aset Tetap yang Nilainya dibawah Nilai Kapitalisasi	-	152.325.016,99
Reklas Persediaan	-	870.000,00
Beban Lain-lain BLUD Puskesmas Dinkes	-	14.960.484,00
Beban Penurunan Nilai Investasi	-	166.351.823,00
Jumlah	-	334.507.323,99

4.4.18. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin Rp15.036.205.911,30 terdiri dari :

Tabel 4.122 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022

No	O P D	Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp)
1	Dinas Pendidikan	302.791.080,00
2	Dinas Kesehatan	122.305.600,00
3	RSUD Cibabat	705.854.800,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.800.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	445.389.165,00
6	Dinas Sosial	343.750,00
7	Dinas sosial. pengendalian penduduk. dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	132.745.026,46
8	Dinas Tenaga Kerja	200.028.000,00
9	Dinas Pangan dan Pertanian	8.950.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.505.552.705,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	202.301.000,00

No	O P D	Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	191.791.520,00
13	Dinas Arsip Daerah	82.611.410,00
14	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	162.855.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	814.085.719,00
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	60.913.000,00
17	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	731.053.923,24
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	599.499.467,00
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	553.730.613,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	291.388.600,00
21	Sekretariat Daerah	1.249.391.080,00
22	Inspektorat Kota	335.168.550,00
23	Kecamatan Cimahi Utara	323.888.001,49
24	Kecamatan Cimahi Tengah	409.799.551,00
25	Kecamatan Cimahi Selatan	501.563.150,11
26	Kesbang	87.405.200,00
	JUMLAH	15.036.205.911,30

4.4.19. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Realisasi Beban Luar Biasa pada tahun 2022 sebesar Rp5.570.083.787,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.123 Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2022

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	5.570.083.787,00	9.736.649.668,00
Jumlah	5.570.083.787,00	9.736.649.668,00

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp57.315.318.073,64. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp34.084.013.537,36. Selisih kurang dari aktivitas investasi sebesar Rp90.495.671.796,00. Selisih kurang dari aktivitas pendanaan sebesar Rp855.508.220,00 dan selisih dari aktivitas transitoris sebesar Rp48.151.595,00. Apabila penurunan arus kas tahun 2022 sebesar Rp57.315.318.073,64 ditambah dengan saldo awal kas 2022 sebesar Rp308.713.641.215,64 maka saldo kas per 31 Desember 2022 berjumlah Rp251.398.323.142,00.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp251.398.323.142,00 terdiri dari

saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp233.273.390.848,00, Saldo di kas di Bendahara pengeluaran Rp155.655.636,00, Saldo di Kas di Bendahara Penerimaan Rp800.000,00, Saldo Kas di RSUD sebesar Rp11.048.201.198,00, Kas di BLUD Air Minum Rp1.586.321.584,00, Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp4.980.283.810,00 Utang PFK dari pengelolaan Dana BOS Rp125.000,00.

4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.084.013.537,36 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp 1.330.186.281.173,53 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp1.296.102.267.636,17.

Tabel 4.124 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.330.186.281.173,53	1.519.082.577.175,11
Jumlah Arus Keluar Kas	1.296.102.267.636,17	1.234.452.140.063,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	34.084.013.537,36	284.630.437.112,11

4.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.330.186.281.173,53 terdiri dari :

Tabel 4.125 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	193.890.140.403,00	179.891.802.692,00
Penerimaan Retribusi Daerah	11.294.079.342,00	11.548.482.640,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	9.956.960.000,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	177.617.892.290,53	202.654.762.893,11
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	54.229.638.467,00	61.309.116.578,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.604.255.359,00	47.781.705.502,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	519.937.401.610,00	530.425.978.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	161.287.016.436,00	131.759.768.941,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.528.168.000,00	52.247.274.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	146.414.475.669,00	123.865.281.737,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	12.360.600.000,00	105.707.342.961,00
Penerimaan Hibah	-	6.700.327.000,00
Dana BOS	-	55.161.824.000,00

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	71.950.231,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.330.186.281.173,53	1.519.082.577.175,11

4.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.296.102.267.636,17 terdiri dari:

Tabel 4.126 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pembayaran Pegawai	658.940.382.015,00	643.977.236.028,00
Pembayaran Barang	588.254.398.560,17	555.391.457.278,00
Pembayaran Bunga	234.672.144,00	308.874.114,00
Pembayaran Subsidi	-	410.574.000,00
Pembayaran Hibah	39.388.772.249,00	18.999.042.200,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.133.871.600,00	2.571.530.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	100.000.000,00	-
Pembayaran Tak Terduga	6.050.171.068,00	12.793.426.443,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Restribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.296.102.267.636,17	1.234.452.140.063,00

4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp90.495.671.796,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp851.993.938,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp91.347.665.734,00

Tabel 4.127 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:		
Jumlah Arus Masuk Kas	851.993.938,00	1.052.983.328,00
Jumlah Arus Keluar Kas	91.347.665.734,00	247.060.564.786,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(90.495.671.796,00)	(246.007.581.458,00)

4.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan

31 Desember 2022 sebesar Rp851.993.938,00

Tabel 4.128 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	809.394.038,00	-
Penjualan atas Gedung dan bangunan	32.941.100,00	10.511.600,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	1.042.471.728,00
Penjualan atas Aset Lainnya	9.658.800,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	851.993.938,00	1.052.983.328,00

4.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk belanja modal selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp91.347.665.734,00 terdiri dari:

Tabel 4.129 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	171.269.485,00	1.924.413.918,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	22.831.957.980,00	40.367.666.054,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	40.246.977.335,00	92.323.402.639,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.911.640.321,00	109.597.606.795,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.408.197.523,00	2.847.475.380,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.777.623.090,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	91.347.665.734,00	247.060.564.786,00

4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(855.508.220,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp855.508.220,00.

Tabel 4.130 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)

4.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 4.131 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-

4.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari:

Tabel 4.132 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggarna 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	855.508.220,00	855.508.220,00

Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp10.633.131.310,00 terdiri dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp9.777.623.090,00

4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan. beban dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp48.151.595,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp87.773.363.792,14 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp.87.821.515.387,14

Tabel 4.133 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris :		
Jumlah Arus Masuk Kas	87.773.363.792,14	94.401.906.222,00
Jumlah Arus Keluar Kas	87.821.515.387,14	94.364.065.094,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(48.151.595,00)	37.841.128,00

4.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.773.363.792,14 terdiri dari :

Tabel 4.134 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. PPN	17.421.899.623,26	34.407.490.526,00
b. PPh 21	25.330.711.656,69	31.240.353.933,00
c. PPh 22	1.745.294.332,81	1.316.033.690,00
d. PPh 23	1.906.605.396,38	1.227.729.933,00
e. PPh Pasal 4 Ayat (2)	22.206.295.328,00	6.471.575.972,00
f. Iuran Wajib Pegawai 1%	3.654.898.156,00	-
g. Jaminan Kesehatan 4%	21.482.186,00	3.567.089.877,00
h. Iuran Wajib Pegawai 8%	15.486.177.113,00	16.171.632.291,00
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	87.773.363.792,14	94.401.906.222,00

4.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.821.515.387,14 terdiri dari :

Tabel 4.135 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. PPN	17.461.979.394,26	34.402.421.809
b. PPh 21	25.331.479.000,69	31.214.568.555
c. PPh 22	1.745.294.332,81	1.316.033.690
d. PPh 23	1.913.909.876,38	1.225.492.190
e. PPh Pasal 4 Ayat (2)	22.206.295.328,00	6.471.575.972
f. Iuran Wajib Pegawai 1%	3.654.898.156,00	-
g. Jaminan Kesehatan 4%	21.482.186,00	3.564.787.879
h. Iuran Wajib Pegawai 8%	15.486.177.113	16.169.184.999
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	87.821.515.387,14	94.364.065.094,00

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi)
6. Pendapatan Yang Ditangguhkan
7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 2.949.071.814.343,26 atau naik 1,13% dari Ekuitas tahun sebelumnya, yaitu Rp2.916.024.217.594,05

4.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021. Nilai Ekuitas Awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2021, yaitu :

	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2.916.024.217.594,05

4.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yaitu :

	1 Jan 2022 – 31 Des 2022 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(77.127.266.666,03)

4.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar sebesar Rp0,39 merupakan saldo pembulatan pada RSUD Cibabat dikarenakan Bank BJB tidak dapat mengakomodir transaksi desimal.
- b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2022 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	31 Desember 2022
Koreksi Nilai Piutang	(687.988.078,24)

c. Koreksi Nilai Utang

Koreksi Nilai Utang merupakan koreksi atas nilai.

	31 Desember 2022
Koreksi Nilai Utang	(60.087.009,00)

d. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi Persediaan sampai dengan Tahun 2022 karena perubahan kebijakan akuntansi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPBD.

	31 Desember 2022
Koreksi Nilai Persediaan	(20.920.936,00)

e. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi terhadap Nilai Aset Tetap dilakukan karena adanya perpindahan aset tetap antar SKPD satu dengan SKPD lainnya, aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dibawah tahun 2022 dan hibah aset tetap kepada masyarakat.

	31 Desember 2022
Koreksi Nilai Aset Tetap	17.471.159.667,00

f. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Tidak ada koreksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2022

	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Aset Lain.lain	(5.000.000,00)

4.6.4. Lain-Lain (Perubahan Basis Akuntansi)

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) terdiri dari penyisihan piutang sebesar Rp1.041.345.213,18 dan juga penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp92.624.323.886,92.

4.6.5. Koreksi Utang PFK

Koreksi utang PFK sebesar Rp340.844,00 merupakan setoran PFK yang masih terdapat dalam Rekening Penampung Bank BJB Per 31 Desember 2021 dan baru disetorkan pada Tahun 2022.

4.6.6. Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah

Kerugian Investasi Pemerintah Daerah berasal dari kenaikan investasi Pemerintah Daerah dari dana bergulir Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp164.172.773,00)

4.6.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang diperoleh dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan RK PPKD dikurangi/ditambah dengan koreksi-koreksi yang berasal dari dampak kumulatif,

perubahan basis akuntansi dan pendapatan yang ditangguhkan. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021
Ekuitas Akhir	2.949.071.814.343,26

Rincian disajikan di **Lampiran 22.**

BAB V

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)

Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan di-otorisasi untuk terbit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dilaksanakan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposit Facility*) yaitu fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Rekening TDF Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah **Rek Lain BI TDF TKD Kota Cimahi Nomor 519000329980** yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 memiliki saldo Rp8.491.417.379,00. Atas rekening tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapatkan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.059.426,94 yang baru kami ketahui setelah tanggal neraca dan kami catat sebagai Piutang Jasa Giro.

5.2 Profil Entitas

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengandung paradigma baru dalam pemerintahan daerah dimana tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan, keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi geografis suatu wilayah secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Pengembangan Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimilikinya.

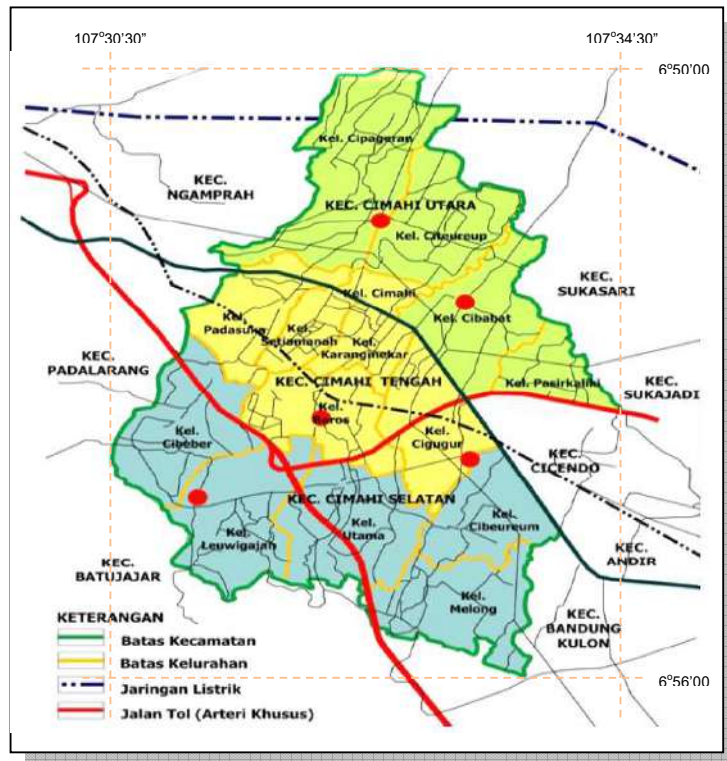
Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta; Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai

sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Cimahi adalah 40,25 km² (4.025,73 ha) yang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan, dengan letak wilayah administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada bagian timur dan selatan. Kabupaten Bandung pada bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat pada bagian utara, barat dan selatan.

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara 13,31 km² dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirkaliki 3,23 km², Kelurahan Cibabat 2,87 km², Kelurahan Citeureup 1,27 km², dan Kelurahan Cipageran 5,94 km². Kemudian untuk Kecamatan Cimahi Tengah memiliki luas wilayah 10,11 dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baros 2,25 km², Kelurahan Cigugur tengah 2,35 km², Kelurahan Karang Mekar 1,31 km², Kelurahan Setiamanah 1,38 km², Kelurahan Padasuka 1,98 km², dan Kelurahan cimahi 0,84 km². Dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki luas wilayah 16,83 km² dibagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Utama 3,13 km². Kelurahan Leuwigajah 2,64 km². Kelurahan Cibeber 3,33 km². Kelurahan Cibeureum 3,93 km² dan Kelurahan Melong 3,8 km².

Gambar 5.1
Peta Administrasi Kota Cimahi



Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang, sebagai berikut :

1. Sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2000 termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
2. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi yaitu 1.446,59 ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.
3. Fungsi lindung Garis Sempadan Sungai (GSS), jalan tol dan jalur kereta api. Selain menguntungkan Kota Cimahi juga menjadi hambatan dalam pengembangan kota, yang menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

Kendala-kendala tersebut tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan namun kendala tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2022

Pada Tahun 2022 terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dimana Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiana yang diangkat menjadi Wali Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5089 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat per tanggal 22 Oktober habis masa jabatannya dan digantikan oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan S.Si, M.M. yang diangkat menjadi Penjabat Wali Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5772 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah kota Cimahi melakukan perubahan satuan kerja perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:

Tabel 5.1 Daftar SKPD Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	DINAS KESEHATAN
4	RSUD CIBABAT
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS SOSIAL
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
19	SEKRETARIAT DAERAH
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21	SEKRETARIAT DPRD
22	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
23	INSPEKTORAT
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
25	KECAMATAN CIMAHI UTARA
26	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
29	DINAS ARSIP DAERAH
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tipeologi dan urusan pemerintahan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;
 - 9) Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi;
 - 12) Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - 13) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;

- 15) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
- 16) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; dan
- 17) Dinas Arsip Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan;

e. Badan meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :

- a) Kelurahan Cipageran;
- b) Kelurahan Citeureup;
- c) Kelurahan Cibabat;
- d) Kelurahan Pasirkaliki;

2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Padasuka;
- b) Kelurahan Setiamanah;
- c) Kelurahan Karangmekar;
- d) Kelurahan Baros;
- e) Kelurahan Cimahi;
- f) Kelurahan Cigugur Tengah;

3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Cibeureum;
- b) Kelurahan Cibeber;
- c) Kelurahan Leuwigajah;

- d) Kelurahan Utama;
- e) Kelurahan Melong;

5.4 Hubungan Dengan DPRD, BPK serta Forkopimda

5.4.1 Hubungan dengan DPRD

Hubungan dengan DPRD merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dan di dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Pemerintah serta fungsi DPRD sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD berjalan secara dinamis sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, serta tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan ini terlihat diantaranya dalam penyusunan rencana anggaran (KUA, PPAS, RAPBD dan APBD) maupun dalam pansus-pansus menghasilkan perda. Selain itu, secara berkala ada forum kebersamaan eksekutif-legislatif mendengarkan pencerahan dari narasumber yang relevan (sosial/politik/ekonomi/hukum).

5.4.2 Hubungan dengan BPK

Hubungan dengan BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sampai saat ini telah berjalan dengan baik.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait masih adanya catatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dengan harapan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi pada tahun mendatang tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5.4.3 Hubungan dengan Forkopimda

Hubungan dengan Forkopimda terjalin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing seperti dengan Unsur Pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Harmonisasi yang telah terjalin diwujudkan dalam Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Daerah serta Koordinasi pada setiap event sosial dan kemasyarakatan.

5.5 Pengaruh *Stakeholder* (pemegang kepentingan): DPRD

Pengaruh *stakeholder* DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup kuat, baik dalam proses penganggaran maupun inisiatif penyusunan produk legislatif/perda. Pengaruh DPRD dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

5.6 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan

Dampak lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor:

1. Lingkungan internal;
Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi.
2. Lingkungan eksternal :
 - a. Kenyamanan lingkungan kerja yang belum optimal;
 - b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan laporan keuangan;
 - c. Pendidikan dan latihan yang diberikan terlalu singkat.

5.7 Alamat Kantor

Tabel 5.2 Alamat Kantor SKPD Kota Cimahi

No	Nama	Alamat	Telepon	Faximile	Keterangan
1	Kepala Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654016	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel
2	SekretariatDewan/DPRD	Jl.Hj.Julaeha Kartasasmita	022- 6633315	6633315	Langsung
3	Inspektorat Kota	Jl. TTUC Jl. Pesantren, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513	022- 6630330	6654274 Psw 125	Langsung
4	Sekretariat Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274	5554274	Langsung
5	BPKAD	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274 Psw 117/132	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel
6	Mall Pelayanan Publik	Jl. Aruman, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat	022- 6632601/ 6641454	022- 6641454	Langsung

BAB VI

PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Belanja Hibah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022

I Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NOSPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	LS	02.23/02.0/000053/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	27-Jun-22	02.23/03.0/000056/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	44.739,00	02.23/04.0/000053/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	27-Jun-22	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi	300.000.000
2	STS	STS Pengembalian 02.23/07.0/000001/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022					29-Dec-22	Pengembalian Belanja Hibah Uang KPU Kota Cimahi	- 27.300.000,00
Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat									272.700.000

II Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

1	LS	02.23/02.0/000058/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	13-Jun-22	02.23/03.0/000060/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	44.725,00	02.23/04.0/000059/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	15-Jun-22	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Soedirman di Pusdikarmed	24.827.900
2	LS	02.23/02.0/000057/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	13-Jun-22	02.23/03.0/000061/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	44.725,00	02.23/04.0/000060/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	15-Jun-22	100% Perencanaan Rehabilitasi Kodim	24.888.400
3	LS	02.23/02.0/000059/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	13-Jun-22	02.23/03.0/000064/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	44.725,00	02.23/04.0/000061/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.01/6/2022	15-Jun-22	100 % Perencanaan Rehabilitasi Gedung Subdenpom	24.855.400
4	LS	02.23/02.0/000153/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	08-Nov-22	02.23/03.0/000156/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	44.873,00	02.23/04.0/000155/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	09-Nov-22	100% Rehabilitasi Gedung Subdenpom	158.300.600
5	LS	02.23/02.0/000169/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	21-Nov-22	02.23/03.0/000172/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	44.886,00	02.23/04.0/000167/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	22-Nov-22	100% Rehabilitasi Gedung Soedirman di Pusdikarmed	158.450.000
6	LS	02.23/02.0/000170/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	21-Nov-22	02.23/03.0/000170/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	44.886,00	02.23/04.0/000169/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	22-Nov-22	100% Pengawasan Rehabilitasi Gedung Soedirman di Pusdikarmed	14.937.200
7	LS	02.23/02.0/000201/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	28-Nov-22	02.23/03.0/000201/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	44.893,00	02.23/04.0/000202/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	30-Nov-22	100% Rehabilitasi Gedung Kodim	156.418.700
8	LS	02.23/02.0/000249/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	12-Dec-22	02.23/03.0/000247/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	44.907,00	02.23/04.0/000237/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	15-Dec-22	100% Pengawasan Rehabilitasi Kodim	14.959.400
9	LS	02.23/02.0/000248/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	12-Dec-22	02.23/03.0/000246/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	44.907,00	02.23/04.0/000245/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	15-Dec-22	100% Pengawasan Rehabilitasi Gedung Subdenpom	14.951.100
10	LS	02.23/02.0/000070/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	27-Jun-22	02.23/03.0/000084/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	44.739,00	02.23/04.0/000076/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	30-Jun-22	100% Perencanaan Lanjutan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari	24.701.800
11	LS	02.23/02.0/000267/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	15-Dec-22	02.23/03.0/000268/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	44.910,00	02.23/04.0/000259/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	16-Dec-22	100% Lanjutan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari	159.352.200,00
12	LS	02.23/02.0/000275/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	16-Dec-22	02.23/03.0/000276/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	44.911,00	02.23/04.0/000268/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022	19-Dec-22	100% Pengawasan Lanjutan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari	14.903.900,00
Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat									791.546.600,00

III Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

1	LS	02.23/02.0/000046/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022	28-Apr-22	02.23/03.0/000047/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022	44.679,00	02.23/04.0/000042/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022	28-Apr-22	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga, yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PMI Kota Cimahi)	500.000.000
2	LS	02.23/02.0/000107/LS/1.05.0.00.0.00.03.0000/P.04/11/2022	04-Nov-22	02.23/03.0/000107/LS/1.05.0.00.0.00.03.0000/P.04/11/2022	44.869,00	02.23/04.0/000106/LS/1.05.0.00.0.00.03.0000/P.04/11/2022	07-Nov-22	Pembayaran Dana Hibah Anggaran Belanja Daerah Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2022 kepada Kepolisian Resor Cimahi	805.620.000
3	LS	02.23/02.0/000021/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2022	22-Mar-22	02.23/03.0/000020/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2022	44.642,00	02.23/04.0/000020/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2022	24-Mar-22	Belanja Hibah uang KONI Kota Cimahi Tahun 2022	4.510.285.000
4	LS	02.23/02.0/000036/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2022	31-Mar-22	02.23/03.0/000036/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/3/2022	44.651,00	02.23/04.0/000034/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/M/4/2022	05-Apr-22	Belanja Hibah Uang NPCI Kota Cimahi	500.000.000
5	LS	02.23/02.0/000038/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.01/4/2022	19-Apr-22	02.23/03.0/000038/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.01/4/2022	44.670,00	02.23/04.0/000036/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.01/4/2022	19-Apr-22	Belanja Hibah Uang Kwarcab gerakan Pramuka Kota Cimahi	121.631.500
6	LS	02.23/02.0/000041/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.01/4/2022	21-Apr-22	02.23/03.0/000041/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.01/4/2022	44.672,00	02.23/04.0/000039/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.01/4/2022	25-Apr-22	BELANJA HIBAH UANG KORMI KOTA CIMAHI	100.000.000
7	LS	02.23/02.0/000077/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/7/2022	27-Jul-22	02.23/03.0/000080/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/7/2022	44.770,00	02.23/04.0/000075/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/7/2022	28-Jul-22	Belanja Hibah Uang kepada KONI Kota Cimahi	7.989.715.000,00
8	LS	02.23/02.0/000083/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	05-Agu-22	02.23/03.0/000083/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	44.778,00	02.23/04.0/000081/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	08-Agu-22	Belanja Hibah uang NPCI Kota Cimahi	500.000.000
9	LS	02.23/02.0/000082/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	05-Agu-22	02.23/03.0/000082/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	44.778,00	02.23/04.0/000080/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	08-Agu-22	Belanja Hibah Uang KORMI Kota Cimahi	100.000.000
10	LS	02.23/02.0/000088/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	15-Agu-22	02.23/03.0/000088/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	44.788,00	02.23/04.0/000086/LS/2.22.3.26.2.19.04.0000/P.02/8/2022	16-Agu-22	Belanja Hibah Uang Gerakan Pramuka Kwarcab Cimahi	178.368.500
11	LS	02.23/02.0/000093/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/5/2022	24-Mei-22	02.23/03.0/000094/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/5/2022	44.705,00	02.23/04.0/000092/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.01/5/2022	24-Mei-22	Belanja Hibah Uang Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi Tahun 2022	200.000.000
12		BOP PAUD - Di Transfer Langsung dari KPPN ke Rekening Penerima							4.882.209.000
13		BOP KESETARAAN - Di Transfer Langsung dari KPPN ke Rekening Penerima							2.534.900.000
14	STS	STS Pengembalian					30-Jan-23	Pengembalian Hibah KONI	- 126.592.597,00
15	STS	STS Pengembalian					20-Jan-23	Pengembalian Hibah KONI	- 28.453.039,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi									22.767.683.364,00
IV	Belanja Hibah Dana BOS								
1	Sekolah SWASTA - Di Transfer Langsung dari KPPN ke Rekening Penerima								14.010.515.835
Belanja Hibah Dana BOS									14.010.515.835

V Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1	LS	02.23/02.0/000051/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	24-Jun-22	02.23/03.0/000054/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	44.736,00	02.23/04.0/000051/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	27-Jun-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) TA 2022	110.401.056
2	LS	02.23/02.0/000052/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	24-Jun-22	02.23/03.0/000055/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	44.736,00	02.23/04.0/000052/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	27-Jun-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) TA 2022	126.057.708
3	LS	02.23/02.0/000050/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	24-Jun-22	02.23/03.0/000053/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	44.736,00	02.23/04.0/000050/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	27-Jun-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TA 2022	278.220.150
4	LS	02.23/02.0/000052/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2022	24-Jun-22	02.23/03.0/000069/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	44.747,00	02.23/04.0/000066/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	06-Jul-22	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat TA 2022	179.984.457
5	LS	02.23/02.0/000063/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	05-Jul-22	02.23/03.0/000066/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	44.747,00	02.23/04.0/000062/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	06-Jul-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Hati Nurani (HANURA) TA 2022	56.577.447
6	LS	02.23/02.0/000064/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	05-Jul-22	02.23/03.0/000067/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	44.747,00	02.23/04.0/000064/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	06-Jul-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) TA 2022	74.198.916
7	LS	02.23/02.0/000062/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	05-Jul-22	02.23/03.0/000065/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	44.747,00	02.23/04.0/000063/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	06-Jul-22	Bantuan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) TA 2022	216.269.109
8	LS	02.23/02.0/000061/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	05-Jul-22	02.23/03.0/000064/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	44.747,00	02.23/04.0/000061/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	06-Jul-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) TA 2022	116.630.712
9	LS	02.23/02.0/000065/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	05-Jul-22	02.23/03.0/000068/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	44.747,00	02.23/04.0/000065/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022	06-Jul-22	Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR) TA 2022	168.535.917
10	LS	02.23/02.0/000080/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022	11-Agu-22	02.23/03.0/000083/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022	44.784,00	02.23/04.0/000080/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022	11-Agu-22	Bantuan keuangan Partai Politik TA 2022	219.450.978
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik									1.546.326.450,00
TOTAL BELANJA HIBAH									39.388.772.249,00

Lampiran 1

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NO SPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	TU	02.23/02.0/000019/TU/1.01.0.00.0.0.01.0000/P.04/11/2022	23-Nov-22	02.23/03.0/000016/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	44.888,00	02.23/04.0/000016/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	24-Nov-22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jenjang SD) Tahun Anggaran 2022	1.459.571.600
2	TU	02.23/02.0/000018/TU/1.01.0.00.0.0.01.0000/P.04/11/2022	22-Nov-22	02.23/04.0/000015/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	44.888,00	02.23/03.0/000015/TU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2022	22-Nov-22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu (Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jenjang SMP) Tahun Anggaran 2022	1.674.300.000
JUMLAH									3.133.871.600,00

Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	Piutang Pajak :					
	Piutang pajak daerah					
	1) Pajak Hotel	2022	19.580.880,00	295.722.582,00	300.018.582,00	15.284.880,00
	2) Pajak Restoran	2022	40.929.897,00	23.272.329.594,00	23.132.936.631,00	180.322.860,00
	3) Pajak Reklame	2022	916.986.235,00	3.005.511.600,00	2.988.440.000,00	934.057.835,00
	4) Pajak Hiburan dan Tontonan	2022	-	461.850.519,00	461.850.519,00	-
	5) Pajak Penerangan Jalan Umum	2022	-	41.156.883.209,00	41.156.883.209,00	-
	6) Pajak Genset Non PLN	2022	-	13.636.488,00	13.636.488,00	-
	7) Pajak Parkir	2022	433.000,00	1.128.004.404,00	1.128.146.604,00	290.800,00
	8) Pajak Air Tanah	2022	886.660.956,00	15.899.944.873,00	15.724.487.391,00	1.062.118.438,00
	9) BPHTB	2022	-	51.047.178.518,00	51.047.178.518,00	-
	10) PBB	2022	127.028.120.025,00	63.394.534.442,00	57.936.562.461,00	132.486.092.006,00
Jumlah			128.892.710.993,00	199.675.596.229,00	193.890.140.403,00	134.678.166.819,00

Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2022

Penyisihan Piutang Pajak Hotel 2022

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2021	14.684.880,00			14.684.880,00	1.468.488,00				
2022	600.000,00	600.000,00	3.000,00						
Jumlah	15.284.880,00	600.000,00	3.000,00	14.684.880,00	1.468.488,00	-	-	-	-
Jumlah Pokok		15.284.880,00							
Jumlah Penyisihan		1.471.488,000							
NRV		13.813.392,00							

Penyisihan Piutang Pajak Restoran 2022

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2021	1.732.500,00			1.732.500,00	173.250,00				
2022	178.590.360,00	178.590.360,00	892.951,80						
Jumlah	180.322.860,00	178.590.360,00	892.951,80	1.732.500,00	173.250,00	-	-	-	-
Jumlah Pokok		180.322.860,00							
Jumlah Penyisihan		1.066.201,80							
NRV		179.256.658,20							

12.148.557,00

Penyisihan Piutang Pajak Reklame 2022

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2012	118.091.438,00							118.091.438,00	118.091.438,00
2013	2.031.250,00							2.031.250,00	2.031.250,00
2014	7.228.422,00							7.228.422,00	7.228.422,00
2015	3.565.625,00							3.565.625,00	3.565.625,00
2016	-								
2017	-								
2018	-								
2019	31.739.200,00		-			31.739.200,00	15.869.600,00		
2020	211.785.700,00		-	211.785.700,00	21.178.570,00				
2021	165.205.100,00		-	165.205.100,00	16.520.510,00				
2022	394.411.100,00	394.411.100,00	1.972.055,50						
Jumlah	934.057.835,00	394.411.100,00	1.972.055,50	376.990.800,00	37.699.080,00	31.739.200,00	15.869.600,00	130.916.735,00	130.916.735,00
Jumlah Pokok		934.057.835,00							
Jumlah Penyisihan		186.457.470,50							
NRV		747.600.364,50							

Penyisihan Piutang Pajak Parkir 2022

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2020	175.800,00		-	175.800,00	17.580,00				
2022	115.000,00	115.000,00	575,00						
Jumlah	290.800,00	115.000,00	575,00	175.800,00	17.580,00	-	-	-	-
Jumlah Pokok		290.800,00							
Jumlah Penyisihan		18.155,000							
NRV		272.645,00							

-

Penyisihan Piutang Pajak Air 2022

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2012	63.977.520,00							63.977.520,00	63.977.520,00
2013	45.403.164,00							45.403.164,00	45.403.164,00
2014	2.911.232,00							2.911.232,00	2.911.232,00
2015	-								
2016	-								
2017	-								
2018	134.077.020,00					134.077.020,00	67.038.510,00		
2019	131.759.502,00					131.759.502,00	65.879.751,00		
2020	101.341.629,00			101.341.629,00	10.134.162,90				
2021	138.560.340,00			138.560.340,00	13.856.034,00				
2022	444.088.031,00	444.088.031,00	2.220.440,16						
Jumlah	1.062.118.438,00	444.088.031,00	2.220.440,16	239.901.969,00	23.990.196,90	265.836.522,00	132.918.261,00	112.291.916,00	112.291.916,00
Jumlah Pokok		1.062.118.438,00							
Jumlah Penyisihan		271.420.814,055							
NRV		790.697.623,95							

-

Penyisihan Piutang PBB 1994-2022

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2013	8.767.681.907,00							8.767.681.907,00	8.767.681.907,00
2014	8.311.061.608,00							8.311.061.608,00	8.311.061.608,00
2015	9.338.260.356,00							9.338.260.356,00	9.338.260.356,00
2016	8.907.882.189,00							8.907.882.189,00	8.907.882.189,00
2017	9.580.972.017,00					9.580.972.017,00	4.790.486.008,50		
2018	11.681.869.591,00					11.681.869.591,00	5.840.934.795,50		
2019	15.156.844.034,00					15.156.844.034,00	7.578.422.017,00		
2020	22.760.156.194,00			22.760.156.194,00	2.276.015.619,40				
2021	25.485.353.647,00			25.485.353.647,00	2.548.535.364,70				
2022	12.496.010.463,00	12.496.010.463,00	62.480.052,32						
Jumlah	132.486.092.006,00	12.496.010.463,00	62.480.052,32	48.245.509.841,00	4.824.550.984,10	36.419.685.642,00	18.209.842.821,00	35.324.886.060,00	35.324.886.060,00
Jumlah Pokok		132.486.092.006,00							
Jumlah Penyisihan		58.421.759.917,42							
TOTAL		74.064.332.088,59							

Piutang Pajak Hotel	1.471.488,00
Piutang Pajak Restoran	1.066.201,80
Piutang Pajak Reklame	186.457.470,50
Piutang Pajak Parkir	18.155,00
Piutang Pajak Air	271.420.814,06
Piutang PBB	58.421.759.917,42
Total Penyisihan	58.882.194.046,77

Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022

Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Penambahan Piutang Tahun 2022	Pengurangan Piutang Tahun 2022	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 31 Desember 2022
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	105.001.074,00	736.788.500,00	733.502.750,00	108.286.824,00	101.766.876,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	2.900.000,00	13.800.000,00	12.750.000,00	3.950.000,00	3.245.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Laboratorium (DLH)	31.548.000,00	656.233.000,00	641.968.500,00	45.812.500,00	16.578.665,00
6	Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	86.411.700,00	788.765.700,00	790.645.875,00	84.531.525,00	62.262.525,00
7	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	33.416.700,00	-	33.416.700,00	9.495.912,25
8	Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.992.752.682,00	3.704.924.850,00	2.946.431.850,00	2.751.245.682,00	2.117.014.375,25
9	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	495.231.061,00	470.250.161,00	24.980.900,00	2.498.090,00
	Jumlah	2.271.651.667,00	6.429.159.811,00	5.595.549.136,00	3.105.262.342,00	2.365.899.654,50

Penyisihan Piutang Retribusi

A. PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2021	Piutang Retribusi IMB tahun 2021	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 99.807.224,00	Rp 99.807.224,00
2	21/09/2022	DADANG MULYANA		Rp -		Rp -	Rp 2.960.300	Rp 1.480.150,00		Rp -
3	24/10/2022	DEDE ANDI		Rp -	Rp 4.756.900,00	Rp 475.690,00				Rp -
4	06/12/2022	FATMAWATI	762.400,00	Rp 3.812,00						
		JUMLAH	Rp 762.400,00	Rp 3.812,00	Rp 4.756.900,00	Rp 475.690,00	Rp 2.960.300,00	Rp 1.480.150,00	Rp 99.807.224,00	Rp 99.807.224,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	Rp 108.286.824,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IMB TAHUN 2022	Rp 101.766.876,00							

B. PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2021	Piutang Retribusi IG tahun 2021	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Rp 51.898.211,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IG TAHUN 2022	Rp 51.898.211,00							

C. PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2021	Piutang Retribusi IT tahun 2021	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	2.900.000,00
2	06/04/2022	KSU TUNAS MANDIRI D 1994 TZ		Rp	-		Rp	150.000,00	Rp	75.000,00
3	26/08/2022	KSU TUNAS MANDIRI D 1996 SG		Rp	-		Rp	150.000,00	Rp	75.000,00
4	23/09/2023	PT. BAGJA TRANSPORT INDONESIA D 1983		Rp	-		Rp	150.000,00	Rp	75.000,00
5	23/09/2023	PT. BAGJA TRANSPORT INDONESIA D 1904 TZ		Rp	-		Rp	150.000,00	Rp	75.000,00
6	10/10/2022	PT. BAGJA TRANSPORT INDONESIA D 1920 TF		Rp	-	Rp	150.000,00	Rp	15.000,00	
7	10/10/2022	PT. BAGJA TRANSPORT INDONESIA D 1940 SC		Rp	-	Rp	150.000,00	Rp	15.000,00	
8	10/10/2022	PT. BAGJA TRANSPORT INDONESIA D 1975 SA		Rp	-	Rp	150.000,00	Rp	15.000,00	
		JUMLAH	Rp	-	Rp	-	Rp	450.000,00	Rp	45.000,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	Rp	3.950.000,00						
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IT TAHUN 2022	Rp	3.245.000,00						

D. PIUTANG KARTU PENGAWASAN

No	Tahun	Rincian	0 s/d 1 Tahun (Lancar)		> 1 s/d 2Tahun (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 Tahun (Diragukan)		>5 Tahun (Macet)	
			Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	2011	Heru Gunawan	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
2	2011	Iming Vertical	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
3	2011	Yuliani Herwanti	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
4	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
5	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
6	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
7	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
8	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00
9	2011	Menna Ria Sitorus	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
10	2011	Nandang Sumitra	-	-	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN		1.140.000,00						
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KARTU PENGAWASAN 2022		1.140.000,00						

E. PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	2021	Piutang sampai dengan 2021							Rp	15.985.500,00
2	November	PT Sansan Saudaratex 2			Rp	1.387.500,00	Rp	138.750,00		
3	November	PT Sansan Saudaratex 2			Rp	815.500,00	Rp	81.550,00		
4	November	CV Karunia Warna Abadi			Rp	682.500,00	Rp	68.250,00		
5	November	PT Logam Bima			Rp	1.256.000,00	Rp	125.600,00		
6	November	PT Indah Jaya			Rp	532.500,00	Rp	53.250,00		
7	Desember	PT Rohto	Rp	422.500	Rp	2.112,50				
8	Desember	PT Benang warna	Rp	682.500	Rp	3.412,50				
9	Desember	PT Setia busanatex	Rp	1.245.000	Rp	6.225,00				
10	Desember	PT Jenshiang	Rp	607.500	Rp	3.037,50				
11	Desember	PT Diamond	Rp	527.500	Rp	2.637,50				
12	Desember	PT Aswindo	Rp	1.245.000	Rp	6.225,00				

13	Desember	PT Trigunawan	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
14	Desember	PT Indo Extrusion	Rp	474.500	Rp	2.372,50												
15	Desember	PT Indah Jaya	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
16	Desember	PT Sansan Saudaratex 2	Rp	1.286.000	Rp	6.430,00												
17	Desember	PT Sansan Saudaratex 5	Rp	712.500	Rp	3.562,50												
18	Desember	PT Sansan Saudaratex 2	Rp	763.500	Rp	3.817,50												
19	Desember	PT Sansan Saudaratex 5	Rp	763.500	Rp	3.817,50												
20	Desember	PT Mewah	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
21	Desember	PT Garuda mas	Rp	1.275.000	Rp	6.375,00												
22	Desember	PT Garuda mas	Rp	457.500	Rp	2.287,50												
23	Desember	PT Dwimulya	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
24	Desember	CV Asiantex	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
25	Desember	PT Kahatex	Rp	1.275.000	Rp	6.375,00												
26	Desember	PT Kahatex	Rp	1.855.000	Rp	9.275,00												
27	Desember	PT SIAP	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
28	Desember	PT Nisshinbo	Rp	682.500	Rp	3.412,50												
29	Desember	Klinik Yudisman	Rp	1.278.000	Rp	6.390,00												
30	Desember	PT Sama Indah	Rp	1.306.000	Rp	6.530,00												
31	Desember	PT Logam Bima	Rp	1.256.000	Rp	6.280,00												
32	Desember	PT Indah Jaya	Rp	2.055.000	Rp	10.275,00												
33	Desember	PT Diamond	Rp	888.000	Rp	4.440,00												
		JUMLAH	Rp	25.153.000,00	Rp	125.765,00	Rp	4.674.000,00	Rp	467.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	15.985.500,00	Rp	15.985.500,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM	Rp	45.812.500,00														
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI LAB TAHUN 2022	Rp	16.578.665,00														

F. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (BITC)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)									
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%								
1	s.d 2021	Piutang BITC sd. 2021		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	59.505.525,00	Rp	59.505.525,00					
2	JULI 2022	ARMO		Rp	-	Rp	-	Rp	600.000,00	Rp	300.000,00							
3	JULI 2022	BRAKA		Rp	-	Rp	-	Rp	600.000,00	Rp	300.000,00							
4	AGUSTUS 2022	ARMO		Rp	-	Rp	-	Rp	600.000,00	Rp	300.000,00							
5	AGUSTUS 2022	BRAKA		Rp	-	Rp	-	Rp	600.000,00	Rp	300.000,00							
6	SEPTEMBER 2022	ARMO		Rp	-	Rp	-	Rp	600.000,00	Rp	300.000,00							
7	SEPTEMBER 2022	BRAKA		Rp	-	Rp	-	Rp	600.000,00	Rp	300.000,00							
8	NOVEMBER 2022	ACDI LT.1		Rp	-	Rp	6.741.000,00	Rp	674.100,00									
9	NOVEMBER 2022	ACDI LT. 3		Rp	-	Rp	2.205.000,00	Rp	220.500,00									
10	DESEMBER 2022	ACDI LT.1	Rp	6.741.000,00	Rp	33.705,00												
11	DESEMBER 2022	ACDI LT. 3	Rp	2.205.000,00	Rp	11.025,00												
12	DESEMBER 2022	HEXAGON	Rp	600.000,00	Rp	3.000,00												
13	DESEMBER 2022	SMARTEK	Rp	2.934.000,00	Rp	14.670,00												
		JUMLAH	Rp	12.480.000,00	Rp	62.400,00	Rp	8.946.000,00	Rp	894.600,00	Rp	3.600.000,00	Rp	1.800.000,00	Rp	59.505.525,00	Rp	59.505.525,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI (BITC)	Rp	84.531.525,00														
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI BITC TAHUN 2022	Rp	62.262.525,00														

G. PIUTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN FASILITAS PASAR/PERTOKOAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	JULI 2022	PT. BRI cabang Cimahi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.569.450,00	Rp 2.784.725,00	Rp -	Rp -
2	AGUSTUS 2022	PT. BRI cabang Cimahi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.569.450,00	Rp 2.784.725,00	Rp -	Rp -
3	SEPTEMBER 2022	PT. BRI cabang Cimahi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.569.450,00	Rp 2.784.725,00	Rp -	Rp -
4	OKTOBER 2022	PT. BRI cabang Cimahi	Rp -	Rp -	Rp 5.569.450,00	Rp 556.945,00			Rp -	Rp -
5	NOVEMBER 2022	PT. BRI cabang Cimahi	Rp -	Rp -	Rp 5.569.450,00	Rp 556.945,00			Rp -	Rp -
6	DESEMBER 2022	PT. BRI cabang Cimahi	Rp 5.569.450,00	Rp 27.847,25					Rp -	Rp -
		JUMLAH	Rp 5.569.450,00	Rp 27.847,25	Rp 11.138.900,00	Rp 1.113.890,00	Rp 16.708.350,00	Rp 8.354.175,00	Rp -	Rp -
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI PERTOKOAN	Rp 33.416.700,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PERTOKOAN TAHUN 2022	Rp 9.495.912,25							

H. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH (RUSUNAWA)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	Des-20	Rusunawa Kota Cimahi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.002.566.432,00	Rp 1.002.566.432,00
2	Des-21	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	788.680.100,00	Rp 788.680.100,00
3	Januari 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	75.100.000,00	Rp 37.550.000,00	Rp -	Rp -
4	Februari 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	58.307.500,00	Rp 29.153.750,00	Rp -	Rp -
	Maret 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	54.322.500,00	Rp 27.161.250,00	Rp -	Rp -
5	Apr-22	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	64.750.000,00	Rp 32.375.000,00	-	Rp -
6	Mei 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	68.162.500,00	Rp 34.081.250,00	-	Rp -
7	Juni 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	72.857.500,00	Rp 36.428.750,00	-	Rp -
8	Juli 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	64.265.000,00	Rp 32.132.500,00	-	Rp -
9	Agustus 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	68.552.500,00	Rp 34.276.250,00	-	Rp -
10	Sep-22	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	82.340.000,00	Rp 41.170.000,00	-	Rp -
11	Oktober 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	94.410.000,00	Rp 9.441.000,00		Rp -	-	Rp -
12	Nov-22	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	112.773.000,00	Rp 11.277.300,00		Rp -	-	Rp -
13	Desember 2022	Rusunawa Kota Cimahi	144.158.650,00	Rp 720.793,25		Rp -		Rp -	-	Rp -
		Jumlah	Rp 144.158.650,00	Rp 720.793,25	Rp 207.183.000,00	Rp 20.718.300,00	Rp 608.657.500,00	Rp 304.328.750,00	Rp 1.791.246.532,00	Rp 1.791.246.532,00
		Jumlah Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2022	Rp 2.751.245.682,00							
		Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2022	Rp 2.117.014.375,25							

I. PIUTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	14 OKTOBER 2022	44-STP-CIMAHI	Rp -	Rp -	Rp 6.378.100,00	Rp 637.810,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	14 OKTOBER 2022	43-STP-CIMAHI	Rp -	Rp -	Rp 4.252.100,00	Rp 425.210,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	14 OKTOBER 2022	42-STP-CIMAHI	Rp -	Rp -	Rp 6.378.100,00	Rp 637.810,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	14 OKTOBER 2022	41-STP-CIMAHI	Rp -	Rp -	Rp 4.783.600,00	Rp 478.360,00			Rp -	Rp -
5	14 OKTOBER 2022	40-STP-CIMAHI	Rp -	Rp -	Rp 2.126.000,00	Rp 212.600,00			Rp -	Rp -
6	14 OKTOBER 2022	39-STP-CIMAHI	Rp -	Rp -	Rp 1.063.000,00	Rp 106.300,00			Rp -	Rp -
		JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp 24.980.900,00	Rp 2.498.090,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	Rp 24.980.900,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2022	Rp 2.498.090,00							

PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI		
Per 31 Desember 2022		
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IMB	= Rp	101.766.876,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IG	= Rp	51.898.211,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IT	= Rp	3.245.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KARTU	= Rp	1.140.000,00
PENGAWAS	= Rp	16.578.665,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LABORATORIUM	= Rp	62.262.525,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	= Rp	9.495.912,25
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (BITC)	= Rp	2.117.014.375,25
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	= Rp	2.498.090,00
PERTOKOAN	= Rp	
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PEMAKAIAN	= Rp	
KEKAYAAN DAERAH RUSUNAWA	= Rp	
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	= Rp	
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA	= Rp	
TELEKOMUNIKASI	= Rp	
Jumlah	Rp	2.365.899.654,50

**Biaya Dibayar Di Muka
Per 31 Desember 2022**

No	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	90.777.649,5800	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
2	DINAS KESEHATAN	88.411.658,3300	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
3	RSU DAERAH CIBABAT	18.200.144,5000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.328.758.854,1000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung; Belanja Sewa Tanah untuk Jalan; Belanja Sewa Bangunan Gudang;
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	184.563.862,4400	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja sewa gedung/kantor/tempat
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	41.863.202,0800	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	85.343.412,5000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	DINAS SOSIAL	36.033.066,6700	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	101.067.099,1700	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
9	DINAS TENAGA KERJA	168.544.400,0000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Bangunan Gudang
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12.298.155,8300	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah;
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	589.850.537,5000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86.854.043,3300	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
14	DINAS PERHUBUNGAN	160.070.333,3400	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.310.768,3300	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang;
18	DINAS ARSIP DAERAH	45.203.293,7500	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Bangunan Gudang
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	44.452.778,3300	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	87.502.500,0000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	182.201.250,0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
22	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.320.577,7800	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	101.770.588,9200	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2.221.781,6700	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.352.970,8300	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
20	SEKRETARIAT DAERAH	326.455.220,6700	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III
21	SEKRETARIAT DPRD	43.321.623,5800	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
26	INSPEKTORAT KOTA	15.270.946,6700	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	11.812.975,0000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	17.965.050,0000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	7.659.976,6700	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	35.561.250,0000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
JUMLAH		3.934.019.971,57	

Catatan:

Biaya di bayar dimuka dihitung secara bulanan

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 1 s.d 15 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan ini

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 16 s.d 31 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan berikutnya

**Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2022**

No	Penanggung Jawab	Data		Hasil Pemantauan														Bagian Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang
	Nama	Kasus	Dokumen TP/TGR	SKTJM/SKP	TMT dan JT Terakhir	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A KERUGIAN KEUANGAN DAERAH																			
1	Dedy Priyatna	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-2002	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.157-keu/2004	001/SKTJM/TP/GR/2011	15-12-2004 dan 15-12-2006	1	15.042.100,00	1	5.900.000,00	0	-	0	-	1	9.142.100,00	9.142.100,00	9.142.100,00		
2	Nur Asih Amari	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.159-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	248.165.000,00	1	69.320.000,00	0	116.707.500,00	0		1	62.137.500,00	62.137.500,00	62.137.500,00		
3	Saefullloh	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.158-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	105.732.500,00	1	19.653.500,00	0	22.012.000,00	0		1	64.067.000,00	64.067.000,00	64.067.000,00		
4	Drs. Kosasih	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.155-Keu/2010	Tanpa SKTJM	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	40.537.900,00	1	16.000.000,00	0		0	-	1	24.537.900,00	24.537.900,00	24.537.900,00		
JUMLAH A						4	409.477.500,00	4	110.873.500,00	0	138.719.500,00	0	-	4	159.884.500,00	159.884.500,00	159.884.500,00		
B KERUGIAN KEHILANGAN ASET DAERAH																			
1	Nana Sujana	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2005	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.200-Keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	9.400.000,00	0	-	1	5.236.000,00	1	4.164.000,00	0	-	-	-		
2	Setia Kusbaran	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2005	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.201-Keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	49.500.000,00	1	46.133.332,00	0	-	0	-	1	3.366.668,00	3.366.668,00	3.366.668,00		
3	Nugraha Gandarmawan	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2004	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.199-keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	49.500.000,00	1	41.000.000,00	0	2.750.000,00	1	6.500.000,00	1	-	-	-		
4	Achmad Gunawan	Kehilangan Kendaraan-2005	Keputusan Walikota Cimahi 900/198-keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	84.800.000,00	1	41.000.000,00	0	-	1	12.800.000,00	1	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		
5	Dedi Dasikin	Kehilangan Kendaraan-2007	Keputusan Walikota Cimahi 900/387-keu/2009	001/SKTJM/TP-TGR/2010	09-12-2009 dan 09-12-2011	1	30.000.000,00	1	6.700.000,00	0	-	0	-	1	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00		
6	Asep Nasrudin	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2009	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.210-keu/2011	Tanpa SKTJM	09-12-2009 dan 09-12-2011	1	11.000.000,00	1	800.000,00	0	5.200.000,00	1	5.000.000,00	1	-	-	-		

No	Penanggung Jawab	Data		Hasil Pemantauan													
		Kasus	Dokumen TP/TGR	SKTJM/SKP	TMT dan JT Terakhir	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa		Bagian Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Handiman	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2012	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.585-keu/2012	004/SKTJM/TP-TGR/2013	26-12-2014 dan 26-12-2014	1	15.000.000,00	0	4.100.000,00	0	10.900.000,00	0	-	1	-	-	-
8	Niagara Raharja	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2012	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.581-keu/2012	005/SKTJM/TP-TGR/2013	26-12-2014 dan 26-12-2014	1	9.000.000,00	1	5.250.000,00	0	3.750.000,00	0	-	1	-	-	-
9	Mia Nursanti	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2012	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.584-keu/2012	006/SKTJM/TP-TGR/2013	26-12-2014 dan 26-12-2014	1	1.761.500,00	0	-	0	1.761.000,00	0	-	1	500,00	500,00	500,00
10	Suyadi	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2019		005/SKTJM/TGR/2019	24/10/2019 dan 24/10/2019	1	9.500.000,00	0	-	1	9.500.000,00		-		-	-	-
11	Deni Herdiani, ST.	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2019		006/SKTJM/TGR/2019	29/10/2019 dan 29/10/2019	1	18.000.000,00	0	-		18.000.000,00		-		-	-	-
12	Hj. Sri Surya Ekawati,SE.	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2019		006/SKTJM/TGR/2019	22/11/2019 dan 22/01/2020	1	24.000.000,00	0	-		24.000.000,00		-		-	-	-
	JUMLAH B					9	311.461.500,00	6	144.983.332,00	1	81.097.000,00	4	28.464.000,00	8	57.667.168,00	57.667.168,00	57.667.168,00
	JUMLAH (A+B)					13	720.939.000,00	10	255.856.832,00	1	219.816.500,00	4	28.464.000,00	12	217.551.668,00	217.551.668,00	217.551.668,00

**Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat
Per 31 Desember 2022**

NO	PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021	PENYISIHAN PIUTANG	SALDO SETELAH PENYISIHAN
1	BPJS KESEHATAN	115.742.045,00	88.433.030.680,00	82.873.310.650,00	5.675.462.075,00	28.377.310,38	5.647.084.764,63
2	PT. JASA RAHARJA	182.410.049,00	1.354.138.401,00	1.449.640.062,00	86.908.388,00	22.036.520,00	64.871.868,00
3	BPJS KETENAGAKERJAAN	55.065.997,00	788.485.947,00	772.496.571,00	71.055.373,00	19.228.891,10	51.826.481,90
4	GAKINDA KOTA CIMAHI	-	-	-	-		
5	GAKINDA KBB	-	7.440.224,00	7.440.224,00	-		
6	JAMPERSAL KBB	27.660.480,00	-	27.660.480,00	-		
7	JAMPERSAL KOTA CIMAHI	-	-	-	-		
8	PT TASPEN	31.513.680,00	21.576.206,00	53.089.886,00	-		
9	KEMENKES	5.944.536.000,00	28.954.701.600,00	34.899.237.600,00	-		
10	RS MITRA KASIH	-	408.916.500,00	408.916.500,00	-		
11	RS DUSTIRA	37.520.000,00	267.295.200,00	304.815.200,00	-		
12	RS KASIH BUNDA	2.160.000,00	30.211.400,00	31.651.400,00	720.000,00	3.600,00	716.400,00
13	RSUP HASAN SADIKIN	109.890.000,00	502.520.000,00	557.410.000,00	55.000.000,00	275.000,00	54.725.000,00
14	RS IMC PADALARANG	-	11.153.500,00	11.153.500,00	-		
15	RSAU dr.M. SALAMUN	-	114.546.800,00	105.166.800,00	9.380.000,00	492.450,00	8.887.550,00
16	RS AVISENA	13.320.000,00	25.200.000,00	33.840.000,00	4.680.000,00	228.600,00	4.451.400,00
17	RS SILOAM PURWAKARTA	142.700.000,00	452.865.000,00	595.565.000,00	-		
18	RSUD CILILIN	-	85.985.000,00	85.985.000,00	-		
19	RS LEMBANG	-	39.565.000,00	39.565.000,00			
20	RS GRAHA MEDIKA	-	23.760.000,00	23.760.000,00			
21	RS CAHYA KAWALUYAAN	-	5.695.000,00	5.695.000,00			
TOTAL		6.662.518.251,00	121.527.086.458,00	122.286.398.873,00	5.903.205.836,00	70.642.371,48	5.832.563.464,53

**Rekapitulasi Piutang Dan Penyisihan BLUD Air Minum
Per 31 Desember 2022**

Piutang BLUD Air Minum

NO	KETERANGAN	PENAMBAHAN PIUTANG 2022		PENGURANGAN PIUTANG 2022		SALDO AKHIR PIUTANG 2022	
	SALDO 31 DESEMBER 2021					1.582.507.300,00	
1	JANUARI	Rp	432.415.800	Rp	427.777.700	Rp	1.587.145.400,00
2	FEBRUARI	Rp	435.409.100	Rp	430.002.400	Rp	1.592.552.100,00
3	MARET	Rp	417.204.600	Rp	424.450.700	Rp	1.585.306.000,00
4	APRIL	Rp	436.528.600	Rp	388.710.600	Rp	1.633.124.000,00
5	MEI	Rp	410.730.800	Rp	393.604.900	Rp	1.650.249.900,00
6	JUNI	Rp	430.906.000	Rp	393.004.100	Rp	1.688.151.800,00
7	JULI	Rp	417.775.500	Rp	416.037.500	Rp	1.689.889.800,00
8	AGUSTUS	Rp	439.732.200	Rp	409.330.800	Rp	1.720.291.200,00
9	SEPTEMBER	Rp	436.916.900	Rp	418.976.900	Rp	1.738.231.200,00
10	OKTOBER	Rp	427.642.300	Rp	412.043.500	Rp	1.753.830.000,00
11	NOVEMBER	Rp	448.620.600	Rp	420.788.000	Rp	1.781.662.600,00
12	DESEMBER	Rp	444.990.600	Rp	407.373.600	Rp	1.819.279.600,00
	JUMLAH	Rp	5.178.873.000	Rp	4.942.100.700	Rp	1.819.279.600,00

Penyisihan Piutang BLUD Air Minum

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	sampai dg Des 21	Rp 996.935.000,00	- Rp	-	- Rp	-	- Rp	-	996.935.000,00	Rp 996.935.000,00
2	Januari 2022	Rp 26.349.700,00	- Rp	-	- Rp	-	26.349.700,00	Rp 13.174.850,00		Rp -
3	Februari 2022	Rp 29.129.300,00	- Rp	-	- Rp	-	29.129.300,00	Rp 14.564.650,00		Rp -
4	Maret 2022	Rp 28.672.800,00	- Rp	-	- Rp	-	28.672.800,00	Rp 14.336.400,00		Rp -
5	Apr-22	Rp 27.456.900,00	- Rp	-	- Rp	-	27.456.900,00	Rp 13.728.450,00	-	Rp -
6	Mei 2022	Rp 23.149.500,00	- Rp	-	- Rp	-	23.149.500,00	Rp 11.574.750,00	-	Rp -
7	Juni 2022	Rp 25.407.600,00	- Rp	-	- Rp	-	25.407.600,00	Rp 12.703.800,00	-	Rp -
8	Juli 2022	Rp 28.403.700,00	- Rp	-	- Rp	-	28.403.700,00	Rp 14.201.850,00	-	Rp -
9	Agustus 2022	Rp 32.686.500,00	- Rp	-	- Rp	-	32.686.500,00	Rp 16.343.250,00	-	Rp -
10	Sep-22	Rp 37.990.100,00	- Rp	-	- Rp	-	37.990.100,00	Rp 18.995.050,00	-	Rp -
11	Oktober 2022	Rp 46.098.800,00	- Rp	-	46.098.800,00	Rp 4.609.880,00			-	Rp -
12	Nov-22	Rp 72.009.100,00	- Rp	-	72.009.100,00	Rp 7.200.910,00			-	Rp -
13	Desember 2022	Rp 444.990.600,00	444.990.600,00	Rp 2.224.953,00					-	Rp -
Jumlah			Rp 444.990.600,00	Rp 2.224.953,00	Rp 118.107.900,00	Rp 11.810.790,00	Rp 259.246.100,00	Rp 129.623.050,00	Rp 996.935.000,00	Rp 996.935.000,00
Jumlah Piutang Air Minum Tahun 2022			Rp 1.819.279.600,00							
Jumlah Penyisihan Piutang Air Minum Tahun 2022			Rp 1.140.593.793,00							

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2022**

No	SKPD	Alat Listrik	Alat Tulis Kantor	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Cetak	Bahan Kimia	Bahan Komputer	Bahan Lainnya	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benda Pos	Kertas dan Cover
1	Dinas Pendidikan	5.579.800,00	20.883.767,00	11.153.900,00	-	5.386.400,00	-	5.637.000,00	-	-	-	1.803.000,00	8.195.449,00
2	Dinas Kesehatan	5.403.649,00	61.576.778,00	20.998.534,00	-	180.810.115,00	1.264.197.713,00	26.224.805,00	3.867.763.767,69	-	-	2.220.000,00	36.261.730,00
3	RSUD Cibabat	38.717.031,00	73.613.983,15	492.975.882,70	103.161.271,50	462.165.155,00	3.371.716.000,00	26.178.450,00	-	-	-	-	30.409.514,04
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	882.500,00	4.550.550,00	198.500,00	135.202.123,00	36.257.400,00	102.839.110,00	887.000,00	160.000,00	-	-	290.000,00	2.679.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	5.010.000,00	12.378.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	1.058.750,00	-	-	-	-	550.000,00	-	-	-	-	-
11	Dinas Pangan Dan Pertanian	-	1.082.300,00	20.581.000,00	-	24.810.000,00	4.446.800,00	2.990.500,00	3.140.000,00	9.922.000,00	59.640.000,00	550.000,00	590.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.000,00	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	216.000,00	2.532.465,88	-	-	292.073.750,00	-	467.181.825,01	-	-	-	-	15.996.295,00
14	Dinas Perhubungan	1.772.944.468,00	-	-	-	349.499.229,28	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.540.000,00	-	-	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	274.875,00	-	-	59.217.000,00	-	-	-	-	-	-	436.000,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	550.000,00	-	-	139.527.939,00	-	-	-	-	-	-	-
21	Sekretariat DPRD	-	18.255.250,00	-	-	1.798.500,00	-	2.800.000,00	-	-	-	280.000,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	2.310.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Kota	-	351.300,00	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	650.000,00	147.000,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Cimahi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Cimahi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grand Total	1.823.743.448,00	186.270.019,03	550.917.816,70	250.741.394,50	1.579.355.488,28	4.743.199.623,00	532.679.580,01	3.871.063.767,69	9.922.000,00	59.640.000,00	7.223.000,00	94.714.988,04

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2022**

No	SKPD	Natura	Obat	Obat-obatan Lainnya	Pakan	Perabot Kantor	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Suvenir/Cendera Mata	Grand Total
1	Dinas Pendidikan	-	2.758.100,00	-	-	-	-	80.000,00	-	61.477.416,00
2	Dinas Kesehatan	-	3.696.181.503,10	-	-	29.735.951,50	-	-	1.194.000,00	9.192.568.546,29
3	RSUD Cibabat	80.276.120,02	5.648.426.255,39	-	-	-	-	-	-	10.327.639.662,80
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	4.065.469.000,00	-	4.065.469.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	523.400,00	-	-	-	1.181.000,00	1.292.500,00	-	-	286.943.083,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.113.700,00	-	-	-	17.085.000,00	306.575.836,00	-	-	343.162.536,00
8	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	171.172.366,00	-	-	172.781.116,00
11	Dinas Pangan Dan Pertanian	410.556,00	41.433.500,00	1.501.238,00	1.578.000,00	1.014.000,00	490.940.968,00	-	-	664.630.862,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	8.775.000,00	-	189.639.440,00	-	-	-	198.844.440,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	1.414.000,00	-	-	-	779.414.335,89
14	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.122.443.697,28
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	15.540.000,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	59.927.875,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	43.972.950,00	-	-	96.611.748,00	280.662.637,00
21	Sekretariat DPRD	3.366.400,00	-	-	-	5.024.500,00	-	-	30.179.346,00	61.703.996,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	3.310.000,00
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	330.000,00	-	-	-	330.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.000,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1.378.300,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Cimahi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Cimahi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total		86.690.176,02	9.388.799.358,49	10.276.238,00	1.578.000,00	289.396.841,50	969.981.670,00	4.065.549.000,00	127.985.094,00	28.649.727.503,26

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
PD. Jati Mandiri
Per 31 Desember 2022

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aset (Rp)					Kewajiban dan Ekuitas (Rp)						
				Lancar	Penyertaan Jk Panjang (KSO)	Tetap	Lainnya	Total	Kewajiban			Ekuitas			
									Jangka Pendek	Jangka Panjang	Total	Penyertaan Modal	Koreksi Nilai Aset Tetap	Laba (Rugi) Kumulatif	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PD. Jati Mandiri Selisih pengakhiran penyertaan modal pada KSO Lingga Jati Bidang Usaha : Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih,	unaudited	-	342.765.000,00	-	39.938.451.608,00	6.681.665.245,00	46.962.881.853,00	4.635.241.312,50	-	4.635.241.312,50	51.351.000.000,00 6.270.623.559,00	174.075.107,00	(15.468.058.125,50)	36.057.016.981,50 6.270.623.559,00
	Jumlah			342.765.000,00	-	39.938.451.608,00	6.681.665.245,00	46.962.881.853,00	4.635.241.312,50	-	4.635.241.312,50	57.621.623.559,00	174.075.107,00	(15.468.058.125,50)	42.327.640.540,50

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
PD. Jati Mandiri
Per 31 Desember 2022

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan Usaha (Rp)	Beban Usaha (Rp)	Pendapatan Kotor (Rp)	Pendapatan Lain-lain (Rp)	Beban Lain-lain (Rp)	Laba (Rugi) Sebelum PKLB (Rp)	PKLB (Rp)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan (Rp)	Laba (Rugi) Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10 = 7+8-9	11	12 = 10 - 11	13	14 = 12 - 13
1	PD. Jati Mandiri Bidang Usaha : Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih, Perumahan, dan jenis usaha lainnya	unaudited	-	-	166.351.823,00	(166.351.823,00)	-	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)
	Jumlah			-	166.351.823,00	(166.351.823,00)	-	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)

**Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2022**

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN							
Saldo Awal (Audited)	62.055.425.372,00	74.377.350.791,36	196.314.539.328,00	599.205.674,00	47.771.271.256,85	12.565.212.634,31	393.683.005.056,52
Penambahan :	-	6.485.089.377,00	17.876.592.057,00	-	1.219.605.223,00	4.069.064.988,00	29.650.351.645,00
Pengurangan :	-	1.409.456.458,00	4.324.070.330,00	-	48.242.533,00	34.776.500,00	5.816.545.821,00
Saldo Akhir (Reviewed)	62.055.425.372,00	79.452.983.710,36	209.867.061.055,00	599.205.674,00	48.942.633.946,85	16.599.501.122,31	417.516.810.880,52
DINAS KESEHATAN							
Saldo Awal (Audited)	7.870.642.001,00	51.914.483.356,10	46.808.347.617,00	306.819.000,00	61.713.000,00	243.707.750,00	107.205.712.724,10
Penambahan :	-	2.221.893.989,00	503.106.414,00	592.071.120,00	-	156.992.184,00	3.474.063.707,00
Pengurangan :	-	5.481.864.658,49	-	-	-	243.707.750,00	5.725.572.408,49
Saldo Akhir (Reviewed)	7.870.642.001,00	48.654.512.686,61	47.311.454.031,00	898.890.120,00	61.713.000,00	156.992.184,00	110.312.075.236,12
RSUD CIBABAT							
Saldo Awal (Audited)	28.362.300.000,00	282.508.102.719,32	127.503.042.329,20	1.191.039.000,00	12.025.600,00	-	439.576.509.648,52
Penambahan :	-	4.084.468.527,00	1.874.660.043,00	5.936.799.639,00	-	-	11.895.928.209,00
Pengurangan :	-	10.891.283.366,83	384.571.734,00	-	-	-	11.275.855.100,83
Saldo Akhir (Reviewed)	28.362.300.000,00	275.701.287.879,49	128.993.130.638,20	7.127.838.639,00	12.025.600,00	-	450.377.611.323,52
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Saldo Awal (Audited)	700.921.601.656,00	11.626.460.455,00	69.433.676.543,00	618.781.568.493,77	534.085.000,00	179.567.488.649,05	1.580.864.880.796,82
Penambahan :	-	389.112.560,00	3.919.733.662,00	11.532.172.228,00	-	1.894.552.720,00	17.735.571.170,00
Pengurangan :	34.516.740.000,00	676.117.010,00	1.522.725.462,00	44.806.754.716,93	-	-	81.522.337.188,93
Saldo Akhir (Reviewed)	666.404.861.656,00	11.339.456.005,00	71.830.684.743,00	585.506.986.004,84	534.085.000,00	181.462.041.369,05	1.595.299.927.366,82
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Saldo Awal (Audited)	126.255.200.892,00	13.265.024.469,12	25.872.378.471,00	138.204.352.104,00	16.601.913.815,00	258.145.030,00	320.457.014.781,12
Penambahan :	1.443.769.485,00	434.826.748,00	12.221.681.893,00	4.505.860.918,00	19.980.000,00	-	18.626.119.044,00
Pengurangan :	-	1.349.155.059,36	187.387.600,00	199.122.000,00	-	-	1.735.664.659,36
Saldo Akhir (Reviewed)	127.698.970.377,00	12.350.696.157,76	37.906.672.764,00	142.511.091.022,00	16.621.893.815,00	258.145.030,00	338.441.531.160,12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
Saldo Awal (Audited)	-	16.770.171.499,34	1.800.860.743,00	-	97.119.000,00	-	18.668.151.242,34
Penambahan :	-	462.971.800,00	-	-	-	-	462.971.800,00
Pengurangan :	-	3.514.615.790,00	-	-	-	-	3.514.615.790,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	13.718.527.509,34	1.800.860.743,00	-	97.119.000,00	-	19.128.615.042,34
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	-	2.149.300.096,00	-	-	9.800.000,00	-	2.159.100.096,00
Penambahan :	-	97.059.098,00	-	-	-	-	97.059.098,00
Pengurangan :	-	8.900.000,00	-	-	-	-	8.900.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.237.459.194,00	-	-	9.800.000,00	-	2.256.159.194,00

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Saldo Awal (Audited)	-	5.179.735.206,48	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.828.767.587,10
Penambahan :	-					-	-
Pengurangan :	-	5.179.735.206,48	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.828.767.587,10
Saldo Akhir (Reviewed)	-	-	-	-	-	-	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
Saldo Awal (Audited)	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan :	-	4.643.688.682,94	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.292.721.063,56
Pengurangan :	-	483.033.008,79	-	-	-	-	483.033.008,79
Saldo Akhir (Reviewed)	-	4.160.655.674,15	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.159.976.037,10
DINAS SOSIAL							
Saldo Awal (Audited)	-			-		-	-
Penambahan :	-	1.708.790.773,54	-	-	-	-	1.708.790.773,54
Pengurangan :	-	20.741.500,00	-	-	-	-	20.741.500,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	1.688.049.273,54	-	-	-	-	1.707.697.023,54
DINAS TENAGA KERJA							
Saldo Awal (Audited)	-	2.309.727.100,00	-	-	5.790.000,00	-	2.315.517.100,00
Penambahan :	-	17.250.000,00	-	-	-	-	17.250.000,00
Pengurangan :	-	495.878.000,00	-	-	-	-	495.878.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	1.831.099.100,00	-	-	5.790.000,00	-	1.930.989.100,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							
Saldo Awal (Audited)	14.252.840.000,00	5.174.189.218,99	12.438.498.256,10	4.149.277.550,00	270.975.000,00	-	36.285.780.025,09
Penambahan :	-	51.519.000,00	-	-	6.120.000,00	-	57.639.000,00
Pengurangan :	-	675.873.332,58	-	-	6.120.000,00	-	681.993.332,58
Saldo Akhir (Reviewed)	14.252.840.000,00	4.549.834.886,41	12.438.498.256,10	4.149.277.550,00	270.975.000,00	-	36.336.574.025,09
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
Saldo Awal (Audited)	21.755.801.960,00	36.504.718.805,76	11.952.624.363,00	5.323.938.191,00	8.800.000,00	49.225.000,00	75.595.108.319,76
Penambahan :	-	5.144.193.466,00	197.954.900,00	198.849.600,00	-	-	5.540.997.966,00
Pengurangan :	-	4.577.420.264,00	212.969.000,00	-	-	-	4.790.389.264,00
Saldo Akhir (Reviewed)	21.755.801.960,00	37.071.492.007,76	11.937.610.263,00	5.522.787.791,00	8.800.000,00	49.225.000,00	78.356.155.380,76
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL							
Saldo Awal (Audited)		9.423.315.048,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00		9.699.660.848,00
Penambahan :	-	237.887.900,00	-	-	7.012.000,00	-	244.899.900,00
Pengurangan :	-	1.074.761.748,00	-	-	7.012.000,00	-	1.081.773.748,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	8.586.441.200,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00	-	9.453.597.748,00
DINAS PERHUBUNGAN							
Saldo Awal (Audited)	8.319.000.000,00	39.400.414.270,00	14.101.060.100,00	55.992.015.038,00	3.765.000,00	-	117.816.254.408,00
Penambahan :	-	435.400.240,00	-	2.676.486.324,00	-	-	3.111.886.564,00
Pengurangan :	-	1.475.866.030,00	-	1.106.460.841,00	-	-	2.582.326.871,00
Saldo Akhir (Reviewed)	8.319.000.000,00	38.359.948.480,00	14.101.060.100,00	57.562.040.521,00	3.765.000,00	-	120.828.590.972,00

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							
Saldo Awal (Audited)	98.000.000,00	11.453.964.707,00	2.539.810.191,00	220.487.300,00	1.247.618.431,00	-	15.559.880.629,00
Penambahan :	-	-	-	-	-	-	-
Pengurangan :	98.000.000,00	11.453.964.707,00	2.539.810.191,00	220.487.300,00	1.247.618.431,00	-	15.559.880.629,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	-	-	-	-	-	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Saldo Awal (Audited)	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan :	-	10.661.753.699,00	1.006.158.191,00	220.487.300,00	-	-	11.888.399.190,00
Pengurangan :	-	835.004.020,00	-	-	-	-	835.004.020,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	9.826.749.679,00	1.006.158.191,00	220.487.300,00	-	-	11.085.872.670,00
DINAS ARSIP DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan :	98.000.000,00	2.534.040.258,00	1.533.652.000,00	-	1.349.110.431,00	-	5.514.802.689,00
Pengurangan :	-	499.983.829,00	-	-	-	-	499.983.829,00
Saldo Akhir (Reviewed)	98.000.000,00	2.034.056.429,00	1.533.652.000,00	-	1.349.110.431,00	-	5.431.741.279,00
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							
Saldo Awal (Audited)	9.272.750.000,00	15.334.545.508,98	160.652.340.356,98	1.574.060.725,00	364.050.825,00	-	187.197.747.414,98
Penambahan :	-	263.958.859,00	1.084.215.017,00	-	-	-	1.348.173.876,00
Pengurangan :	-	867.685.500,00	141.245.449,00	-	-	-	1.008.930.949,00
Saldo Akhir (Reviewed)	9.272.750.000,00	14.730.818.867,98	161.595.309.924,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	-	188.201.870.841,98
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Saldo Awal (Audited)	-	8.133.261.066,00	-	-	4.440.000,00	15.464.032.800,00	23.601.733.866,00
Penambahan :	-	269.778.616,00	9.027.915.313,00	-	19.710.000,00	9.027.915.313,00	18.345.319.242,00
Pengurangan :	-	1.809.976.064,00	9.027.915.313,00	-	19.710.000,00	499.466.313,00	11.357.067.690,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	6.593.063.618,00	-	-	4.440.000,00	23.992.481.800,00	32.085.342.076,00
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Saldo Awal (Audited)	28.617.459.050,00	1.962.538.996,00	2.318.431.500,00	-	245.025.000,00	3.848.565.175,00	36.992.019.721,00
Penambahan :	77.500.000,00	394.880.040,00	9.629.842.166,00	-	-	6.571.766.770,00	16.673.988.976,00
Pengurangan :	1.350.000.000,00	113.582.390,00	6.267.839.000,00	-	-	3.311.527.575,00	11.042.948.965,00
Saldo Akhir (Reviewed)	27.344.959.050,00	2.243.836.646,00	5.680.434.666,00	-	245.025.000,00	7.108.804.370,00	42.662.632.232,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	-	4.601.292.691,26	-	-	9.800.000,00	-	4.611.092.691,26
Penambahan :	-	182.475.000,00	81.752.499,00	-	-	-	264.227.499,00
Pengurangan :	-	1.466.263.059,67	81.752.499,00	-	-	-	1.548.015.558,67
Saldo Akhir (Reviewed)	-	3.317.504.631,59	-	-	9.800.000,00	-	3.939.147.368,02
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	-	11.243.843.540,00	-	-	226.000.000,00	-	11.469.843.540,00
Penambahan :	-	517.751.999,00	-	-	46.120.500,00	-	563.872.499,00
Pengurangan :	-	1.725.838.958,00	-	-	46.120.500,00	-	1.771.959.458,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	10.035.756.581,00	-	-	226.000.000,00	-	10.779.968.822,00

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	-	6.026.060.071,66	167.033.430,00	-	91.863.000,00	-	6.284.956.501,66
Penambahan :	-	246.192.119,00	-	-	-	-	246.192.119,00
Pengurangan :	-	845.921.513,00	-	-	-	-	845.921.513,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	5.426.330.677,66	167.033.430,00	-	91.863.000,00	-	5.977.418.007,66
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							
BKPSDMD							
Saldo Awal (Audited)	-	2.943.846.017,00	-	-	-	-	2.943.846.017,00
Penambahan :	-	19.652.000,00	-	-	-	-	19.652.000,00
Pengurangan :	-	715.966.413,00	-	-	-	-	715.966.413,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.247.531.604,00	-	-	-	-	2.672.109.417,00
SEKRETARIAT DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	6.164.015.740,00	37.099.131.686,78	58.328.132.188,22	175.060.800,00	500.749.922,00	-	102.267.090.337,00
Penambahan :	-	828.765.847,00	133.774.647,00	-	-	-	962.540.494,00
Pengurangan :	-	4.068.529.247,00	133.774.647,00	-	-	-	4.202.303.894,00
Saldo Akhir (Reviewed)	6.164.015.740,00	33.859.368.286,78	58.328.132.188,22	175.060.800,00	500.749.922,00	-	101.773.264.504,00
SEKRETARIAT DPRD							
Saldo Awal (Audited)	2.756.775.000,00	17.053.637.331,00	12.270.490.134,00	-	2.261.194.720,00	-	34.342.097.185,00
Penambahan :	-	655.891.030,00	-	-	-	-	655.891.030,00
Pengurangan :	-	808.347.700,00	-	-	-	-	808.347.700,00
Saldo Akhir (Reviewed)	2.756.775.000,00	16.901.180.661,00	12.270.490.134,00	-	2.261.194.720,00	-	34.997.988.215,00
INSPEKTORAT KOTA							
Saldo Awal (Audited)	-	2.276.322.061,00	4.461.163.137,00	-	-	-	6.737.485.198,00
Penambahan :	-	232.080.790,00	121.809.773,00	-	-	-	353.890.563,00
Pengurangan :	-	407.871.550,00	40.845.485,00	-	-	-	448.717.035,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.100.531.301,00	4.542.127.425,00	-	-	-	6.690.600.726,00
KECAMATAN CIMAHI UTARA							
Saldo Awal (Audited)	12.194.245.000,00	6.305.326.657,55	6.539.117.500,00	49.558.364,00	7.792.489,00	-	25.096.040.010,55
Penambahan :	-	76.005.000,00	-	-	-	-	76.005.000,00
Pengurangan :	-	1.136.613.011,44	-	-	-	-	1.136.613.011,44
Saldo Akhir (Reviewed)	12.194.245.000,00	5.244.718.646,11	6.539.117.500,00	49.558.364,00	7.792.489,00	-	24.862.573.733,55
KECAMATAN CIMAHI TENGAH							
Saldo Awal (Audited)	10.506.345.128,00	9.446.617.502,28	11.789.085.581,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	31.767.208.094,28
Penambahan :	-	294.248.477,00	99.337.807,00	-	-	-	393.586.284,00
Pengurangan :	-	961.476.600,00	99.337.807,00	-	-	-	1.060.814.407,00
Saldo Akhir (Reviewed)	10.506.345.128,00	8.779.389.379,28	11.789.085.581,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	31.664.818.021,28
KECAMATAN CIMAHI SELATAN							
Saldo Awal (Audited)	15.227.905.000,00	8.783.459.429,00	6.648.163.461,00	189.574.684,75	9.812.492,00	-	30.858.915.066,75
Penambahan :	-	172.068.450,00	212.260.345,00	-	-	-	384.328.795,00
Pengurangan :	-	1.363.649.220,00	92.498.850,00	-	-	-	1.456.148.070,00
Saldo Akhir (Reviewed)	15.227.905.000,00	7.591.878.659,00	6.767.924.956,00	189.574.684,75	9.812.492,00	-	30.286.589.861,75

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
KESBANGPOLL							
Saldo Awal (Audited)	2.075.500.000,00	924.886.046,00	-	-	3.446.000,00	-	3.003.832.046,00
Penambahan :	-	246.516.250,00	-	-	-	-	246.516.250,00
Pengurangan :		169.291.700,00					169.291.700,00
Saldo Akhir (Reviewed)	2.075.500.000,00	1.002.110.596,00	-	-	3.446.000,00	-	3.162.943.096,00
TOTAL	1.022.360.336.284,00	671.637.270.027,82	807.092.567.588,52	806.294.757.832,59	71.698.455.667,47	229.627.190.875,36	3.723.381.191.361,17

Saldo Awal (Audited)	1.056.705.806.799,00	694.191.726.346,98	772.624.864.228,52	826.964.855.561,52	70.405.620.977,47	211.996.377.038,36	3.632.889.250.951,85
Penambahan :	1.619.269.485,00	44.010.210.595,48	60.169.479.727,00	25.662.727.129,00	2.671.657.534,62	21.720.291.975,00	155.853.636.446,10
Pengurangan :	35.964.740.000,00	66.564.666.914,64	25.701.776.367,00	46.332.824.857,93	1.378.822.844,62	4.089.478.138,00	180.032.309.122,19
Saldo Akhir (Reviewed)	1.022.360.336.284,00	671.637.270.027,82	807.092.567.588,52	806.294.757.832,59	71.698.455.667,47	229.627.190.875,36	3.608.710.578.275,76

Rekapitulasi Laporan Aset Tetap BOS Tahun 2022

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
1	SD NEGERI BAROS MANDIRI 1	135.229.998		1.033.200	136.263.198,00
2	SD NEGERI BAROS MANDIRI 2	71.398.000		-	71.398.000,00
3	SD NEGERI BAROS MANDIRI 3	25.157.200		2.465.800	27.623.000,00
4	SD NEGERI BAROS MANDIRI 4	85.400.000		22.834.300	108.234.300,00
5	SD NEGERI BAROS MANDIRI 5	47.888.240		-	47.888.240,00
6	SD NEGERI BAROS MANDIRI 6	81.078.000		-	81.078.000,00
7	SD NEGERI BAROS MANDIRI 7	10.680.000		11.198.000	21.878.000,00
8	SD NEGERI BINA HARAPAN	11.150.000		-	11.150.000,00
9	SD NEGERI CIBABAT 2	22.020.000		-	22.020.000,00
10	SD NEGERI CIBABAT 4	38.476.000		676.000	39.152.000,00
11	SD NEGERI CIBABAT 5	122.620.000		-	122.620.000,00
12	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 1	180.162.684		10.186.100	190.348.784,00
13	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 2	82.413.520		1.907.998	84.321.518,00
14	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 3	165.728.998		-	165.728.998,00
15	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 4	67.520.349		8.720.000	76.240.349,00
16	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 5	76.883.561		14.016.800	90.900.361,00
17	SD NEGERI CIBEKER 1	11.762.299		3.313.100	15.075.399,00
18	SD NEGERI CIBEKER 2	10.919.400		-	10.919.400,00
19	SD NEGERI CIBEKER 3	32.095.000		6.900.000	38.995.000,00
20	SD NEGERI CIBEKER 4	23.999.999		1.800.000	25.799.999,00
21	SD NEGERI CIBEKER MANDIRI 1	122.377.400		14.313.600	136.691.000,00
22	SD NEGERI CIBEKER MANDIRI 2	101.543.000		50.772.200	152.315.200,00
23	SD NEGERI CIBEUREUM 5	23.050.000		12.112.400	35.162.400,00
24	SD NEGERI CIBEUREUM 7	23.100.000		7.693.740	30.793.740,00
25	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 1	121.475.166		9.944.800	131.419.966,00
26	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 2	122.664.413		15.845.000	138.509.413,00
27	SD NEGERI CIBODAS 1	32.629.439		2.339.000	34.968.439,00
28	SD NEGERI CIBODAS 2	22.933.589		6.680.000	29.613.589,00
29	SD NEGERI CIBODAS 3	8.305.000		16.610.900	24.915.900,00
30	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH	6.200.000		-	6.200.000,00
31	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 1	64.021.000		10.867.000	74.888.000,00
32	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 2	22.630.000		37.873.300	60.503.300,00
33	SD NEGERI CIMAHU MANDIRI 1	109.604.500		8.694.000	118.298.500,00
34	SD NEGERI CIMAHU MANDIRI 2	24.130.000		49.972.300	74.102.300,00
35	SD NEGERI CIMAHU MANDIRI 3	48.495.000		11.269.200	59.764.200,00
36	SD NEGERI CIMAHU MANDIRI 4	18.199.540		11.584.000	29.783.540,00
37	SD NEGERI CIMAHU MANDIRI 5	119.300.000		28.607.100	147.907.100,00
38	SD NEGERI CIMINDI 2	14.374.000		-	14.374.000,00
39	SD NEGERI CIMINDI 4	17.200.000		-	17.200.000,00
40	SD NEGERI CIMINDI 5	4.160.000		7.230.000	11.390.000,00
41	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 1	67.626.000		-	67.626.000,00
42	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 2	86.474.589		18.160.400	104.634.989,00
43	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 3	32.104.509		7.815.300	39.919.809,00
44	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 4	9.000.000		-	9.000.000,00
45	SD NEGERI CIREUNDEU	8.214.000		6.966.900	15.180.900,00
46	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 1	39.873.400		27.165.900	67.039.300,00
47	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 2	95.235.000		46.984.000	142.219.000,00
48	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 3	32.526.000		50.264.000	82.790.000,00
49	SD NEGERI HARAPAN 1	19.999.999		4.830.200	24.830.199,00
50	SD NEGERI HARAPAN 2	-		5.646.200	5.646.200,00
51	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 1	177.611.238		-	177.611.238,00

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
52	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 2	16.937.200		23.047.600	39.984.800,00
53	SD NEGERI KARYA BAKTI	32.892.860		-	32.892.860,00
54	SD NEGERI KIHAPIT	54.270.000		25.214.300	79.484.300,00
55	SD NEGERI LEUWIGAJAH 2	88.672.000		1.271.200	89.943.200,00
56	SD NEGERI LEUWIGAJAH 3	110.124.999		3.300.000	113.424.999,00
57	SD NEGERI LEUWIGAJAH 5	72.349.999		3.885.000	76.234.999,00
58	SD NEGERI LEUWIGAJAH 6	75.186.189		-	75.186.189,00
59	SD NEGERI LEUWIGAJAH MANDIRI 1	66.995.000		32.121.500	99.116.500,00
60	SD NEGERI LINGGABUDI	62.630.500		6.483.800	69.114.300,00
61	SD NEGERI MELONG ASIH 4	28.895.000		3.850.000	32.745.000,00
62	SD NEGERI MELONG ASIH 5	1.800.000		6.690.000	8.490.000,00
63	SD NEGERI MELONG ASIH 7	9.945.589		3.300.000	13.245.589,00
64	SD NEGERI MELONG ASIH 8	28.981.000		12.936.800	41.917.800,00
65	SD NEGERI MELONG MANDIRI 1	58.080.486		-	58.080.486,00
66	SD NEGERI MELONG MANDIRI 2	245.282.710		3.794.535	249.077.245,00
67	SD NEGERI MELONG MANDIRI 3	26.190.000		8.335.000	34.525.000,00
68	SD NEGERI MELONG MANDIRI 4	157.284.598		31.992.200	189.276.798,00
69	SD NEGERI MELONG MANDIRI 5	73.056.830		15.724.000	88.780.830,00
70	SD NEGERI MELONG MANDIRI 6	147.895.190		20.494.000	168.389.190,00
71	SD NEGERI MELONG MANDIRI 7	76.890.509		-	76.890.509,00
72	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 1	7.400.000		8.759.600	16.159.600,00
73	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 2	78.190.000		16.660.600	94.850.600,00
74	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 3	18.476.920		-	18.476.920,00
75	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 4	80.161.370		4.400.000	84.561.370,00
76	SD NEGERI PAMBUDI DHARMA	28.451.100		1.566.000	30.017.100,00
77	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 1	76.240.000		5.990.000	82.230.000,00
78	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 2	133.022.511		-	133.022.511,00
79	SD NEGERI RANCABENTANG 3	44.790.182		30.582.200	75.372.382,00
80	SD NEGERI SETIAMANAH MANDIRI 1	141.100.000		-	141.100.000,00
81	SD NEGERI SETIAWARGA	89.999.400		-	89.999.400,00
82	SD NEGERI SINDANGSARI	56.757.500		12.712.500	69.470.000,00
83	SD NEGERI SUKAMAJU 1	11.155.000		1.962.900	13.117.900,00
84	SD NEGERI SUKAMAJU 2	9.400.000		-	9.400.000,00
85	SD NEGERI SUKANAMPA	25.570.000		3.509.600	29.079.600,00
86	SD NEGERI TUNAS HARAPAN	-		11.719.100	11.719.100,00
87	SD NEGERI TUNAS MEKAR	765.000		5.617.500	6.382.500,00
88	SD NEGERI UTAMA 3	-		944.200	944.200,00
89	SD NEGERI UTAMA 6	70.492.678		6.615.000	77.107.678,00
90	SD NEGERI UTAMA 7	22.192.000		2.158.000	24.350.000,00
91	SD NEGERI UTAMA MANDIRI 1	85.352.700		9.908.000	95.260.700,00
	Jumlah SD	5.311.517.050	-	880.837.873	6.192.354.923,00
1	SMP NEGERI 1 CIMAHI	31.635.000		18.287.200	49.922.200,00
2	SMP NEGERI 2 CIMAHI	30.529.700		8.921.800	39.451.500,00
3	SMP NEGERI 3 CIMAHI	16.470.000		-	16.470.000,00
4	SMP NEGERI 4 CIMAHI	86.025.000		-	86.025.000,00
5	SMP NEGERI 5 CIMAHI	9.500.000		-	9.500.000,00
6	SMP NEGERI 6 CIMAHI	16.799.999		2.000.000	18.799.999,00
7	SMP NEGERI 7 CIMAHI	30.600.000		31.969.600	62.569.600,00
8	SMP NEGERI 8 CIMAHI	49.166.100		-	49.166.100,00
9	SMP NEGERI 9 CIMAHI	86.199.998		8.963.000	95.162.998,00
10	SMP NEGERI 10 CIMAHI	29.000.000		68.690.000	97.690.000,00
11	SMP NEGERI 11 CIMAHI	12.432.999		-	12.432.999,00
12	SMP NEGERI 12 CIMAHI	19.150.000		14.038.500	33.188.500,00
13	SMP NEGERI 13 CIMAHI	90.467.998		35.566.800	126.034.798,00
14	SMP NEGERI 14 CIMAHI	21.900.000	-	12.640.250	34.540.250,00

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
15	SMP NEGERI 15 CIMAHI	28.749.300	-	67.494.000	96.243.300,00
16	SMP NEGERI 16 CIMAHI	30.216.200	-	58.354.000	88.570.200,00
	<i>Jumlah SMP</i>	<i>588.842.294</i>	-	<i>326.925.150</i>	915.767.444,00
	Total Jumlah	5.900.359.344	-	1.207.763.023	7.108.122.367,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pada Jalan Lingkungan Tahun 2022

No. Urut.	Letak/ Lokasi	Harga	Ket
1	2	3	4
1	Kel. Cibabat	101.144.000,00	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kel. Cibabat I (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
2	Kel. Melong	101.331.000,00	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kel. Melong II (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
3	Kel. Cibeureum	101.220.000,00	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kel. Cibeureum III (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
4	Jaling RW.17 Cibabat Jl. Flamboyan 3 ; Jl. Kemuning	201.718.000,00	Rehabilitasi Jalan Wilayah Cimahi Utara V (Anggaran Perubahan 2015) (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1600 Meter)
5	Kec. Cimahi Utara III	201.335.000,00	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kec. Cimahi Utara III (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1285 Meter)
6	Kelurahan Cipageran I	201.689.000,00	Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Cipageran I (Banprov Anggaran Perubahan T.A. 2016) (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1258 Meter)
7	Kelurahan Melong I	201.430.000,00	Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Melong I (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1275 Meter)
8	Kelurahan Cibeber I	201.226.000,00	Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Cibeber I (Banprov Anggaran Perubahan T.A. 2016) (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1276 Meter)
9	Jaling Melong (Plaosan)	48.992.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
10	JALING SUAKA	49.443.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
11	JALING CIBABAT PPTM	49.569.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
12	JALING PASIRKALIKI	49.635.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
13	Jaling Cimahi Nusa Hijau	49.673.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
14	Jaling RW. 17 Cibabat	49.691.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
15	JALING BAROS	49.705.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
16	JALING CIGUGUR TENGAH	49.709.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
17	Jaling Terusan Jendral Soedirman	49.717.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
18	Jaling Singosari	49.817.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
19	JALING CIPAGERAN RW. 05	49.853.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
20	JALING CIPUTRI	74.601.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 900 Meter)
21	JALING SADARMANAH RW.10	99.178.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
22	JALING MELONG GREEN RW. 28	99.311.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
23	Jaling Cigugur Tengah	99.362.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
24	JALING CITEUREUP	99.374.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
25	JALING NATA ENDAH	99.465.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
26	JALING KALASAN	99.543.000,00	-
27	JALING MELONG GREEN RW. 29	99.555.000,00	-
28	JALING KEBON JERUK CIBEUREUM	99.746.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
29	JALING SINGOSARI III	49.294.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
30	JALING RW.18 SETIAMANAH	49.369.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 650 Meter)
31	JALING KELURAHAN BAROS	49.376.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
32	JALING PAWON	49.485.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
33	JALING KELURAHAN CIBEBER	49.542.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 900 Meter)
34	JALING KELURAHAN CIBEUREUM	49.580.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
35	JALING RW.14 PASIRKALIKI	49.721.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 740 Meter)
36	JALING NATA ENDAH KEL. CIBABAT	49.762.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
37	JALING KELURAHAN MELONG	54.422.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 740 Meter)
38	JALING BOKO	59.322.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
39	JALING CANGKUANG	98.197.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
40	JALING KELURAHAN	98.203.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)

No. Urut.	Letak/ Lokasi	Harga	Ket
1	2	3	4
41	JALING MELONG RW. 29	98.334.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1150 Meter)
42	JALING BUKIT CIBOGO	98.509.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
43	JALING UTAMA RW. 16	98.700.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
44	JALING WARTA	98.826.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1300 Meter)
45	JALING CIBEUREUM RW. 03 DAN RW. 29	98.851.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
46	JALING SUAKA	98.852.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
47	JALING CIBEUREUM (SMK MUSLIMIN DAN RW. 25)	98.909.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
48	JALING KEBON JERUK CIBEUREUM	98.918.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
49	JALING LEUWIGAJAH RW. 04	98.959.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
50	JALING LEUWIGAJAH RW. 05	98.987.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
51	JALING RW. 10 CIBEBER	98.989.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
52	JALING CIBEUREUM (JL. NURUL HUDA)	98.994.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1180 Meter)
53	JALING PRAMBANAN	99.000.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
54	JALING RW.31 MELONG	99.018.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
55	Perbaikan Saluran Jaling Kel. Melong	99.021.000,00	(DBP Jawa Barat) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
56	JALING ROROJONGRANG UTARA II	99.028.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
57	JALING CIMAHI	99.033.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
58	JALING CIGUGUR (RW. 04)	99.051.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 850 Meter)
59	JALING CIBEBER (UMJANI)	99.062.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
60	JALING CIBEBER RW. 02	99.069.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
61	JALING LEUWIGAJAH (RW. 01)	99.074.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 800 Meter)
62	JALING BAROS	99.079.000,00	(Jl. SAMRATULANGI) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
63	JALING H. NUR CIBABAT	99.094.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
64	JALING RW. 17 CIPAGERAN	99.112.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
65	Jaling Kel. Melong	99.116.000,00	(DBP Jawa Barat) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
66	JALING BAROS	99.121.000,00	(Jl. KEBON RUMPUT) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1070 Meter)
67	JALING KARANG MEKAR (PANDAY)	331.596.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter), Jl. Panday Tahun 2012 99,126,000.00, Perencanaan Jalan Wilayah Tengah I Tahun 2020 Rp16.502.666,67, Rehab Jalan Kota Wilayah Tengah I DID T.A. 2020 Rp199.453.000, Pengawasan Jalan Wilayah Tengah I Tahun 2020 Rp16.514.333,33
68	JALING MENDUT VI	99.137.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1100 Meter)
69	JALING KEBON RUMPUT DALAM	99.160.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
70	JALING BOROBUDUR RAYA	99.166.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
71	JALING CIPAGERAN	99.200.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
72	JALING PASAR ANTRI BARU	99.210.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
73	JALING RW.05 CIPAGERAN	99.218.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
74	Jaling Kel. Cipageran (DBP Jawa Barat)	99.220.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
75	JALING MENDUT RAYA	99.222.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1150 Meter)
76	JALING CITEUREUP RW. 04	99.236.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
77	JALING KARANG MEKAR	99.273.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
78	JALING PADASUKA	99.274.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
79	JALING RW. 11 CIBEBER	99.289.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
80	JALING RW. 20 CIPAGERAN	99.302.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
81	JALING PURI CIPAGERAN I	99.314.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
82	JALING ARUMAN CIBABAT	99.336.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)

No. Urut.	Letak/ Lokasi	Harga	Ket
1	2	3	4
83	JALING RW.28 KEL. MELONG	99.342.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
84	JALING RW. 19 KELURAHAN CIGUGUR	99.356.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
85	JALING CIGUGUR (RW. 15 & RW. 05)	99.369.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
86	Jaling Kel. Cipageran	99.369.000,00	(Jalan Terobosan) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
87	JALING KELURAHAN CITEUREUP	99.378.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
88	JALING KARANG ANYAR CIGUGUR	99.379.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
89	Jaling Nusa Hijau	99.381.000,00	(DBP Jawa Barat) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
90	JALING NATA ENDAH	99.387.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
91	JALING SETIAMANAH RW. 14	99.397.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
92	JALING PADASUKA RW. 15	99.411.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
93	JALING RW. 18 CIPAGERAN	99.412.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1100 Meter)
94	JALING PASIRKALIKI RW. 09	99.420.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
95	JALING CIBABAT (JL. PESANTREN PERMAI)	99.440.000,00	-
96	JALING CITEUREUP RW. 09	99.442.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
97	JALING CIBABAT	99.460.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
98	JALING CIBABAT RW. 23	99.480.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
99	JALING CIPUTRI	99.488.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
100	JALING RW.17 CIBABAT	99.500.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
101	JALING UTAMA RW. 14	99.515.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
102	JALING KELURAHAN PASIRKALIKI	99.523.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
103	JALING GUNUNG BATU DALAM	99.540.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
104	JALING RW. 11 PADASUKA (RANCABELUT)	99.545.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1200 Meter)
105	JALING PASIRKALIKI	197.378.000,00	(APBD KOTA CIMAHI) - (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 1800 Meter)
106	Saluran Jalan Lingkungan Lapangan Tembak	49.655.000,00	- (Tindak lanjut LHP Tahun 2017 yang semula luasan 0 menjadi 150 Meter)
TOTAL		10.260.731.000,00	

**Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022**

NO	SKPD	31 Desember 2021	Beban Penyusutan Tahun 2022	Ekuitas 2022	31 Desember 2022
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 112.077.792.635,63	Rp 8.979.792.217,87	Rp (4.360.619.366,51)	Rp 116.696.965.486,99
2	DINAS KESEHATAN	Rp 52.856.560.010,75	Rp 4.558.089.958,74	Rp (6.522.164.893,97)	Rp 50.892.485.075,52
3	RSUD dibabat	Rp 239.857.371.732,78	Rp 28.742.733.143,70	Rp (7.969.701.896,76)	Rp 260.630.402.979,72
4	DPUPR	Rp 464.205.096.388,74	Rp 23.952.793.875,90	Rp (45.261.539.702,99)	Rp 442.896.350.561,65
5	DPKP	Rp 43.421.252.164,11	Rp 6.870.607.166,11	Rp 1.555.934.657,93	Rp 51.847.793.988,15
6	SATPOL PP DAN DAMKAR	Rp 16.037.438.428,42	Rp 603.917.974,08	Rp (3.557.141.982,34)	Rp 13.084.214.420,16
7	BPBD	Rp 1.577.334.291,00	Rp 196.662.469,31	Rp 13.128.570,00	Rp 1.787.125.330,31
8	DINAS SOSIAL	Rp 931.090.398,53	Rp 185.914.214,29	Rp 7.569.660,72	Rp 1.124.574.273,54
9	DP3AP2KB	Rp 3.828.646.696,62	Rp 256.362.837,02	Rp (101.540.565,13)	Rp 3.983.468.968,51
10	DINAS TENAGA KERJA	Rp 2.135.839.099,99	Rp 57.714.500,00	Rp (470.675.250,00)	Rp 1.722.878.349,99
11	DISPANGTAN	Rp 9.466.876.185,38	Rp 551.689.488,15	Rp (667.266.878,00)	Rp 9.351.298.795,53
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 34.307.562.206,06	Rp 2.642.226.376,37	Rp (4.470.440.278,90)	Rp 32.479.348.303,53
13	DISDUKCAPIL	Rp 8.904.268.942,21	Rp 327.271.276,14	Rp (1.114.278.018,50)	Rp 8.117.262.199,85
14	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 59.722.123.814,49	Rp 7.655.167.830,52	Rp (1.817.522.543,75)	Rp 65.559.769.101,26
15	DISKOMINFO	Rp 6.096.296.564,12	Rp 961.485.807,36	Rp 241.225.589,75	Rp 7.299.007.961,23
16	DISARDA	Rp 2.055.315.100,60	Rp 195.182.816,43	Rp (183.676.293,98)	Rp 2.066.821.623,05
17	DISDAGKOPERIN	Rp 38.683.527.826,08	Rp 3.853.696.659,48	Rp (2.109.205.379,54)	Rp 40.428.019.106,02
18	DPMPTSP	Rp 5.059.150.954,81	Rp 932.579.192,60	Rp (1.842.920.907,57)	Rp 4.148.809.239,84
19	DISBUDPARPORA	Rp 1.791.162.945,14	Rp 346.956.509,66	Rp (158.425.370,25)	Rp 1.979.694.084,55
20	BAPPEDA	Rp 4.339.923.582,59	Rp 185.710.424,91	Rp (1.385.185.050,14)	Rp 3.140.448.957,36
21	BPKAD	Rp 10.661.937.968,92	Rp 380.755.289,08	Rp (1.391.203.205,13)	Rp 9.651.490.052,87
22	BAPENDA	Rp 5.953.944.687,15	Rp 93.055.838,40	Rp (791.132.640,60)	Rp 5.255.867.884,96
23	BKPSDMD	Rp 2.783.397.192,00	Rp 68.423.137,50	Rp (720.595.600,50)	Rp 2.131.224.729,00
24	SETDA	Rp 52.166.396.646,75	Rp 2.910.778.688,40	Rp (3.697.083.633,26)	Rp 51.380.091.701,89
25	SETWAN	Rp 19.733.322.922,30	Rp 1.174.147.668,91	Rp (1.455.712.738,00)	Rp 19.451.757.853,21
26	INSPEKTORAT KOTA	Rp 2.562.410.721,96	Rp 257.223.808,41	Rp (382.862.710,00)	Rp 2.436.771.820,37
27	KEC. CIMAHI UTARA	Rp 7.856.491.122,39	Rp 428.734.224,81	Rp (1.191.698.566,49)	Rp 7.093.526.780,71
28	KEC. CIMAHI TENGAH	Rp 11.580.967.658,48	Rp 712.647.339,84	Rp (1.029.608.782,32)	Rp 11.264.006.216,00
29	KEC. CIMAHI SELATAN	Rp 10.301.462.666,63	Rp 504.357.192,57	Rp (1.773.674.461,98)	Rp 9.032.145.397,22
30	KESBANG	Rp 921.316.084,30	Rp 27.874.415,10	Rp (16.305.648,70)	Rp 932.884.850,70
JUMLAH		Rp 1.231.876.277.638,94	Rp 98.614.552.341,66	Rp (92.624.323.886,92)	Rp 1.237.866.506.093,70

Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
1	Dinas Pendidikan				668.380.800,00	53.787.500,00	40.297.950,00	71.715.337,50	510.737.287,50	439.021.950,00	71.715.337,50
	Aplikasi Siadik	2022	2029	1	82.800.000,00			20.700.000,00	20.700.000,00	-	20.700.000,00
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2021	2028	1	148.521.800,00		21.130.450,00	31.847.837,50	52.978.287,50	21.130.450,00	31.847.837,50
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2021		1	84.521.800,00						-
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (pengembangan)	2022		1	64.000.000,00						-
	Sistem Penilaian Kinerja Guru	2019	2026	1	76.670.000,00	19.167.500,00	19.167.500,00	19.167.500,00	76.670.000,00	57.502.500,00	19.167.500,00
	Aplikasi SIM Pendataan Pendidikan	2016	2023	1	46.774.000,00			-	46.774.000,00	46.774.000,00	-
	Software Dinas Pendidikan	2015	2022	1	99.535.000,00			-	99.535.000,00	99.535.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Pembangunan Aplikasi Web Dinas Pendidikan	2017	2024	1	39.160.000,00	9.790.000,00		-	39.160.000,00	39.160.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi SIM Absensi Terintegrasi Bagi Guru	2017	2024	1	49.500.000,00	12.375.000,00		-	49.500.000,00	49.500.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi BOS	2017	2024	1	49.820.000,00	12.455.000,00		-	49.820.000,00	49.820.000,00	-
	Software Cont Off-line Computer (temuan BPK 2017) disdik dan sekolah	2016	2023	1	75.600.000,00			-	75.600.000,00	75.600.000,00	-
2	Dinas Kesehatan				172.730.000,00	34.132.500,00	9.492.500,00	9.492.500,00	169.480.000,00	159.987.500,00	9.492.500,00
	SPTJB JAMPRO	2016	2023	1	20.000.000,00	-		-	20.000.000,00	20.000.000	-
	Sistem Pelayanan Terintegrasi (SIMPATI)	2017	2024	1	79.860.000,00	19.965.000,00		-	79.860.000,00	79.860.000	-
	Software WEB Service Terintegrasi Sijariemas Cimahi	2017	2024	1	18.700.000,00	4.675.000,00		-	18.700.000,00	18.700.000	-
	Pengadaan windows original (temuan BPK 2017)	2013	2020	1	16.200.000,00	-		-	16.200.000,00	16.200.000	-
	Sistem Informasi SPM	2019	2026	1	24.970.000,00	6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00	24.970.000,00	18.727.500	6.242.500,00
	Aplikasi Survei Kepuasan masyarakat	2020	2027	1	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000	2.000.000,00
	Sistem Antrian paket	2020	2027	1	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00	2.500.000	1.250.000,00
3	RSUD				392.194.000,00	36.498.500,00	33.061.000,00	33.061.000,00	392.194.000,00	359.133.000,00	33.061.000,00
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2006	2013	1	200.000.000,00	-			200.000.000,00	200.000.000	-
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2011	2018	1	8.250.000,00	-			8.250.000,00	8.250.000	-
	Software - BPJS C1 (temuan BPK 2017)	2016	2023	1	37.950.000,00	-			37.950.000,00	37.950.000	-
	SIMRS (temuan BPK 2017)	2017	2024	1	13.750.000,00	3.437.500,00			13.750.000,00	13.750.000	-
	License Software Billing	2019	2026	1	6.294.000,00	1.573.500,00	1.573.500,00	1.573.500,00	6.294.000,00	4.720.500	1.573.500,00
	Aplikasi SKP	2019	2026	1	57.200.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	57.200.000,00	42.900.000	14.300.000,00
	Acronics Server dan Cloud ST	2019	2026	1	44.825.000,00	11.206.250,00	11.206.250,00	11.206.250,00	44.825.000,00	33.618.750	11.206.250,00
	Multimedia Informasi	2019	2026	1	23.925.000,00	5.981.250,00	5.981.250,00	5.981.250,00	23.925.000,00	17.943.750	5.981.250,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				1.500.774.910,00	199.856.250,00	246.337.775,00	148.175.471,25	1.056.248.496,25	908.073.025,00	148.175.471,25
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2018	2025	1	711.675.910,00	104.472.500,00	128.892.775,00	84.810.783,75	457.243.558,75	372.432.775,00	84.810.783,75
	Induk Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2018		1	188.100.000,00						
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang	2019		1	180.070.000,00						
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2020		1	49.720.000,00						
	Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	2021		1	97.681.100,00						
	Aset Tidak Berwujud- Pemeliharaan Sistem Informasi penataan Ruang	2022		1	97.816.530,00						-
	Aset Tidak Berwujud- Pengembangan Substansi dalam Sistem Informasi Penataan Ruang	2022		1	98.288.280,00						-
	Aset Tidak Berwujud- Pengembangan Sistem Informasi jalan dan Jembatan (SILAJA)	2022		1	99.743.000,00			24.935.750,00	24.935.750,00		24.935.750,00
	Sistem informasi Movev Bangunan Gedung	2021	2028		175.777.000,00		22.061.250,00	38.428.937,50	60.490.187,50	22.061.250,00	38.428.937,50
	Induk Sistem informasi Movev Bangunan Gedung	2021		1	88.245.000,00		22.061.250,00		22.061.250,00	22.061.250,00	-
	Updating Sistem Informasi Movev Bangunan Gedung	2022		1	87.532.000,00				-		-
	Penyusunan Database Jaringan Jalan Kota Cimahi Berbasis GIS	2018	2025	1	381.535.000,00	95.383.750,00	95.383.750,00	-	381.535.000,00	381.535.000	-
	Software Keuangan & Kepegawaian (temuan BPK 2017)	2007	2014	1	49.940.000,00				49.940.000,00	49.940.000	-
	Software LAN (temuan BPK 2017)	2007	2014	1	82.104.000,00				82.104.000,00	82.104.000	-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				324.720.140,00	45.593.625,00	43.874.875,00	44.001.410,00	265.116.535,00	221.115.125,00	44.001.410,00
	Aplikasi Sistem Informasi Rusunawa	2022	2029	1	49.588.140,00	-		12.397.035,00	12.397.035,00	-	12.397.035,00
	Belanja Peningkatan Aplikasi Billing.	2020	2027	1	89.650.000,00	22.412.500,00	22.412.500,00	22.412.500,00	67.237.500,00	44.825.000	22.412.500,00
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Revitalisasi SIM UPT PALD	2019	2026	1	36.767.500,00	9.191.875,00	9.191.875,00	9.191.875,00	36.767.500,00	27.575.625	9.191.875,00
	Sistem Pencatatan Meter Air dan Online Billing	2018	2025	1	49.082.000,00	12.270.500,00	12.270.500,00	-	49.082.000,00	49.082.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
	Sistem Operasi Windows Komputer Rusunawa (temuan BPK 2017)	2017	2024	1	6.875.000,00	1.718.750,00			6.875.000,00	6.875.000	-
	SIM UPT Air Minum	2016	2023	1	44.027.500,00				44.027.500,00	44.027.500	-
	SIM Pelanggan Penyedotan Lumpur Tinja	2016	2023	1	48.730.000,00				48.730.000,00	48.730.000	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran				65.000.000,00	16.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00
	Website www.satpolppdamkar.cimahikot.go.id	2017	2024	1	45.000.000,00	11.250.000,00			45.000.000,00	45.000.000	-
	Upgrade Aplikasi Sistem Papan Informasi	2020	2027	1	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000	5.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,				32.640.000,00	7.500.000,00	-	-	32.640.000,00	32.640.000,00	-
	SIM Database Terpilah Anak	2017	2024	1	30.000.000,00	7.500.000,00			30.000.000,00	30.000.000	-
	software Windows 7 (temuan BPK 2017)	2011	2018	1	2.640.000,00				2.640.000,00	2.640.000	-
8	Dinas Tenaga Kerja				411.318.050,00	57.959.250,00	80.346.750,00	62.120.137,50	261.791.637,50	199.671.500,00	62.120.137,50
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2020	2027	1	264.031.050,00	21.137.500,00	43.525.000,00	49.842.137,50	114.504.637,50	64.662.500,00	49.842.137,50
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2020	2027	1	84.550.000,00						
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2021	2028	1	89.550.000,00						
	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2022	2029	1	89.931.050,00						
	Database Ketenagakerjaan Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	2018	2025	1	98.175.000,00	24.543.750,00	24.543.750,00		98.175.000,00	98.175.000	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	2019	2026	1	49.112.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00	49.112.000,00	36.834.000	12.278.000,00
9	Dinas Pangan dan Pertanian				51.975.455,00	4.668.750,00	2.000.000,00	-	51.975.455,00	51.975.455,00	-
	Aplikasi Pemutakhiran Data Pertanian dan Kehatanan Pangan (Diskopindagtan - 2016)	2016	2023	1	33.300.455,00				33.300.455,00	33.300.455	-
	Aplikasi SIM Puskesmas	2017	2024	1	10.675.000,00	2.668.750,00			10.675.000,00	10.675.000	-
	Aplikasi SIM Puskesmas	2018	2025	1	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
10	Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)				349.472.000,00	21.670.000,00	21.670.000,00	65.698.000,00	152.378.000,00	86.680.000,00	65.698.000,00
	SIM Laboratorium	2018	2025	1	38.830.000,00	9.707.500,00	9.707.500,00		38.830.000,00	38.830.000	-
	SIM Dokumen Lingkungan Online	2018	2025	1	47.850.000,00	11.962.500,00	11.962.500,00		47.850.000,00	47.850.000	-
	Aplikasi Retribusi Pelayanan Persampahan	2022	2029	1	96.570.000,00			24.142.500,00	24.142.500,00		24.142.500,00
	Database dan Aplikasi Website RTH Kehati	2022	2029	1	69.042.000,00			17.260.500,00	17.260.500,00		17.260.500,00
	Pengembangan Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup (Sitangkal)	2022	2029	1	97.180.000,00			24.295.000,00	24.295.000,00		24.295.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				384.974.250,00	58.354.487,50	54.166.987,50	61.829.487,50	278.810.500,00	216.981.012,50	61.829.487,50
	Belanja Jasa Aplikasi Website	2020	2027		34.705.000,00	8.676.250,00	8.676.250,00	8.676.250,00	26.028.750,00	17.352.500	8.676.250,00
	Belanja Jasa License Zoom	2020	2027		26.950.000,00	6.737.500,00	6.737.500,00	6.737.500,00	20.212.500,00	13.475.000	6.737.500,00
	Pengembangan Aplikasi Silima	2019	2026	1	35.250.000,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	35.250.000,00	26.437.500	8.812.500,00
	Software	2019	2026	1	29.412.950,00	7.353.237,50	7.353.237,50	7.353.237,50	29.412.950,00	22.059.713	7.353.237,50
	Sistem Koneksi (Intervase tahap awal) NIK Pembuatan Digital Arsip	2018	2025	1	38.600.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00		38.600.000,00	38.600.000	-
	Informasi yang dapat diakses masyarakat melalui web Dinas Kependudukan	2018	2025	1	26.750.000,00	6.687.500,00	6.687.500,00		26.750.000,00	26.750.000	-
	Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Intervase Tahap Awal) NIK	2018	2025	1	25.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00		25.000.000,00	25.000.000	-
	Aplikasi Monev Pelayanan Dokumen Kependudukan	2016	2023	1	22.330.000,00	-			22.330.000,00	22.330.000	-
	Aplikasi CD Interaktif Profil Disdukcapil	2017	2024	1	16.750.000,00	4.187.500,00			16.750.000,00	16.750.000	-
	ESET NOD32 (temuan BPK 2017)	2015	2022	1	5.000.000,00	-			5.000.000,00	5.000.000	-
	Kaspersky (temuan BPK 2017)	2009	2016	1	3.226.300,00	-			3.226.300,00	3.226.300	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
	Belanja Jasa tenaga Informasi DILANDACITA	2022	2029	1	121.000.000,00	-	-	30.250.000,00	30.250.000,00	-	30.250.000,00
12	Dinas Perhubungan				355.089.395,00	12.349.200,00	-	5.186.336,25	339.530.386,25	334.344.050,00	5.186.336,25
	Upgrade Aplikasi BLUE RFID Kemenhub	2022	2029	1	20.745.345,00			5.186.336,25	5.186.336,25	-	5.186.336,25
	Aplikasi Untuk Penyempurnaan Software Website Dinas Perhubungan Tahun 2016	2016	2023	1	19.493.750,00				19.493.750,00	19.493.750	-
	OS Windows	2014	2021	1	2.700.000,00				2.700.000,00	2.700.000	-
	Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum	2017	2024	1	49.396.800,00	12.349.200,00			49.396.800,00	49.396.800	-
	SOFTWARE APLIKASI SISTEM INFORMASI (temuan BPK 2017)	2006	2013	1	22.000.000,00				22.000.000,00	22.000.000	-
	WINDOWS XP SOFTWARE (temuan BPK 2017)	2006	2013	1	1.881.000,00				1.881.000,00	1.881.000	-
	sim database angkutan umum (temuan BPK 2017)	2015	2022	1	41.345.000,00				41.345.000,00	41.345.000	-
	software website dishub (temuan BPK 2017)	2015	2022	1	100.425.000,00				100.425.000,00	100.425.000	-
	Sistem Informasi PJU (temuan BPK 2017)	2015	2022	1	48.702.500,00				48.702.500,00	48.702.500	-
	Sistem Reklame (temuan BPK 2017)	2015	2022	1	48.400.000,00				48.400.000,00	48.400.000	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika				1.006.929.683,00	203.049.170,75	46.622.420,75	9.912.375,00	1.006.929.683,00	997.017.308,00	9.912.375,00
	Sistem Pengelolaan Administrasi Pelayanan Informasi Publik	2017	2024	1	38.940.000,00	9.735.000,00			38.940.000,00	38.940.000	-
	Aplikasi Cimahi Smart City	2017	2024	1	586.767.000,00	146.691.750,00			586.767.000,00	586.767.000	-
	Revitalisasi Aplikasi Pengaduan Terintegrasi (KAPPDE-2016)	2016	2023	1	45.795.000,00	-			45.795.000,00	45.795.000	-
	Aplikasi Pengaduan Berbasis Android (KAPPDE-2016)	2016	2023	1	52.886.000,00	-			52.886.000,00	52.886.000	-
	Revitalisasi Aplikasi Intervensi Kemiskinan (KAPPDE-2016)	2016	2023	1	31.240.000,00	-			31.240.000,00	31.240.000	-
	Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2019	2026	1	39.649.500,00	9.912.375,00	9.912.375,00	9.912.375,00	39.649.500,00	29.737.125	9.912.375,00
	Piranti Lunak Pengamanan Jaringan Komputer	2018	2025	1	55.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00		55.000.000,00	55.000.000	-
	Computer mainframe	2018	2025	1	91.840.183,00	22.960.045,75	22.960.045,75		91.840.183,00	91.840.183	-
	Software Operating System Server - (temuan BPK 2017)	2013	2020	1	9.900.000,00				9.900.000,00	9.900.000	-
	Software Database Management System - (temuan BPK 2017)	2013	2020	1	19.250.000,00				19.250.000,00	19.250.000	-
	Software Development tools - (temuan BPK 2017)	2013	2020	1	4.950.000,00				4.950.000,00	4.950.000	-
	perangkat lunak windows Pro SP2 OEM /MS Office 2007 Pro FPP(temuan BPK 2017)	2008	2015	1	30.712.000,00				30.712.000,00	30.712.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
14	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				636.943.400,00	88.566.625,00	118.669.125,00	141.735.975,00	426.705.225,00	284.969.250,00	141.735.975,00
	Aplikasi Sistem Collact-CE	2022	2029	1	49.633.650,00			12.408.412,50	12.408.412,50	-	12.408.412,50
	Website Pelayanan Kementrologian	2022	2029	1	88.883.250,00			22.220.812,50	22.220.812,50	-	22.220.812,50
	SIMECI(Aplikasi Metrologi Cimahi)	2021	2028	1	46.500.000,00		11.625.000,00	11.625.000,00	23.250.000,00	11.625.000	11.625.000,00
	Jasa Pembuatan Website Integritas Layanan Teknis (Cerah)	2021	2028	1	47.850.000,00		11.962.500,00	11.962.500,00	23.925.000,00	11.962.500	11.962.500,00
	Aplikasi Pameran Virtual Expo	2021	2028	1	49.810.000,00		12.452.500,00	12.452.500,00	24.905.000,00	12.452.500	12.452.500,00
	Aplikasi Pelayanan Metrologi	2020	2027	1	26.850.000,00	6.712.500,00	6.712.500,00	6.712.500,00	20.137.500,00	13.425.000	6.712.500,00
	Aplikasi Lapaku	2020	2027	1	49.600.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	37.200.000,00	24.800.000	12.400.000,00
	Aplikasi Kegiatan Pemetaan dan Pendataan UKM (LAPAKU)	2019	2026	1	49.200.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	49.200.000,00	36.900.000	12.300.000,00
	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	2019	2026	1	48.900.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	48.900.000,00	36.675.000	12.225.000,00
	Aplikasi Meteorologi	2019	2026	1	49.085.000,00	12.271.250,00	12.271.250,00	12.271.250,00	49.085.000,00	36.813.750	12.271.250,00
	Aplikasi Meteorologi	2018	2025	1	46.249.500,00	11.562.375,00	11.562.375,00		46.249.500,00	46.249.500	-
	Aplikasi SIM Laporan Kinerja	2017	2024	1	23.750.000,00	5.937.500,00			23.750.000,00	23.750.000	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				819.692.900,00	73.671.000,00	187.163.225,00	162.438.225,00	556.005.200,00	393.566.975,00	162.438.225,00
	Sistem Operasi untuk server dan software monitoring	2022	2029	1	32.500.000,00			8.125.000,00	8.125.000,00	-	8.125.000,00
	Aplikasi Pendukung MPP	2021	2028	1	453.968.900,00		113.492.225,00	113.492.225,00	226.984.450,00	113.492.225	113.492.225,00
	Konsultasi Pengembangan Sipinter DPMPTSP	2020	2027	1	49.313.000,00	12.328.250,00	12.328.250,00	12.328.250,00	36.984.750,00	24.656.500	12.328.250,00
	Konsultasi Pengembangan Sipinter DPMPTSP	2019	2026	1	48.224.000,00	12.056.000,00	12.056.000,00	12.056.000,00	48.224.000,00	36.168.000	12.056.000,00
	Konsultasi pengembangan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke Sipinter DPMPTSP	2019	2026	1	34.177.000,00	8.544.250,00	8.544.250,00	8.544.250,00	34.177.000,00	25.632.750	8.544.250,00
	Aplikasi Migrasi Data	2019	2026	1	31.570.000,00	7.892.500,00	7.892.500,00	7.892.500,00	31.570.000,00	23.677.500	7.892.500,00
	Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu	2018	2025	1	47.500.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00		47.500.000,00	47.500.000	-
	pembuatan konten dashboard pada aplikasi multimedia 2018	2018	2025	1	39.900.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00		39.900.000,00	39.900.000	-
	Penyedia jasa penyusunan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke system pelayanan terpadu tahun 2018	2018	2025	1	44.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		44.000.000,00	44.000.000	-
	Software Aplikasi Sistem Informasi Arsip - Temuan BPK	2010	2017	1	14.850.000,00				14.850.000,00	14.850.000	-
	Mainframe (Temuan BPK 2017)	2011	2018	1	6.190.000,00				6.190.000,00	6.190.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
	Software DAAS MOD (Temuan BPK 2017)	2012	2019	1	17.500.000,00				17.500.000,00	17.500.000	-
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga				117.150.000,00	8.662.500,00	8.662.500,00	20.625.000,00	55.275.000,00	34.650.000,00	20.625.000,00
	Aplikasi Pembuatan Web Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi	2018	2025	1	34.650.000,00	8.662.500,00	8.662.500,00		34.650.000,00	34.650.000	-
	Sistem Aplikasi Data Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU)	2022	2029	1	82.500.000,00			20.625.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				264.694.646,90	12.271.874,99	8.676.250,00	23.676.250,00	202.342.146,90	178.665.896,90	23.676.250,01
	Sistem Pengelolaan Data infrastruktur Lingkungan	2021	2028	1	34.705.000,00		8.676.250,00	8.676.250,00	17.352.500,00	8.676.250,00	8.676.250,00
	Sistem Perencanaan Sektor Cipta Karya dan Lingkungan Hidup	2017	2024	1	49.087.500,00	12.271.875,00			49.087.500,00	49.087.500	-
	microsoft windows server, sqls, ms office(temuan BPK 2017)	2016	2023	1	120.902.146,90	- 0,01			120.902.146,90	120.902.146,90	0,01
	Pengembangan Sistem PIRAMIDA	2022	2029	1	60.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
18	BPKAD				519.907.500,00	68.864.250,00	56.626.750,00	55.913.875,00	448.317.125,00	392.403.250,00	55.913.875,00
	Belanja Modal Software Website BPKAD	2022	2029	1	46.120.500,00			11.530.125,00	11.530.125,00		11.530.125,00
	Aplikasi SIP Persediaan	2020	2027		148.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	111.000.000,00	74.000.000,00	37.000.000,00
	Aplikasi RKBMD	2019	2026	1	29.535.000,00	7.383.750,00	7.383.750,00	7.383.750,00	29.535.000,00	22.151.250,00	7.383.750,00
	Aplikasi RKBMD	2018	2025	1	48.972.000,00	12.243.000,00	12.243.000,00		48.972.000,00	48.972.000,00	-
	Aplikasi Smart Accounting Control	2017	2024	1	48.950.000,00	12.237.500,00			48.950.000,00	48.950.000,00	-
	Aplikasi Integrasi Sistem SIPKD Keuangan dengan SIPKD Persediaan	2016	2023	1	49.500.000,00				49.500.000,00	49.500.000,00	-
	Aplikasi QR code	2016	2023	1	49.060.000,00				49.060.000,00	49.060.000,00	-
	Perangkat Lunak SIPKD Persediaan - (temuan BPK 2017)	2014	2021	1	99.770.000,00				99.770.000,00	99.770.000,00	-
19	Badan Pengelolaan Pendapatan				1.687.042.900,00	254.313.125,00	235.169.275,00	182.168.775,00	1.521.742.350,00	1.339.573.575,00	182.168.775,00
	Aplikasi SISMIOP	2016	2023	1	727.359.000,00	158.406.875,00	114.372.500,00	85.572.000,00	641.787.000,00	556.215.000,00	85.572.000,00
	Induk Aplikasi SISMIOP/SIM PBB (Dinas Pendapatan-2016)	2016		1	34.457.500,00						-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah	2017		1	176.137.500,00						-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah	2018		1	156.200.000,00						-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah	2019		1	155.100.000,00						-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
	Pengembangan Aplikasi SISMIOP	2020		1	96.030.000,00						-
	Pengembangan dan Custom Aplikasi SISMIOP	2020		1	50.160.000,00						-
	Pengembangan Aplikasi SISMIOP	2022		1	59.274.000,00						-
	Pengembangan Sistem BAPENDA	2021	2028	1	133.552.100,00		33.388.025,00	33.388.025,00	66.776.050,00	33.388.025,00	33.388.025,00
	Pengembangan Aplikasi e-PAD	2020	2027	1	51.810.000,00	12.952.500,00	12.952.500,00	12.952.500,00	38.857.500,00	25.905.000	12.952.500,00
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2019	2026	1	106.150.000,00	26.537.500,00	26.537.500,00	26.537.500,00	106.150.000,00	79.612.500	26.537.500,00
	Aplikasi Pelayanan/Pemutakhiran Data PBB Berbasis Web	2019	2026	1	94.875.000,00	23.718.750,00	23.718.750,00	23.718.750,00	94.875.000,00	71.156.250	23.718.750,00
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2018	2025	1	96.800.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00		96.800.000,00	96.800.000	-
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2017	2024	1	33.990.000,00	8.497.500,00			33.990.000,00	33.990.000	-
	BPHTB pada Kegiatan Pendapatan Daerah (Dinas Pendapatan-2016)	2016	2023	1	47.135.000,00				47.135.000,00	47.135.000	-
	Sistem Penghapusan Piutang dan NOP Ganda Pajak Bumi dan Bangunan (Dinas Pendapatan-2016)	2016	2023	1	48.907.500,00				48.907.500,00	48.907.500	-
	Aplikasi e-PAD (Dinas Pendapatan-2016)	2016	2023	1	34.595.000,00				34.595.000,00	34.595.000	-
	Software Pendapatan (Dinas Pendapatan-2016)	2012	2019	1	165.529.300,00				165.529.300,00	165.529.300	-
	Software Capaian Kinerja Pegawai (Temuan BPK 2017)	2015	2022	1	30.300.000,00				30.300.000,00	30.300.000	-
	Software Pemeliharaan (Temuan BPK)	2011	2018	1	23.540.000,00				23.540.000,00	23.540.000	-
	Software Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Software Administrasi Sistem, Lap Kegiatan (Temuan BPK 2017)	2011	2018	1	92.500.000,00				92.500.000,00	92.500.000	-
20	BKPSDMD				378.260.500,00	48.409.625,00	23.941.500,00	-	378.260.500,00	378.260.500,00	-
	Aplikasi Kinerja	2018	2025	1	47.784.000,00	11.946.000,00	11.946.000,00		47.784.000,00	47.784.000	-
	Restrukturisasi Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi	2018	2025	1	47.982.000,00	11.995.500,00	11.995.500,00		47.982.000,00	47.982.000	-
	Aplikasi SKP Online	2017	2024	1	49.060.000,00	12.265.000,00			49.060.000,00	49.060.000	-
	Aplikasi Pengelolaan TKD	2017	2024	1	48.812.500,00	12.203.125,00			48.812.500,00	48.812.500	-
	Aplikasi Absensi Pegawai Kegiatan Pembangunan (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	2023	1	43.285.000,00				43.285.000,00	43.285.000	-
	Aplikasi Human Capital Care (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	2023	1	47.520.000,00				47.520.000,00	47.520.000	-
	Software aplikasi kenaikan gaji berkala (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2009	2016	1	39.567.000,00				39.567.000,00	39.567.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
	Software Otomatisasi absensi (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2010	2017	1	43.250.000,00				43.250.000,00	43.250.000	-
	MS Office 2007 (temuan BPK 2017)	2012	2019	1	6.000.000,00				6.000.000,00	6.000.000	-
	OS Windows 7 - (temuan BPK 2017)	2013	2020	1	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000	-
21	Sekretariat Daerah				166.952.500,00	28.985.000,00	4.496.250,00	-	166.952.500,00	166.952.500,00	-
	Aplikasi SIM Kelurahan	2017	2024	1	49.060.000,00	12.265.000,00			49.060.000,00	49.060.000	-
	Sistem Informasi Kinerja Instansi Pemerintah (SIKIP)	2017	2024	1	48.895.000,00	12.223.750,00			48.895.000,00	48.895.000	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi	2016	2023	1	38.087.500,00				38.087.500,00	38.087.500	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi (pengembangan)	2018	2025	1	17.985.000,00	4.496.250,00	4.496.250,00		17.985.000,00	17.985.000	-
	software Windows (temuan BPK 2017)	2008	2015	1	12.925.000,00				12.925.000,00	12.925.000	-
22	Sekretariat DPRD				743.221.000,00	82.958.250,00	36.708.250,00	81.708.250,00	723.846.000,00	642.137.750,00	81.708.250,00
	Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas	2016	2023		144.500.000,00			45.000.000,00	144.500.000,00	99.500.000,00	45.000.000,00
	Induk Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas	2016		1	99.500.000,00						
	Pengembangan Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas	2022		1	45.000.000,00						
	Aplikasi SIKWAN	2020	2027		77.500.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	58.125.000,00	38.750.000,00	19.375.000,00
	Aplikasi (SIWANI)	2019	2026	1	69.333.000,00	17.333.250,00	17.333.250,00	17.333.250,00	69.333.000,00	51.999.750,00	17.333.250,00
	Sistem Pengendalian Anggaran Belanja	2017	2024	1	89.000.000,00	22.250.000,00			89.000.000,00	89.000.000,00	-
	Sistem Informasi Arsip Digital	2017	2024	1	96.000.000,00	24.000.000,00			96.000.000,00	96.000.000,00	-
	Software Sistem Manajemen DPRD	2016	2023	1	195.800.000,00	-			195.800.000,00	195.800.000,00	-
	SIM Legislatif	2016	2023	1	59.488.000,00	-			59.488.000,00	59.488.000,00	-
	Microsoft (temuan BPK 2017)	2011	2018	1	11.600.000,00	-			11.600.000,00	11.600.000,00	-
23	Inspektorat				49.700.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	-	49.700.000,00	49.700.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan	2018	2025	1	49.700.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00		49.700.000,00	49.700.000	-
24	Kecamatan Cimahi Utara				71.193.750,00	12.449.000,00	-		71.193.750,00	71.193.750,00	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	2024	1	49.796.000,00	12.449.000,00			49.796.000,00	49.796.000	-
	O.S Window 7, ms office (temuan BPK 2017) Kel. Cibabat	2013	2020	1	15.897.750,00				15.897.750,00	15.897.750	-
	Software DAAS(temuan BPK 2017)kel. Cipageran	2015	2022	1	3.500.000,00				3.500.000,00	3.500.000	-
	Software Cont Off-line Computer(temuan BPK 2017) kel. Citeureup	2015	2022	1	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000	-
25	Kecamatan Cimahi Tengah				173.664.500,00	35.543.125,00	31.904.875,00	16.086.125,00	161.168.500,00	145.082.375,00	16.086.125,00
	Website Kelurahan Baros	2021	2028	1	24.992.000,00		6.248.000,00	6.248.000,00	12.496.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00
	Pengembangan Aplikasi Website Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2019	2019	2026	1	39.352.500,00	9.838.125,00	9.838.125,00	9.838.125,00	39.352.500,00	29.514.375	9.838.125,00
	SIM Pelayanan	2018	2025	1	53.130.000,00	13.282.500,00	13.282.500,00		53.130.000,00	53.130.000	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	2024	1	39.545.000,00	9.886.250,00			39.545.000,00	39.545.000	-
	Perangkat Lunak SMS Center(temuan BPK 2017) kel. Baros	2015	2022	1	6.500.000,00	-			6.500.000,00	6.500.000	-
	Aplikasi Sepakat Online Pemeliharaan	2018	2025	1	10.145.000,00	2.536.250,00	2.536.250,00		10.145.000,00	10.145.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Maksimal Masa Manfaat	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2020	2021	2022	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2021	Beban Amortisasi 2022
26	Kecamatan Cimahi Selatan				100.595.000,00	19.648.750,00	9.831.250,00	11.000.000,00	89.595.000,00	78.595.000,00	11.000.000,00
	SIM Pelayanan	2018	2025		61.325.000,00	9.831.250,00	9.831.250,00	11.000.000,00	50.325.000,00	39.325.000,00	11.000.000,00
	Induk SIM Pelayanan	2018		1	39.325.000,00						
	Pengembangan SIM Pelayanan	2022		1	22.000.000,00						
	Aplikasi Sepakat Online	2017		1	39.270.000,00	9.817.500,00			39.270.000,00	39.270.000	-
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik				47.492.500,00		11.873.125,00	11.873.125,00	23.746.250,00	11.873.125,00	11.873.125,00
	Sistem Informasi Ormas	2021	2028	1	47.492.500,00		11.873.125,00	11.873.125,00	23.746.250,00	11.873.125	11.873.125,00
	JUMLAH				11.492.709.779,90	1.498.437.358,24	1.329.017.633,25	1.223.417.655,00	9.452.681.527,40	8.229.263.872,40	1.223.417.655,01

Rekapitulasi Aset Lain Lain Tahun 2022

NO.	SKPD	SALDO AWAL				PENAMBAHAN				PENGURANGAN				SALDO AKHIR			
		Aset Rusak Berat	Mutasi dari Aset Tetap (Siap Lelang)	Aset Rusak Berat Lainnya	Total Saldo Awal Rusak berat	Aset Rusak Berat	Mutasi dari Aset Tetap (Siap Lelang)	Aset Rusak Berat Lainnya	Total Penambahan Rusak berat	Aset Rusak Berat	Penghapusan/Lelang	Aset Rusak Berat Lainnya	Total Pengurang Rusak berat	Aset Rusak Berat	Mutasi dari Aset Tetap (Siap Lelang)	Aset Rusak Berat Lainnya	Total Saldo Akhir Rusak berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DINAS PENDIDIKAN	2.476.529.819,01	136.609.350,00	5.422.866.048,00	8.036.005.217,01	445.269.300,00	510.068.762,00	-	955.338.062,00	-	-	-	-	2.921.799.119,01	646.678.112,00	5.422.866.048,00	8.991.343.279,01
2	DINAS KESEHATAN	91.723.639,12	28.600.000,00		120.323.639,12	5.357.871.213,51			5.357.871.213,51		28.600.000,00		28.600.000,00	5.449.594.852,63	-	-	5.449.594.852,63
3	RSUD CIBABAT	-	-	-	-	10.181.028.566,83	-	-	10.181.028.566,83	-	-	-	-	10.181.028.566,83	-	-	10.181.028.566,83
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	477.896.000	14.800.000	-	492.696.000,10	78.206.892.589	14.920.000		78.221.812.588,93	-	14.800.000	-	14.800.000,00	78.684.788.589,03	14.920.000,00	-	78.699.708.589,03
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	241.573.000,12	26.500.000,00		268.073.000,12	1.094.061.994,36			1.094.061.994,36					1.335.634.994,48	26.500.000,00	-	1.362.134.994,48
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	22.400.000,00		-	22.400.000,00	3.452.322.790,00	59.785.000,00		3.512.107.790,00				-	3.474.722.790,00	59.785.000,00	-	3.534.507.790,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	8.900.000,00		-	8.900.000,00	-	-	-	-	8.900.000,00	-	-	8.900.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	350.287.982,33		-	350.287.982,33	-	-	-	-	350.287.982,33	-	-	350.287.982,33
9	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	19.647.750,00		-	19.647.750,00	-	-	-	-	19.647.750,00	-	-	19.647.750,00
10	DINAS TENAGA KERJA	226.237.000,00			226.237.000,00	162.600.000,00		-	162.600.000,00	89.150.000,00	-		89.150.000,00	299.687.000,00	-	-	299.687.000,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-	8.950.000,00		8.950.000,00	675.148.332,58		-	675.148.332,58		8.950.000,00		8.950.000,00	675.148.332,58	-	-	675.148.332,58
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	277.366.320,28	865.579.350,00	4.176.304.800,00	5.319.250.470,28	2.010.438.359,00			2.010.438.359,00	-	-	3.840.135.800,00	3.840.135.800,00	2.287.804.679,28	865.579.350,00	336.169.000,00	3.489.553.029,28
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	5.000.000,00	10.000.000,00		15.000.000,00	595.810.748,00			595.810.748,00		15.000.000,00		15.000.000,00	600.810.748,00	(5.000.000,00)		595.810.748,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	127.020.550,00	-		127.020.550,00	2.455.797.371,00	26.979.500,00		2.482.776.871,00				-	2.582.817.921,00	26.979.500,00	-	2.609.797.421,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	331.255.000,10	-	-	331.255.000,10	32.477.500,00	-	-	32.477.500,00	-	-	-	-	363.732.500,10	-	-	363.732.500,10
16	DINAS ARSIP DAERAH	6.124.000,00	-	-	6.124.000,00	416.922.419,00	-	-	416.922.419,00	-	-	-	-	423.046.419,00	-	-	423.046.419,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	185.198.027,00	-	-	185.198.027,00	664.880.500,00	-	-	664.880.500,00	-	-	-	-	850.078.527,00	-	-	850.078.527,00
18	DPMPSTP	133.066.414,86	-	212.739.385,00	345.805.799,86	995.890.345,00			995.890.345,00	-	-		-	1.128.956.759,86	-	212.739.385,00	1.341.696.144,86
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	39.572.500,00	-	-	39.572.500,00	-	-	-	-	39.572.500,00	-	-	39.572.500,00
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	611.842.736,43	-	-	611.842.736,43	-	-	-	-	611.842.736,43	-	-	611.842.736,43
21	BPKAD	-	-	-	-	528.212.241,00	-	-	528.212.241,00	-	-	-	-	528.212.241,00	-	-	528.212.241,00
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	479.369.579,93	-		479.369.579,93	292.190.900,00	8.491.417.379,00		8.783.608.279,00				-	771.560.479,93	8.491.417.379,00	-	9.262.977.858,93
23	BKPSDMD	-	-	-	-	424.577.813,00	-	-	424.577.813,00	-	-	-	-	424.577.813,00	-	-	424.577.813,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	562.099.000,00	131.985.000,00		694.084.000,00	2.745.937.567,00	-		2.745.937.567,00	-	69.752.000,00		69.752.000,00	3.308.036.567,00	62.233.000,00	-	3.370.269.567,00
25	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	808.347.700,00	-	-	808.347.700,00	-	-	-	-	808.347.700,00	-	-	808.347.700,00
26	INSPEKTORAT KOTA	-	-	-	-	47.942.000,00	-	-	47.942.000,00	-	-	-	-	47.942.000,00	-	-	47.942.000,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	75.512.900,00	14.416.724,49		89.929.624,49	827.141.734,44		-	827.141.734,44		14.416.724,49		14.416.724,49	902.654.634,44	-	-	902.654.634,44
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	53.378.800,00	22.961.001,00		76.339.801,00	564.838.050,00	-	-	564.838.050,00	-	22.961.001,00		53.378.800,00	618.216.850,00	-	-	618.216.850,00
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	67.560.268,30	29.003.000,11	-	96.563.268,41	499.494.070,00	382.595.000,00		882.089.070,00	-	20.003.000,11		20.003.000,11	567.054.338,30	391.595.000,00	-	958.649.338,30
30	KESBANGPOLL	14.842.000,00	-		14.842.000,00	81.886.500,00	-	-	81.886.500,00	-	-	-	-	96.728.500,00	-	-	96.728.500,00
	JUMLAH	5.854.152.318,82	1.289.404.425,60	9.811.910.233,00	16.955.466.977,42	114.598.231.572,41	9.485.765.641,00	-	124.083.997.213,41	89.150.000,00	194.482.725,60	3.840.135.800,00	4.154.186.324,60	120.363.233.891,23	10.580.687.341,00	5.971.774.433,00	136.915.695.665,23

Utang Belanja Per 31 Desember 2022

No	SKPD	Listrik	Air	Telepon	Internet	Utang Sewa Mesin Fotocopy Bappenda	Utang Penerangan Jalan Umum (PJU)	Utang Belanja Pemeliharaan	Utang Belanja Persediaan	Utang Belanja Modal	Utang Belanja Pegawai	Total
1	Dinas Pendidikan	661.972,00		102.072,00	1.470.200,00						158.217.200,00	160.451.444,00
2	Dinas Kesehatan	27.462.636,00	1.052.700,00	1.155.155,00	10.454.907,00							40.125.398,00
3	RSUD Cibabat	189.534.716,00	40.000,00	1.760.492,00	18.037.500,00			841.643.621,00	508.692.139,00	476.399.909,00	-	2.036.108.377,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.964,00		107.637,00								386.601,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	67.520.186,00		3.771.542,00								71.291.728,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	315.488,00	662.400,00	732.552,00								1.710.440,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.797.498,00		925.246,00	908.182,00							3.630.926,00
8	Dinas Sosial	-	882.450,00									882.450,00
9	Dinas Tenaga Kerja			45.003,00								45.003,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	6.055.546,00		282.950,00								6.338.496,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.566.664,00	313.300,00	1.977.586,00								5.857.550,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	458.081,00		44.131,00								502.212,00
13	Dinas Perhubungan	7.983.956,00		2.366.616,00	-		756.002.197,00					766.352.769,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan											-
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	51.349.805,00		1.202.797,00								52.552.602,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.699.905,00		408.074,00	854.871,00	3.330.000,00						66.292.850,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	499.263,00		1.179.098,00								1.678.361,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											-
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			38.686,00								38.686,00
20	BAPENDA			324.759,00		693.750,00						1.018.509,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			46.234,00								46.234,00
22	Sekretariat Daerah	106.114.836,00		2.839.521,00	1.203.370,00							110.157.727,00
23	Sekretariat DPRD	20.505.933,00		63.043,00								20.568.976,00
24	Inspektorat Kota	2.654.131,00		98.546,00								2.752.677,00
25	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	272.981,00	127.800,00	145.510,00								546.291,00
26	Dinas Arsip											-
27	Kantor Kesatuan Bangsa			71.870,00								71.870,00
28	Kecamatan Cimahi Utara	3.188.352,00	169.300,00	2.107.796,00								5.465.448,00
29	Kecamatan Cimahi Tengah	7.902.276,00	600.000,00	2.313.807,00	1.866.446,00							12.682.529,00
30	Kecamatan Cimahi Selatan	5.446.366,00	69.000,00	353.427,00								5.868.793,00
	Jumlah	565.269.555,00	3.916.950,00	24.464.150,00	34.795.476,00	4.023.750,00	756.002.197,00	841.643.621,00	508.692.139,00	476.399.909,00	158.217.200,00	3.373.424.947,00

**Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 30 Desember 2022**

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
1	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-15A/PWS/DISTAKOT/2005	8.400.000,00	7.560.000,00	840.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Padasuka
2	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-13/PWS/DISTAKOT/2005	16.200.000,00	14.580.000,00	1.620.000,00	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Cimindi
3	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-15/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Utara
4	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	601/13.E/SP/PWS.P2RDPMA-PSPK/DISTAKOT/2005	12.150.000,00	10.935.000,00	1.215.000,00	Pengawasan Peningkatan 3 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
5	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	04/KKP/PAK-15B/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
6	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	04/KKP/PAK-04/PWS/DISTAKOT/2005	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung
7	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	01A/SP/PWS 01/ABT/DISTAKOT/2005	17.500.000,00	15.750.000,00	1.750.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung ABT
8	2005	Dinas Tata Kota	PT. RESTU IBU	621/39/HARLA/BM/DISTAKOT/2005	88.027.000,00	87.486.000,00	541.000,00	Pengadaan Aspal Untuk Pemeliharaan Jalan Berkala
8	Sub Total I				165.677.000,00	157.371.000,00	8.306.000,00	
9	2006	Dinas Tata Kota	CV. DIANA JULI	621/81/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	46.346.000,00	44.028.700,00	2.317.300,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Gorong-gorong Crossing Jl. Padasuka
10	2006	Dinas Tata Kota	CV. SANDRILLA PUTRA	621/126/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	48.871.000,00	46.427.450,00	2.443.550,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Saluran samping jalan cipageran
11	2006	Dinas Tata Kota	CV. HANDAYANI PRIMA	621/RPBRJ/BM-DISTAKOT/2006	27.785.000,00	15.885.000,00	11.900.000,00	peningkatan jalan lingk ar utara pengadaan alat-alat kantor (laptor)
3	Sub Total II				123.002.000,00	106.341.150,00	16.660.850,00	
12	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI SACITA	621/47/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	191.290.000,00	181.725.500,00	9.564.500,00	Pemeliharaan Jalan sindang sari cibaligo
13	2007	Dinas Tata Kota	CV. KUSDINAR	621/51/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	192.650.000,00	183.017.500,00	9.632.500,00	pemeliharaan jalan cibogo lamping dan cireundeu
14	2007	Dinas Tata Kota	CV. MITRA UTAMA	621/167/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	99.490.000,00	98.992.550,00	497.450,00	pemeliharaan jalan pabrik aci
15	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI MANUNGAL KARYA	621/113/JKS-PRASKOT/2007	48.800.000,00	46.360.000,00	2.440.000,00	perbaikan jalan curug cileungsi kel. Leuwigajah
4	Sub Total III				532.230.000,00	510.095.550,00	22.134.450,00	
16	2008	Sekretariat Daerah	CV. DIMAR	04/PPK/SP/R-SETDA/XII/2008	97.181.000,00	92.321.950,00	4.859.050,00	pemeliharaan tailing tanga
17	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ENDORA SAKTI	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-10/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
18	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. PRATAMA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-11/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
19	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. KARYA TIGA PUTRA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-01/PPBPK/2008	19.213.975,00		19.213.975,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
20	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ROSFER INDAH	027/49/DUK/2008	540.903.000,00	513.857.850,00	27.045.150,00	pengadaan jaringan komputer (tower LAN) kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK
21	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TRI USAHA MANDIRI	510.2/673/DLH/VI/2007	49.821.000,00	47.329.950,00	2.491.050,00	keermur/TPT area unloading
22	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. CIPTA JAYA KENCANA	510.2/908/DLH/VI/2007	49.515.000,00	47.039.250,00	2.475.750,00	pegecoran area unloading TPK
23	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. A & B TERANG ABADI	510.2/1377/DLH/VIII/2007	34.539.000,00	32.812.050,00	1.726.950,00	pekerjaan konstruksi jaringan air bersih
24	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TIGA SAUDARA	510.2/1569/DLH/IX/2007	556.239.000,00	556.238.999,00	1,00	pembangunan tahap II laboratorium seluas 200 m2
25	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. MEGA	510.2/2228.C/DLH/IX/2008	83.185.000,00	79.025.750,00	4.159.250,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. Pasirkaliki (luncuran GRLK prov. 2007)
26	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. PERKASA UTAMA	510.2/2228.A/DLH/XI/2008	86.599.000,00	82.269.050,00	4.329.950,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. cimahi (luncuran GRLK prov. 2007)
27	2008	Dinas Tata Kota	CV. INTAN	631/36/PU/PRASKOT/2008	99.850.000,00	94.857.500,00	4.992.500,00	pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang perbaikan jembatan di RW. 08 Kel. Karang Mekar
28	2008	Dinas Tata Kota	CV. SEPTIANA	621.5/25/Pm.L/PRASKOT/2008	87.391.000,00	83.021.450,00	4.369.550,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 21 kel. Melong

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
29	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA TIGA PUTRA	621.5/04-SP/PL.5-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	43.313.000,00	41.147.350,00	2.165.650,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 20 Kel. Padasuka
30	2008	Dinas Tata Kota	CV. BRATA JAYA	621.5/46/m.L/PRASKOT/2008	84.310.000,00	80.094.500,00	4.215.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 05 kel. Cigugur tengah
31	2008	Dinas Tata Kota	CV. MAHARANI	621.5/04-SP/PL.10-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	49.500.000,00	47.025.000,00	2.475.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Leuwigajah
32	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.14-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	42.890.000,00	40.745.500,00	2.144.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Padasuka
33	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.17-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi normalisasi saluran RW. 08 kel. Melong dan RW 10 kel. Cibeureum
34	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.18-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	33.850.000,00	32.157.500,00	1.692.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 30 dan perbatasan RW 05 kel. Melong
35	2008	Dinas Tata Kota	CV. DIMAR	621.5/25/PL/ABT-PRASKOT/2008	49.000.000,00	46.550.000,00	2.450.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan gorong-gorong di kel. Cigugur tengah
36	2008	Dinas Tata Kota	CV. UTAMA	621.5/04-SP/PL.28-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	14.315.000,00	13.599.250,00	715.750,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi pembangunan drainase RW. 17 siliwangi jl. Kebon rumput III RW 17 Kel. Baros
37	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.5/27/PL/ABT-PRASKOT/2008	9.625.000,00	9.143.750,00	481.250,00	pengadaan konstruksi pintu air perbaikan pintu air jorolot di kel. Leuwigajah
38	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.3/28/PL/ABT-PRASKOT/2008	19.500.000,00	18.525.000,00	975.000,00	pengadaan konstruksi jalan pemasangan paving block di RT 01, 04 RW 03 kel. Padasuka
39	2008	Dinas Tata Kota	CV. MEGA	621.3/04-SP/PL.21-FPPS/PRASKOT-DTK/2008	47.690.000,00	45.305.500,00	2.384.500,00	pengadaan konstruksi jalan pembangunan jalan lingkungan pontren al-mushadah KH encep toha cilember jl. Cilember cimahi
40	2008	Dinas Tata Kota	CV. SURYA SAMUDRA	691/04-SP/PL.11-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	44.138.000,00	41.931.100,00	2.206.900,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum instalasi air bersih di kel. Cibeureum, 2 lokasi
41	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA MANDIRI	691/04-SP/PL.13-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.640.000,00	23.408.000,00	1.232.000,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minumpembangunan sarana air bersih RW 08 kel. Cibeureum
42	2008	Dinas Tata Kota	CV. HARAVAN JAYA	691.27/37/Pm.L/PRASKOT/2008	97.348.000,00	92.480.600,00	4.867.400,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/07 kel. Cibeureum
43	2008	Dinas Tata Kota	CV. TRIJAYA	691/04-SP/PL.15-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	49.491.000,00	47.016.450,00	2.474.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/04 dan RT 04/08 kel. Cigugur tengah
44	2008	Dinas Tata Kota	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	621.3/04-SP/PL.17-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.611.000,00	23.380.450,00	1.230.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum pembangunan jalan dan selokan air kotor di wilayah RT 05/07 jl. Pesantren kel. Cibabat
45	2008	Dinas Tata Kota	CV. SINAR SADULUR PUTRA	621/SPKK-22/BM-PRASKOT/2008	146.776.000,00	139.437.200,00	7.338.800,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Jayadikrama
46	2008	Dinas Tata Kota	CV. REZEKI	621/SPKK-40/BM-PRASKOT/2008	99.355.000,00	94.387.250,00	4.967.750,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Kalasan
31			Sub Total IV		2.653.125.775,00	2.502.348.199,00	150.777.576,00	
47	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. WIDYA PRATAMA	510.2/3183/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	253.363.000,00	246.514.598,00	6.848.402,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi leuwiteureup
48	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PUTRA JAYA	510.2/3137/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	208.467.000,00	205.047.000,00	3.420.000,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi jorolot
49	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KENCANA ABADI PERKASA	510.2/4106.B/DPLK/IX/2009	47.658.000,00	45.275.100,00	2.382.900,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran paku haji di cijanggal (paket2)
50	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TRIJAYA	04/KPA-DPLK-06-M/SP/XI/2009	92.900.000,00	88.255.000,00	4.645.000,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi di leuwiliang (paket3)
51	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. REZITAMA	510.2/2346.C/DPLK/VII/2009	264.621.000,00	264.620.950,00	50,00	pengerukan sungai cikendal
52	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KAHURIPAN	510.2/3850/DPLK/X/2009	258.500.000,00	245.575.000,00	12.925.000,00	penyediaan sarana air bersih (sumur artesis) di kel. Cigugur tengah
53	2009	kantor lingkungan hidup	CV. DOHARDO	03/KPA/KLH-03/SP/IX/2009	119.611.000,00	113.630.450,00	5.980.550,00	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
54	2009	Dinas Kesehatan	CV. KARYA CIPTA ARTHA	03/KPA-Dinkes.01.M/SP/XI/2009	181.588.000,00	172.508.600,00	9.079.400,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan)
55	2009	Dinas Kesehatan	CV. SENTRAL AGUNG PRAKASA	04/KPA-Dinkes-01.M/SP/XI/2009	88.112.000,00	83.706.400,00	4.405.600,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan2)
56	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	04/KPA-Dinkes-07.M/SP/XI/2009	73.687.000,00	70.002.650,00	3.684.350,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan)
57	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	03/KPA/SPK/Pusk. CTRP.II/XI/2009	37.460.000,00	35.587.000,00	1.873.000,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan2)
58	2009	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA PRATAMA	04/KPA/Dinkes.14.L/SP/XI/2009	501.160.000,00	476.102.000,00	25.058.000,00	pembangunan puskesmas pembantu melong
59	2009	Dinas Kesehatan	CV. HENDOKI BHAKTI	04/KPA-Dinkes-05.M/SP/XI/2009	75.248.000,00	71.485.600,00	3.762.400,00	penataan puskesmas dan gudang obat padasuka
60	2009	Dinas Kesehatan	CV. MEGA	04/KPA-Dinkes-02.M/SP/XI/2009	93.425.000,00	88.753.750,00	4.671.250,00	penataan puskesmas cimahi tengah
61	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA-Dinkes-04.M/SP/XI/2009	61.150.000,00	58.092.501,00	3.057.499,00	penataan puskesmas cigugur tengah

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
62	2009	Dinas Kesehatan	CV. GINANJAR	04/KPA/SPK/PSRKLK/Dinkes/2009	30.520.000,00	28.994.000,00	1.526.000,00	penataan puskesmas pasirkailiki
63	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA.Dinkes-03.M/SP/XI/2009	87.126.000,00	82.769.700,00	4.356.300,00	penataan puskesmas gedung obat ciawitali
64	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	03/KPA-DPU-45 L/SP/VII/2009	463.694.000,00	440.510.200,00	23.183.800,00	penataan halaman pasar atas baru kota cimahi
65	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABU RIZAL	03/KPA/SPK/Kel.Cigugur/PU/2009	49.984.000,00	47.484.800,00	2.499.200,00	penyempurnaan kantor kelurahan cigugur tengah
66	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	03/KPA/SPK/UKS/PU/2009	49.989.000,00	47.489.550,00	2.499.450,00	penataan sekolah untuk lomba UKS
67	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BAGJA WALUYA	03/KPA/SP/DPU-64-L/IX/2009	129.375.000,00	122.906.250,00	6.468.750,00	pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di dalam site sekitar rusun
68	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	621/SPKK-24/BM-DPU/2009	192.057.000,00	182.454.150,00	9.602.850,00	pemeliharaan berkala jalan industri II
69	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/SPKK-274/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.936.000,00	42.689.200,00	2.246.800,00	jalan margaluyu
70	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-281/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.106.000,00	41.900.700,00	2.205.300,00	persimpangan jalan pesantren amir machmud
71	2009	Dinas Pendidikan	CV. JAYA MAKMUR	07/DISDIK-07-M/SPK/XI/2009	58.295.000,00	55.380.250,00	2.914.750,00	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMKN 1 cimahi
Sub Total V					3.507.032.000,00	3.357.735.399,00	149.296.601,00	
72	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KARYA TRISTA ASRI	510.2/4718/DPLK/XI/2010	446.920.000,00	424.574.000,00	22.346.000,00	pembuatan septik tank komunal/biogas/mck plus 4 di kel. Padasuka
73	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDRILLA PUTRA	510.2/4432/DPLK/XI/2010	49.600.000,00	47.120.000,00	2.480.000,00	pembuatan mck/septik tank/SPAL/IPAL 4 RW 22 kel. Citeureup
74	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TIGA PUTRI	510.2/4337/DPLK/XI/2010	89.494.000,00	85.019.300,00	4.474.700,00	rehabilitasi/normalisasi/kimir/DPT kel. Cibabat (RW 17)
75	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. DILAGGA	510.2/5337/DPLK/XI/2010	73.860.000,00	70.167.000,00	3.693.000,00	penataan taman median jl. Mintaredja (tahap I)
76	2010	Dinas Perhubungan	CV. INSUN MEDAL LESTARI	555/SPKK-01/LU/DISHUB/X/2010	196.080.000,00	186.276.000,00	9.804.000,00	pengadaan marka jalan
77	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GELAR SARANA	027/DPU-ABT.03-M/SP/X/2010	98.370.000,00	93.451.500,00	4.918.500,00	penyempurnaan pasar atas baru kota cimahi
78	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	027/DPU-ABT.PG.05-PL/SPK/XI/2010	49.730.000,00	47.243.500,00	2.486.500,00	penataan sarana penunjang olah raga di kota cimahi
79	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	027/DPU-ABT.PG.03-PL/SPK/XI/2010	98.450.000,00	93.527.500,00	4.922.500,00	penyekatan gedung C3
80	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	027/DPU-ABT.PG.04-PL/SP/XI/2010	99.050.000,00	94.097.500,00	4.952.500,00	penataan sarana penunjang bandung cimahi junction (BJC)
81	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-22/L/BM-DPU/2010	221.010.000,00	209.959.500,00	11.050.500,00	pembuatan saluran dan trotoar jl. HMS mintaredja
82	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/SPKK-30/pml/BM-DPU/2010	94.254.000,00	89.541.300,00	4.712.700,00	penggantian plat beton jl. Amir machmud
83	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-01/pml/BM-DPU/2010	98.770.000,00	93.831.500,00	4.938.500,00	overlay jl. Kihapit
84	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	621/SPKK-05/pml/BM-DPU/2010	97.290.000,00	92.425.500,00	4.864.500,00	pelebaran beton jl. Sekolahan, cimahi tengah
85	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-11/PML/BM-DPU/2010	96.307.000,00	91.491.650,00	4.815.350,00	overlay jl. Usman dhomiri
86	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SENTRAL AGUNG PERKASA	621/SPKK-19/PML/BM-DPU/2010	93.560.000,00	88.882.000,00	4.678.000,00	overlay jl. Sisingamangaraja, cimahi tengah
87	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-24/PML/BM-DPU/2010	91.261.000,00	86.697.950,00	4.563.050,00	overlay jl. Contong
88	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SWASTIKA MEGA UTAMA	621/SPKK-41/PML/BM-DPU/2010	85.380.000,00	81.111.000,00	4.269.000,00	rehabilitasi jalan baros-dustira-sriwijaya-gandawijaya
89	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-47/PML/BM-DPU/2010	74.295.000,00	70.580.250,00	3.714.750,00	jl. Stadion
90	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-27/PML/BM-DPU/2010	74.393.000,00	70.673.350,00	3.719.650,00	overlay jl. Kebon rumput
91	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-203/pml/BM-DPU/2010	49.680.000,00	47.196.000,00	2.484.000,00	kelurahan karang mekar
92	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-303/pml/BM-DPU/2010	49.747.000,00	47.259.650,00	2.487.350,00	kelurahan setiamanah
93	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TEKAD MULYA	621/SPKK-197/pml/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	kelurahan baros
94	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-159/RPJ/BM-DPU/2010	49.679.000,00	47.195.050,00	2.483.950,00	kelurahan cigugur tengah
95	2010	Dinas Pekerjaan Umum	(prayitno basuki)	621/SPKK-177/RPJ/BM-DPU/2010	49.448.000,00	46.975.600,00	2.472.400,00	kelurahan utama
96	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-182/RPJ/BM-DPU/2010	49.516.000,00	47.040.200,00	2.475.800,00	kelurahan cibeureum
97	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI SACITA	621/SPKK-335/RPJ/BM-DPU/2010	49.496.000,00	47.021.200,00	2.474.800,00	pelebaran beton jl. Dustira, cimahi tengah
98	2010	Dinas Pekerjaan Umum	PT. HEMBI GEMILANG	621/SPKK-65/pml/BM-DPU/2010	69.450.000,00	65.977.500,00	3.472.500,00	pemagaran jl. Sriwijaya
99	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MANDIRI JAYA SETIA	621/SPKK-18/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.637.000,00	47.155.150,00	2.481.850,00	jl. Padasuka
100	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-45/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.596.000,00	47.116.200,00	2.479.800,00	jl. Gatot subroto dalam (TEPBK TNI)
101	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARANG NUNGGAL	621/SPKK-57/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.772.000,00	47.283.400,00	2.488.600,00	jl. Baros pasar RW 01 kel. Leuwigajah
102	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-03/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.799.000,00	46.359.050,00	2.439.950,00	jl. Encep kartawirya
103	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INTAN	621/SPKK-32/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.643.000,00	47.160.850,00	2.482.150,00	jl. Sriwijaya (lanjutan)
104	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-111/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.480.000,00	47.006.000,00	2.474.000,00	jl. Mukodar cibeureum
105	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-54/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.814.000,00	47.323.300,00	2.490.700,00	jl. Terusan jenderal sudirman
106	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-93/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.451.000,00	46.978.450,00	2.472.550,00	jl. Kalasan II

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
107	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	621/SPKK-105/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.548.000,00	47.070.600,00	2.477.400,00	Jl. Sadarmanah
108	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ADHITAMA SARANA	621/SPKK-102/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.391.000,00	46.921.450,00	2.469.550,00	Jl. Padat karya
109	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/SPKK-96/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	Jl. Bakti I cibeureum
110	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA CITRA UTAMA	621/SPKK-48/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.622.000,00	47.140.900,00	2.481.100,00	Jl. Sriwijaya 1
111	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUNCAK JAYA ABADI	621/SPKK-51/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.640.000,00	47.158.000,00	2.482.000,00	Jl. Sriwijaya 3
112	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. AKAR MANDIRI	621/SPKK-21/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.330.000,00	46.863.500,00	2.466.500,00	pengecatan marka jalan gandawijaya
113	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	621/SPKK-144/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.147.000,00	45.739.650,00	2.407.350,00	drainase jalan melong
114	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SUKONINDO	621/SPKK-66/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.115.000,00	46.659.250,00	2.455.750,00	drainase bapa ampi
115	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SEJAHTERA	621/SPKK-108/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	Jl. Singosari
116	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-72/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	45.883.800,00	43.589.610,00	2.294.190,00	pembuatan dan pengecatan median
117	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRA JAYA	621/SPKK-39/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.654.000,00	47.171.300,00	2.482.700,00	Jl. Taman raden saleh kel. Baros
118	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	621/SPKK-63/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.674.000,00	47.190.300,00	2.483.700,00	Jl. Muhammad yamin
119	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-30/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	47.063.000,00	44.709.850,00	2.353.150,00	Jl. Pemasangan median
120	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/SPKK-66/PmL-ABT/BM-DPU/2010	59.150.000,00	56.192.500,00	2.957.500,00	kelurahan citeureup
121	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621/SPKK-192/RPJ/BM-DPU/2010	48.006.000,00	45.605.700,00	2.400.300,00	ruas jalan puri cipageran
122	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA RAYA	621/SPKK-60/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	Jl. Lungkungan RW 08 Kel. Setiamanah
123	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. INTAN	510.2/5653.A/DPLK/XII/2010	29.719.000,00	28.233.050,00	1.485.950,00	kelurahan cigugur tengah
124	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. GURAT EMAS	510.2/5651.A/DPLK/XII/2010	49.465.000,00	46.991.750,00	2.473.250,00	bumi prima RW 22 kel. Cibabat
125	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SINAR TERANG	510.2/5660.A/DPLK/XII/2010	49.461.000,00	46.987.950,00	2.473.050,00	sungai citaman RW 16 kel. Cibabat
126	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. CIBAJA	510.2/5662.A/DPLK/XII/2010	49.387.000,00	46.917.650,00	2.469.350,00	pemakaman umum RW kel. Cibabat
127	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDHI BUANA	510.2/5652.A/DPLK/XII/2010	49.507.000,00	47.031.650,00	2.475.350,00	kel. Karangmekar RW 08 dan 06
128	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PERKASA UTAMA	510.2/5656.A/DPLK/XII/2010	49.466.000,00	46.992.700,00	2.473.300,00	sungai citaman RW 08 kel. Cibabat
129	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. MEGA	510.2/5654.A/DPLK/XII/2010	49.763.000,00	47.274.850,00	2.488.150,00	kel. Cigugur tengah RW 06
130	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SANTIKA PUTRA USAHA	027/Disdik-71-PL/SPK/X/2010	89.465.000,00	84.991.750,00	4.473.250,00	pembangunan ruang kelas baru SMPN 8
131	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TRIJAYA	027/Disdik-74-PL/SPK/X/2010	79.399.000,00	75.429.050,00	3.969.950,00	Rehab sedang SMPN 10
132	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SUKAHARJA	027/Disdik-76-PL/SPK/X/2010	79.500.000,00	75.525.000,00	3.975.000,00	Rehab sedang SMPN 9
133	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TEAM BANGUN PERKASA	027/Disdik-77-PL/SPK/X/2010	79.463.000,00	75.489.850,00	3.973.150,00	Rehab Berat SMPN 2
134	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGAH JAYA	027/Disdik-134-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	Rehab sedang SMPN 3
135	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-100-PL/SPK/X/2010	79.414.000,00	75.443.300,00	3.970.700,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMPN 5
136	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-101-PL/SPK/X/2010	79.562.000,00	75.583.900,00	3.978.100,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMP Muhammadiyah
137	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. KARANG NUNGGAL	027/Disdik-105-PL/SPK/X/2010	79.631.000,00	75.649.450,00	3.981.550,00	Rehab sedang 2 kelas SMPN 5
138	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SATRIA KARYA	027/Disdik-89-PL/SPK/X/2010	79.398.000,00	75.428.100,00	3.969.900,00	rehab berat 1 unit SDN utama mandiri 1
139	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TIGA PUTERI	027/Disdik-123-PL/SPK/X/2010	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	rehab sedang 1 unit SDN citeureup mandiri 1
140	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	027/Disdik-128-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	rehab sedang 1 unit SDN utama mandiri 1
141	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. PERKASA UTAMA	027/Disdik-119-PL/SPK/X/2010	79.320.000,00	75.354.000,00	3.966.000,00	rehab sedang 2 unit SMA Pasundan 2 cimahi
142	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGA	027/Disdik-116-PL/SPK/X/2010	79.406.000,00	75.435.700,00	3.970.300,00	rehab berat 1 unit SMAN 6
143	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SINAR TERANG	027/Disdik-132-PL/SPK/X/2010	39.100.000,00	37.145.000,00	1.955.000,00	rehab sedang 1 unit SMK Moh Toha
144	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. CIPTA JAYA KENCANA	027/Disdik-109-PL/SPK/X/2010	89.451.000,00	84.978.450,00	4.472.550,00	ruang kelas baru 1 unit SDN padasuka mandiri 3
73			Sub Total VI		5.211.437.800,00	4.950.865.910,00	260.571.890,00	
145	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DRANARIN ABADI	03/PPK-KIMRUM/SPK/PSR2M/X/2011 03 Oktober 2011	97.960.000,00	93.062.000,00	4.898.000,00	Pembuatan Sumur Resapan Rusunawa Melong

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
146	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPJ-75-L/X/2011 03 Nopember 2011	147.900.000,00	140.505.000,00	7.395.000,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi RW 13 Kelurahan Utama (DBP)
147	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/DPJ-04-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	166.065.000,00	157.761.750,00	8.303.250,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 10 (DBP)
148	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MELATI	KPA/SP/DPJ-05-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	167.736.000,00	159.349.200,00	8.386.800,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 16 (DBP)
149	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPJ-54-L/IX/2011 05 September 2011	162.795.000,00	154.655.250,00	8.139.750,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margajaya Kel. Citeureup RW 2 (DBP)
150	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	KPA/SP/DPJ-55-L/IX/2011 24 Agustus 2011	163.023.000,00	154.871.850,00	8.151.150,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margaluyu Kel. Cimahi RW 2 (DBP)
151	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV EKA SAPTA	03/PPK- KIMRUM/SPK/NS.CKC/XI/2011 01 Nopember 2011	76.985.000,00	73.135.750,00	3.849.250,00	Rehabilitasi Saluran Cikendal Kel. Cipageran
152	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	17/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.407.000,00	94.436.650,00	4.970.350,00	Jl. CIBOGO LAMPING (APBD KOTA CIMAHI)
153	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	48/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.857.000,00	90.114.150,00	4.742.850,00	Jl. KEBON KOPI (DBP JAWA BARAT)
154	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	43/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.019.000,00	90.268.050,00	4.750.950,00	Jl. GANIRAH (DBP JAWA BARAT)
155	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	KPA/SP/DPJ-30-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	190.030.000,00	180.528.500,00	9.501.500,00	PEMBANGUNAN SALURAN DI JALAN MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
156	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	46/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.854.000,00	90.111.300,00	4.742.700,00	PERBAIKAN JALAN KEBON KOPI III KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
157	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	53/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.039.000,00	90.287.050,00	4.751.950,00	PERBAIKAN JALAN MELONG III KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
158	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	44/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.788.000,00	90.048.600,00	4.739.400,00	PERBAIKAN JALAN SADARMANAH KEL. CIBEKER KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
159	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	55/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.657.000,00	89.924.150,00	4.732.850,00	PERBAIKAN Jl. HMS MINTAREJUA IV KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
160	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	47/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.649.000,00	89.916.550,00	4.732.450,00	PERBAIKAN Jl. KEBON KOPI IV KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
161	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	54/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.800.000,00	90.060.000,00	4.740.000,00	PERBAIKAN Jl. MELONG IV KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
162	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	45/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.168.000,00	90.409.600,00	4.758.400,00	PERBAIKAN Jl. SADARMANAH I KEL. CIBEKER KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
163	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	KPA/SP/DPJ-25-L/VIII/2011 04 Agustus 2011	197.903.000,00	188.007.850,00	9.895.150,00	Jl. SETASION (APBD KOTA CIMAHI)
164	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	KPA/SP/DPJ-23-L/VIII/2011 04 Agustus 2011	278.701.000,00	264.765.950,00	13.935.050,00	Jl. URIP SUMOHARDJO (APBD KOTA CIMAHI)
165	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	83/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.293.000,00	88.628.350,00	4.664.650,00	Jl. DJULAEHA (DBP JAWA BARAT)
166	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	86/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.238.000,00	88.576.100,00	4.661.900,00	Jl. SRIWIJAYA (DBP JAWA BARAT)
167	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	KPA/SP/DPJ-37-L/VIII/2011 05 Agustus 2011	148.124.000,00	140.717.800,00	7.406.200,00	Jl. CIAWITALI (APBD KOTA CIMAHI)
168	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GUDITA	69/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.090.000,00	89.385.500,00	4.704.500,00	Jl. SANGKURIANG (DBP JAWA BARAT)
169	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZA PRATAMA	56/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.952.000,00	89.254.400,00	4.697.600,00	Jl. CIHANJUANG (DBP JAWA BARAT)
170	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	57/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.941.000,00	89.243.950,00	4.697.050,00	Jl. PESANTREN (DBP JAWA BARAT)
171	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	72/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.065.000,00	89.361.750,00	4.703.250,00	Jl. CIAWITALI (DBP JAWA BARAT)
172	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	74/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.102.000,00	89.396.900,00	4.705.100,00	PERBAIKAN Jl. ENCEP KARTAWIRYA III KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
173	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	76/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.979.000,00	89.280.050,00	4.698.950,00	PERBAIKAN Jl. SANGKURIANG III KEL. PADASUKA KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)
174	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	60/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.170.000,00	89.461.500,00	4.708.500,00	PERBAIKAN Jl. CIHANJUANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
175	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	61/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.045.000,00	89.342.750,00	4.702.250,00	PERBAIKAN Jl. PESANTREN III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
176	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	62/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.180.000,00	89.471.000,00	4.709.000,00	PERBAIKAN Jl. DEMANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
177	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRI MANDIRI	68/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN Jl. MARGALUYU III KEL. CIMAHI KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
178	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	75/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.911.000,00	89.215.450,00	4.695.550,00	PERBAIKAN JI. ENCEP KARTAWIRYA IV KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
179	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	63/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN JI. CIHANJUANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
180	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RINJANI	64/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.987.000,00	89.287.650,00	4.699.350,00	PERBAIKAN JI. PESANTREN IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
181	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	65/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.084.000,00	89.379.800,00	4.704.200,00	PERBAIKAN JI. DEMANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
182	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	78/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.981.000,00	89.281.950,00	4.699.050,00	PERBAIKAN JI. RANCABALI KEL. PASIRKALIKI KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
183	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA KONSTRUKSI	12/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.829.000,00	94.837.550,00	4.991.450,00	Jalan Lingkungan kebon Jeruk (APBD Kota Cimahi)
184	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/16/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.635.000,00	47.153.250,00	2.481.750,00	JALING PASIRKALIKI
185	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	621/17/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.853.000,00	47.360.350,00	2.492.650,00	JALING CIPAGERAN RW. 05
186	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. MADYA KARYA	510.2/4260/DKP/X/2011	296.698.000,00	281.863.100,00	14.834.900,00	Pembuatan Sumur Artesis Cibeureum
187	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. WIDYA TEKNIK	510.2/4261/DKP/X/2011	292.697.000,00	278.062.150,00	14.634.850,00	Pembuatan Sumur Artesis Leuwigajah
188	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Permata	027/Disdikpora- 25 -L/SPK/X/2011	113.759.000,00	108.071.050,00	5.687.950,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustk SMP PGRI 3
189	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV TRIJAYA	027/Disdikpora-27-L/SPK/X/2011	227.335.000,00	215.968.250,00	11.366.750,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehab Ruang Kelas SDN Cimahi Mandiri 5
190	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/Disdikpora-15-X/2011	106.254.000,00	100.941.300,00	5.312.700,00	Pembangunan ruang kelas lanjutan, rehab, mushola, WC
191	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Mutiara Teknik	027/disdikpora-114-PL/SPK/2011	24.878.000,00	23.634.100,00	1.243.900,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustakaan SMP Darussurur
47	Sub Total VII				5.608.436.000,00	5.328.014.200,00	280.421.800,00	
192	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. DILAGGA	027/ Disdikpora/112-PL/SPK/X/2012	14.813.000,00	14.072.350,00	740.650,00	Pemagaran SDN Cibeureum Mandiri 1
193	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. LEMBANG ABADI	027/ Disdikpora/115-PL/SPK/X/2012	15.657.000,00	14.874.150,00	782.850,00	Pemagaran SDN Melong Mandiri 2
194	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. Bina Kontruksi	027/ Disdikpora-025 -L/SPK/IX/2012	244.954.000,00	232.706.300,00	12.247.700,00	Pembuatan Ruang Kelas Baru, Penyelesaian Ruang Kelas, Pemasangan Trails dan Pekerjaan MCK Lanjutan
195	2012	Dinas Kesehatan	CV. FIMOS KARYA	36/SPK/PMB.PKM.CIMSEL(LANJUT ANJ)/KPA/DINKES-PL/VII/2012	49.242.000,00	46.779.900,00	2.462.100,00	Pembangunan Puskesmas Cimahi Selatan (Lanjutan)
196	2012	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA JAYA KENCANA	05/PPK/Pojok Laktasi PKM Melong/SPK/Yanmed/Dinkes/VII/2012	49.725.000,00	47.238.750,00	2.486.250,00	Pembangunan Rehab untuk Pojok Laktasi
197	2012	Dinas Kesehatan	CV. NAGA MAS JAYA	02/PPK/Sp.Pem.Pustu Cimenteng_Lanjutan/DINKES/VIII/2012	507.687.000,00	497.467.260,00	10.219.740,00	Pembangunan Puskesmas Pembantu Cimenteng Sehat (Lanjutan)
198	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	52/SPK/Rumdin Medis/KPA/DINKES/X/2012	217.652.000,00	201.343.336,00	16.308.664,00	Pembangunan Rumah Dinas Medis
199	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	54/SPK/Rumdin Paramedis/KPA/DINKES/X/2012	265.557.000,00	191.216.973,00	74.340.027,00	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
200	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/23/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	269.681.000,00	256.196.950,00	13.484.050,00	Jl. PADAT KARYA
201	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/03/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.202.000,00	187.341.900,00	9.860.100,00	Jl. IBU GANIRAH -WARUNG CONTONG
202	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/05/SPK/RPJ/DPU-BM/II/2012 TANGGAL, 27 FEBRUARI 2012	99.154.000,00	94.196.300,00	4.957.700,00	SALURAN Jl. IBU GANIRAH
203	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/27/SP/RPJ-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 09 OKTOBER 2012	99.187.000,00	94.227.650,00	4.959.350,00	JL. CISEUPAN

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
204	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	621/15/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	570.084.000,00	541.579.800,00	28.504.200,00	Jl. DAENG M. ARDIWINATA
205	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/01/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.556.000,00	187.678.200,00	9.877.800,00	Jl. MARTASIK
206	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/26/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.208.000,00	94.247.600,00	4.960.400,00	Jl. RANCABALI
207	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/29/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.341.000,00	94.373.950,00	4.967.050,00	Jl. KAMARUNG PAMOYANAN
208	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/02/SP/RPJ-L-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 05 OKTOBER 2012	542.258.000,00	515.145.100,00	27.112.900,00	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. SANGKURIANG
209	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/16/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.411.000,00	94.440.450,00	4.970.550,00	JALING PADASUKA (RW. 15)
210	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/07/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.334.000,00	93.417.300,00	4.916.700,00	JALING MELONG (RW. 29)
211	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/28/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.540.000,00	94.563.000,00	4.977.000,00	JALING GUNUNG BATU DALAM
212	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/69/SPK/RPJ/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 24 AGUSTUS 2012	99.379.000,00	94.410.050,00	4.968.950,00	JALING KARANG ANYAR CIGUGUR
213	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/72/SPK/RPJ/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 01 OKTOBER 2012	99.213.000,00	94.252.350,00	4.960.650,00	JALAN KEL. CIBEBER
214	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/34/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2012 TANGGAL, 01 JUNI 2012	98.700.000,00	93.765.000,00	4.935.000,00	JALING UTAMA (RW 16)
215	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV.DIMAR	621/18/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.126.000,00	94.169.700,00	4.956.300,00	JALING KARANG MEKAR (PANDAY)
216	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PRIMA JAYA	621/56/SPK/RPJ/DPU-BM/II/2012 TANGGAL, 10 JULI 2012	99.302.000,00	94.336.900,00	4.965.100,00	JALING RW. 20 CIPAGERAN
217	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/08/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.203.000,00	93.292.850,00	4.910.150,00	JALING KELURAHAN
218	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABDI JAYA	621/04/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.762.000,00	47.273.900,00	2.488.100,00	JALING NATA ENDAH KEL. CIBABAT
219	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INDRA NUGRAHA	621/17/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	JALING KEL. CIBEBER
220	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/06/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	99.121.000,00	94.164.950,00	4.956.050,00	JALAN GATOT SUBROTO
221	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ESA KARYA	621/24/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	JALAN DAYANG SUMBI
222	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NOVETA SAMUEL	02/PPK/SP-PKSPP/DPU/X/21012	294.524.000,00	279.797.800,00	14.726.200,00	Pembangunan Lanjutan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
223	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	03/PPK-KIMRUM/SPK/PMA/IV/2012	99.518.000,00	94.542.100,00	4.975.900,00	Penyempurnaan Mesjid Agung
224	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	02/PPK/SP-RLKCBT/DPU/X/21012	369.682.000,00	351.197.900,00	18.484.100,00	Rehabilitasi Lanjutan Kantor Kelurahan Cibabat
225	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/KNP-PDSK/VI/2012	29.581.000,00	28.101.950,00	1.479.050,00	Pemasangan Kanopi Kantor Kelurahan Padasuka
226	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. FAJAR FIRDAUS	02/PPK-KIMRUM/SPK/TPT.MLNG/VI/21012	99.201.000,00	94.240.950,00	4.960.050,00	Perbaikan TPT di RW. 22 Kel. Melong
227	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-LWG/V/2012	87.559.000,00	83.181.050,00	4.377.950,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Leuwigajah
228	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-CBBT/VI/2012	87.477.000,00	83.173.450,00	4.303.550,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Cibabat
229	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	02/PPK/SP-RJILT/DPU/X/21012	140.789.000,00	133.749.550,00	7.039.450,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwiteureup
230	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	03/PPK-KIMRUM/SPK/NSC-LWG/XI/2012	99.495.000,00	94.520.250,00	4.974.750,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Kel. Leuwigajah
231	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NS.CBBR/VIII/2012 ADDM.: 076/01/PPK.KIMRUM/ADD/NS.CBBR /VII/2012	98.922.000,00	93.975.900,00	4.946.100,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Cibeber

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
232	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NSS. CTMN/VII/2012	99.470.000,00	94.496.500,00	4.973.500,00	Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Sungai Citaman
233	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KHARISMA JAYA MANDIRI	02/PPK/SP-PLKB/DPU/X/21012	482.012.000,00	457.911.400,00	24.100.600,00	Penataan Lapangan Krida Bakti (DBP)
234	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TIGA SAUDARA	02/PPK/SP/DPU-59-L/XI/2012	397.991.000,00	378.091.450,00	19.899.550,00	Penataan Lingkungan Kawasan Rusun Leuwigajah
235	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/ART-LWG/VII/2012	49.413.000,00	46.942.350,00	2.470.650,00	Penyempurnaan Artesis RW. 16 Kelurahan Leuwigajah
236	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	03/PPK-KIMRUM/SPK/PGR-RL/VI/2012	99.481.000,00	94.506.950,00	4.974.050,00	Pemasangan Pagar Bagian Depan Rusunawa Leuwigajah
237	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIJAYA KUSUMAH	03/PPK-KIMRUM/FAN-PIPA/XI/2012	49.492.000,00	47.017.400,00	2.474.600,00	Pemasangan Pipa Distribusi dan Kelengkapannya Rusunawa Leuwigajah
238	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV KURNIA PRIMA JAYA	510.2/3965/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	198.974.000,00	189.025.300,00	9.948.700,00	Penataan Taman Median Jalan Mintaredja (Tahap II)
239	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV INSUN MEDAL LESTARI	510.2/2366.A/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	148.261.000,00	140.847.950,00	7.413.050,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota (Padasuka)
48			Sub Total VIII		7.610.046.000,00	7.178.290.369,00	431.755.631,00	
			JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		25.410.986.575,00	24.091.061.777,00	1.319.924.798,00	

Pemerintah Kota Cimahi
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2022	PEMBAYARAN UTANG TAHUN 2022	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
1	Saldo Utang Retensi	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00
	Total	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00

Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan
Per 31 Desember 2022

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2021	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2022	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2022		
					UTANG 2021	UTANG 2022	2021	2022	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
1	ALBA UNIVERSAL ABADI			-		-	-	-	-
2	ANTAR MITRA SEMBADA			94.060.350,00		94.060.350,00	-	-	-
3	ANUGRAH ARGON MEDIKA	1.452.983.335,00		3.550.644.631,22	1.452.983.335,00	2.210.471.665,12	-	1.340.172.966,10	1.340.172.966,10
4	AULIA INDOTAMA LESTARI	3.460.600,00		263.837.132,00	3.460.600,00	256.488.932,00	-	7.348.200,00	7.348.200,00
5	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	908.681.704,00		1.463.883.246,72	908.681.704,00	1.207.139.990,71	-	256.743.256,01	256.743.256,01
6	ABADI NUSA USAHA SEMESTA	696.960.000,00		3.013.280.500,00	696.960.000,00	2.218.853.500,00	-	794.427.000,00	794.427.000,00
7	ANUGRAH JAYA FORDIC			-		-	-	-	-
8	ANUGRAH KARYA GEMILANG			-		-	-	-	-
9	AMODIA KARYAGUNA SEJAHTERA	1.782.000,00		-	1.782.000,00	-	-	-	-
10	ANUGRAH CORONA MEDIKA			80.490.500,00		80.490.500,00	-	-	-
11	ASIA TRAN SINERGI			-		-	-	-	-
12	ALIYPZ INTERNASIONAL	9.504.000,00		-	9.504.000,00	-	-	-	-
13	AFINDO BUANA JAYA	56.027.327,00		212.356.254,25	56.027.327,00	200.199.978,25	-	12.156.276,00	12.156.276,00
14	AGUNG WIJAYA EKASENTOSA			159.480.000,00		159.480.000,00	-	-	-
15	BINA SAN PRIMA	363.128.899,00	(2.223.375,00)	1.637.093.037,60	360.905.524,00	1.368.424.621,56	-	268.668.416,04	268.668.416,04
16	BRATACO			-		-	-	-	-
17	BIOTEK INTI KORPORINDO	133.599.995,00		699.243.135,00	133.599.995,00	408.927.694,00	-	290.315.441,00	290.315.441,00
18	BERKEMBANG SELARAS DAYA			-		-	-	-	-
19	BUMIASRI ANGSATANA MANDIRI	34.105.005,00		231.934.004,00	34.105.005,00	220.334.504,00	-	11.599.500,00	11.599.500,00
20	BUANA JAYA ALKESINDO			-		-	-	-	-
21	BINA BAKTI NIAGAPERKASA	26.250.000,00		61.249.996,00	26.250.000,00	38.499.998,00	-	22.749.998,00	22.749.998,00
22	BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA			20.275.200,00		20.275.200,00	-	-	-
23	BIO FARMA			296.100.420,00		236.380.200,00	-	59.720.220,00	59.720.220,00
24	BINA ARTHA SEMESTA	54.578.000,00		159.310.170,00	54.578.000,00	148.654.170,00	-	10.656.000,00	10.656.000,00
25	CIMEKAR RAYA PERKASA	77.660.000,00		76.867.992,00	77.660.000,00	55.547.996,00	-	21.319.996,00	21.319.996,00
26	CENTRAL BANDUNG RAYA	100.608.738,00		30.813.107,00	100.608.738,00	27.213.756,00	-	3.599.351,00	3.599.351,00
27	CIPTA KARUNIA MANDIRI	15.264.480,00		33.807.212,00	15.264.480,00	25.932.095,00	-	7.875.117,00	7.875.117,00
28	CIPTA KARYA MANDIRI			-		-	-	-	-
29	CORONA CAHAYA SEMESTA	45.644.500,00		-	45.644.500,00	-	-	-	-
30	COBRA DENTAL INDONESIA	10.020.400,00		23.334.300,00	10.020.400,00	17.512.350,00	-	5.821.950,00	5.821.950,00
31	DAYA MUDA AGUNG			15.290.694,00		15.290.694,00	-	-	-
32	DISTRI VERSA BUANA MAS	10.549.000,00		55.011.591,00	10.549.000,00	33.633.435,00	-	21.378.156,00	21.378.156,00
33	DEMKA SAKTI			-		-	-	-	-
34	DIASTIKA BIOTEKINDO	33.440.000,00		83.451.500,00	33.440.000,00	83.451.500,00	-	-	-
35	DAMAI SEJAHTERA MEDIKA			-		-	-	-	-
36	DIFAS PUTRA GEMILANG	21.173.625,00		109.398.543,00	21.173.625,00	103.848.543,00	-	5.550.000,00	5.550.000,00
37	DUTA BERKAT ABADI			-		-	-	-	-
38	DIRA PHARMA ALKES			-		-	-	-	-
39	DEXA ARFINDO PRATAMA			120.629.300,00		120.629.300,00	-	-	-
40	DOS NI ROHA			83.360.309,00		21.153.545,00	-	62.206.764,00	62.206.764,00
41	EZZY GEMILANG JAYA			202.598.000,00		184.305.200,00	-	18.292.800,00	18.292.800,00
42	ELO KARSA UTAMA			-		-	-	-	-
43	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	559.679.573,00		2.065.852.401,72	559.679.573,00	1.445.144.226,28	-	620.708.175,44	620.708.175,44
44	FAJAR ALAM SCIENTIFIC	9.874.149,00		89.143.608,00	9.874.149,00	71.544.929,00	-	17.598.679,00	17.598.679,00
45	FISMED GLOBAL INDONESIA			1.140.862.500,00		921.637.500,00	-	219.225.000,00	219.225.000,00

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2021	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2022	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2022		
					UTANG 2021	UTANG 2022	2021	2022	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
46	FRISMED HOSLAB INDONESIA			-		-	-	-	-
47	GEMPA RAMADHAN			-		-	-	-	-
48	GRACIA PERSADA ABADI	134.899.999,00		206.000.000,00	134.899.999,00	206.000.000,00	-	-	-
49	GRATIA JAYA MULYA			-		-	-	-	-
50	HIKMAH GAS	463.578.500,00		1.829.348.868,00	463.578.500,00	1.299.305.442,00	-	530.043.426,00	530.043.426,00
51	HARMONI			-		-	-	-	-
52	HOLI PHARMA			1.577.600,00		1.577.600,00	-	-	-
53	INTI MEDIKA SARANA			-		-	-	-	-
54	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	139.595.198,00		88.337.888,05	139.595.198,00	85.027.114,05	-	3.310.774,00	3.310.774,00
55	INDOHADETAMA	2.508.000,00		1.212.567.613,00	2.508.000,00	1.146.236.233,00	-	66.331.380,00	66.331.380,00
56	INDO DENTAL			-		-	-	-	-
57	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA			480.000,00		480.000,00	-	-	-
58	INDOPTA KARYA NETRATAMA			7.292.250,00		7.292.250,00	-	-	-
59	INSAN AFLAT MANDIRI	558.245.326,00		1.247.271.099,00	558.245.326,00	1.068.129.410,00	-	179.141.689,00	179.141.689,00
60	ITAMAYA RANORAYA	320.000.000,00		1.281.996.990,74	320.000.000,00	641.996.991,27	-	639.999.999,47	639.999.999,47
61	IDS MEDICAL SYSTEM INDONESIA			-		-	-	-	-
62	KIMIA PHARMA	1.038.095.562,00		2.860.618.416,47	1.038.095.562,00	2.347.880.229,65	-	512.738.186,82	512.738.186,82
63	KOLOSAL PRATAMA			-		-	-	-	-
64	KASHELARA			-		-	-	-	-
65	KURNIA ASTASURYA			-		-	-	-	-
66	LAKSANA ABADI MANDIRI	11.440.000,00		1.467.770.400,00	11.440.000,00	1.352.232.720,00	-	115.537.680,00	115.537.680,00
67	LITERA MULTI SARANA			-		-	-	-	-
68	MENSA BINA SUKSES	12.540.240,00		509.816.909,00	12.540.240,00	426.970.735,00	-	82.846.174,00	82.846.174,00
69	MERAPI UTAMA PHARMA	566.593.944,00		974.895.483,51	566.593.944,00	723.562.355,00	-	251.333.128,51	251.333.128,51
70	MILLENNIUM PHARMACON	268.979.810,00		589.434.443,09	268.979.810,00	463.758.642,13	-	125.675.800,96	125.675.800,96
71	MEGAH MEDIKA PHARMA	80.425.125,00		58.497.125,00	80.425.125,00	35.769.875,00	-	22.727.250,00	22.727.250,00
72	MEDIKA CAHAYA MANDIRI	21.099.005,00		56.672.030,00	21.099.005,00	48.636.962,00	-	8.035.068,00	8.035.068,00
73	MESAT INDO GLOBAL			-		-	-	-	-
74	MUARA SAKTI	23.092.069,00		32.316.621,13	23.092.069,00	26.673.021,13	-	5.643.600,00	5.643.600,00
75	MEDITECH INDONESIA			-		-	-	-	-
76	MEDQUEST JAYA GLOBAL			81.061.998,00		81.061.998,00	-	-	-
77	MEDISON JAYA RAYA			-		-	-	-	-
78	MITRA MAJU SENTOSA			-		-	-	-	-
79	MARIN LIZA FARMASI			-		-	-	-	-
80	MULYA HUSADA JAYA	5.850.000,00		42.249.999,00	5.850.000,00	42.249.999,00	-	-	-
81	MIDIF FARMA			-		-	-	-	-
82	MAX TECH CARE MEDIKA			1.925.812.142,16		1.344.023.591,72	-	581.788.550,44	581.788.550,44
83	MUNGGARAN	120.257.500,00		148.470.825,00	120.257.500,00	90.362.325,00	-	58.108.500,00	58.108.500,00
84	NUSA KARISMA RAYA	104.860.024,00		392.127.896,00	104.860.024,00	330.316.922,00	-	61.810.974,00	61.810.974,00
85	NUSA PRATAMA MANDIRI			-		-	-	-	-
86	NUSA ASIA MEDIKA			95.138.012,13		79.948.012,47	-	15.189.999,66	15.189.999,66
87	NASZA BERDIKARI			-		-	-	-	-
88	NAHL MEDICA UTAMA	150.538.850,00		41.297.060,00	150.538.850,00	38.855.060,00	-	2.442.000,00	2.442.000,00
89	NUANSA JAYA GROUP			-		-	-	-	-
90	NEYKA SHARY PRATAMA	448.244.390,00		327.212.024,00	448.244.390,00	297.952.424,00	-	29.259.600,00	29.259.600,00
91	OSADHA GRAHA SEJAHTERA			-		-	-	-	-
92	ORIZA MEDIKA MANDIRI	3.503.500,00		16.650.000,00	3.503.500,00	16.650.000,00	-	-	-
93	PRIMA ANUGRAH MANDIRI	101.626.822,00		46.790.557,00	101.626.822,00	31.725.331,00	-	15.065.226,00	15.065.226,00
94	PMI KOTA BANDUNG	15.560.000,00		308.690.000,00	15.560.000,00	308.690.000,00	-	-	-

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2021	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2022	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2022		
					UTANG 2021	UTANG 2022	2021	2022	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
95	PRIMA ALKESINDO NUSANTARA			-		-	-	-	-
96	PARIT PADANG	384.120.394,00	(1.078.000,00)	2.527.850.002,01	383.042.394,00	2.031.179.362,41	-	496.670.639,60	496.670.639,60
97	PRO HEALTH INTERNASIONAL			-		-	-	-	-
98	PUTRA DAFARA LESTARINDO			47.520.116,00		35.200.004,00	-	12.320.112,00	12.320.112,00
99	PERUSAHAAN PERDAGANGAN IND	249.563.161,00		819.940,00	249.563.161,00	819.940,00	-	-	-
100	PRABU MANDIRI JAYA			-		-	-	-	-
101	PENTA VALENT	42.132.582,00		773.675.201,50	42.132.582,00	591.205.474,75	-	182.469.726,75	182.469.726,75
102	RAJAWALI MEDIKA MANDIRI			292.125.005,00		244.314.277,00	-	47.810.728,00	47.810.728,00
103	REVAS UTAMA MEDIKA			-		-	-	-	-
104	RONTHKARD			251.546.029,00		251.546.029,00	-	-	-
105	RAJAWALI NUSINDO	66.144.023,00		250.281.230,27	66.144.023,00	203.018.968,33	-	47.262.261,94	47.262.261,94
106	SURYA PRIMA PERKASA			-		-	-	-	-
107	SURGIKA ALKESINDO	125.177.866,00		80.451.876,00	125.177.866,00	60.180.834,00	-	20.271.042,00	20.271.042,00
108	SAPTA SARI TAMA			7.447.509,00		7.447.509,00	-	-	-
109	SENTRA ASIA GEMILANG	702.174.930,00	(4.185.000,00)	872.282.420,00	697.989.930,00	631.773.503,00	-	240.508.917,00	240.508.917,00
110	SUMARSANA/SUMAR SARANA GLOBAL			109.793.652,00		60.665.052,00	-	49.128.600,00	49.128.600,00
111	SEHAT MURNI SEJAHTERA			-		-	-	-	-
112	SABA INDOMEDIKA			59.047.300,00		51.896.680,00	-	7.150.620,00	7.150.620,00
113	SAN PRIMA SEJATI			-		-	-	-	-
114	SINERGI TRIDAYA MEDICAL			-		-	-	-	-
115	SARANA BINA PRATAMA			-		-	-	-	-
116	SAFIRA DWI TAMA			-		-	-	-	-
117	SINAR PANCA MEDIKA	73.070.000,00		362.768.612,12	73.070.000,00	302.627.873,20	-	60.140.738,92	60.140.738,92
118	SAYAP SONDA	16.813.335,00		18.068.047,00	16.813.335,00	18.068.047,00	-	-	-
119	SUMIFIN CITRA ABADI			5.520.900,00		5.520.900,00	-	-	-
120	SETIA GUNA MEDIKA			-		-	-	-	-
121	TUNAS BANGUN PRAKARSA	81.802.600,00		83.368.770,00	81.802.600,00	64.366.680,00	-	19.002.090,00	19.002.090,00
122	TEMPO	34.359.840,00		3.542.900,02	34.359.840,00	2.271.450,01	-	1.271.450,01	1.271.450,01
123	TRANSMEDIC INDONESIA	87.486.288,00		526.374.053,41	87.486.288,00	452.719.780,41	-	73.654.273,00	73.654.273,00
124	TAWADA HEALTHCARE			509.635.694,46		473.661.195,00	-	35.974.499,46	35.974.499,46
125	TRIPUTRA TECHNOMEDIKA BAHARI	34.669.250,00		193.336.850,00	34.669.250,00	168.317.450,00	-	25.019.400,00	25.019.400,00
126	TOTAL MEDIKA PERSADA			-		-	-	-	-
127	TRIMITRA INTERNUSA MEDIKA	60.000.000,00		82.320.000,00	60.000.000,00	82.320.000,00	-	-	-
128	TANAYA PUTRA MANDIRI			67.960.192,00		67.960.192,20	-	(0,20)	(0,20)
129	TRI SAPTA JAYA	82.001.917,00		917.222.064,29	82.001.917,00	834.528.062,51	-	82.694.001,78	82.694.001,78
130	TRANS BLOOD INDONESIA			1.411.020.342,00		1.316.221.184,00	-	94.799.158,00	94.799.158,00
131	TIARA KENCANA	1.566.000,00		27.680.871,00	1.566.000,00	18.466.967,99	-	9.213.903,01	9.213.903,01
132	TERANG JAYA DENTAL SUPPLY			1.465.200,00		1.465.200,00	-	-	-
133	TIGARAKSA SATRIA			-		-	-	-	-
134	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS			142.096.829,00		142.096.829,00	-	-	-
135	UNITED DICO CITAS	32.918.435,00		107.839.702,70	32.918.435,00	107.839.702,70	-	-	-
136	USAHA SARANA MEDIKA			-		-	-	-	-
137	USAHA MEDIKA MANDIRI			-		-	-	-	-
138	VERSACON MEDICAL			97.222.497,00		81.697.497,00	-	15.525.000,00	15.525.000,00
139	VIOLET INDONESIA PERSADA	90.000.000,00		112.792.797,00	90.000.000,00	64.144.144,00	-	48.648.653,00	48.648.653,00
140	WIKATON MITRA TAMA			-		-	-	-	-
141	WEY DETANA HOSPINDO			148.612.905,00		72.573.465,00	-	76.039.440,00	76.039.440,00
142	WEGO MEDIKA INDONESIA			-		-	-	-	-
143	WORKCKHARDT PHARMA INDO			9.834.800,00		-	-	9.834.800,00	9.834.800,00

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2021	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2022	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2022		
					UTANG 2021	UTANG 2022	2021	2022	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
TOTAL		11.380.509.815,00	(7.486.375,00)	42.025.578.192,57	11.373.023.440,00	32.985.005.869,85	-	9.040.572.322,72	9.040.572.322,72

**Rincian Utang KJP dan KDN
Per 31 Desember 2022**

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO
KDN	70.342.150	694.896.960	706.066.590	59.172.520
KJP	309.281.000	3.013.746.400	3.067.510.600	255.516.800
TOTAL	379.623.150	3.708.643.360	3.773.577.190	314.689.320

UTANG KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF (KDN)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
31 Desember 2017	Saldo Utang KDN 2015-Kurang Bayar KDN Juni 2015		100.000	(100.000)
31 Desember 2021	KDN Desember 2021		46.392.150	(46.492.150)
31 Desember 2021	KDN Arus Balik Desember 2021		23.850.000	(70.342.150)
31 Januari 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti - 02.23/04.0/000011/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/M/1/2022	70.242.150		(100.000)
07 Maret 2022	KDN Januari 2022		39.002.250	(39.102.250)
07 Maret 2022	KDN Arus Balik Januari 2022		20.850.000	(59.952.250)
16 Maret 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus balik Bulan Januari 2022- 02.23/04.0/000030/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/M/3/2022	59.852.250		(100.000)
31 Maret 2022	KDN Februari 2022		34.961.010	(35.061.010)
31 Maret 2022	KDN Arus Balik Februari 2022		18.765.000	(53.826.010)
06 April 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) di TPPAS Sarimukti dan Arus Balik bulan februari 2022-02.23/04.0/000049/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/M/4/2022	53.726.010		(100.000)
27 April 2022	KDN Maret 2022		38.473.890	(38.573.890)
27 April 2022	KDN Arus Balik Maret 2022		20.820.000	(59.393.890)
12 Mei 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Maret 2022- 02.23/04.0/000070/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2022	59.293.890		(100.000)
31 Mei 2022	KDN April 2022		38.509.590	(38.609.590)
31 Mei 2022	KDN Arus Balik April 2022		20.610.000	(59.219.590)
06 Juni 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan April 2022- 02.23/04.0/000086/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.01/6/2022	59.119.590		(100.000)
20 Juni 2022	KDN Mei 2022		35.867.790	(35.967.790)
20 Juni 2022	KDN Arus Balik Mei 2022		19.605.000	(55.572.790)
05 Juli 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan Mei 2022- 02.23/04.0/000105/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/7/2022	55.472.790		(100.000)
18 Juli 2022	KDN Juni 2022		37.927.680	(38.027.680)
18 Juli 2022	KDN Arus Balik Juni 2022		20.385.000	(58.412.680)
25 Juli 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS dan Arus Balik Bulan Juni 2022- 02.23/04.0/000116/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/7/2022	58.312.680		(100.000)
22 Agustus 2022	KDN Juli 2022		39.155.760	(39.255.760)
22 Agustus 2022	KDN Arus Balik Juli 2022		21.180.000	(60.435.760)
07 September 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Juli 2022- 02.23/04.0/000138/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/9/2022	60.335.760		(100.000)
22 September 2022	KDN Agustus 2022		39.220.020	(39.320.020)
22 September 2022	KDN Arus Balik Agustus 2022		21.000.000	(60.320.020)
28 September 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan Agustus 2022-02.23/04.0/000151/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/9/2022	60.220.020		(100.000)
19 Oktober 2022	KDN September 2022		37.581.390	(37.681.390)
19 Oktober 2022	KDN Arus Balik September 2022		20.070.000	(57.751.390)
27 Oktober 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan September 2022-02.23/04.0/000167/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.04/10/2022	57.651.390		(100.000)
24 November 2022	KDN Oktober 2022		33.729.360	(33.829.360)
24 November 2022	KDN Arus Balik Oktober 2022		17.835.000	(51.664.360)
07 Desember 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan Oktober 2022-02.23/04.0/000194/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.04/12/2022	51.564.360		(100.000)
14 Desember 2022	KDN November 2022		39.305.700	(39.405.700)
14 Desember 2022	KDN Arus Balik November 2022		20.970.000	(60.375.700)
27 Desember 2022	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan November 2022-02.23/04.0/000211/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.05/12/2022	60.275.700		(100.000)
17 Januari 2023	KDN Desember 2022		38.327.520	(38.427.520)
17 Januari 2023	KDN Arus Balik Desember 2022		20.745.000	(59.172.520)

UTANG KOMPENSASI JASA PELAYANAN (KJP)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
31 Desember 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2021		309.281.000	(309.281.000)
31 Januari 2022	Kompensasi Jasa Pelayan (KJP) Bulan Desember 2021-02.23/04.0/000010/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/M/1/2022	309.281.000		-
07 Maret 2022	Kompensasi Jasa Pelayan (KJP) Januari 2022		260.015.000	(260.015.000)
16 Maret 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Januari 2022-02.23/04.0/000029/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/M/3/2022	260.015.000		-
31 Maret 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) bulan Februari 2022		233.073.400	(233.073.400)
06 April 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) bulan Februari 2022-02.23/04.0/000048/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/M/4/2022	233.073.400		-
27 April 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Maret 2022		256.492.600	(256.492.600)
12 Mei 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Maret 2022-02.23/04.0/000069/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2022	256.492.600		-
31 Mei 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan April 2022		256.730.600	(256.730.600)
06 Juni 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan April 2022-02.23/04.0/000084/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.01/6/2022	256.730.600		-
20 Juni 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Mei 2022		239.118.600	(239.118.600)
05 Juli 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Mei 2022-02.23/04.0/000104/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/7/2022	239.118.600		-
18 Juli 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juni 2022		252.851.200	(252.851.200)
25 Juli 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juni 2022-02.23/04.0/000115/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/7/2022	252.851.200		-
22 Agustus 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juli 2022		261.038.400	(261.038.400)
07 September 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juli 2022-02.23/04.0/000137/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/9/2022	261.038.400		-
22 September 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Agustus 2022		261.466.800	(261.466.800)
28 September 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Agustus 2022-02.23/04.0/000150/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.02/9/2022	261.466.800		-
19 Oktober 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan September 2022		250.542.600	(250.542.600)
27 Oktober 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan September 2022-02.23/04.0/000166/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.04/10/2022	250.542.600		-
24 November 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Oktober 2022		224.862.400	(224.862.400)
06 Desember 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Oktober 2022-02.23/04.0/000190/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.04/12/2022	224.862.400		-
14 Desember 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan November 2022		262.038.000	(262.038.000)
27 Desember 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan November 2022-02.23/04.0/000212/LS/2.11.0.00.0.00.02.0000/P.05/12/2022	262.038.000		-
17 Januari 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2022		255.516.800	(255.516.800)

Saldo Utang KDN 2015-Kurang Bayar KDN Juni 2015		100.000
KDN Desember 2021		38.327.520
KDN Desember 2021		20.745.000
KJP Desember 2021		255.516.800
SALDO UTANG		314.689.320

**Penjelasan Mutasi Penyesuaian Pendapatan LRA - Pendapatan LO
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022**

A	Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah LO	
	Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun Berjalan	193.890.140.403,00
	PembayaranPiutang 2021 - Pajak Hotel	(4.896.000,00)
	PembayaranPiutang 2021 - Pajak Resto	(1.672.392.056,00)
	PembayaranPiutang 2021 - Pajak Reklame	(377.339.500,00)
	PembayaranPiutang 2021 - Pajak Parkir	(257.200,00)
	PembayaranPiutang 2021 - Pajak Pajak Air Tanah	(249.063.325,00)
	PembayaranPiutang 2021 - Pajak PBB	(57.936.562.461,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan Pajak Tahun 2022	66.114.270.787,00
	Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun Berjalan	199.763.900.648,00
B	Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah LO	
	Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun Berjalan	11.294.079.342,00
	Pembayaran Piutang 2021 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	(5.193.850,00)
	Pembayaran Piutang 2021 - Laboratorium (DLH)	(15.562.500,00)
	Pembayaran Piutang 2021 - Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	(26.906.175,00)
	Pembayaran Piutang 2021 - Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	(201.506.150,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan Retribusi Tahun 2022	1.082.779.350,00
	Selisih Lebih Piutang DPMPSTP	(3.285.750,00)
	Pengakuan SKR 2021 DISHUB	(150.000,00)
	Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun Berjalan	12.124.254.267,00
C	Penjelasan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	
	Pendapatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Tahun Berjalan	11.022.613.597,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
C	Pendapatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO Tahun Berjalan	11.022.613.597,00
C	Penjelasan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LRA Tahun Berjalan	178.469.886.228,53
	Pembayaran Piutang 2021 - Kontribusi Cimahi Mall	(282.673.360,20)
	Pembayaran Piutang 2021 - TGR RSUD Cibabat	(197.129.997,09)
	Pembayaran Piutang 2021 - TGR DPUPR	(331.908.121,95)
	Pembayaran Piutang 2021 - TGR DISDIK	(73.931.290,00)
	Pembayaran Piutang 2021 - BLUD Air Minum	(585.572.300,00)
	Pembayaran Piutang 2021 - RSUD	(3.905.901.458,00)
	Pembayaran Piutang 2021 - Dinas Kesehatan	(23.920.000,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan Lainnya Tahun 2022	4.575.962.478,98
	Pendapatan dimuka Sewa Lahan - Bali Towerlindo	(330.272.010,00)
	Pembulatan UYHD dan Penutupan BSI	0,67
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO Tahun Berjalan	177.314.540.170,94
D	Penjelasan Dana Bagi Hasil Pajak LO	
	Dana Bagi Hasil Pajak LRA Tahun Berjalan	54.229.638.467,00
	Pengakuan Pendapatan Non Tunai Pajak Penghasilan	4.487.134.510,00
	Non Tunai PBB	587.709.814,00
	Non Tunai DBHCHT	662.552.844,00
	Dana Bagi Hasil Pajak LO Tahun Berjalan	59.967.035.635,00

E	Penjelasan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA Tahun Berjalan	36.604.255.359,00
	Non Tunai SDA Minyak Bumi	741.492.040,00
	Non Tunai Minerba	101.545.599,00
	Non Tunai Kehutanan	10.863.550,00
	Non Tunai Perikanan	211.753.211,00
	Non Tunai Panas Bumi	1.688.365.811,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO Tahun Berjalan	39.358.275.570,00
C	Penjelasan Pendapatan DAU LO	
	Pendapatan Pendapatan DAU LRA Tahun Berjalan	519.937.401.610,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DAU LO Tahun Berjalan	519.937.401.610,00
C	Penjelasan Pendapatan DAK LO	
	Pendapatan Pendapatan DAK LRA Tahun Berjalan	161.287.016.436,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DAK LO Tahun Berjalan	161.287.016.436,00
C	Penjelasan Pendapatan DID LO	
	Pendapatan Pendapatan DID LRA Tahun Berjalan	5.528.168.000,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DID LO Tahun Berjalan	5.528.168.000,00
F	Penjelasan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA Tahun Berjalan	146.414.475.669,00
	Pembayaran Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 2021	(2.624.406.060,00)
	Pembayaran Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2021	(1.467.319.800,00)
	Pembayaran Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2021	(2.696.305.912,00)
	Pembayaran Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2021	(24.964.600,00)
	Pembayaran Piutang Pajak Rokok 2021	(2.981.309.199,00)
	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 2022	2.317.152.540,00
	Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2022	1.204.696.200,00
	Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2022	1.530.273.536,00
	Pendapatan Pajak Air Permukaan 2022	12.737.150,00
	Pendapatan Pajak Rokok 2022	2.639.675.826,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO Tahun Berjalan	144.324.705.350,00
	Penjelasan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LO	
	Pendapatan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LRA Tahun Berjalan	12.360.600.000,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LO Tahun Berjalan	12.360.600.000,00
G	Penjelasan Pendapatan Hibah LO	
	Pendapatan Hibah LRA Tahun Berjalan	-
	Pendapatan Hibah Dinkes	9.723.267.574,00
	Pendapatan Hibah RSUD	1.190.538.903,00
	Pendapatan Hibah DPKP	1.660.622.899,00
	Pendapatan Hibah BPBD	38.934.050,00
	Pendapatan Hibah DP3AP2KB	211.377.874,00
	Pendapatan Hibah Bappeda	24.425.000,00
	Pendapatan Hibah DISDIK	355.882.500,00
	Pendapatan Hibah LO Tahun Berjalan	13.205.048.800,00

Penjelasan Mutasi Penyesuaian Belanja - Beban
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022

A	Penjelasan Beban Pegawai	
	Belanja Pegawai LRA Tahun Berjalan	658.940.382.015,00
	Pengakuan Beban Utang Belanja Pegawai Disdik	158.217.200,00
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Dinkes	(3.928.572,00)
	Beban Pegawai LO Tahun Berjalan	659.094.670.643,00
B	Penjelasan Beban Persediaan	
	Belanja Barang LRA Tahun Berjalan	107.405.313.011,00
	Belanja Persediaan dari BLUD	49.153.154.252,00
	Belanja Persediaan dari BOS	11.784.458.281,00
	BTT yang menjadi Persediaan	194.051.245,00
	Belanja Persediaan Dari Utang	9.549.264.461,72
	Persediaan dari Pendapatan Hibah	11.164.698.401,00
	Koreksi Saldo Awal berdasarkan LHP 2021	87.347.109,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan mesin ke Persediaan	917.671.672,98
	Reklasifikasi dari Belanja Hibah	791.546.600,00
	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	3.928.196.144,00
	Reklasifikasi dari Belanja Perjalanan Dinas	31.080.000,00
	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	12.974.684.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin	(1.049.000,00)
	Reklasifikasi ke Belanja Jasa	(12.579.734,00)
	Reklasifikasi ke Belanja Perjalanan Dinas	(430.000,00)
	Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan	(242,00)
	Koreksi Keluar berdasarkan LHP 2021	(108.268.045,00)
	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca 2022)	(28.649.727.503,26)
	Persediaan Barang Tahun 2021 (Neraca)	32.019.657.874,93
	Beban Persediaan LO Tahun Berjalan	211.229.068.528,36
C	Penjelasan Beban Jasa	
	Belanja Jasa LRA Tahun Berjalan	408.969.243.394,17
	Aset Tidak Berwujud dari beban jasa	(1.481.527.245,00)
	Biaya Dibayar Dimuka	642.672.617,72
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.977.966.325,00
	Belanja Persediaan dari BLUD	(49.153.154.252,00)
	Belanja Persediaan dari BOS	(11.784.458.281,00)
	Belanja Pemeliharaan dari BOS	(1.000.550.951,00)
	Belanja Pemeliharaan dari BLUD	(789.530.255,00)
	Belanja Perjalanan Dinas dari BOS	2.055.165.600,00
	Belanja Perjalanan Dinas dari BLUD	(843.641.140,00)
	Koreksi Utang Belanja Modal Ke Beban Jasa	349.131.313,00
	Belanja Pemasangan Paving Block Jalan Setapak masyarakat- DPKP	(3.928.196.144,00)
	Reklas dari Persediaan ke beban Jasa	12.579.734,00
	Mutasi Ke Aset Tetap dari belanja barang	(4.731.592.934,00)
	Selisih Pengakuan dan Pembayaran Utang Belanja	(144.960.700,00)
	Selisih Pengakuan dan Pembayaran Utang Jangka Panjang	11.465.501.389,00
	Reklas Ke Perjalanan Dinas Dari Beban Jasa (Disarda)	(30.770.181,00)
	Koreksi Pengakuan Belanja Pegawai	3.928.572,00
	Koreksi Pembulatan	0,86
	Beban Jasa LRA Tahun Berjalan	329.546.472.884,75
C	Penjelasan Beban Pemeliharaan	
	Belanja Pemeliharaan LRA Tahun Berjalan	29.842.003.612,00
	Belanja Pemeliharaan dari BOS	1.000.550.951,00
	Belanja Pemeliharaan dari BLUD	789.530.255,00
	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Ke Aset Tetap	(49.906.680,00)
	Reklasifikasi Aset tetap Ke Beban Pemeliharaan	361.638.949,00
	Reklasifikasi Persediaan Ke Beban Pemeliharaan	242,00
	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Ke Persediaan	(12.974.684.000,00)
	Koreksi Mapping Beban Pemeliharaan ke Beban jasa	
	Utang Pemeliharaan RSUD Cibabat	841.643.621,00
	Beban Pemeliharaan LO Tahun Berjalan	19.810.776.950,00
D	Penjelasan Beban Perjalanan Dinas	
	Belanja Perjalanan Dinas LRA Tahun Berjalan	35.059.872.218,00
	Reklas dari Persediaan (Budpar)	430.000,00
	Reklas Dari Beban Jasa (Disarda)	30.770.181,00
	Koreksi Isnpektorat	
	Belanja Perjalanan Dinas dari BOS	2.055.165.600,00
	Belanja Perjalanan Dinas dari BLUD	843.641.140,00
	Reklas Ke Persediaan (Setda)	(31.080.000,00)
	Beban Perjalanan Dinas LO Tahun Berjalan	37.958.799.139,00

E	Penjelasan Beban Bunga	
	Belanja Bunga LRA Tahun Berjalan	234.672.144,00
	Reklas Pembayaran Bagian Lancar Utang Bunga 2021 dari beban bunga	(161.298.946,00)
	Pengakuan Utang Bunga 2022	92.533.016,65
	Koreksi Jurnal Selisih pembayaran utang bunga tahun 2021 dengan 2020	32.259.789,53
	Beban Bunga LO Tahun Berjalan	198.166.004,18
F	Penjelasan Beban Hibah	
	Belanja Hibah LRA Tahun Berjalan	39.388.772.249,00
	Koreksi Belanja Hibah ke Persediaan - DPUPR	- 791.546.600,00
	Beban Hibah LO Tahun Berjalan	38.597.225.649,00
G	Penjelasan Beban Bantuan Soisal	
	Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun Berjalan	3.133.871.600,00
	Tidak ada jurnal penyesuaian	-
	Beban Bantuan Sosial LO Tahun Berjalan	3.133.871.600,00
H	Penjelasan Beban Transfer	
	Belanja transfer LRA Tahun Berjalan	100.000.000,00
	Tidak ada jurnal penyesuaian	-
	Beban transfer LO Tahun Berjalan	100.000.000,00
I	Penjelasan Beban Luar Biasa	
	Belanja BTT LRA Tahun Berjalan	6.050.171.068,00
	Reklas ke Beban Persediaan	- 194.051.245,00
	Reklas ke Aset tetap peralatan dan mesin	- 286.036.036,00
	Beban Luar Biasa LO Tahun Berjalan	5.570.083.787,00

**Rincian Beban Jasa
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022**

8.1.02.02	Beban Jasa	329.546.472.884,75
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	169.204.581.428,92
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.284.208.100,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	696.500.000,00
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.073.176.250,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	69.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	503.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	9.544.600.600,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	7.447.088.097,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.232.728.120,00
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.351.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	651.056.000,00
8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	89.094.400,00
5.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	17.100.000,00
5.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	554.285.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	122.820.000,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	702.000.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	61.495.019.794,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.314.072.961,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.775.623.232,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.312.521.366,00
5.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka	48.000.000,00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	312.709.153,00
5.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	61.000.000,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.194.505.000,00
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	71.362.321,00
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	76.487.700,17
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	415.811.387,00
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	123.289.500,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	806.226.016,92
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	17.538.234.350,00
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	5.930.716.587,00
8.1.02.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	61.950.000,00
5.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	19.339.000,00
5.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	807.140.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	932.665.420,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	314.028.154,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	32.742.442,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	12.182.590.265,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.610.805.600,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.954.315.802,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	28.296.400,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	385.980.249,83
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	5.934.816.389,00
5.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	30.535.772,00
5.1.02.02.01.0074	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	94.540.000,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	43.175.502.211,39
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	33.267.152.500,00
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.730.916.400,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.160.846.581,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	799.150.903,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	887.859.561,00
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	1.329.576.266,39
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	340.280.592,60
8.1.02.02.03.0023	Beban Sewa Tanah untuk Jalan	340.280.592,60
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.754.008.535,00
5.1.02.02.04.0017	Beban Sewa Mesin Proses Apung	133.460.000,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.007.390.450,00
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	223.021.379,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.326.947.237,00

8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	4.023.750,00
5.1.02.02.04.0120	Beban Sewa Alat Pembersih	49.165.719,00
5.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum	10.000.000,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.357.838.115,07
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.016.657.281,75
8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang	1.470.684.166,65
5.1.02.02.05.0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.070.000,00
8.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	242.100.000,00
8.1.02.02.05.0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	40.416.666,67
8.1.02.02.05.0018	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	74.715.000,00
5.1.02.02.05.0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	837.695.000,00
5.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman	20.500.000,00
8.1.02.02.05.0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	515.000.000,00
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	166.064.500,00
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	166.064.500,00
8.1.02.02.08	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	9.447.420.787,00
5.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	57.098.488,00
5.1.02.02.08.0003	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	605.995.867,00
5.1.02.02.08.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	9.632.000,00
5.1.02.02.08.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	325.322.584,00
5.1.02.02.08.0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	99.743.000,00
5.1.02.02.08.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	229.261.200,00
5.1.02.02.08.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	77.607.098,00
5.1.02.02.08.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	659.506.891,00
5.1.02.02.08.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	236.159.615,00
5.1.02.02.08.0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	360.968.039,00
5.1.02.02.08.0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	276.334.167,00
5.1.02.02.08.0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	518.321.405,00
5.1.02.02.08.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.240.714.929,00
5.1.02.02.08.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.407.614.086,00
5.1.02.02.08.0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	959.842.406,00
5.1.02.02.08.0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	372.245.852,00
5.1.02.02.08.0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	569.905.070,00
5.1.02.02.08.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.233.877.340,00
5.1.02.02.08.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	201.270.750,00
5.1.02.02.08.0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	6.000.000,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.699.823.614,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	753.436.060,00
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	294.622.260,00
8.1.02.02.09.0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa	980.305.850,00
8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi	164.057.467,00
5.1.02.02.09.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	507.401.977,00
5.1.02.02.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	6.750.000,00
5.1.02.02.11.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	3.250.000,00
5.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.682.857.652,00
5.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.342.910.564,00
5.1.02.02.12.0002	Beban Sosialisasi	782.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis	661.321.088,00
5.1.02.02.12.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	896.626.000,00

8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.049.770.181,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.049.770.181,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.424.770.181,00
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.625.000.000,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-
5.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	31.905.857.498,86
5.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	31.905.857.498,86
5.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS	31.905.857.498,86
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	54.752.467.768,91
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	54.752.467.768,91
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	54.752.467.768,91

**Rincian Perhitungan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2022**

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PPKD/ RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIDAJIAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	KOREKSI UTANG PFK	KEUNTUNGAN/ KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
PPKD-PPKD																	-
Disdik	87.365.167.746,15	(328.001.534.246,79)	268.600.272.836,00	-	(73.931.290,00)		-	10.000.000,00	-	-	369.656,45	4.360.619.366,51	-	-	-	-	32.260.964.068,32
Dinkes	67.270.559.577,05	(105.771.064.255,68)	105.705.912.601,00	-	-		-	10.000.000,00	-	-	119.600,00	6.522.164.893,97	-	-	-	-	73.737.692.416,34
RSUD	246.870.957.407,95	(114.056.950.474,25)	58.522.399.325,00	0,39	(197.129.997,09)		194.051.245,00	5.796.584.775,00	-	-	797.517.935,13	7.969.701.896,76	-	-	-	-	205.897.132.113,90
DPUPR	1.124.789.789.015,21	(53.829.714.571,42)	46.218.544.428,00	-	(331.908.121,95)		-	22.500.000,00	-	-	1.659.540,60	45.261.539.702,99	-	-	-	-	1.162.132.409.993,43
DPKP	280.047.606.231,48	(48.585.767.535,27)	47.431.532.326,00	-	-		-	12.883.431.328,00	-	-	-	(1.555.934.657,93)	-	-	-	-	290.220.867.692,28
SATPOL PP DAMKAR	2.707.889.884,00	(24.188.143.975,08)	24.035.425.493,00	-	-		-	-	-	-	-	3.557.141.982,34	-	-	-	-	6.112.313.384,26
BPBD	1.392.427.100,33	(6.909.214.226,14)	6.430.337.518,00	-	-		(6.512.936,00)	-	-	-	-	(13.128.570,00)	-	-	-	-	893.908.886,19
DSP2KBP3A	1.431.563.009,51	-	-	(1.431.563.009,51)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DINSOS	-	(8.970.188.709,29)	9.402.955.945,00	177.425.791,68	-		-	15.650.000,00	-	-	-	(7.569.660,72)	-	-	-	-	618.273.366,67
DP3AP2KB	-	(14.166.731.782,20)	13.852.535.742,00	1.254.137.217,83	-		-	408.577.250,00	-	-	-	101.540.565,13	-	-	-	-	1.450.058.992,76
DISNAKER	676.551.285,50	(10.489.308.856,00)	10.296.205.880,00	-	-		-	(217.400.000,00)	(5.000.000,00)	-	-	470.675.250,00	-	-	-	-	731.723.559,50
PANGAN	27.555.836.422,22	(11.761.146.261,82)	11.170.673.713,00	-	-		-	23.235.000,00	-	-	-	667.266.678,00	-	-	-	-	27.655.865.751,40
DLH	47.195.957.604,48	(49.506.531.147,37)	45.812.555.954,00	-	-		-	78.775.000,00	-	-	-	4.470.440.278,90	-	-	-	-	48.051.197.690,01
DISDUKASIP	2.206.238.344,01	(10.384.778.647,14)	9.662.585.750,00	-	-		(14.408.000,00)	(270.650.000,00)	-	-	-	1.114.278.018,50	-	-	-	-	2.313.265.465,37
DISHUB	60.379.144.617,19	(34.356.409.535,82)	29.187.410.066,00	-	-		(0,00)	(99.550.000,00)	-	-	150.000,00	1.817.522.543,75	-	-	-	-	56.928.267.691,11
DISKOMINFOARUPUS	7.886.349.997,97	-	-	(7.886.349.997,97)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DISKOMINFO	-	(11.940.839.632,78)	11.313.209.616,00	4.868.458.893,73	-		-	155.310.000,00	-	-	-	(241.225.589,75)	-	-	-	-	4.154.913.287,20
DISARDA	-	(4.654.437.586,52)	4.755.145.013,00	3.017.891.104,24	-		-	173.900.000,00	-	-	-	183.676.293,98	-	-	-	-	3.476.174.824,70
DISDAGKOPERIN	149.014.996.017,01	(24.240.938.252,52)	21.340.829.758,00	-	-		-	(16.715.000,00)	-	-	-	2.109.205.379,54	-	-	-	-	148.207.377.902,04
DPMPPTSP	19.135.886.647,55	(14.380.979.712,10)	21.488.078.755,00	-	3.285.750,00		-	-	-	-	637.273,00	1.842.920.907,57	-	-	-	-	28.089.829.621,02
DISBUDPARPORA	34.491.370.832,02	(28.424.160.003,82)	36.370.584.474,00	-	-		-	(1.515.839.000,00)	-	-	-	158.425.370,25	-	-	-	-	41.080.381.672,45
BAPPEDA	313.957.358,67	(14.685.056.109,38)	13.975.961.589,00	-	-		-	(123.366.400,00)	-	-	-	1.385.185.050,14	-	-	-	-	866.681.488,44
BPKAD	269.235.103.715,10	680.295.622.867,46	(596.404.407.966,49)	-	-	(60.087.009,00)	(194.051.245,00)	(588.273.286,00)	-	-	-	1.391.203.205,13	-	-	-	(164.172.773,00)	353.510.937.508,20
BAPENDA	93.175.116.136,29	446.169.606.294,79	(447.210.102.877,00)	-	(88.304.419,20)		-	-	-	-	240.891.208,00	791.132.640,60	-	-	-	-	93.078.338.983,47
BKPSDMD	163.791.773,00	(10.710.039.665,67)	10.369.843.717,00	-	-		-	-	-	-	-	720.595.600,50	-	-	-	-	544.191.424,83
DPRD	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPDA	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PPKD/ RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIDAJAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	KOREKSI UTANG PFK	KEUNTUNGAN/ KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
SETDA	51.634.474.798,59	(62.741.889.380,06)	58.456.520.881,00	-	-		-	468.275.000,00	-	-	-	3.697.083.633,26	-	-	-	-	51.514.464.932,79
SETWAN	14.717.097.392,87	(84.587.301.584,50)	84.064.553.459,00	-	-		-	-	-	-	-	1.455.712.738,00	-	-	-	-	15.650.062.005,37
INSPEKTORAT	4.192.443.047,71	(10.347.156.448,41)	10.052.016.166,00	-	-		-	(12.440.000,00)	-	-	-	382.862.710,00	-	-	-	-	4.267.725.475,30
CIMUT	17.334.847.148,65	(29.649.949.341,30)	28.946.591.006,00	-	-		-	27.720.000,00	-	-	-	1.191.698.566,49	-	-	-	-	17.850.907.379,84
CIMTENG	20.291.681.078,80	(40.501.509.325,84)	39.634.468.591,00	-	-		-	17.720.000,00	-	-	-	1.029.608.782,31	-	-	-	-	20.471.969.126,27
CIMSEL	20.656.061.452,20	(36.826.783.572,68)	36.073.623.575,00	-	-		-	49.815.000,00	-	-	-	1.773.674.461,98	-	-	-	-	21.726.390.916,50
KESBANG	2.164.867.611,03	(8.948.108.388,43)	8.897.171.004,00	-	-		-	173.900.000,00	-	-	-	16.305.648,70	-	-	-	-	2.304.135.875,30
PPKD	261.726.484.341,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.844,00	-	261.726.825.185,51
ELIMINASI			(28.453.434.337,51)														(28.453.434.337,51)
SALDO 2022	2.916.024.217.594,05	(77.151.404.066,03)	-	0,39	(687.988.078,24)	(60.087.009,00)	(20.920.936,00)	17.471.159.667,00	(5.000.000,00)	-	1.041.345.213,18	92.624.323.886,92	-	-	340.844,00	(164.172.773,00)	2.949.071.814.343,26

LAPORAN KEUANGAN SKPD

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	286.511.483.830,00	225.282.255.688,00	78,63	228.552.914.893,00
	Belanja Barang	74.964.971.447,00	70.347.209.072,00	93,84	69.621.159.447,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	22.110.565.800,00	21.427.624.835,00	96,91	7.404.200.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.202.251.600,00	3.133.871.600,00	74,58	1.369.990.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	387.789.272.677,00	320.190.961.195,00	82,57	306.948.264.340,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	6.821.660.822,00	6.071.544.344,00	89,00	5.823.668.982,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	20.394.094.300,00	16.205.049.009,00	79,46	11.966.304.739,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.440.360.700,00	1.207.763.023,00	83,85	2.593.188.705,00
	Jumlah Belanja Modal	28.656.115.822,00	23.484.356.376,00	81,95	20.383.162.426,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	416.445.388.499,00	343.675.317.571,00	82,53	327.331.426.766,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	416.445.388.499,00	343.675.317.571,00	82,53	327.331.426.766,00
	SURPLUS / DEFISIT	(416.445.388.499,00)	(343.675.317.571,00)	82,53	(327.331.426.766,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(416.445.388.499,00)	(343.675.317.571,00)	82,53	(327.331.426.766,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.050,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	(277.715.126.661,00)	(202.640.087.976,00)
	Kas Lainnya	125.000,00	47.935.751,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	90.777.649,58	7.251.000,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	15.532.585,63	89.463.875,63
	Penyisihan Piutang Lainnya	(77.662,93)	(447.319,38)
	Persediaan	61.477.416,00	187.389.597,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	(277.547.291.672,72)	(202.308.489.021,75)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	62.055.425.372,00	62.055.425.372,00
	Peralatan dan Mesin	79.452.983.710,36	74.377.350.791,36
	Gedung dan Bangunan	209.867.061.055,00	196.314.539.328,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	599.205.674,00	599.205.674,00
	Aset Tetap Lainnya	48.942.633.946,85	47.771.271.256,85
	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.599.501.122,31	12.565.212.634,31
	Akumulasi Penyusutan	(116.696.965.486,99)	(112.077.792.635,63)
	Jumlah Aset Tetap	300.819.845.393,53	281.605.212.420,89
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	668.380.800,00	521.580.800,00
	Akumulasi Amortisasi	(510.737.287,50)	(439.021.950,00)
	Aset Lain-Lain	8.991.343.279,01	8.036.005.217,01
	Jumlah Aset Lainnya	9.148.986.791,51	8.118.564.067,01
	JUMLAH ASET	32.421.540.512,32	87.415.287.466,15

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	125.000,00	47.935.751,00
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	160.451.444,00	2.183.969,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	160.576.444,00	50.119.720,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	160.576.444,00	50.119.720,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	32.260.964.068,32	87.365.167.746,15
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	32.421.540.512,32	87.415.287.466,15

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp 89.463.875,63	Rp (89.463.875,63)	-100
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 355.882.500,00	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 355.882.500,00	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 355.882.500,00	Rp 89.463.875,63	Rp 266.418.624,37	297,795
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 225.440.472.888,00	Rp 227.084.164.893,00	Rp (1.643.692.005,00)	-0,72
	Beban Persediaan	Rp 15.795.428.303,00	Rp 20.765.675.603,00	Rp (4.970.247.300,00)	-23,93
	Beban Jasa	Rp 49.510.638.953,42	Rp 44.426.279.349,50	Rp 5.084.359.603,92	11,44
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.138.475.951,00	Rp 1.806.829.544,00	Rp (668.353.593,00)	-36,99
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 2.556.605.581,00	Rp 1.582.225.362,00	Rp 974.380.219,00	61,58
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp 21.427.624.835,00	Rp 7.404.200.000,00	Rp 14.023.424.835,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp 3.133.871.600,00	Rp 1.369.990.000,00	Rp 1.763.881.600,00	
	Beban Penyusutan	Rp 8.979.792.217,87	Rp 9.131.625.900,66	Rp (151.833.682,79)	-1,66
	Beban Amortisasi	Rp 71.715.337,50	Rp 40.297.950,00	Rp 31.417.387,50	77,96
	Beban Penyisihan Piutang	Rp (0,00)	Rp 447.319,38	Rp (447.319,38)	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 328.054.625.666,79	Rp 313.611.735.921,54	Rp 14.442.889.745,25	4,61
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (327.698.743.166,79)	Rp (313.522.272.045,91)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (302.791.080,00)	Rp (276.510.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (302.791.080,00)	Rp (276.510.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (328.001.534.246,79)	Rp (313.798.782.045,91)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (328.001.534.246,79)	Rp (313.798.782.045,91)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENDIDIKAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	87.365.167.746,15	124.764.465.157,03
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(328.001.534.246,79)	(313.798.782.045,91)
3	RK PPKD/RK SKPD	268.600.272.836,00	271.442.125.550,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(73.931.290,00)	(228.697.100,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	10.000.000,00	(1.135.121.894,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	369.656,45	-
	-Akumulasi Penyusutan	4.360.619.366,51	6.321.172.029,03
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	6.050,00
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	32.260.964.068,32	87.365.167.746,15

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37	18.034.132.900,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37	18.034.132.900,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	18.508.598.160,00	18.946.647.100,00	102,37	18.034.132.900,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	62.455.839.862,00	55.841.975.796,00	89,41	56.650.499.398,00
	Belanja Barang	80.991.019.041,00	63.689.155.310,00	78,64	57.289.527.169,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	143.946.858.903,00	120.031.131.106,00	83,39	114.440.026.567,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.407.404.753,00	2.184.260.689,00	64,10	3.304.884.809,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	3.066.532.675,00	151.708.650,00	4,95	11.953.356.846,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	600.000.000,00	479.622.800,00	79,94	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	7.073.937.428,00	2.815.592.139,00	39,80	15.258.241.655,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	151.020.796.331,00	122.846.723.245,00	81,34	129.698.268.222,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	151.020.796.331,00	122.846.723.245,00	81,34	129.698.268.222,00
	SURPLUS / DEFISIT	(132.512.198.171,00)	(103.900.076.145,00)	78,41	(111.664.135.322,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(132.512.198.171,00)	(103.900.076.145,00)	78,41	(111.664.135.322,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	4.980.283.810,00	3.174.447.354,00
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	88.411.658,33	82.494.925,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	2.000.000,00	23.920.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(10.000,00)	(119.600,00)
	Persediaan	9.192.568.546,29	9.548.695.953,58
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	14.263.254.014,62	12.829.438.632,58
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	7.870.642.001,00	7.870.642.001,00
	Peralatan dan Mesin	48.654.512.686,61	51.914.483.356,10
	Gedung dan Bangunan	47.311.454.031,00	46.808.347.617,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	898.890.120,00	306.819.000,00
	Aset Tetap Lainnya	61.713.000,00	61.713.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	156.992.184,00	243.707.750,00
	Akumulasi Penyusutan	(50.892.485.075,52)	(52.856.560.010,75)
	Jumlah Aset Tetap	54.061.718.947,09	54.349.152.713,35
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	172.730.000,00	172.730.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(169.480.000,00)	(159.987.500,00)
	Aset Lain-Lain	5.449.594.852,63	120.323.639,12
	Jumlah Aset Lainnya	5.452.844.852,63	133.066.139,12
	JUMLAH ASET	73.777.817.814,34	67.311.657.485,05

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	40.125.398,00	41.097.908,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	40.125.398,00	41.097.908,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	40.125.398,00	41.097.908,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	73.737.692.416,34	67.270.559.577,05
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	73.777.817.814,34	67.311.657.485,05

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KESEHATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan (%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 18.924.727.100,00	Rp 18.058.052.900,00	Rp 866.674.200,00 4,80
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 18.924.727.100,00	Rp 18.058.052.900,00	Rp 866.674.200,00 4,80
	PENDAPATAN TRANSFER			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	Rp 9.723.267.574,00	Rp 6.356.416.321,00	Rp 3.366.851.253,00 52,968
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 9.723.267.574,00	Rp 6.356.416.321,00	Rp 3.366.851.253,00 52,968
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 28.647.994.674,00	Rp 24.414.469.221,00	Rp 4.233.525.453,00 17,34
2	BEBAN			
	Beban Pegawai	Rp 55.838.047.224,00	Rp 50.456.967.864,00	Rp 5.381.079.360,00 10,66
	Beban Persediaan	Rp 20.478.805.199,27	Rp 14.351.843.972,03	Rp 6.126.961.227,24 42,69
	Beban Jasa	Rp 50.680.461.598,67	Rp 53.627.957.626,83	Rp (2.947.496.028,16) -5,50
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.091.938.255,00	Rp 1.245.566.201,00	Rp (153.627.946,00) -12,33
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.139.908.594,00	Rp 782.775.831,00	Rp 357.132.763,00 45,62
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Hibah	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Penyusutan	Rp 4.558.089.958,74	Rp 4.902.788.768,71	Rp (344.698.809,97) -7,03
	Beban Amortisasi	Rp 9.492.500,00	Rp 9.492.500,00	Rp - 0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 10.000,00	Rp 119.600,00	Rp (109.600,00)
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 115.031.572,99	Rp (115.031.572,99) -100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 134.296.753.329,68	Rp 125.992.543.936,56	Rp 8.304.209.393,12 6,59
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (105.648.758.655,68)	Rp (101.578.074.715,56)	
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (122.305.600,00)	Rp (926.926.500,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (122.305.600,00)	Rp (926.926.500,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (105.771.064.255,68)	Rp (102.505.001.215,56)	
4	POS LUAR BIASA			
	Pendapatan Luar Biasa			
	Beban Luar Biasa			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (105.771.064.255,68)	Rp (102.505.001.215,56)	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KESEHATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	67.270.559.577,05	57.784.842.424,15
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(105.771.064.255,68)	(102.505.001.215,56)
3	RK PPKD/RK SKPD	105.705.912.601,00	112.264.811.523,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	107.141.300,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	10.000.000,00	10.460.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	119.600,00	-
	-Akumulasi Penyusutan	6.522.164.893,97	(391.694.454,53)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	73.737.692.416,34	67.270.559.577,05

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - CIBABAT

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang			-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39	165.608.981.259,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39	165.608.981.259,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	145.000.000.000,00	136.867.524.937,00	94,39	165.608.981.259,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	113.576.457.702,00	112.469.799.875,00	99,03	88.637.587.609,00
	Belanja Barang	126.334.571.474,00	107.828.779.122,00	85,35	108.266.447.515,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	239.911.029.176,00	220.298.578.997,00	91,83	196.904.035.124,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.599.998.000,00	3.538.373.366,00	98,29	10.346.041.343,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.494.390.175,00	74,72	1.292.167.160,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	5.599.998.000,00	5.032.763.541,00	89,87	11.638.208.503,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	245.511.027.176,00	225.331.342.538,00	91,78	208.542.243.627,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	245.511.027.176,00	225.331.342.538,00	91,78	208.542.243.627,00
	SURPLUS / DEFISIT	(100.511.027.176,00)	(88.463.817.601,00)	88,01	(42.933.262.368,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(100.511.027.176,00)	(88.463.817.601,00)	88,01	(42.933.262.368,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA RSU CIBABAT
Per 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	11.048.201.198,00	40.989.619.473,61
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	18.200.144,50	27.940.943,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	5.903.205.836,00	6.859.648.248,09
	Penyisihan Piutang Lainnya	(70.642.371,48)	(868.160.306,61)
	Persediaan	10.327.639.662,80	11.721.606.703,80
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	27.226.604.469,82	58.730.655.062,22
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	28.362.300.000,00	28.362.300.000,00
	Peralatan dan Mesin	275.701.287.879,49	282.508.102.719,32
	Gedung dan Bangunan	128.993.130.638,20	127.503.042.329,20
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.127.838.639,00	1.191.039.000,00
	Aset Tetap Lainnya	12.025.600,00	12.025.600,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(260.630.402.979,73)	(239.857.371.732,79)
	Jumlah Aset Tetap	179.566.179.776,96	199.719.137.915,73
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	392.194.000,00	392.194.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(392.194.000,00)	(359.133.000,00)
	Aset Lain-Lain	10.181.028.566,83	-
	Jumlah Aset Lainnya	10.181.028.566,83	33.061.000,00
	JUMLAH ASET	216.973.812.813,62	258.482.853.977,95

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	2.036.108.377,00	231.386.755,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.040.572.322,72	11.380.509.815,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.076.680.699,72	11.611.896.570,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.076.680.699,72	11.611.896.570,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	205.897.132.113,90	246.870.957.407,95
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	216.973.812.813,62	258.482.853.977,95

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL RSU CIBABAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 136.108.212.522,00	Rp 168.160.013.515,00	Rp (32.051.800.993,00)	-19,06
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 136.108.212.522,00	Rp 168.160.013.515,00	Rp (32.051.800.993,00)	-19,06
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 1.190.538.903,00	Rp 1.913.159.147,00	Rp (722.620.244,00)	-37,77
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.190.538.903,00	Rp 1.913.159.147,00	Rp (722.620.244,00)	-37,77
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 137.298.751.425,00	Rp 170.073.172.662,00	Rp (32.774.421.237,00)	-19,27
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 112.469.799.875,00	Rp 87.769.882.609,00	Rp 24.699.917.266,00	28,14
	Beban Persediaan	Rp 56.065.970.666,72	Rp 54.396.848.717,91	Rp 1.669.121.948,81	3,07
	Beban Jasa	Rp 52.496.638.792,83	Rp 40.474.807.598,50	Rp 12.021.831.194,33	29,70
	Beban Pemeliharaan	Rp 841.643.621,00	Rp 6.328.606.234,00	Rp (5.486.962.613,00)	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp -	Rp 166.396.168,00	Rp (166.396.168,00)	
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 28.742.733.143,70	Rp 39.270.687.570,62	Rp (10.527.954.426,92)	-26,81
	Beban Amortisasi	Rp 33.061.000,00	Rp 33.061.000,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 539.246.619,77	Rp (539.246.619,77)	-100,00
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 3.940.000,00	Rp (3.940.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 250.649.847.099,25	Rp 228.983.476.517,80	Rp 21.666.370.581,45	9,46
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (113.351.095.674,25)	Rp (58.910.303.855,80)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (705.854.800,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (705.854.800,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (114.056.950.474,25)	Rp (58.910.303.855,80)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (114.056.950.474,25)	Rp (58.910.303.855,80)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS RSU CIBABAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	246.870.957.407,95	233.218.301.355,92
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(114.056.950.474,25)	(58.910.303.855,80)
3	RK PPKD/RK SKPD	58.522.399.325,00	71.298.490.211,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	0,39	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(197.129.997,09)	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	194.051.245,00	918.832.953,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	5.796.584.775,00	1.681.223.172,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	797.517.935,13	-
	-Akumulasi Penyusutan	7.969.701.896,76	(1.335.586.428,17)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	205.897.132.113,90	246.870.957.407,95

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.124.135.819,00	7.458.012.412,00	91,80	7.241.021.693,00
	Belanja Barang	25.595.628.800,00	23.603.003.616,00	92,21	38.483.234.017,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	800.000.000,00	791.546.600,00	98,94	748.887.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	34.519.764.619,00	31.852.562.628,00	92,27	46.473.142.710,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	225.178.270,00	192.712.560,00	85,58	481.961.150,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	3.826.022.162,00	3.461.825.662,00	90,48	46.563.565.838,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.995.695.069,00	10.711.443.578,00	89,29	98.631.001.206,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	16.046.895.501,00	14.365.981.800,00	89,52	145.676.528.194,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	50.566.660.120,00	46.218.544.428,00	91,40	192.149.670.904,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	50.566.660.120,00	46.218.544.428,00	91,40	192.149.670.904,00
	SURPLUS / DEFISIT	(50.566.660.120,00)	(46.218.544.428,00)	91,40	(192.149.670.904,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(50.566.660.120,00)	(46.218.544.428,00)	91,40	(192.149.670.904,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	1.328.758.854,10	1.703.763.588,37
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	64.547.257,60	396.455.379,55
	Penyisihan Piutang Lainnya	(322.736,29)	(1.982.276,89)
	Persediaan	4.065.469.000,00	3.475.067.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	5.458.452.375,41	5.573.303.691,03
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	666.404.861.656,00	700.921.601.656,00
	Peralatan dan Mesin	11.339.456.005,00	11.626.460.455,00
	Gedung dan Bangunan	71.830.684.743,00	69.433.676.543,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	585.506.986.004,84	618.781.568.493,77
	Aset Tetap Lainnya	534.085.000,00	534.085.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	181.462.041.369,05	179.567.488.649,05
	Akumulasi Penyusutan	(442.896.350.561,65)	(464.205.096.388,74)
	Jumlah Aset Tetap	1.074.181.764.216,24	1.116.659.784.408,08
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	1.500.774.910,00	1.117.395.100,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.056.248.496,25)	(908.073.025,00)
	Aset Lain-Lain	78.699.708.589,03	492.696.000,10
	Jumlah Aset Lainnya	82.492.580.002,78	4.050.363.075,10
	JUMLAH ASET	1.162.132.796.594,43	1.126.283.451.174,21

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	386.601,00	1.493.662.159,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	386.601,00	1.493.662.159,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	386.601,00	1.493.662.159,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.162.132.409.993,43	1.124.789.789.015,21
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.162.132.796.594,43	1.126.283.451.174,21

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp 396.455.380	Rp (396.455.380)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp 396.455.380	Rp (396.455.380)	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	-	
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	-	
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	-	
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	-	
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	-	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp 396.455.379,55	Rp (396.455.379,55)	
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.458.012.412,00	Rp 6.922.171.693,00	Rp 535.840.719,00	7,74
	Beban Persediaan	Rp 15.927.503.780,00	Rp 6.209.322.612,00	Rp 9.718.181.168,00	156,51
	Beban Jasa	Rp 5.700.546.559,27	Rp 6.409.546.161,80	Rp (708.999.602,53)	-11,06
	Beban Pemeliharaan	Rp 496.495.250,00	Rp 23.861.018.500,00	Rp (23.364.523.250,00)	-97,92
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 131.387.223,00	Rp 353.784.987,00	Rp (222.397.764,00)	-62,86
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 23.952.793.875,90	Rp 32.961.709.548,05	Rp (9.008.915.672,15)	-27,33
	Beban Amortisasi	Rp 148.175.471,25	Rp 246.337.775,00	Rp (98.162.303,75)	-39,85
	Beban Penyisihan Piutang	Rp (0,00)	Rp 1.982.276,90	Rp (1.982.276,90)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 53.814.914.571,42	Rp 76.965.873.553,75	Rp (23.150.958.982,33)	-30,08
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (53.814.914.571,42)	Rp (76.569.418.174,20)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (14.800.000,00)	Rp (68.500.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (14.800.000,00)	Rp (68.500.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (53.829.714.571,42)	Rp (76.637.918.174,20)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (53.829.714.571,42)	Rp (76.637.918.174,20)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	1.124.789.789.015,21	996.073.183.351,36
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(53.829.714.571,42)	(76.637.918.174,20)
3	RK PPKD/RK SKPD	46.218.544.428,00	192.149.670.904,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(331.908.121,95)	(1.515.150.488,75)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	22.500.000,00	(3.202.622.400,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	1.659.540,60	-
	-Akumulasi Penyusutan	45.261.539.702,99	17.922.625.822,79
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	1.162.132.409.993,43	1.124.789.789.015,21

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.195.690.000,00	3.312.360.350,00	103,65	3.217.740.950,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.320.000.000,00	5.157.174.326,00	119,38	4.469.058.130,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	7.515.690.000,00	8.469.534.676,00	112,69	7.686.799.080,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	7.515.690.000,00	8.469.534.676,00	112,69	7.686.799.080,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	11.565.243.555,00	10.639.887.434,00	92,00	10.018.490.921,00
	Belanja Barang	44.341.470.890,00	40.454.265.262,00	91,23	31.257.360.546,00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				1.160.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	55.906.714.445,00	51.094.152.696,00	91,39	42.435.851.467,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	1.603.248.798,00	93.769.485,00	5,85	1.545.337.518,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	560.416.920,00	394.876.748,00	70,46	561.562.798,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	870.999.900,00	728.200.565,00	83,61	645.046.098,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.892.267.000,00	2.845.238.019,00	98,37	7.490.001.989,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	
	Jumlah Belanja Modal	5.946.912.618,00	4.082.064.817,00	68,64	10.241.948.403,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	61.853.627.063,00	55.176.217.513,00	89,20	52.677.799.870,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	61.853.627.063,00	55.176.217.513,00	89,20	52.677.799.870,00
	SURPLUS / DEFISIT	(54.337.937.063,00)	(46.706.682.837,00)	85,96	(44.991.000.790,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(54.337.937.063,00)	(46.706.682.837,00)	85,96	(44.991.000.790,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	1.586.321.584,00	861.472.095,00
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	579.827.960,00	542.857.960,00
	InvestasiJangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	2.751.245.682,00	1.992.752.682,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.117.014.375,25)	(1.303.245.519,50)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	184.563.862,44	281.237.210,85
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	1.819.279.600,00	1.582.507.300,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.140.593.793,00)	(901.445.411,00)
	Persediaan	286.943.083,00	236.724.165,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.950.573.603,19	3.292.860.482,35
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	127.698.970.377,00	126.255.200.892,00
	Peralatan dan Mesin	12.350.696.157,76	13.265.024.469,12
	Gedung dan Bangunan	37.906.672.764,00	25.872.378.471,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	142.511.091.022,00	138.204.352.104,00
	Aset Tetap Lainnya	16.621.893.815,00	16.601.913.815,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	258.145.030,00	258.145.030,00
	Akumulasi Penyusutan	(51.847.793.988,15)	(43.421.252.164,11)
	Jumlah Aset Tetap	285.499.675.177,61	277.035.762.617,01
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	324.720.140,00	275.132.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(265.116.535,00)	(221.115.125,00)
	Aset Lain-Lain	1.362.134.994,48	268.073.000,12
	Jumlah Aset Lainnya	1.421.738.599,48	322.089.875,12
	JUMLAH ASET	290.871.987.380,28	280.650.712.974,48

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	71.291.728,00	60.248.783,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	579.827.960,00	542.857.960,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	651.119.688,00	603.106.743,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	651.119.688,00	603.106.743,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	290.220.867.692,28	280.047.606.231,48
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	290.871.987.380,28	280.650.712.974,48

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 4.070.853.350,00	Rp 3.963.320.700,00	Rp 107.532.650,00	2,71
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 5.393.946.626,00	Rp 4.926.484.830,00	Rp 467.461.796,00	9,49
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 9.464.799.976,00	Rp 8.889.805.530,00	Rp 574.994.446,00	6,47
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 1.660.622.899,00	Rp 12.908.002.465,00	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.660.622.899,00	Rp 12.908.002.465,00	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 11.125.422.875,00	Rp 21.797.807.995,00	Rp (10.672.385.120,00)	-48,96
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.639.887.434,00	Rp 9.633.190.921,00	Rp 1.006.696.513,00	10,45
	Beban Persediaan	Rp 15.561.533.048,00	Rp 6.589.182.104,00	Rp 8.972.350.944,00	136,17
	Beban Jasa	Rp 21.822.900.831,41	Rp 22.950.190.236,09	Rp (1.127.289.404,68)	-4,91
	Beban Pemeliharaan	Rp 2.884.177.741,00	Rp 1.723.131.699,00	Rp 1.161.046.042,00	67,38
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 389.776.377,00	Rp 325.280.196,00	Rp 64.496.181,00	19,83
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp 1.160.000.000,00	Rp (1.160.000.000,00)	-100,00
	Beban Penyusutan	Rp 6.870.607.166,11	Rp 6.968.727.732,95	Rp (98.120.566,84)	-1,41
	Beban Amortisasi	Rp 44.001.410,00	Rp 43.874.875,00	Rp 126.535,00	0,29
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 1.052.917.237,75	Rp 738.509.512,80	Rp 314.407.724,95	42,57
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 1.610.768,00	Rp (1.610.768,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 59.265.801.245,27	Rp 50.133.698.044,84	Rp 9.132.103.200,43	18,22
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (48.140.378.370,27)	Rp (28.335.890.049,84)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (445.389.165,00)	Rp (724.246.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (445.389.165,00)	Rp (724.246.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (48.585.767.535,27)	Rp (29.060.136.049,84)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (48.585.767.535,27)	Rp (29.060.136.049,84)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	280.047.606.231,48	265.434.998.713,48
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(48.585.767.535,27)	(29.060.136.049,84)
3	RK PPKD/RK SKPD	47.431.532.326,00	45.656.482.245,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	(21.905.000,00)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	12.883.431.328,00	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(1.555.934.657,93)	(1.961.833.677,16)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	290.220.867.692,28	280.047.606.231,48

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01	104.907.500,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01	104.907.500,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	100.247.500,00	115.297.500,00	115,01	104.907.500,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	15.931.373.615,00	14.630.239.549,00	91,83	14.486.562.106,00
	Belanja Barang	9.076.015.010,00	8.251.531.644,00	90,92	5.666.512.105,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	805.620.000,00	805.620.000,00	100,00	200.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	25.813.008.625,00	23.687.391.193,00	91,77	20.353.074.211,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	520.400.000,00	462.971.800,00	88,96	442.193.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	178.457.793,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	520.400.000,00	462.971.800,00		620.650.793,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	26.333.408.625,00	24.150.362.993,00	91,71	20.973.725.004,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	26.333.408.625,00	24.150.362.993,00	91,71	20.973.725.004,00
	SURPLUS / DEFISIT	(26.233.161.125,00)	(24.035.065.493,00)	91,62	(20.868.817.504,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(26.233.161.125,00)	(24.035.065.493,00)	91,62	(20.868.817.504,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	360.000,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	41.863.202,08	43.030.927,08
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	2.744.260,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	42.223.202,08	45.775.187,08
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	13.718.527.509,34	16.770.171.499,34
	Gedung dan Bangunan	1.800.860.743,00	1.800.860.743,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	97.119.000,00	97.119.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(13.084.214.420,16)	(16.037.438.428,42)
	Jumlah Aset Tetap	2.532.292.832,18	2.630.712.813,92
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	65.000.000,00	65.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(60.000.000,00)	(55.000.000,00)
	Aset Lain-Lain	3.534.507.790,00	22.400.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	3.539.507.790,00	32.400.000,00
	JUMLAH ASET	6.114.023.824,26	2.708.888.001,00

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.710.440,00	998.117,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.710.440,00	998.117,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.710.440,00	998.117,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	6.112.313.384,26	2.707.889.884,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.114.023.824,26	2.708.888.001,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 115.297.500,00	Rp 104.907.500,00	Rp 10.390.000,00	9,90
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 115.297.500,00	Rp 104.907.500,00	Rp 10.390.000,00	9,904
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 115.297.500,00	Rp 104.907.500,00		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 14.630.239.549,00	Rp 13.915.112.106,00	Rp 715.127.443,00	5,14
	Beban Persediaan	Rp 2.476.125.748,00	Rp 245.748.370,00	Rp 2.230.377.378,00	907,59
	Beban Jasa	Rp 4.848.227.562,00	Rp 4.684.113.133,08	Rp 164.114.428,92	3,50
	Beban Pemeliharaan	Rp 688.941.642,00	Rp 711.297.000,00	Rp (22.355.358,00)	-3,14
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 245.369.000,00	Rp 63.860.432,00	Rp 181.508.568,00	284,23
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 805.620.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 605.620.000,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 603.917.974,08	Rp 914.620.188,08	Rp (310.702.214,00)	-33,97
	Beban Amortisasi	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 24.303.441.475,08	Rp 20.739.751.229,16	Rp 3.563.690.245,92	17,18
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (24.188.143.975,08)	Rp (20.634.843.729,16)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (24.188.143.975,08)	Rp (20.634.843.729,16)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (24.188.143.975,08)	Rp (20.634.843.729,16)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	2.707.889.884,00	2.693.734.861,50
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(24.188.143.975,08)	(20.634.843.729,16)
3	RK PPKD/RK SKPD	24.035.425.493,00	20.868.817.504,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	42.875.450,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	3.557.141.982,34	(262.694.202,33)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	6.112.313.384,26	2.707.889.884,00

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	2.717.210.291,00	2.388.762.313,00	87,91	2.573.133.397,00
	Belanja Barang	4.155.334.500,00	3.944.516.107,00	94,93	3.675.825.943,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	41.540.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	6.872.544.791,00	6.333.278.420,00	92,15	6.290.499.340,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	108.211.000,00	97.059.098,00	89,69	516.691.450,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	69.826.000,00
	Jumlah Belanja Modal	108.211.000,00	97.059.098,00	89,69	586.517.450,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	6.980.755.791,00	6.430.337.518,00	92,12	6.877.016.790,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	6.980.755.791,00	6.430.337.518,00	92,12	6.877.016.790,00
	SURPLUS / DEFISIT	(6.980.755.791,00)	(6.430.337.518,00)	92,12	(6.877.016.790,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(6.980.755.791,00)	(6.430.337.518,00)	92,12	(6.877.016.790,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20212	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	85.343.412,50	77.342.108,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	343.162.536,00	735.731.307,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	428.505.948,50	813.073.415,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.237.459.194,00	2.149.300.096,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.787.125.330,31)	(1.577.334.291,00)
	Jumlah Aset Tetap	460.133.863,69	581.765.805,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	8.900.000,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	8.900.000,00	-
	JUMLAH ASET	897.539.812,19	1.394.839.220,33

No.	Uraian	20212	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	3.630.926,00	2.412.120,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.630.926,00	2.412.120,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.630.926,00	2.412.120,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	893.908.886,19	1.392.427.100,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	897.539.812,19	1.394.839.220,33

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 38.934.050,00	Rp 344.259.500,00	Rp (305.325.450,00)	-88,69
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 38.934.050,00	Rp 344.259.500,00	Rp (305.325.450,00)	-88,69
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 38.934.050,00	Rp 344.259.500,00	Rp (305.325.450,00)	-88,69
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 2.388.762.313,00	Rp 2.456.458.397,00	Rp (67.696.084,00)	-2,756
	Beban Persediaan	Rp 1.695.897.630,00	Rp 1.207.176.374,00	Rp 488.721.256,00	40,485
	Beban Jasa	Rp 2.263.158.462,83	Rp 2.441.890.603,67	Rp (178.732.140,84)	-7,319
	Beban Pemeliharaan	Rp 237.604.814,00	Rp 232.827.100,00	Rp 4.777.714,00	2,052
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 166.062.587,00	Rp 161.775.500,00	Rp 4.287.087,00	2,65
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp 41.540.000,00	Rp (41.540.000,00)	-100
	Beban Penyusutan	Rp 196.662.469,31	Rp 189.417.227,57	Rp 7.245.241,74	3,825
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 1.200.000,00	Rp (1.200.000,00)	-100
	JUMLAH BEBAN	Rp 6.948.148.276,14	Rp 6.732.285.202,24	Rp 215.863.073,90	3,206
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (6.909.214.226,14)	Rp (6.388.025.702,24)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (177.000.000,00)		-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (177.000.000,00)		-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (6.909.214.226,14)	Rp (6.565.025.702,24)		-
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (6.909.214.226,14)	Rp (6.565.025.702,24)		-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	1.392.427.100,33	988.618.043,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(6.909.214.226,14)	(6.565.025.702,24)
3	RK PPKD/RK SKPD	6.430.337.518,00	6.877.016.790,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(6.512.936,00)	142.100.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(13.128.570,00)	(50.282.030,43)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	893.908.886,19	1.392.427.100,33

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	-	-	-	7.073.918.557,00
	Belanja Barang	-	-	-	8.331.986.490,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	300.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	-	-	-	15.705.905.047,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	342.064.150,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-	342.064.150,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	16.047.969.197,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	16.047.969.197,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
IV	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	(16.047.969.197,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	(6.877.016.790,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	91.822.925,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	271.174.665,56
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	-	362.997.590,56
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	5.179.735.206,48
	Gedung dan Bangunan	-	645.033.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	3.999.380,62
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	(4.759.737.095,15)
	Jumlah Aset Tetap	-	1.069.030.491,95
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	32.640.000,00
	Akumulasi Amortisasi	-	(32.640.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	-	1.432.028.082,51

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	465.073,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	465.073,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	465.073,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	0,00	1.431.563.009,51
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	0,00	1.432.028.082,51

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

LAPORAN OPERASIONAL DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 110.387.516,80	Rp (110.387.516,80)	-100,00
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 110.387.516,80	Rp (110.387.516,80)	-100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp 110.387.516,80	Rp (110.387.516,80)	-100
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp -	Rp 6.793.068.557,00	Rp (6.793.068.557,00)	-100,00
	Beban Persediaan	Rp -	Rp 1.223.337.096,24	Rp (1.223.337.096,24)	-100,00
	Beban Jasa	Rp -	Rp 6.941.019.182,00	Rp (6.941.019.182,00)	-100,00
	Beban Pemeliharaan	Rp -	Rp 81.044.000,00	Rp (81.044.000,00)	-100,00
	Beban Perjalanan Dinas	Rp -	Rp 338.132.064,00	Rp (338.132.064,00)	-100,00
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp 300.000.000,00	Rp (300.000.000,00)	-100,00
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp -	Rp 399.290.334,14	Rp (399.290.334,14)	-100,00
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp -	Rp 16.075.891.233,38	Rp (16.075.891.233,38)	-100,00
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp -	Rp (15.965.503.716,58)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp -	Rp (15.965.503.716,58)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp -	Rp (15.965.503.716,58)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	1.431.563.009,51	1.266.533.314,10
2	SURPLUS/DEFISIT LO	-	(15.965.503.716,58)
3	RK PPKD/RK SKPD	-	16.047.969.197,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	(1.431.563.009,51)	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	98.507.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	-	(15.942.785,01)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	0,00	1.431.563.009,51

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.084.336.052,00	3.596.948.771,00	70,75	-
	Belanja Barang	9.544.494.380,00	5.187.569.174,00	54,35	-
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	14.628.830.432,00	8.784.517.945,00	60,05	-
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	677.307.640,00	618.438.000,00	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	677.307.640,00	618.438.000,00	-	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	15.306.138.072,00	9.402.955.945,00	61,43	-

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	15.306.138.072,00	9.402.955.945,00	61,43	
					-
	SURPLUS / DEFISIT	(15.306.138.072,00)	(9.402.955.945,00)	61,43	
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				-
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
					-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(15.306.138.072,00)	(9.402.955.945,00)	61,43	-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS SOSIAL
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	36.033.066,67	
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
	Piutang Lainnya	-	
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	
	Persediaan	-	
	RK SKPD	-	
	Jumlah Aset Lancar	36.033.066,67	
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	
	Investasi Permanen Lainnya	-	
	Jumlah Investasi Permanen	-	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	1.688.049.273,54	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan	(1.124.574.273,54)	
	Jumlah Aset Tetap	563.475.000,00	
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	
	Jumlah Dana Cadangan	-	
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	
	Tuntutan Ganti Rugi	-	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	
	Aset Tak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi	-	
	Aset Lain-Lain	19.647.750,00	
	Jumlah Aset Lainnya	19.647.750,00	
	JUMLAH ASET	619.155.816,67	

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	
	Utang Bunga	-	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	
	Utang Belanja	882.450,00	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	882.450,00	
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	
	Utang Luar Negeri	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	882.450,00	
III	EKUITAS		
	EKUITAS	618.273.366,67	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	619.155.816,67	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS SOSIAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -		Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 3.596.948.771,00		Rp 3.596.948.771,00	#DIV/0!
	Beban Persediaan	Rp 1.520.560.920,00		Rp 1.520.560.920,00	#DIV/0!
	Beban Jasa	Rp 3.499.952.545,00		Rp 3.499.952.545,00	#DIV/0!
	Beban Pemeliharaan	Rp 47.703.509,00		Rp 47.703.509,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 118.765.000,00		Rp 118.765.000,00	#DIV/0!
	Beban Bunga	Rp -		Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -		Rp -	
	Beban Hibah	Rp -		Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -		Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 185.914.214,29		Rp 185.914.214,29	#DIV/0!
	Beban Amortisasi	Rp -		Rp -	#DIV/0!
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -		Rp -	
	Beban Transfer	Rp -		Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -		Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 8.969.844.959,29		Rp 8.969.844.959,29	#DIV/0!
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (8.969.844.959,29)			
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (343.750,00)			
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (343.750,00)			
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (8.970.188.709,29)			
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -			
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (8.970.188.709,29)			

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS SOSIAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	-	
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.970.188.709,29)	
3	RK PPKD/RK SKPD	9.402.955.945,00	
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	177.425.791,68	
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	15.650.000,00	
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	
	-Penyisihan Piutang	-	
	-Akumulasi Penyusutan	(7.569.660,72)	
	-Akumulasi Amortisasi	-	
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	
11	KOREKSI UTANG PFK	-	
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	
13	EKUITAS AKHIR	618.273.366,67	

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	255.000.000,00	-	-	583.770.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	255.000.000,00	-	-	583.770.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	255.000.000,00	-	-	583.770.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.044.622.253,00	4.750.174.274,00	94,16	4.462.877.073,00
	Belanja Barang	5.887.036.600,00	5.528.781.606,00	93,91	4.323.129.083,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	10.931.658.853,00	10.278.955.880,00	94,03	8.786.006.156,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	18.191.000,00	17.250.000,00	94,83	165.425.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	42.001.198,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	18.191.000,00	17.250.000,00	94,83	207.426.198,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	10.949.849.853,00	10.296.205.880,00	94,03	8.993.432.354,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.949.849.853,00	10.296.205.880,00	94,03	8.993.432.354,00
	SURPLUS / DEFISIT	(10.694.849.853,00)	(10.296.205.880,00)	96,27	(8.409.662.354,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(10.694.849.853,00)	(10.296.205.880,00)	96,27	(8.409.662.354,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS TENAGA KERJA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	168.544.400,00	148.991.762,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	168.544.400,00	148.991.762,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	1.831.099.100,00	2.309.727.100,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	5.790.000,00	5.790.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.722.878.350,00)	(2.135.839.100,00)
	Jumlah Aset Tetap	114.010.750,00	179.678.000,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	411.318.050,00	321.387.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(261.791.637,50)	(199.671.500,00)
	Aset Lain-Lain	299.687.000,00	226.237.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	449.213.412,50	347.952.500,00
	JUMLAH ASET	731.768.562,50	676.622.262,50

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	45.003,00	70.977,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	45.003,00	70.977,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	45.003,00	70.977,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	731.723.559,50	676.551.285,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	731.768.562,50	676.622.262,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS TENAGA KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp 583.770.000,00	Rp (583.770.000,00)	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp 583.770.000,00	Rp (583.770.000,00)	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp 583.770.000,00	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.750.174.274,00	Rp 4.264.577.073,00	Rp 485.597.201,00	11,39
	Beban Persediaan	Rp 914.047.300,00	Rp 182.268.100,00	Rp 731.779.200,00	401,49
	Beban Jasa	Rp 4.129.139.444,50	Rp 3.276.278.796,00	Rp 852.860.648,50	26,03
	Beban Pemeliharaan	Rp 140.385.200,00	Rp 172.200.698,00	Rp (31.815.498,00)	-18,48
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 235.700.000,00	Rp 658.284.000,00	Rp (422.584.000,00)	-64,19
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 57.714.500,00	Rp 110.175.821,43	Rp (52.461.321,43)	-47,62
	Beban Amortisasi	Rp 62.120.137,50	Rp 80.346.750,00	Rp (18.226.612,50)	-22,68
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 765.000,00	Rp (765.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.289.280.856,00	Rp 8.744.896.238,43	Rp 1.544.384.617,57	17,66
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.289.280.856,00)	Rp (8.161.126.238,43)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (200.028.000,00)	Rp (459.021.370,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (200.028.000,00)	Rp (459.021.370,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (10.489.308.856,00)	Rp (8.620.147.608,43)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -	Rp -	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (10.489.308.856,00)	Rp (8.620.147.608,43)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS TENAGA KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	676.551.285,50	2.952.084.147,50
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(10.489.308.856,00)	(8.620.147.608,43)
3	RK PPKD/RK SKPD	10.296.205.880,00	8.409.662.354,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(217.400.000,00)	(2.222.000.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	(5.000.000,00)	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	470.675.250,00	156.952.392,43
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	731.723.559,50	676.551.285,50

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.938.638.742,00	5.439.942.362,00	78,40	-
	Belanja Barang	10.634.778.500,00	8.282.264.380,00	77,88	-
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	17.573.417.242,00	13.722.206.742,00	78,09	-
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	132.181.000,00	130.079.000,00	98,41	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	132.181.000,00	130.079.000,00	98,41	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	17.705.598.242,00	13.852.285.742,00	78,24	-

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.705.598.242,00	13.852.285.742,00	78,24	
					-
	SURPLUS / DEFISIT	(17.705.598.242,00)	(13.852.285.742,00)	78,24	
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(17.705.598.242,00)	(13.852.285.742,00)	78,24	-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	250.000,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	101.067.099,17	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	172.781.116,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	274.098.215,17	
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.160.655.674,15	-
	Gedung dan Bangunan	645.033.000,00	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.999.380,62	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(3.983.468.968,51)	-
	Jumlah Aset Tetap	826.219.086,26	
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	32.640.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi	(32.640.000,00)	-
	Aset Lain-Lain	350.287.982,33	-
	Jumlah Aset Lainnya	350.287.982,33	
	JUMLAH ASET	1.450.605.283,76	

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	
	Utang Bunga	-	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	
	Utang Belanja	546.291,00	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	546.291,00	
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	
	Utang Luar Negeri	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	546.291,00	
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.450.058.992,76	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.450.605.283,76	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 211.377.874,00		Rp 211.377.874,00	#DIV/0!
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 211.377.874,00		Rp 211.377.874,00	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 211.377.874,00		Rp 211.377.874,00	#DIV/0!
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.439.942.362,00		Rp 5.439.942.362,00	#DIV/0!
	Beban Persediaan	Rp 2.425.963.408,56		Rp 2.425.963.408,56	#DIV/0!
	Beban Jasa	Rp 5.402.674.806,16		Rp 5.402.674.806,16	#DIV/0!
	Beban Pemeliharaan	Rp 149.692.500,00		Rp 149.692.500,00	#DIV/0!
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 570.728.716,00		Rp 570.728.716,00	#DIV/0!
	Beban Bunga	Rp -		Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -		Rp -	
	Beban Hibah	Rp -		Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -		Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 256.362.837,02		Rp 256.362.837,02	#DIV/0!
	Beban Amortisasi	Rp -		Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -		Rp -	
	Beban Transfer	Rp -		Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -		Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 14.245.364.629,74		Rp 14.245.364.629,74	#DIV/0!
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (14.033.986.755,74)			
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (132.745.026,46)			
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (132.745.026,46)			
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (14.166.731.782,20)			
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -			
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (14.166.731.782,20)			

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	-	
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(14.166.731.782,20)	
3	RK PPKD/RK SKPD	13.852.535.742,00	
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	1.254.137.217,83	
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	408.577.250,00	
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	
	-Penyisihan Piutang	-	
	-Akumulasi Penyusutan	101.540.565,13	
	-Akumulasi Amortisasi	-	
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	
11	KOREKSI UTANG PFK	-	
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	
13	EKUITAS AKHIR	1.450.058.992,76	-

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43	263.827.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43	263.827.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	285.560.000,00	312.492.500,00	109,43	263.827.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.674.052.425,00	7.884.428.665,00	90,90	7.607.760.017,00
	Belanja Barang	3.928.128.628,00	3.564.333.548,00	90,74	3.324.144.424,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	12.602.181.053,00	11.448.762.213,00	90,85	10.931.904.441,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	28.983.000,00	28.284.000,00	97,59	215.650.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	161.557.430,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	-
	Jumlah Belanja Modal	35.103.000,00	34.404.000,00	98,01	377.207.430,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	12.637.284.053,00	11.483.166.213,00	90,87	11.309.111.871,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER	-	-	-	-
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer				
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.637.284.053,00	11.483.166.213,00	90,87	11.309.111.871,00
	SURPLUS / DEFISIT	(12.351.724.053,00)	(11.170.673.713,00)	90,44	(11.045.284.871,00)
IV	PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.351.724.053,00)	(11.170.673.713,00)	90,44	(11.045.284.871,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	12.298.155,83	12.566.262,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	664.630.862,00	722.590.459,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	676.929.017,83	735.156.721,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	14.252.840.000,00	14.252.840.000,00
	Peralatan dan Mesin	4.549.834.886,41	5.174.189.218,99
	Gedung dan Bangunan	12.438.498.256,10	12.438.498.256,10
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.149.277.550,00	4.149.277.550,00
	Aset Tetap Lainnya	270.975.000,00	270.975.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.351.298.795,52)	(9.466.876.185,37)
	Jumlah Aset Tetap	26.310.126.896,99	26.818.903.839,72
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	51.975.455,00	51.975.455,00
	Akumulasi Amortisasi	(51.975.455,00)	(51.975.455,00)
	Aset Lain-Lain	675.148.332,58	8.950.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	675.148.332,58	8.950.000,00
	JUMLAH ASET	27.662.204.247,40	27.563.010.561,22

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	6.338.496,00	7.174.139,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.338.496,00	7.174.139,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.338.496,00	7.174.139,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	27.655.865.751,40	27.555.836.422,22
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	27.662.204.247,40	27.563.010.561,22

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 312.492.500,00	Rp 263.827.000,00	Rp 48.665.500,00	18,44599
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 312.492.500,00	Rp 263.827.000,00	Rp 48.665.500,00	18,44599
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 312.492.500,00	Rp 263.827.000,00	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.884.428.665,00	Rp 7.278.160.017,00	Rp 606.268.648,00	8,33
	Beban Persediaan	Rp 1.338.823.673,00	Rp 900.459.104,00	Rp 438.364.569,00	48,68
	Beban Jasa	Rp 1.876.089.398,67	Rp 2.111.884.027,50	Rp (235.794.628,83)	-11,17
	Beban Pemeliharaan	Rp 248.987.602,00	Rp 106.274.430,00	Rp 142.713.172,00	134,29
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 164.669.935,00	Rp 74.489.000,00	Rp 90.180.935,00	121,07
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 551.689.488,15	Rp 670.339.945,73	Rp (118.650.457,58)	-17,70
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 2.000.000,00	Rp (2.000.000,00)	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 2.100.000,00	Rp (2.100.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.064.688.761,82	Rp 11.145.706.524,23	Rp 918.982.237,59	8,25
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (11.752.196.261,82)	Rp (10.881.879.524,23)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (8.950.000,00)	Rp (180.900.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (8.950.000,00)	Rp (180.900.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (11.761.146.261,82)	Rp (11.062.779.524,23)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (11.761.146.261,82)	Rp (11.062.779.524,23)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	27.555.836.422,22	27.634.088.968,09
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(11.761.146.261,82)	(11.062.779.524,23)
3	RK PPKD/RK SKPD	11.170.673.713,00	11.045.284.871,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	23.235.000,00	(32.236.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	667.266.878,00	(28.521.892,65)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	27.655.865.751,40	27.555.836.422,22

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55	2.154.402.900,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55	2.154.402.900,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.465.000.000,00	2.823.713.906,00	114,55	2.154.402.900,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.737.875.956,00	12.486.538.585,00	98,03	11.208.960.620,00
	Belanja Barang	36.248.273.994,00	30.802.376.309,00	84,98	31.641.395.218,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	48.986.149.950,00	43.288.914.894,00	88,37	42.850.355.838,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.222.359.000,00	4.950.400.466,00	94,79	5.055.771.650,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	200.400.000,00	197.954.900,00	98,78	621.673.138,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	200.000.000,00	198.849.600,00	99,42	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	5.622.759.000,00	5.347.204.966,00	95,10	5.677.444.788,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	54.608.908.950,00	48.636.119.860,00	89,06	48.527.800.626,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	54.608.908.950,00	48.636.119.860,00	89,06	48.527.800.626,00
	SURPLUS / DEFISIT	(52.143.908.950,00)	(45.812.405.954,00)	87,86	(46.373.397.726,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(52.143.908.950,00)	(45.812.405.954,00)	87,86	(46.373.397.726,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	800.000,00	650.000,00
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	45.812.500,00	31.548.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(16.578.665,00)	(14.074.815,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	589.850.537,50	462.284.162,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	198.844.440,00	493.088.160,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	818.728.812,50	973.495.507,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	21.755.801.960,00	21.755.801.960,00
	Peralatan dan Mesin	37.071.492.007,76	36.504.718.805,76
	Gedung dan Bangunan	11.937.610.263,00	11.952.624.363,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.522.787.791,00	5.323.938.191,00
	Aset Tetap Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	49.225.000,00	49.225.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(32.479.348.303,53)	(34.307.562.206,06)
	Jumlah Aset Tetap	43.866.368.718,23	41.287.546.113,70
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	349.472.000,00	86.680.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(152.378.000,00)	(86.680.000,00)
	Aset Lain-Lain	3.489.553.029,28	5.319.250.470,28
	Jumlah Aset Lainnya	3.686.647.029,28	5.319.250.470,28
	JUMLAH ASET	48.371.744.560,01	47.580.292.091,48

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	5.857.550,00	4.711.337,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	314.689.320,00	379.623.150,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	320.546.870,00	384.334.487,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	320.546.870,00	384.334.487,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	48.051.197.690,01	47.195.957.604,48
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	48.371.744.560,01	47.580.292.091,48

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	-	-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.837.978.406,00	Rp 2.154.402.900,00	Rp 683.575.506,00	31,7292
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	-	-	
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.837.978.406,00	Rp 2.154.402.900,00	Rp 683.575.506,00	31,7292
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	-	-	
	Dana Alokasi Umum	Rp -	-	-	
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	-	-	
	Dana Penyesuaian	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	-	-	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	-	-	
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	-	-	
	Pendapatan Lainnya	Rp -	-	-	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.837.978.406,00	Rp 2.154.402.900,00	Rp 683.575.506,00	
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 12.486.538.585,00	Rp 10.791.410.620,00	Rp 1.695.127.965,00	15,71
	Beban Persediaan	Rp 7.148.641.744,00	Rp 2.377.030.483,00	Rp 4.771.611.261,00	200,74
	Beban Jasa	Rp 18.883.553.597,00	Rp 24.978.343.254,16	Rp (6.094.789.657,16)	-24,40
	Beban Pemeliharaan	Rp 4.401.192.579,00	Rp 3.563.902.208,00	Rp 837.290.371,00	23,49
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 208.602.117,00	Rp 255.917.000,00	Rp (47.314.883,00)	-18,49
	Beban Bunga	Rp -	-	-	
	Beban Subsidi	Rp -	-	-	
	Beban Hibah	Rp -	-	-	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	-	-	
	Beban Penyusutan	Rp 2.642.226.376,37	Rp 3.340.057.073,91	Rp (697.830.697,54)	-20,89
	Beban Amortisasi	Rp 65.698.000,00	Rp 21.670.000,00	Rp 44.028.000,00	203,17
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 2.503.850,00	Rp 7.030.847,50	Rp (4.526.997,50)	-64,39
	Beban Transfer	Rp -	-	-	
	Beban Lain-lain	Rp -	2.970.000,00	Rp (2.970.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 45.838.956.848,37	Rp 45.338.331.486,57	Rp 500.625.361,80	1,10
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (43.000.978.442,37)	Rp (43.183.928.586,57)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	-	-	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	-	-	
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	-	-	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	-	-	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (6.505.552.705,00)	-	-	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (6.505.552.705,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (49.506.531.147,37)	Rp (43.183.928.586,57)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (49.506.531.147,37)	Rp (43.183.928.586,57)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	47.195.957.604,48	45.701.706.146,20
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(49.506.531.147,37)	(43.183.928.586,57)
3	RK PPKD/RK SKPD	45.812.555.954,00	46.374.047.726,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	(2.341.500,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(18.747.960,00)
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	78.775.000,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	4.470.440.278,90	(1.674.778.221,15)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	48.051.197.690,01	47.195.957.604,48

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.365.913.108,00	6.215.751.964,00	84,39	6.094.500.138,00
	Belanja Barang	3.318.837.400,00	3.229.945.886,00	97,32	3.470.304.341,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	10.684.750.508,00	9.445.697.850,00	88,40	9.564.804.479,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	243.683.000,00	209.875.900,00	86,13	428.998.400,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.157.000,00	7.012.000,00	97,97	30.760.000,00
	Jumlah Belanja Modal	250.840.000,00	216.887.900,00	86,46	459.758.400,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	10.935.590.508,00	9.662.585.750,00	88,36	10.024.562.879,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.935.590.508,00	9.662.585.750,00	88,36	10.024.562.879,00
	SURPLUS / DEFISIT	(10.935.590.508,00)	(9.662.585.750,00)	88,36	(10.024.562.879,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(10.935.590.508,00)	(9.662.585.750,00)	88,36	(10.024.562.879,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	86.854.043,33	87.273.470,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	779.414.335,89	1.261.693.160,89
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	866.268.379,22	1.348.966.631,72
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	8.586.441.200,00	9.423.315.048,00
	Gedung dan Bangunan	41.036.000,00	41.036.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	186.635.000,00	186.635.000,00
	Aset Tetap Lainnya	48.674.800,00	48.674.800,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(8.117.262.199,85)	(8.904.268.942,21)
	Jumlah Aset Tetap	745.524.800,15	795.391.905,79
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	384.974.250,00	263.974.250,00
	Akumulasi Amortisasi	(278.810.500,00)	(216.981.012,50)
	Aset Lain-Lain	595.810.748,00	15.000.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	701.974.498,00	61.993.237,50
	JUMLAH ASET	2.313.767.677,37	2.206.351.775,01

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	502.212,00	113.431,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	502.212,00	113.431,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	502.212,00	113.431,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.313.265.465,37	2.206.238.344,01
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.313.767.677,37	2.206.351.775,01

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.215.751.964,00	Rp 5.847.200.138,00	Rp 368.551.826,00	6,30
	Beban Persediaan	Rp 1.687.804.465,00	Rp 2.055.657.694,11	Rp (367.853.229,11)	-17,89
	Beban Jasa	Rp 1.235.793.532,50	Rp 1.758.600.177,17	Rp (522.806.644,67)	-29,73
	Beban Pemeliharaan	Rp 351.955.650,00	Rp 265.098.860,00	Rp 86.856.790,00	32,76
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 302.071.272,00	Rp 304.029.050,00	Rp (1.957.778,00)	-0,64
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 327.271.276,14	Rp 679.843.191,15	Rp (352.571.915,01)	-51,86
	Beban Amortisasi	Rp 61.829.487,50	Rp 54.166.987,50	Rp 7.662.500,00	14,15
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 2.600.000,00	Rp (2.600.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.182.477.647,14	Rp 10.967.196.097,93	Rp (784.718.450,79)	-7,16
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.182.477.647,14)	Rp (10.967.196.097,93)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (202.301.000,00)	Rp (199.063.793,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (202.301.000,00)	Rp (199.063.793,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (10.384.778.647,14)	Rp (11.166.259.890,93)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (10.384.778.647,14)	Rp (11.166.259.890,93)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	2.206.238.344,01	3.462.035.356,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(10.384.778.647,14)	(11.166.259.890,93)
3	RK PPKD/RK SKPD	9.662.585.750,00	10.024.562.879,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(14.408.000,00)	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(270.650.000,00)	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.114.278.018,50	(114.100.000,06)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	2.313.265.465,37	2.206.238.344,01

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90	1.529.391.040,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90	1.529.391.040,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.530.500.000,00	1.620.789.100,00	105,90	1.529.391.040,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.333.231.497,00	9.426.092.550,00	91,22	9.346.093.418,00
	Belanja Barang	20.043.133.727,00	18.270.220.052,00	91,15	19.045.116.908,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	30.376.365.224,00	27.696.312.602,00	91,18	28.391.210.326,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	479.281.740,00	435.400.240,00	90,84	318.968.100,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	167.754.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.710.173.480,00	2.676.486.324,00	-	3.476.603.600,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	3.189.455.220,00	3.111.886.564,00	97,57	3.963.325.700,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	33.565.820.444,00	30.808.199.166,00	91,78	32.354.536.026,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	33.565.820.444,00	30.808.199.166,00	91,78	32.354.536.026,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(32.035.320.444,00)	(29.187.410.066,00)	91,11	(30.825.144.986,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(32.035.320.444,00)	(29.187.410.066,00)	91,11	(30.825.144.986,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	3.950.000,00	2.900.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.245.000,00)	(2.900.000,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	160.070.333,34	120.801.804,58
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	14.148.000,00	14.148.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(14.148.000,00)	(14.148.000,00)
	Persediaan	2.122.443.697,28	2.687.119.484,10
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	2.283.219.030,62	2.807.921.288,68
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	8.319.000.000,00	8.319.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	38.359.948.480,00	39.400.414.270,00
	Gedung dan Bangunan	14.101.060.100,00	14.101.060.100,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57.562.040.521,00	55.992.015.038,00
	Aset Tetap Lainnya	3.765.000,00	3.765.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(65.559.769.101,26)	(59.722.123.814,49)
	Jumlah Aset Tetap	52.786.044.999,74	58.094.130.593,51
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	355.089.395,00	334.344.050,00
	Akumulasi Amortisasi	(339.530.386,25)	(334.344.050,00)
	Aset Lain-Lain	2.609.797.421,00	127.020.550,00
	Jumlah Aset Lainnya	2.625.356.429,75	127.020.550,00
	JUMLAH ASET	57.694.620.460,11	61.029.072.432,19

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	766.352.769,00	649.927.815,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	766.352.769,00	649.927.815,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	766.352.769,00	649.927.815,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	56.928.267.691,11	60.379.144.617,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	57.694.620.460,11	61.029.072.432,19

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.621.689.100	Rp 1.529.241.040	92.448.060,00	6,045356
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.621.689.100	Rp 1.529.241.040	92.448.060,00	6,04536
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.621.689.100	Rp 1.529.241.040	Rp 92.448.060	6,04536
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.426.092.550,00	Rp 8.961.343.418	Rp 464.749.132	5,19
	Beban Persediaan	Rp 4.532.018.127,81	Rp 2.314.310.444	Rp 2.217.707.684	95,83
	Beban Jasa	Rp 12.989.205.183,24	Rp 14.397.526.453	Rp (1.408.321.270)	-9,78
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.195.484.872,00	Rp 1.517.135.830	Rp (321.650.958)	-21,20
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 174.598.736,00	Rp 242.773.866	Rp (68.175.130)	-28,08
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 7.655.167.830,52	Rp 7.569.397.554	Rp 85.770.277	1,13
	Beban Amortisasi	Rp 5.186.336	Rp -	Rp 5.186.336	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 345.000	Rp -	Rp 345.000	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 35.978.098.635,82	Rp 35.002.487.564,60	Rp 975.611.071,23	Rp 2,79
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (34.356.409.535,82)	Rp (33.473.246.524,60)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (34.356.409.536)	Rp (33.473.246.525)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (34.356.409.535,82)	Rp (33.473.246.525)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	60.379.144.617,19	67.874.286.365,67
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(34.356.409.535,82)	(33.473.246.524,60)
3	RK PPKD/RK SKPD	29.187.410.066,00	30.825.144.986,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	(150.000,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(0,00)	46.164.498,10
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(99.550.000,00)	189.853.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	150.000,00	75.750,00
	-Akumulasi Penyusutan	1.817.522.543,75	(5.082.983.457,99)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	56.928.267.691,11	60.379.144.617,19

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	431.612.791,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	431.612.791,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	431.612.791,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	-	-	-	7.590.421.984,00
	Belanja Barang	-	-	-	5.115.652.618,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	-	-	-	12.706.074.602,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	3.601.446.943,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	843.482.041,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	91.554.675,00
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-	4.536.483.659,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	17.242.558.261,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	-	-	-	17.242.558.261,00
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	(16.810.945.470,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	(16.810.945.470,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	140.400,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	129.801.858,59
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	847.400,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	-	130.789.658,59
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	98.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	-	11.453.964.707,00
	Gedung dan Bangunan	-	2.539.810.191,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	220.487.300,00
	Aset Tetap Lainnya	-	1.247.618.431,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	(8.151.611.664,72)
	Jumlah Aset Tetap	-	7.408.268.964,28
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	1.006.929.683,00
	Akumulasi Amortisasi	-	(997.017.308,00)
	Aset Lain-Lain	-	337.379.000,10
	Jumlah Aset Lainnya	-	347.291.375,10
	JUMLAH ASET	-	7.886.349.997,97

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	-	7.886.349.997,97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-	7.886.349.997,97

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	- Rp 259.404.580		
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	- Rp 259.404.580		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp	- Rp	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp	- Rp	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	- Rp	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	- Rp	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp	- Rp	-	
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	- Rp	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	- Rp 259.404.580		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp	- Rp 7.253.221.984,00	Rp (7.253.221.984,00)	-100,00
	Beban Persediaan	Rp	- Rp 304.974.950,00	Rp (304.974.950,00)	-100,00
	Beban Jasa	Rp	- Rp 4.434.620.193,91	Rp (4.434.620.193,91)	-100,00
	Beban Pemeliharaan	Rp	- Rp 102.908.200,00	Rp (102.908.200,00)	-100,00
	Beban Perjalanan Dinas	Rp	- Rp 205.271.553,00	Rp (205.271.553,00)	-100,00
	Beban Bunga	Rp	- Rp	Rp	-
	Beban Subsidi	Rp	- Rp	Rp	-
	Beban Hibah	Rp	- Rp	Rp	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp	- Rp	Rp	-
	Beban Penyusutan	Rp	- Rp 1.016.248.311,10	Rp (1.016.248.311,10)	-100,00
	Beban Amortisasi	Rp	- Rp 46.622.420,75	Rp (46.622.420,75)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp	- Rp	Rp	-
	Beban Transfer	Rp	- Rp	Rp	-
	Beban Lain-lain	Rp	- Rp	Rp	-
	JUMLAH BEBAN	Rp	- Rp 13.363.867.612,76	Rp (13.363.867.612,76)	-100,00
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp	- Rp (13.104.463.032,76)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	- Rp	-	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp	- Rp	-	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp	- Rp (13.104.463.032,76)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp	- Rp	-	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp	- Rp (13.104.463.032,76)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	7.886.349.997,97	4.201.620.215,25
2	SURPLUS/DEFISIT LO	-	(13.104.463.032,76)
3	RK PPKD/RK SKPD	-	16.811.085.870,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	(7.886.349.997,97)	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	17.220.821,10
	-Akumulasi Penyusutan	-	(39.113.875,61)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	0,00	7.886.349.997,97

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	400.000.000,00	470.250.161,00	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	470.250.161,00	-	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	400.000.000,00	470.250.161,00	-	
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.208.866.760,00	5.397.490.456,00	86,93	
	Belanja Barang	6.039.461.600,00	5.772.589.471,00	95,58	
	Belanja Bunga	-	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	-	
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
	Jumlah Belanja Operasi	12.248.328.360,00	11.170.079.927,00	91,20	
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.380.437.320,00	613.520.250,00	44,44	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Belanja Modal	1.380.437.320,00	613.520.250,00	44,44	
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	13.628.765.680,00	11.783.600.177,00	86,46	

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	
	Jumlah Transfer	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.628.765.680,00	11.783.600.177,00	86,46	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.228.765.680,00)	(11.313.350.016,00)	85,52	
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(13.228.765.680,00)	(11.313.350.016,00)	85,52	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	140.400,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	24.980.900,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.498.090,00)	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	14.310.768,33	129.801.858,59
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	847.400,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	36.793.578,33	130.789.658,59
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	98.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	9.826.749.679,00	11.453.964.707,00
	Gedung dan Bangunan	1.006.158.191,00	2.539.810.191,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220.487.300,00	220.487.300,00
	Aset Tetap Lainnya	-	1.247.618.431,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(7.299.007.961,23)	(8.151.611.664,72)
	Jumlah Aset Tetap	3.754.387.208,77	7.408.268.964,28
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.006.929.683,00	1.006.929.683,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.006.929.683,00)	(997.017.308,00)
	Aset Lain-Lain	363.732.500,10	337.379.000,10
	Jumlah Aset Lainnya	363.732.500,10	347.291.375,10
	JUMLAH ASET	4.154.913.287,20	7.886.349.997,97

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	4.154.913.287,20	7.886.349.997,97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.154.913.287,20	7.886.349.997,97

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 495.231.061	Rp 259.404.580		
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 495.231.061	Rp 259.404.580		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 495.231.061	Rp 259.404.580		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.397.490.456,00	Rp 7.253.221.984,00	Rp (1.855.731.528,00)	-25,58
	Beban Persediaan	Rp 533.339.448,00	Rp 304.974.950,00	Rp 228.364.498,00	74,88
	Beban Jasa	Rp 4.834.950.202,42	Rp 4.434.620.193,91	Rp 400.330.008,51	9,03
	Beban Pemeliharaan	Rp 277.799.600,00	Rp 102.908.200,00	Rp 174.891.400,00	169,95
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 226.803.195,00	Rp 205.271.553,00	Rp 21.531.642,00	10,49
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 961.485.807,36	Rp 1.016.248.311,10	Rp (54.762.503,74)	-5,39
	Beban Amortisasi	Rp 9.912.375,00	Rp 46.622.420,75	Rp (36.710.045,75)	-78,74
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 2.498.090,00	Rp -	Rp 2.498.090,00	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.244.279.173,78	Rp 13.363.867.612,76	Rp (1.119.588.438,98)	-8,38
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (11.749.048.112,78)	Rp (13.104.463.032,76)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (191.791.520,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (191.791.520,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (11.940.839.632,78)	Rp (13.104.463.032,76)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (11.940.839.632,78)	Rp (13.104.463.032,76)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	-	4.201.620.215,25
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(11.940.839.632,78)	(13.104.463.032,76)
3	RK PPKD/RK SKPD	11.313.209.616,00	16.811.085.870,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	4.868.458.893,73	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	155.310.000,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	17.220.821,10
	-Akumulasi Penyusutan	(241.225.589,75)	(39.113.875,61)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	4.154.913.287,20	7.886.349.997,97

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25	1.552.574.234,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25	1.552.574.234,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	733.502.750,00	122,25	1.552.574.234,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.751.704.805,00	6.399.150.937,00	94,78	6.076.232.910,00
	Belanja Barang	9.313.109.758,00	6.524.736.639,00	70,06	5.361.563.016,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	16.064.814.563,00	12.923.887.576,00	80,45	11.437.795.926,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	379.481.000,00	250.068.616,00	65,90	3.216.612.532,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	11.199.131.311,00	9.027.915.313,00	80,61	13.560.482.737,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	42.083.000,00	19.710.000,00	46,84	60.146.000,00
	Jumlah Belanja Modal	11.620.695.311,00	9.297.693.929,00	80,01	16.837.241.269,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	27.685.509.874,00	22.221.581.505,00	80,26	28.275.037.195,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	27.685.509.874,00	22.221.581.505,00	80,26	28.275.037.195,00
	SURPLUS / DEFISIT	(27.085.509.874,00)	(21.488.078.755,00)	79,33	(26.722.462.961,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(27.085.509.874,00)	(21.488.078.755,00)	79,33	(26.722.462.961,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	161.325.035,00	158.039.285,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(154.805.087,00)	(155.442.360,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	87.502.500,00	49.199.637,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	15.540.000,00	152.798.890,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	109.562.448,00	204.595.452,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	6.593.063.618,00	8.133.261.066,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	4.440.000,00	4.440.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	23.992.481.800,00	15.464.032.800,00
	Akumulasi Penyusutan	(4.148.809.239,84)	(5.059.150.954,81)
	Jumlah Aset Tetap	26.441.176.178,16	18.542.582.911,19
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	819.692.900,00	787.192.900,00
	Akumulasi Amortisasi	(556.005.200,00)	(393.566.975,00)
	Aset Lain-Lain	1.341.696.144,86	345.805.799,86
	Jumlah Aset Lainnya	1.605.383.844,86	739.431.724,86
	JUMLAH ASET	28.156.122.471,02	19.486.610.088,55

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	66.292.850,00	350.723.441,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	66.292.850,00	350.723.441,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	66.292.850,00	350.723.441,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	28.089.829.621,02	19.135.886.647,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	28.156.122.471,02	19.486.610.088,55

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 733.502.750,00	Rp 1.552.574.234,00	Rp (819.071.484,00)	-52,76
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 733.502.750,00	Rp 1.552.574.234,00	Rp (819.071.484,00)	-52,76
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 733.502.750,00	Rp 1.552.574.234,00	Rp (819.071.484,00)	-52,76
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.399.150.937,00	Rp 5.804.482.910,00	Rp 594.668.027,00	10,24
	Beban Persediaan	Rp 2.104.120.190,00	Rp 459.248.100,00	Rp 1.644.872.090,00	358,17
	Beban Jasa	Rp 4.352.727.462,50	Rp 2.610.581.375,50	Rp 1.742.146.087,00	66,73
	Beban Pemeliharaan	Rp 161.641.000,00	Rp 80.177.675,00	Rp 81.463.325,00	101,60
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 187.739.736,00	Rp 172.940.897,00	Rp 14.798.839,00	8,56
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 932.579.192,60	Rp 542.740.641,83	Rp 389.838.550,77	71,83
	Beban Amortisasi	Rp 162.438.225,00	Rp 187.163.225,00	Rp (24.725.000,00)	-13,21
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 28.496.160,00	Rp (28.496.160,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 14.300.396.743,10	Rp 9.885.830.984,33	Rp 4.414.565.758,77	44,66
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (13.566.893.993,10)	Rp (8.333.256.750,33)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (814.085.719,00)	Rp (274.500.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (814.085.719,00)	Rp (274.500.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (14.380.979.712,10)	Rp (8.607.756.750,33)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (14.380.979.712,10)	Rp (8.607.756.750,33)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	19.135.886.647,55	1.435.153.268,82
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(14.380.979.712,10)	(8.607.756.750,33)
3	RK PPKD/RK SKPD	21.488.078.755,00	26.722.462.961,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	3.285.750,00	(488.625.756,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	637.273,00	38.276.491,05
	-Akumulasi Penyusutan	1.842.920.907,57	36.376.433,01
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	28.089.829.621,02	19.135.886.647,55

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.681.699.455,00	4.565.519.900,00	97,52	4.151.918.547,00
	Belanja Barang	12.775.270.979,00	10.054.557.348,00	78,70	5.404.396.387,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	14.000.000.000,00	13.844.954.364,00	-	8.049.628.750,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	31.456.970.434,00	28.465.031.612,00	90,49	17.605.943.684,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	5.436.160.100,00	77.500.000,00	-	379.076.400,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	410.535.000,00	394.880.040,00	96,19	282.670.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	7.831.909.550,00	7.393.788.707,00	-	2.753.655.625,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	13.678.604.650,00	7.866.168.747,00	57,51	3.415.402.025,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	45.135.575.084,00	36.331.200.359,00	80,49	21.021.345.709,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	45.135.575.084,00	36.331.200.359,00	80,49	21.021.345.709,00
	SURPLUS / DEFISIT	(45.135.575.084,00)	(36.331.200.359,00)	80,49	(21.021.345.709,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(45.135.575.084,00)	(36.331.200.359,00)	80,49	(21.021.345.709,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	20201
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	155.045.636,00	115.661.521,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	182.201.250,00	271.364.104,16
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	337.246.886,00	387.025.625,16
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	27.344.959.050,00	28.617.459.050,00
	Peralatan dan Mesin	2.243.836.646,00	1.962.538.996,00
	Gedung dan Bangunan	5.680.434.666,00	2.318.431.500,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	245.025.000,00	245.025.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.108.804.370,00	3.848.565.175,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.979.694.084,55)	(1.791.162.945,14)
	Jumlah Aset Tetap	40.643.365.647,45	35.200.856.775,86
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	117.150.000,00	34.650.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(55.275.000,00)	(34.650.000,00)
	Aset Lain-Lain	39.572.500,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	101.447.500,00	-
	JUMLAH ASET	41.082.060.033,45	35.587.882.401,02

No.	Uraian	2022	20201
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.678.361,00	1.096.511.569,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.678.361,00	1.096.511.569,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.678.361,00	1.096.511.569,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	41.080.381.672,45	34.491.370.832,02
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	41.082.060.033,45	35.587.882.401,02

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.565.519.900,00	Rp 3.978.100.547,00	Rp 587.419.353,00	14,77
	Beban Persediaan	Rp 3.020.374.144,00	Rp 448.772.700,00	Rp 2.571.601.444,00	573,03
	Beban Jasa	Rp 4.406.031.319,16	Rp 3.954.446.945,17	Rp 451.584.373,99	11,42
	Beban Pemeliharaan	Rp 393.389.104,00	Rp 155.692.500,00	Rp 237.696.604,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.765.396.663,00	Rp 709.140.610,00	Rp 1.056.256.053,00	148,95
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 13.844.954.364,00	Rp 8.049.628.750,00	Rp 5.795.325.614,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 346.956.509,66	Rp 231.269.151,83	Rp 115.687.357,83	50,02
	Beban Amortisasi	Rp 20.625.000,00	Rp 8.662.500,00	Rp 11.962.500,00	138,10
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 28.363.247.003,82	Rp 17.535.713.704,00	Rp 10.827.533.299,82	61,75
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (28.363.247.003,82)	Rp (17.535.713.704,00)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (60.913.000,00)	Rp (354.660.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (60.913.000,00)	Rp (354.660.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (28.424.160.003,82)	Rp (17.890.373.704,00)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (28.424.160.003,82)	Rp (17.890.373.704,00)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	34.491.370.832,02	29.187.631.917,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(28.424.160.003,82)	(17.890.373.704,00)
3	RK PPKD/RK SKPD	36.370.584.474,00	21.137.007.230,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.515.839.000,00)	2.348.239.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	158.425.370,25	(291.133.611,31)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	41.080.381.672,45	34.491.370.832,02

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS ARSIP DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.198.309.027,00	2.997.745.645,00	57,67	-
	Belanja Barang	1.856.774.200,00	1.465.878.368,00	78,95	-
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	7.055.083.227,00	4.463.624.013,00	63,27	-
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	202.150.800,00	190.029.000,00	94,00	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	114.999.000,00	101.492.000,00	88,25	-
	Jumlah Belanja Modal	317.149.800,00	291.521.000,00	91,92	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	7.372.233.027,00	4.755.145.013,00	64,50	-

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.372.233.027,00	4.755.145.013,00	64,50	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.372.233.027,00)	(4.755.145.013,00)	64,50	
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(7.372.233.027,00)	(4.755.145.013,00)	64,50	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS ARSIP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	45.203.293,75	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	59.927.875,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	105.131.168,75	
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	98.000.000,00	-
	Peralatan dan Mesin	2.034.056.429,00	-
	Gedung dan Bangunan	1.533.652.000,00	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	1.349.110.431,00	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.066.821.623,05)	-
	Jumlah Aset Tetap	2.947.997.236,95	
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	423.046.419,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	423.046.419,00	
	JUMLAH ASET	3.476.174.824,70	

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	3.476.174.824,70	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.476.174.824,70	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS ARSIP DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -			
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -			
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -			
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -			
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -			
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -			
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -			
2	<u>BEBAN</u>				
	Beban Pegawai	Rp 2.997.745.645,00		Rp 2.997.745.645,00	#DIV/0!
	Beban Persediaan	Rp 451.265.929,00		Rp 451.265.929,00	#DIV/0!
	Beban Jasa	Rp 722.372.226,09		Rp 722.372.226,09	#DIV/0!
	Beban Pemeliharaan	Rp 23.795.000,00		Rp 23.795.000,00	#DIV/0!
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 181.464.560,00		Rp 181.464.560,00	#DIV/0!
	Beban Bunga	Rp -		Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -		Rp -	
	Beban Hibah	Rp -		Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -		Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 195.182.816,43		Rp 195.182.816,43	#DIV/0!
	Beban Amortisasi	Rp -		Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -		Rp -	
	Beban Transfer	Rp -		Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -		Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 4.571.826.176,52		Rp 4.571.826.176,52	#DIV/0!
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (4.571.826.176,52)			
	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (82.611.410,00)			
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (82.611.410,00)			
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (4.654.437.586,52)			
4	<u>POS LUAR BIASA</u>				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -			
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (4.654.437.586,52)			

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS ARSIP DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	-	
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(4.654.437.586,52)	
3	RK PPKD/RK SKPD	4.755.145.013,00	
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	3.017.891.104,24	
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	173.900.000,00	
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	
	-Penyisihan Piutang	-	
	-Akumulasi Penyusutan	183.676.293,98	
	-Akumulasi Amortisasi	-	
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	
11	KOREKSI UTANG PFK	-	
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	
13	EKUITAS AKHIR	3.476.174.824,70	

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.717.197.500,00	1.905.673.075,00	110,98	1.710.256.225,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	9.088.686,00	-	7.070.277,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.717.197.500,00	1.914.761.761,00	111,51	1.717.326.502,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.717.197.500,00	1.914.761.761,00	111,51	1.717.326.502,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.045.992.700,00	8.567.063.312,00	94,71	8.388.826.728,00
	Belanja Barang	14.921.675.500,00	13.640.079.094,00	91,41	14.438.317.185,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	410.574.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	23.967.668.200,00	22.207.142.406,00	92,65	23.237.717.913,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	104.424.200,00	85.151.640,00	81,54	976.220.150,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.002.800.000,00	963.297.473,00	96,06	377.084.489,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.107.224.200,00	1.048.449.113,00	94,69	1.353.304.639,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	25.074.892.400,00	23.255.591.519,00	92,74	24.591.022.552,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	25.074.892.400,00	23.255.591.519,00	92,74	24.591.022.552,00
	SURPLUS / DEFISIT	(23.357.694.900,00)	(21.340.829.758,00)	91,37	(22.873.696.050,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(23.357.694.900,00)	(21.340.829.758,00)	91,37	(22.873.696.050,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN NERACA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECILDAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	117.948.225,00	86.411.700,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(71.758.437,25)	(35.289.205,88)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	44.452.778,33	21.350.125,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	183.509.525,00	183.509.525,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(183.509.525,00)	(183.509.525,00)
	Persediaan	-	82.752.900,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	90.642.566,08	155.225.519,12
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	9.272.750.000,00	9.272.750.000,00
	Peralatan dan Mesin	14.730.818.867,98	15.334.545.508,98
	Gedung dan Bangunan	161.595.309.924,00	160.652.340.356,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.574.060.725,00	1.574.060.725,00
	Aset Tetap Lainnya	364.050.825,00	364.050.825,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(40.428.019.106,02)	(38.683.527.826,09)
	Jumlah Aset Tetap	147.108.971.235,96	148.514.219.588,89
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	636.943.400,00	498.426.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(426.705.225,00)	(284.969.250,00)
	Aset Lain-Lain	850.078.527,00	185.198.027,00
	Jumlah Aset Lainnya	1.060.316.702,00	398.655.277,00
	JUMLAH ASET	148.259.930.504,04	149.068.100.385,01

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	52.552.602,00	53.104.368,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	52.552.602,00	53.104.368,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	52.552.602,00	53.104.368,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	148.207.377.902,04	149.014.996.017,02
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	148.259.930.504,04	149.068.100.385,02

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.937.209.600,00	Rp 1.760.468.425,00	Rp 176.741.175,00	10,03944
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 9.088.686,00	Rp 7.070.277,00	Rp 2.018.409,00	28,54781
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.946.298.286,00	Rp 1.767.538.702,00	Rp 178.759.584,00	10,11
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.946.298.286,00	Rp 1.767.538.702,00	Rp 178.759.584,00	10,11
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.567.063.312,00	Rp 8.031.701.728,00	Rp 535.361.584,00	6,67
	Beban Persediaan	Rp 2.675.450.955,00	Rp 1.633.912.101,00	Rp 1.041.538.854,00	63,75
	Beban Jasa	Rp 9.527.172.031,67	Rp 11.159.280.373,00	Rp (1.632.108.341,33)	-14,63
	Beban Pemeliharaan	Rp 977.965.864,00	Rp 927.414.341,00	Rp 50.551.523,00	5,45
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 244.827.510,00	Rp 480.047.306,00	Rp (235.219.796,00)	-49,00
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp 410.574.000,00	Rp (410.574.000,00)	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 3.853.696.659,48	Rp 4.450.033.917,10	Rp (596.337.257,62)	-13,40
	Beban Amortisasi	Rp 141.735.975,00	Rp 118.669.125,00	Rp 23.066.850,00	19,44
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 36.469.231,37	Rp 30.621.625,88	Rp 5.847.605,49	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 26.024.381.538,52	Rp 27.242.254.516,98	Rp (1.217.872.978,46)	-4,47
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (24.078.083.252,52)	Rp (25.474.715.814,98)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (162.855.000,00)	Rp (112.400.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (162.855.000,00)	Rp (112.400.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (24.240.938.252,52)	Rp (25.587.115.814,98)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (24.240.938.252,52)	Rp (25.587.115.814,98)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	149.014.996.017,01	152.755.312.704,98
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(24.240.938.252,52)	(25.587.115.814,98)
3	RK PPKD/RK SKPD	21.340.829.758,00	22.873.696.050,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(16.715.000,00)	3.364.500,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	2.109.205.379,54	(1.030.261.422,99)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	148.207.377.902,04	149.014.996.017,02

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	31.120.377.263,00	30.010.588.507,00	96,43	28.013.446.114,00
	Belanja Barang	32.350.302.000,00	28.080.922.630,00	86,80	22.458.667.191,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	63.670.679.263,00	58.291.511.137,00	91,55	50.472.113.305,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	135.345.000,00	57.439.400,00	42,44	1.489.021.670,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	135.375.000,00	133.774.647,00	98,82	289.332.495,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	270.720.000,00	191.214.047,00	70,63	1.778.354.165,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	63.941.399.263,00	58.482.725.184,00	91,46	52.250.467.470,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	63.941.399.263,00	58.482.725.184,00	91,46	52.250.467.470,00
	SURPLUS / DEFISIT	(63.941.399.263,00)	(58.482.725.184,00)	91,46	(52.250.467.470,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(63.941.399.263,00)	(58.482.725.184,00)	91,46	(52.250.467.470,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	26.204.303,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	326.455.220,67	571.852.244,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	280.662.637,00	331.766.639,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	607.117.857,67	929.823.186,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	6.164.015.740,00	6.164.015.740,00
	Peralatan dan Mesin	33.859.368.286,78	37.099.131.686,78
	Gedung dan Bangunan	58.328.132.188,22	58.328.132.188,22
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.060.800,00	175.060.800,00
	Aset Tetap Lainnya	500.749.922,00	500.749.922,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(51.380.091.701,88)	(52.166.396.646,74)
	Jumlah Aset Tetap	47.647.235.235,12	50.100.693.690,26
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	166.952.500,00	166.952.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(166.952.500,00)	(166.952.500,00)
	Aset Lain-Lain	3.370.269.567,00	694.084.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	3.370.269.567,00	694.084.000,00
	JUMLAH ASET	51.624.622.659,79	51.724.600.876,59

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	110.157.727,00	90.126.078,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	110.157.727,00	90.126.078,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	110.157.727,00	90.126.078,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	51.514.464.932,79	51.634.474.798,59
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	51.624.622.659,79	51.724.600.876,59

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 30.010.588.507,00	Rp 26.815.346.114,00	Rp 3.195.242.393,00	11,92
	Beban Persediaan	Rp 10.209.788.859,00	Rp 2.957.885.204,00	Rp 7.251.903.655,00	245,17
	Beban Jasa	Rp 13.994.521.457,66	Rp 16.967.077.165,00	Rp (2.972.555.707,34)	-17,52
	Beban Pemeliharaan	Rp 863.332.032,00	Rp 549.253.431,00	Rp 314.078.601,00	57,18
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 3.303.488.756,00	Rp 1.710.005.351,00	Rp 1.593.483.405,00	93,19
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 2.910.778.688,40	Rp 3.092.598.099,32	Rp (181.819.410,92)	-5,88
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 4.496.250,00	Rp (4.496.250,00)	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 61.492.498.300,06	Rp 52.096.661.614,32	Rp 9.395.836.685,74	18,04
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (61.492.498.300,06)	Rp (52.096.661.614,32)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (1.249.391.080,00)	Rp (449.020.090,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (1.249.391.080,00)	Rp (449.020.090,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (62.741.889.380,06)	Rp (52.545.681.704,32)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (62.741.889.380,06)	Rp (52.545.681.704,32)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	51.634.474.798,59	51.541.367.080,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(62.741.889.380,06)	(52.545.681.704,32)
3	RK PPKD/RK SKPD	58.456.520.881,00	52.250.467.470,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	468.275.000,00	74.295.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	3.697.083.633,26	287.822.649,58
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	26.204.303,00
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	51.514.464.932,79	51.634.474.798,59

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	45.290.693.397,00	44.596.468.842,00	98,47	40.198.975.031,00
	Belanja Barang	48.007.670.380,00	38.812.193.587,00	80,85	25.574.335.690,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	93.298.363.777,00	83.408.662.429,00	89,40	65.773.310.721,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	713.844.000,00	655.891.030,00	91,88	1.101.947.600,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	140.725.693,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	713.844.000,00	655.891.030,00	91,88	1.242.673.293,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	94.012.207.777,00	84.064.553.459,00	89,42	67.015.984.014,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	94.012.207.777,00	84.064.553.459,00	89,42	67.015.984.014,00
	SURPLUS / DEFISIT	(94.012.207.777,00)	(84.064.553.459,00)	89,42	(67.015.984.014,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(94.012.207.777,00)	(84.064.553.459,00)	89,42	(67.015.984.014,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	43.321.623,58	39.213.999,17
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	61.703.996,00	41.034.950,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	105.025.619,58	80.248.949,17
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.756.775.000,00	2.756.775.000,00
	Peralatan dan Mesin	16.901.180.661,00	17.053.637.331,00
	Gedung dan Bangunan	12.270.490.134,00	12.270.490.134,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	2.261.194.720,00	2.261.194.720,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(19.451.757.853,21)	(19.733.322.922,30)
	Jumlah Aset Tetap	14.737.882.661,79	14.608.774.262,70
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	743.221.000,00	698.221.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(723.846.000,00)	(642.137.750,00)
	Aset Lain-Lain	808.347.700,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	827.722.700,00	56.083.250,00
	JUMLAH ASET	15.670.630.981,37	14.745.106.461,87

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	20.568.976,00	28.009.069,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	20.568.976,00	28.009.069,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	20.568.976,00	28.009.069,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	15.650.062.005,37	14.717.097.392,87
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	15.670.630.981,37	14.745.106.461,87

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DPRD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 44.596.468.842,00	Rp 39.927.875.031,00	Rp 4.668.593.811,00	11,69
	Beban Persediaan	Rp 5.148.055.236,00	Rp 975.548.499,00	Rp 4.172.506.737,00	427,71
	Beban Jasa	Rp 10.008.469.549,59	Rp 9.977.677.199,16	Rp 30.792.350,43	0,31
	Beban Pemeliharaan	Rp 366.520.581,00	Rp 362.956.305,00	Rp 3.564.276,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 23.211.931.457,00	Rp 14.341.718.100,00	Rp 8.870.213.357,00	61,85
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 1.174.147.668,91	Rp 1.858.081.343,61	Rp (683.933.674,70)	-36,81
	Beban Amortisasi	Rp 81.708.250,00	Rp 36.708.250,00	Rp 45.000.000,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 84.587.301.584,50	Rp 67.480.564.727,77	Rp 17.106.736.856,73	25,35
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (84.587.301.584,50)	Rp (67.480.564.727,77)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (84.587.301.584,50)	Rp (67.480.564.727,77)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (84.587.301.584,50)	Rp (67.480.564.727,77)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DPRD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	14.717.097.392,87	16.296.390.674,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(84.587.301.584,50)	(67.480.564.727,77)
3	RK PPKD/RK SKPD	84.064.553.459,00	67.015.984.014,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(2.101.681.750,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.455.712.738,00	986.969.182,31
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	15.650.062.005,37	14.717.097.392,87

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.103.681.562,00	9.899.233.046,00	97,98	9.444.636.182,00
	Belanja Barang	4.131.532.400,00	3.836.926.044,00	92,87	2.797.667.167,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	14.235.213.962,00	13.736.159.090,00	96,49	12.242.303.349,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	161.672.000,00	158.050.000,00	97,76	221.197.240,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	82.897.600,00	81.752.499,00	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	244.569.600,00	239.802.499,00	98,05	221.197.240,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	14.479.783.562,00	13.975.961.589,00	96,52	12.463.500.589,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	14.479.783.562,00	13.975.961.589,00	96,52	12.463.500.589,00
	SURPLUS / DEFISIT	(14.479.783.562,00)	(13.975.961.589,00)	96,52	(12.463.500.589,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(14.479.783.562,00)	(13.975.961.589,00)	96,52	(12.463.500.589,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	20201
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	2.320.577,78	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	3.310.000,00	16.759.500,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	5.630.577,78	16.759.500,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	3.317.504.631,59	4.601.292.691,26
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	- 3.140.448.957,36	(4.339.923.582,59)
	Jumlah Aset Tetap	186.855.674,23	271.169.108,67
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	264.694.646,90	204.694.646,90
	Akumulasi Amortisasi	- 202.342.146,90	(178.665.896,90)
	Aset Lain-Lain	611.842.736,43	-
	Jumlah Aset Lainnya	674.195.236,43	26.028.750,01
	JUMLAH ASET	866.681.488,44	313.957.358,67

No.	Uraian	2022	20201
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	866.681.488,44	313.957.358,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	866.681.488,44	313.957.358,67

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	DID	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 24.425.000	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 24.425.000	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 24.425.000	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.899.233.046,00	Rp 9.020.336.182,00	Rp 878.896.864,00	9,74
	Beban Persediaan	Rp 1.438.645.800,00	Rp 305.670.850,00	Rp 1.132.974.950,00	370,65
	Beban Jasa	Rp 1.918.767.846,22	Rp 2.130.363.855,00	Rp (211.596.008,78)	-9,93
	Beban Pemeliharaan	Rp 198.649.445,00	Rp 103.606.188,00	Rp 95.043.257,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 313.744.374,00	Rp 205.237.916,00	Rp 108.506.458,00	52,87
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 185.710.424,91	Rp 255.122.883,51	Rp (69.412.458,60)	-27,21
	Beban Amortisasi	Rp 23.676.250,01	Rp 8.676.250,00	Rp 15.000.000,01	
	Beban Penyisihan Piutang			Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 13.978.427.186,14	Rp 12.029.014.124,51	Rp 1.949.413.061,63	16,21
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (13.954.002.186,14)	Rp (12.029.014.124,51)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (731.053.923,24)	Rp (256.175.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (731.053.923,24)	Rp (256.175.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (14.685.056.109,38)	Rp (12.285.189.124,51)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (14.685.056.109,38)	Rp (12.285.189.124,51)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	313.957.358,67	272.865.759,25
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(14.685.056.109,38)	(12.285.189.124,51)
3	RK PPKD/RK SKPD	13.975.961.589,00	12.463.500.589,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(123.366.400,00)	(52.293.500,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.385.185.050,14	(84.926.365,08)
	-Akumulasi Amortisasi	-	0,01
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	866.681.488,44	313.957.358,67

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	168.162.607.277,00	193.890.140.403,00	115,30	179.891.802.692,00
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	11.022.613.597,00	100,00	9.956.960.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.697.566.243,00	17.489.451.179,53	98,82	15.588.494.611,11
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	196.882.787.117,00	222.402.205.179,53	112,96	205.437.257.303,11
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	46.381.576.000,00	54.229.638.467,00	116,92	61.309.116.578,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.469.404.000,00	36.604.255.359,00	143,72	47.781.705.502,00
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	71.850.980.000,00	90.833.893.826,00	126,42	109.090.822.080,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	52.247.274.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	52.247.274.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67	123.865.281.737,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				105.707.342.961,00
	Bantuan Keuangan Provinsi				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	148.381.756.623,00	146.414.475.669,00	98,67	229.572.624.698,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	220.232.736.623,00	237.248.369.495,00	107,73	390.910.720.778,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	6.700.327.000,00
	Dana Darurat				
	Dana BOS				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	6.700.327.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	417.115.523.740,00	459.650.574.674,53	110,20	603.048.305.081,11
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.770.822.152,00	8.393.236.918,00	95,69	8.927.229.801,00
	Belanja Barang	4.176.712.513,00	3.801.042.761,00	91,01	3.715.275.155,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	12.947.534.665,00	12.194.279.679,00	94,18	12.642.504.956,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah			-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	270.921.000,00	246.192.119,00	-	91.019.500,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	270.921.000,00	246.192.119,00	-	91.019.500,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.218.455.665,00	12.440.471.798,00	94,11	12.733.524.456,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.218.455.665,00	12.440.471.798,00	94,11	12.733.524.456,00
	SURPLUS / DEFISIT	403.897.068.075,00	447.210.102.876,53	110,72	590.314.780.625,11
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	403.897.068.075,00	447.210.102.876,53	110,72	590.314.780.625,11

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	134.678.166.819,00	128.892.710.993,00
	Penyisihan Piutang	(58.882.194.046,77)	(46.745.285.110,18)
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.704.535.252,00	9.794.305.571,00
	Belanja Dibayar Dimuka	2.221.781,67	2.226.195,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(217.551.668,00)	(217.551.668,00)
	Piutang Lainnya	137.074.399,94	417.688.333,20
	Penyisihan Piutang Lainnya	(88.142.335,00)	(329.032.832,00)
	Persediaan	330.000,00	45.023.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	83.551.991.870,84	92.077.636.150,86
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	5.426.330.677,66	6.026.060.071,66
	Gedung dan Bangunan	167.033.430,00	167.033.430,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	91.863.000,00	91.863.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(5.255.867.884,96)	(5.953.944.687,16)
	Jumlah Aset Tetap	429.359.222,70	331.011.814,50
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.687.042.900,00	1.627.768.900,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.521.742.350,00)	(1.339.573.575,00)
	Aset Lain-Lain	9.262.977.858,93	479.369.579,93
	Jumlah Aset Lainnya	9.428.278.408,93	767.564.904,93
	JUMLAH ASET	93.409.629.502,47	93.176.212.870,29

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	330.272.010,00	-
	Utang Belanja	1.018.509,00	1.096.734,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	331.290.519,00	1.096.734,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	331.290.519,00	1.096.734,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	93.078.338.983,47	93.175.116.136,29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	93.409.629.502,47	93.176.212.870,29

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 199.763.900.648,00	Rp 203.700.704.578,00	Rp (3.936.803.930,00)	-1,93
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 11.022.613.597,00	Rp 9.956.960.000,00	Rp 1.065.653.597,00	10,70
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 16.878.565.236,94	Rp 15.697.682.570,31	Rp 1.180.882.666,63	7,52
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 227.665.079.481,94	Rp 229.355.347.148,31	Rp (1.690.267.666,37)	-0,74
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 59.967.035.635,00	Rp 51.986.941.479,00	Rp 7.980.094.156,00	15,35
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp 39.358.275.570,00	Rp 29.733.151.567,00	Rp 9.625.124.003,00	32,37
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 99.325.311.205,00	Rp 81.720.093.046,00	Rp 17.605.218.159,00	21,54
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp -	Rp 52.247.274.000,00	Rp (52.247.274.000,00)	-100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp 52.247.274.000,00	Rp (52.247.274.000,00)	-100,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 144.324.705.350,00	Rp 126.781.787.043,00	Rp 17.542.918.307,00	13,84
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp 105.707.342.961,00	Rp (105.707.342.961,00)	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 144.324.705.350,00	Rp 232.489.130.004,00	Rp (88.164.424.654,00)	-37,92
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 243.650.016.555,00	Rp 366.456.497.050,00	Rp (122.806.480.495,00)	-33,51
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 6.700.327.000,00	Rp (6.700.327.000,00)	-100,00
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp 71.950.231,00	Rp (71.950.231,00)	-100,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 6.772.277.231,00	Rp (6.772.277.231,00)	-100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 471.315.096.036,94	Rp 602.584.121.429,31	Rp (131.269.025.392,37)	-21,78
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.393.236.918,00	Rp 8.529.679.801,00	Rp (136.442.883,00)	-1,60
	Beban Persediaan	Rp 880.614.076,00	Rp 377.405.500,00	Rp 503.208.576,00	133,33
	Beban Jasa	Rp 2.483.016.405,16	Rp 2.841.500.224,50	Rp (358.483.819,34)	-12,62
	Beban Pemeliharaan	Rp 217.398.500,00	Rp 228.095.000,00	Rp (10.696.500,00)	-4,69
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 205.358.969,00	Rp 93.449.742,00	Rp 111.909.227,00	119,75
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 93.055.838,40	Rp 220.701.419,99	Rp (127.645.581,59)	-57,84
	Beban Amortisasi	Rp 182.168.775,00	Rp 235.169.275,00	Rp (53.000.500,00)	-22,54
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 12.136.909.647,60	Rp 1.348.601.463,83	Rp 10.788.308.183,76	799,96
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 1.892.000,00	Rp (1.892.000,00)	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 24.591.759.129,16	Rp 13.876.494.426,32	Rp 10.715.264.702,83	77,22
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 446.723.336.907,79	Rp 588.707.627.002,99		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (553.730.613,00)	Rp (224.800.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (553.730.613,00)	Rp (224.800.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 446.169.606.294,79	Rp 588.482.827.002,99		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 446.169.606.294,79	Rp 588.482.827.002,99		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	93.175.116.136,29	96.988.219.346,11
2	SURPLUS/DEFISIT LO	446.169.606.294,79	588.482.827.002,99
3	RK PPKD/RK SKPD	(447.210.102.877,00)	(590.386.730.856,11)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(88.304.419,20)	(1.940.954.071,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	4.460.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	240.891.208,00	28.980.793,48
	-Akumulasi Penyusutan	791.132.640,60	(1.686.079,17)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	93.078.338.983,47	93.175.116.136,29

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				9.044,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-		9.044,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum	519.937.401.610,00	519.937.401.610,00	100,00	530.425.978.000,00
	Dana Alokasi Khusus	185.227.760.683,00	161.287.016.436,00	87,07	131.759.768.941,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	705.165.162.293,00	681.224.418.046,00	96,60	662.185.746.941,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	5.528.168.000,00	5.528.168.000,00	100,00	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Bantuan Keuangan Provinsi	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	12.360.600.000,00	12.360.600.000,00	100,00	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	723.053.930.293,00	699.113.186.046,00	96,69	662.185.746.941,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana BOS				55.161.824.000,00
	Pendapatan Lainnya				71.950.231,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	55.233.774.231,00
	JUMLAH PENDAPATAN	723.053.930.293,00	699.113.186.046,00	96,69	717.419.530.216,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	17.457.200.730,00	7.512.737.104,00	43,04	22.894.407.047,00
	Belanja Barang	4.517.798.600,00	4.251.739.835,17	94,11	2.888.847.210,00
	Belanja Bunga	500.000.000,00	234.672.144,00	46,93	308.874.114,00
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	22.474.999.330,00	11.999.149.083,17	53,39	26.092.128.371,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	233.930.000,00	221.861.999,00	94,84	266.918.250,00
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	46.120.500,00	92,24	2.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	283.930.000,00	267.982.499,00	94,38	268.918.250,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	21,69	12.793.426.443,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	27.890.907.700,00	6.050.171.068,00	-	12.793.426.443,00
	JUMLAH BELANJA	50.649.837.030,00	18.317.302.650,17	36,16	39.154.473.064,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	Jumlah Transfer	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	50.749.837.030,00	18.417.302.650,17	36,29	39.154.473.064,00
	SURPLUS / DEFISIT	672.304.093.263,00	680.695.883.395,83	101,25	678.265.057.152,00
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	270.898.017.186,53
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	308.665.364.621,00	308.665.364.620,64	100,00	270.898.017.186,53
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	9.777.623.090,00		
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga				
	Jumlah Pengeluaran	12.429.808.337,00	10.633.131.310,00	35,21	855.508.220,00
	PEMBIAYAAN NETO	296.235.556.284,00	298.032.233.310,64	70,42	270.042.508.966,53
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	968.539.649.547,00	978.728.116.706,47	101,05	948.307.566.118,53

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.812.150,52
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	9.044,00
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	278.068.671.727,00	55.161.824.000,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	101.770.588,92	261.938.079,17
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	11.500.000,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	278.181.942.315,92	55.430.583.273,69
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	52.770.586,00	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	52.770.586,00	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.105.263.630,50	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	78.105.263.630,50	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	78.158.034.216,50	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	10.035.756.581,00	11.243.843.540,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	226.000.000,00	226.000.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.651.490.052,87)	(10.661.937.968,92)
	Jumlah Aset Tetap	610.266.528,13	807.905.571,08
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	519.907.500,00	473.787.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(448.317.125,00)	(392.403.250,00)
	Aset Lain-Lain	528.212.241,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	599.802.616,00	81.383.750,00
	JUMLAH ASET	357.550.045.676,55	56.319.872.594,77

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	92.533.016,65	(32.259.789,53)
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	38.686,00	38.360,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.380.011.807,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.328.091.729,65	823.286.790,47
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	1.711.016.438,70	(855.508.220,00)
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1.711.016.438,70	(855.508.220,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.039.108.168,35	(32.221.429,53)
III	EKUITAS		
	EKUITAS	353.510.937.508,20	56.352.094.024,30
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	357.550.045.676,55	56.319.872.594,77

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp 9.044	Rp (9.044)	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp 9.044	Rp (9.044)	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp 519.937.401.610	Rp 530.425.978.000	Rp (10.488.576.390)	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp 161.287.016.436	Rp 131.759.768.941	Rp 29.527.247.495	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 681.224.418.046	Rp 662.185.746.941	Rp 19.038.671.105	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp 5.528.168.000	Rp -	Rp 5.528.168.000	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp 5.528.168.000	Rp -	Rp 5.528.168.000	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp 12.360.600.000	Rp -	Rp 12.360.600.000	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 12.360.600.000	Rp -	Rp 12.360.600.000	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 699.113.186.046	Rp 662.185.746.941	Rp 36.927.439.105	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 55.161.824.000	Rp (55.161.824.000)	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 55.161.824.000	Rp (55.161.824.000)	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 699.113.186.046	Rp 717.347.579.985	Rp (18.234.393.939)	
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.512.737.104,00	Rp 22.602.907.047,00	Rp (15.090.169.943,00)	-66,76
	Beban Persediaan	Rp 1.657.004.103,00	Rp 497.781.762,00	Rp 1.159.222.341,00	232,88
	Beban Jasa	Rp 2.196.511.214,28	Rp 1.821.427.808,17	Rp 375.083.406,11	20,59
	Beban Pemeliharaan	Rp 158.439.800,00	Rp 132.640.200,00	Rp 25.799.600,00	-
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 388.452.535,00	Rp 317.041.054,00	Rp 71.411.481,00	22,52
	Beban Bunga	Rp 198.166.004,18	Rp 276.614.324,47	Rp (78.448.320,29)	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 380.755.289,08	Rp 714.197.787,18	Rp (333.442.498,10)	-46,69
	Beban Amortisasi	Rp 55.913.875,00	Rp 56.626.750,00	Rp (712.875,00)	-1,26
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 100.000.000,00	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.647.979.924,54	Rp 26.419.236.732,82	Rp (13.771.256.808,28)	-52,13
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 686.465.206.121,46	Rp 690.928.343.252,18	Rp -	
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (599.499.467,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (599.499.467,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 685.865.706.654,46	Rp 690.928.343.252,18		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp 5.570.083.787,00	Rp 9.736.649.668,00		
	Beban Luar Biasa	Rp (5.570.083.787,00)	Rp (9.736.649.668,00)		
	POS LUAR BIASA	Rp (5.570.083.787,00)	Rp (9.736.649.668,00)		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 680.295.622.867,46	Rp 681.191.693.584,18		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	269.235.103.715,10	919.598.213,34
2	SURPLUS/DEFISIT LO	680.295.622.867,46	681.191.693.584,18
3	RK PPKD/RK SKPD	(596.404.407.966,49)	(623.031.273.877,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(194.051.245,00)	(1.369.553.603,00)
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(588.273.286,00)	138.585.578,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.391.203.205,13	(1.503.768.021,74)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	6.812.150,52
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	(164.172.773,00)	-
13	EKUITAS AKHIR	353.571.024.517,20	56.352.094.024,30

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.490.142.450,00	6.060.465.577,00	80,91	11.039.594.900,00
	Belanja Barang	5.550.898.900,00	4.289.726.140,00	77,28	2.999.297.709,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.041.041.350,00	10.350.191.717,00	79,37	14.038.892.609,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	19.668.000,00	19.652.000,00	99,92	145.974.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	19.668.000,00	19.652.000,00	99,92	145.974.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.060.709.350,00	10.369.843.717,00	79,40	14.184.866.609,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.060.709.350,00	10.369.843.717,00	79,40	14.184.866.609,00
	SURPLUS / DEFISIT	(13.060.709.350,00)	(10.369.843.717,00)	79,40	(14.184.866.609,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(13.060.709.350,00)	(10.369.843.717,00)	79,40	(14.184.866.609,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	3.352.970,83	3.386.725,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.352.970,83	3.386.725,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.247.531.604,00	2.943.846.017,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.131.224.729,00)	(2.783.397.192,00)
	Jumlah Aset Tetap	116.306.875,00	160.448.825,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	378.260.500,00	378.260.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(378.260.500,00)	(378.260.500,00)
	Aset Lain-Lain	424.577.813,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	424.577.813,00	-
	JUMLAH ASET	544.237.658,83	163.835.550,00

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	46.234,00	43.777,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	46.234,00	43.777,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	46.234,00	43.777,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	544.191.424,83	163.791.773,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	544.237.658,83	163.835.550,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.060.465.577,00	Rp 10.775.044.900,00	Rp (4.714.579.323,00)	-43,75
	Beban Persediaan	Rp 1.095.433.530,00	Rp 230.756.250,00	Rp 864.677.280,00	374,71
	Beban Jasa	Rp 2.627.304.627,17	Rp 2.143.340.510,33	Rp 483.964.116,84	22,58
	Beban Pemeliharaan	Rp 100.087.550,00	Rp 88.109.000,00	Rp 11.978.550,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 466.936.644,00	Rp 581.351.929,00	Rp (114.415.285,00)	-19,68
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 68.423.137,50	Rp 208.806.246,43	Rp (140.383.108,93)	-67,23
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 23.941.500,00	Rp (23.941.500,00)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.418.651.065,67	Rp 14.051.350.335,76	Rp (3.632.699.270,09)	-25,85
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.418.651.065,67)	Rp (14.051.350.335,76)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (291.388.600,00)	Rp (112.400.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (291.388.600,00)	Rp (112.400.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (10.710.039.665,67)	Rp (14.163.750.335,76)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (10.710.039.665,67)	Rp (14.163.750.335,76)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	163.791.773,00	165.356.374,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(10.710.039.665,67)	(14.163.750.335,76)
3	RK PPKD/RK SKPD	10.369.843.717,00	14.184.866.609,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	720.595.600,50	(22.680.874,57)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	544.191.424,83	163.791.773,00

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.695.507.736,00	7.964.474.408,00	82,15	6.869.038.159,00
	Belanja Barang	2.141.489.700,00	1.778.381.680,00	83,04	1.405.593.315,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	11.836.997.436,00	9.742.856.088,00	82,31	8.274.631.474,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	215.743.000,00	187.350.305,00	86,84	40.785.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	122.550.000,00	121.809.773,00	99,40	192.306.077,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	338.293.000,00	309.160.078,00	91,39	233.091.077,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	12.175.290.436,00	10.052.016.166,00	82,56	8.507.722.551,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.175.290.436,00	10.052.016.166,00	82,56	8.507.722.551,00
	SURPLUS / DEFISIT	(12.175.290.436,00)	(10.052.016.166,00)	82,56	(8.507.722.551,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.175.290.436,00)	(10.052.016.166,00)	82,56	(8.507.722.551,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA INSPEKTORAT KOTA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	15.270.946,67	15.289.046,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	1.378.300,00	4.532.480,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	16.649.246,67	19.821.526,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.100.531.301,00	2.276.322.061,00
	Gedung dan Bangunan	4.542.127.425,00	4.461.163.137,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.436.771.820,37)	(2.562.410.721,96)
	Jumlah Aset Tetap	4.205.886.905,63	4.175.074.476,04
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	49.700.000,00	49.700.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(49.700.000,00)	(49.700.000,00)
	Aset Lain-Lain	47.942.000,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	47.942.000,00	-
	JUMLAH ASET	4.270.478.152,30	4.194.896.002,71

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	2.752.677,00	2.452.955,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.752.677,00	2.452.955,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.752.677,00	2.452.955,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	4.267.725.475,30	4.192.443.047,71
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.270.478.152,30	4.194.896.002,71

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.964.474.408,00	Rp 6.536.463.159,00	Rp 1.428.011.249,00	21,85
	Beban Persediaan	Rp 553.080.423,00	Rp 101.817.294,00	Rp 451.263.129,00	443,21
	Beban Jasa	Rp 884.164.972,00	Rp 1.002.165.166,66	Rp (118.000.194,66)	(11,77)
	Beban Pemeliharaan	Rp 91.976.000,00	Rp 81.112.398,00	Rp 10.863.602,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 261.068.287,00	Rp 200.966.000,00	Rp 60.102.287,00	29,91
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 257.223.808,41	Rp 290.736.706,16	Rp (33.512.897,75)	(11,53)
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 12.425.000,00	Rp (12.425.000,00)	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 7.550.000,00	Rp (7.550.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.011.987.898,41	Rp 8.233.235.723,82	Rp 1.778.752.174,59	21,60
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.011.987.898,41)	Rp (8.233.235.723,82)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (335.168.550,00)	Rp (334.675.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (335.168.550,00)	Rp (334.675.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (10.347.156.448,41)	Rp (8.567.910.723,82)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (10.347.156.448,41)	Rp (8.567.910.723,82)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT KOTA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	4.192.443.047,71	4.272.094.539,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(10.347.156.448,41)	(8.567.910.723,82)
3	RK PPKD/RK SKPD	10.052.016.166,00	8.507.722.551,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(12.440.000,00)	25.300.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	382.862.710,00	(44.763.318,80)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	4.267.725.475,30	4.192.443.047,71

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI UTARA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.204.929.845,00	9.608.102.943,00	94,15	9.781.000.666,00
	Belanja Barang	20.079.942.700,00	19.290.301.669,00	96,07	21.272.382.108,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	30.284.872.545,00	28.898.404.612,00	95,42	31.053.382.774,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	48.822.000,00	48.285.000,00	98,90	142.762.200,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	48.822.000,00	48.285.000,00	98,90	142.762.200,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	30.333.694.545,00	28.946.689.612,00	95,43	31.196.144.974,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	30.333.694.545,00	28.946.689.612,00	95,43	31.196.144.974,00
	SURPLUS / DEFISIT	(30.333.694.545,00)	(28.946.689.612,00)	95,43	(31.196.144.974,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(30.333.694.545,00)	(28.946.689.612,00)	95,43	(31.196.144.974,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI UTARA
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	98.606,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	11.812.975,00	11.834.225,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	11.812.975,00	11.932.831,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	12.194.245.000,00	12.194.245.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.244.718.646,11	6.305.326.657,55
	Gedung dan Bangunan	6.539.117.500,00	6.539.117.500,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.558.364,00	49.558.364,00
	Aset Tetap Lainnya	7.792.489,00	7.792.489,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(7.093.526.780,71)	(7.856.491.122,39)
	Jumlah Aset Tetap	16.941.905.218,40	17.239.548.888,16
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	71.193.750,00	71.193.750,00
	Akumulasi Amortisasi	(71.193.750,00)	(71.193.750,00)
	Aset Lain-Lain	902.654.634,44	89.929.624,49
	Jumlah Aset Lainnya	902.654.634,44	89.929.624,49
	JUMLAH ASET	17.856.372.827,84	17.341.411.343,65

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	5.465.448,00	6.564.195,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.465.448,00	6.564.195,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.465.448,00	6.564.195,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	17.850.907.379,84	17.334.847.148,65
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	17.856.372.827,84	17.341.411.343,65

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.608.102.943,00	Rp 9.366.150.666,00	Rp 241.952.277,00	2,58
	Beban Persediaan	Rp 8.951.945.530,00	Rp 7.282.531.124,00	Rp 1.669.414.406,00	22,92
	Beban Jasa	Rp 9.629.998.129,00	Rp 13.500.224.594,83	Rp (3.870.226.465,83)	-28,67
	Beban Pemeliharaan	Rp 595.370.513,00	Rp 355.796.903,00	Rp 239.573.610,00	67,33
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 111.910.000,00	Rp 140.607.000,00	Rp (28.697.000,00)	-20,41
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 428.734.224,81	Rp 578.049.541,89	Rp (149.315.317,08)	-25,83
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 29.326.061.339,81	Rp 31.223.359.829,72	Rp (1.897.298.489,91)	-6,08
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (29.326.061.339,81)	Rp (31.223.359.829,72)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (323.888.001,49)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (323.888.001,49)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (29.649.949.341,30)	Rp (31.223.359.829,72)	Rp -	
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (29.649.949.341,30)	Rp (31.223.359.829,72)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	17.334.847.148,65	17.623.768.445,22
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(29.649.949.341,30)	(31.223.359.829,72)
3	RK PPKD/RK SKPD	28.946.591.006,00	31.196.144.974,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	5.048.400,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	27.720.000,00	(216.583.499,86)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.191.698.566,49	(50.269.946,99)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	98.606,00
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	17.850.907.379,84	17.334.847.148,65

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	13.348.034.197,00	12.907.166.913,00	96,70	12.513.798.847,00
	Belanja Barang	27.824.221.408,00	26.450.773.201,00	95,06	28.833.370.641,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	41.172.255.605,00	39.357.940.114,00	95,59	41.347.169.488,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	177.680.000,00	177.190.670,00	99,72	413.680.700,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	99.750.000,00	99.337.807,00	99,59	373.519.881,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	277.430.000,00	276.528.477,00	99,68	787.200.581,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	41.449.685.605,00	39.634.468.591,00	95,62	42.134.370.069,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	41.449.685.605,00	39.634.468.591,00	95,62	42.134.370.069,00
	SURPLUS / DEFISIT	(41.449.685.605,00)	(39.634.468.591,00)	95,62	(42.134.370.069,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(41.449.685.605,00)	(39.634.468.591,00)	95,62	(42.134.370.069,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI TENGAH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	17.965.050,00	13.656.340,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	17.965.050,00	13.656.340,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	10.506.345.128,00	10.506.345.128,00
	Peralatan dan Mesin	8.779.389.379,28	9.446.617.502,28
	Gedung dan Bangunan	11.789.085.581,00	11.789.085.581,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.263.637,00	21.263.637,00
	Aset Tetap Lainnya	3.896.246,00	3.896.246,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(11.264.006.216,01)	(11.580.967.658,48)
	Jumlah Aset Tetap	19.835.973.755,27	20.186.240.435,80
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	173.664.500,00	173.664.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(161.168.500,00)	(145.082.375,00)
	Aset Lain-Lain	618.216.850,00	76.339.801,00
	Jumlah Aset Lainnya	630.712.850,00	104.921.926,00
	JUMLAH ASET	20.484.651.655,27	20.304.818.701,80

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	12.682.529,00	13.137.623,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.682.529,00	13.137.623,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	12.682.529,00	13.137.623,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	20.471.969.126,27	20.291.681.078,80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	20.484.651.655,27	20.304.818.701,80

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 12.907.166.913,00	Rp 11.992.678.847,00	Rp 914.488.066,00	7,63
	Beban Persediaan	Rp 12.691.720.516,00	Rp 10.155.622.413,00	Rp 2.536.098.103,00	24,97
	Beban Jasa	Rp 12.886.396.370,00	Rp 17.814.169.290,00	Rp (4.927.772.920,00)	-27,66
	Beban Pemeliharaan	Rp 754.885.469,00	Rp 630.561.000,00	Rp 124.324.469,00	19,72
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 122.807.042,00	Rp 226.775.000,00	Rp (103.967.958,00)	-45,85
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 712.647.339,84	Rp 934.210.137,31	Rp (221.562.797,47)	-23,72
	Beban Amortisasi	Rp 16.086.125,00	Rp 31.904.875,00	Rp (15.818.750,00)	-49,58
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 40.091.709.774,84	Rp 41.785.921.562,31	Rp (1.694.211.787,47)	-4,05
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (40.091.709.774,84)	Rp (41.785.921.562,31)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (409.799.551,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (409.799.551,00)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (40.501.509.325,84)	Rp (41.785.921.562,31)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (40.501.509.325,84)	Rp (41.785.921.562,31)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	20.291.681.078,80	17.817.970.292,28
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(40.501.509.325,84)	(41.785.921.562,31)
3	RK PPKD/RK SKPD	39.634.468.591,00	42.134.370.069,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	12.604.200,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	17.720.000,00	3.205.500.400,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.029.608.782,31	(1.092.842.320,17)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	20.471.969.126,27	20.291.681.078,80

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.558.630.674,00	12.132.635.605,00	96,61	11.924.488.688,00
	Belanja Barang	24.506.134.570,00	23.632.562.365,00	96,44	25.617.549.224,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	37.064.765.244,00	35.765.197.970,00	96,49	37.542.037.912,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	132.315.000,00	122.253.450,00	92,40	355.364.174,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	187.625.000,00	186.172.155,00	99,23	200.929.361,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	319.940.000,00	308.425.605,00	96,40	556.293.535,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	37.384.705.244,00	36.073.623.575,00	96,49	38.098.331.447,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	37.384.705.244,00	36.073.623.575,00	96,49	38.098.331.447,00
	SURPLUS / DEFISIT	(37.384.705.244,00)	(36.073.623.575,00)	96,49	(38.098.331.447,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(37.384.705.244,00)	(36.073.623.575,00)	96,49	(38.098.331.447,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	7.659.976,67	7.364.334,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	7.659.976,67	7.364.334,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	15.227.905.000,00	15.227.905.000,00
	Peralatan dan Mesin	7.591.878.659,00	8.783.459.429,00
	Gedung dan Bangunan	6.767.924.956,00	6.648.163.461,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	189.574.684,75	189.574.684,75
	Aset Tetap Lainnya	9.812.492,00	9.812.492,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.032.145.397,22)	(10.301.462.666,63)
	Jumlah Aset Tetap	20.754.950.394,53	20.557.452.400,12
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	100.595.000,00	78.595.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(89.595.000,00)	(78.595.000,00)
	Aset Lain-Lain	958.649.338,30	96.563.268,41
	Jumlah Aset Lainnya	969.649.338,30	96.563.268,41
	JUMLAH ASET	21.732.259.709,50	20.661.380.003,20

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	5.868.793,00	5.318.551,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.868.793,00	5.318.551,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.868.793,00	5.318.551,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	21.726.390.916,50	20.656.061.452,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21.732.259.709,50	20.661.380.003,20

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 12.132.635.605,00	Rp 11.422.793.688,00	Rp 709.841.917,00	6,21
	Beban Persediaan	Rp 11.345.329.276,00	Rp 9.371.347.817,00	Rp 1.973.981.459,00	21,06
	Beban Jasa	Rp 11.497.841.253,00	Rp 15.555.680.789,33	Rp (4.057.839.536,33)	-26,09
	Beban Pemeliharaan	Rp 663.480.775,00	Rp 674.315.400,00	Rp (10.834.625,00)	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 170.576.321,00	Rp 130.310.000,00	Rp 40.266.321,00	30,90
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 504.357.192,57	Rp 883.268.853,62	Rp (378.911.661,05)	-42,90
	Beban Amortisasi	Rp 11.000.000,00	Rp 9.831.250,00	Rp 1.168.750,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 36.325.220.422,57	Rp 38.047.547.797,95	Rp (1.722.327.375,38)	-4,53
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (36.325.220.422,57)	Rp (38.047.547.797,95)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (501.563.150,11)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (501.563.150,11)	Rp -		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (36.826.783.572,68)	Rp (38.047.547.797,95)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (36.826.783.572,68)	Rp (38.047.547.797,95)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	20.656.061.452,20	21.009.156.659,27
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(36.826.783.572,68)	(38.047.547.797,95)
3	RK PPKD/RK SKPD	36.073.623.575,00	38.098.331.447,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	10.344.300,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	49.815.000,00	16.056.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.773.674.461,98	(430.279.156,12)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	21.726.390.916,50	20.656.061.452,20

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.845.244.508,00	3.417.491.664,00	70,53	2.208.900.584,00
	Belanja Barang	3.883.311.250,00	3.588.036.640,00	92,40	3.112.399.456,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.846.326.450,00	1.819.026.450,00	98,52	1.796.326.450,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	10.574.882.208,00	8.824.554.754,00	83,45	7.117.626.490,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	84.323.000,00	72.616.250,00	86,12	18.165.263,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	84.323.000,00	72.616.250,00		18.165.263,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	10.659.205.208,00	8.897.171.004,00	83,47	7.135.791.753,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.659.205.208,00	8.897.171.004,00	83,47	7.135.791.753,00
	SURPLUS / DEFISIT	(10.659.205.208,00)	(8.897.171.004,00)	83,47	(7.135.791.753,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(10.659.205.208,00)	(8.897.171.004,00)	83,47	(7.135.791.753,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	35.561.250,00	31.414.583,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	517.200,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	35.561.250,00	31.931.783,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.075.500.000,00	2.075.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.002.110.596,00	924.886.046,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.446.000,00	3.446.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(932.884.850,70)	(921.316.084,30)
	Jumlah Aset Tetap	2.148.171.745,30	2.082.515.961,70
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	47.492.500,00	47.492.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(23.746.250,00)	(11.873.125,00)
	Aset Lain-Lain	96.728.500,00	14.842.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	120.474.750,00	50.461.375,00
	JUMLAH ASET	2.304.207.745,30	2.164.909.120,03

No.	Uraian	2022	2021
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	71.870,00	41.509,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	71.870,00	41.509,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	71.870,00	41.509,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.304.135.875,30	2.164.867.611,03
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.304.207.745,30	2.164.909.120,03

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 3.417.491.664,00	Rp 2.111.150.584,00	Rp 1.306.341.080,00	61,88
	Beban Persediaan	Rp 903.776.500,00	Rp 75.809.900,00	Rp 827.966.600,00	1092,16
	Beban Jasa	Rp 2.237.246.551,33	Rp 2.520.508.939,67	Rp (283.262.388,34)	-11,24
	Beban Pemeliharaan	Rp 51.366.531,00	Rp 40.871.500,00	Rp 10.495.031,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 392.047.952,00	Rp 401.146.055,00	Rp (9.098.103,00)	-2,27
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp 1.819.026.450,00	Rp 1.796.326.450,00	Rp 22.700.000,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 27.874.415,10	Rp 14.141.301,30	Rp 13.733.113,80	97,11
	Beban Amortisasi	Rp 11.873.125,00	Rp 11.873.125,00	Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 8.860.703.188,43	Rp 6.971.827.854,97	Rp 1.888.875.333,46	27,09
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (8.860.703.188,43)	Rp (6.971.827.854,97)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (87.405.200,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (87.405.200,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (8.948.108.388,43)	Rp (6.971.827.854,97)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (8.948.108.388,43)	Rp (6.971.827.854,97)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	2.164.867.611,03	2.018.176.713,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.948.108.388,43)	(6.971.827.854,97)
3	RK PPKD/RK SKPD	8.897.171.004,00	7.135.791.753,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	173.900.000,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	16.305.648,70	(17.273.000,00)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	2.304.135.875,30	2.164.867.611,03

